

MILIK DEPARTEMEN P DAN K
TIDAK DIPERDAGANGKAN



SEJARAH

Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Sulawesi Utara



841

rektorat
ayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN
NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH
TAHUN 1991/1992

S E J A R A H

REVOLUSI KEMERDEKAAN

(1945 - 1949)

DAERAH SULAWESI UTARA

Peneliti / Penulis :

Drs. LAURENS TH. MANUS
Drs. ANTHON SIGARLAKI
Drs. ROBERT TANDI
Drs. ALBERT E. ROMPAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN
NILAI-NILAI BUDAYA DAERAH
TAHUN 1991/1992

SUSUNAN TIM

- Penasehat** : Prof. W.J. Waworoentoe M.Sc.
Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado
Drs. Serta Tarigan
Kakanwil Departemen P & K
Propinsi Sulawesi Utara
- Pemimpin Proyek** : O. Sentinuwo
- Penanggung Jawab Umum** : Prof. Drs. W.F.J.B. Tooy
- Ketua Tim/Penanggung
Jawab / Anggota** : Drs. Laurens Th. Manus
- Anggota** : Drs. Anthon Sigarlaki
- Anggota** : Drs. Robert Tandi
- Anggota** : Drs. Albert E. Rompas

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Dengan rasa gembira dan penuh syukur kami menyambut buku hasil Penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 1979/1980 dengan judul :

" Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Sulawesi Utara "

Penerbitan naskah ini merupakan realisasi kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pengembangan Kebudayaan Nasional, di Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah dari antara sekian daerah yang membentuk kesatuan Nasional kita dengan kekayaan budayanya yang khas.

Adapun aspek : "Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Sulawesi Utara" merupakan bagian warisan budaya daerah di masa silam yang dapat dikaji nilai dan manfaatnya bagi perkembangan sistem peralatan modern dewasa ini dalam menunjang program pembangunan secara luas. Sebab itu usaha penerbitan buku/naskah itu di daerah perlu kita sambut dengan penuh rasa gembira serta diharapkan dapat dipetik manfaat pengetahuannya secara tepat bagi kelanjutan pembangunan bangsa khususnya pembangunan di Sulawesi Utara.

Akhirnya kami meyakini kegunaan buku ini sebagai salah satu usaha nyata dalam memperkaya khasanah kebudayaan Nasional guna menunjang pembangunan bangsa di sektor pendidikan dan Kebudayaan.

Manado, Juli 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara




Drs. W.G. Manua
NIP. 130 058 871.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Juni 1991
Direktur Jenderal Kebudayaan



Srs. GBPH Poeger
NIP. 130 204 562

KATA PENGANTAR

Naskah berjudul "Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945 - 1949) Daerah Sulawesi Utara" ini, adalah merupakan hasil pelaksanaan salah satu bagian tugas dari Proyek Pencatatan dan Dokumentasi Sejarah Daerah Departemen P dan K 1979/1980. Penyelesaian pekerjaan penyusunan naskah dilakukan oleh satu tim yang kami ketuai sendiri, dan bertanggung jawab kepada Pemimpin-Proyek di atas. Para anggota tim kami yakni Drs. Anthon Sigarlaki, Drs. Robert Tandi dan Drs. Albert E. Rompas.

Karena sifat pekerjaan yang mengharuskan pengumpulan data meliputi seluruh wilayah administratif Daerah Sulawesi Utara, maka pembagian tugas para anggota termasuk kami sendiri selaku Ketua Tim tidaklah terhindar lagi demi untuk merampungkan isi naskah ini. Untuk itu maka kami telah menugaskan kepada setiap anggota tim mengumpulkan data ke keempat daerah yang ditentukan sebagai sampel yaitu Sangir Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Tugas telah dijalankan dengan baik dan selesai pada bulan Oktober 1979.

Oleh karena itu maka dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada para anggota tim kami yang sudah menyelesaikan tugas pengumpulan data serta penyusunan konsep hasilnya perdaerah. Terima kasih yang sama juga disampaikan kepada :

1. Pemerintah Daerah se Sulawesi Utara, mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan sampai ke desa-desa yang ada;
2. Pimpinan dan Staf KANWIL P & K tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan di Daerah Sulawesi Utara;
3. Pimpinan dan staf Universitas Sam Ratulangi serta Pimpinan dan staf Fakultas Sastra UNSRAT
4. Para informan yang tersebar di kota-kota dan desa-desa dalam wilayah Daerah Sulawesi Utara, yang nama-namanya terlampir.
5. Sdr. Drs. F.E.W. Parengkuan yang telah membantu pengetikan naskah.
6. Semua pihak yang sudah turut memberikan bantuannya selama tim kami bertugas.

Hanyalah dengan bantuan, izin, fasilitas serta kemauan yang baik dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, maka dapatlah naskah ini selesai pada waktunya.

Akhir kata, sambil menaikan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, kami persembahkan naskah yang sederhana ini kepada sidang pembaca untuk diterima sebagaimana adanya. Segala teguran dan kritik demi kesempurnaan isinya sebentar, akan kami terima dengan dada lapang.

MANADO, DESEMBER 1979
KETUA TIM,

DRS. LAURENS TH. MANUS.

— 000 —

DAFTAR ISI

	hal.
SUSUNAN TIM	i
SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBU DAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENELITIAN	6
B. MASALAH	6
C. RUANG LINGKUP	7
D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN	7
II. KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)	10
A. BIDANG PEMERINTAHAN	10
B. BIDANG SOSIAL EKONOMI	10
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA	27
D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK/SOSIAL DAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL	35
1. Gerakan Tiga A	37
2. Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)	37
3. Keimin Bunka Syidosyo (Badan Pusat Kebudayaan	38
4. Organisasi Kepemudaan	38
5. Organisasi Kemiliteran/Semi Militer	41
6. Pengerahan Romusya	45
7. Organisasi Kewanitaan (Fujinkai)	48
8. Komite Tenaga Rakyat (KTR)	49
9. Menado Syukai Gi In	50
III. KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN A. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN ATAUPUN YANG MERU- PAKAN AWAL DARI PROSES REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)	51
1. Berita Proklamasi Kemerdekaan di Daerah	51
2. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih	56
B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH	60
1. Sikap Pasukan Jepang	60
2. Hambatan - hambatan	62
3. Partisipasi Masyarakat	66
C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANGAN BERSEN- JATA) DI DAERAH	68
1. Perebutan Kekuasaan dari Jepang di Daerah	68
2. Timbulnya Organisasi Kemiliteran dan Perjuangan (BKR Kelaskaran dll)	70
3. Partisipasi Masyarakat	77

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI DAERAH ..	79
1. Sikap Masyarakat	79
2. Akibat-akibatnya	86
IV. PERJUANGAN DI DAERAH	89
A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I	89
B. MASA AKSI MILITER BELANDA I	114
C. MASA AKSI MILITER BELANDA II DAN PERIODE PERANG GERILYA ..	118
D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH	
TINGKAT NASIONAL	123
1. Maklumat Pemerintah No. X	123
2. Perjanjian Linggajati	124
3. Politik Divide et Impera DR. H.J. van Mook	126
E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN/-	
KEHIDUPAN	129
1. Tata Pemerintahan	129
2. Sosial Ekonomi	133
3. Sosial Budaya	135
4. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan	136
5. Agama dan Kepercayaan	138
6. P e r s	139
7. Kepemudaan	141
8. Kewanitaan	142
V. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN	
(REVOLUSI FISIK)	144
A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB	144
B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONPERENSI ANTAR INDONESIA ..	147
C. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA NEGARA KESATUAN RE-	
PUBLIK INDONESIA	148
D. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN ...	150
1. Sosial Ekonomi	150
2. Sosial Budaya	151
3. Pendidikan	152
4. Agama dan Kepercayaan	153
5. P e r s	153
6. Kepemudaan	154
7. Kewanitaan	154
E. PELAKSANAAN HASIL KMB DI DAERAH	155
VI. - P E N U T U P	176
- GLOSARIUM	178
- DAFTAR KATA (INDEKS)	182
- P E T A	193
- DAFTAR SUMBER	194
- DAFTAR INFORMAN	197

I. PENDAHULUAN

Wilayah yang menjadi obyek/lokasi dalam tulisan ini meliputi seluruh daerah yang sekarang ini dikenal sebagai Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah. Sebagai sebuah propinsi maka Sulawesi Utara terbentuk dari tujuh daerah yang lebih kecil dengan statusnya masing-masing. Ketujuh daerah itu ialah :

1. Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, yang menjadi tempat kedudukan Ibukota Propinsi;
2. Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo;
3. Kabupaten Daerah Tingkat II Sangir Talaud dengan Ibukota Tahuna;
4. Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dengan Ibukota Tondano;
5. Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dengan Ibukota Limboto;
6. Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow dengan Ibukota Kotamobagu; dan
7. Kota Administratif Bitung.

Kotamadya dipimpin oleh seorang Walikotamadya sedangkan Kabupaten oleh seorang Bupati/Kepala Daerah. Kota Administratif dipimpin oleh seorang Walikota Administratif.

Dalam menjalankan tugasnya, Gubernur/Kepala Daerah didampingi oleh sebuah Dewan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I Sulawesi Utara, dan bersama-sama dewan itu merupakan Pemerintah Daerah. Hal inipun berlaku untuk daerah tingkat II kecuali untuk Kota Administratif. Masing-masing pejabat mulai Gubernur, Walikota, Bupati dan Walikota Administratif, memiliki stafnya yang bekerja demi suksesnya tugas rutin dan tugas pembangunan masing-masing pejabat itu.

Menilik sejarahnya, daerah ini sebagai suatu kesatuan administratif dimulai ketika pemerintah kolonial Belanda tahun 1824 membentuk Keresidenan Manado yang merupakan pecahan dari Keresidenan Ternate. Wilayah Keresidenan Manado ini meliputi wilayah yang luasnya sama dengan luas wilayah yang sekarang ini

merupakan Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah, kecuali Sangir Talaud. Baru setahun kemudian (1825) daerah Sangir Talaud dilepaskan dari keresidenan Ternate dan dimasukkan ke Keresidenan Manado. Hal ini diatur antara lain dalam Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tgl. 14-6-1824 Nomor 10 (Staatsblad 1824/28a). Sejak waktu itu maka wilayah Sulawesi Utara/Tengah tidak lagi di bawah Keresidenan Ternate, tetapi langsung di bawah Gubernur Maluku yang berkedudukan di Ambon (Arsip Nasional, 1971 ; Manus dkk, 1978).

Wilayah Sulawesi Utara/Tengah yang tergabung dalam Keresidenan Manado ini bertahan terus sampai akhir pemerintahan Hindia Belanda 1942, digantikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Dengan menyerahnya Residen Manado 11 Januari 1942 kepada Jepang, maka praktis seluruh Sulawesi Utara/Tengah berada di bawah penguasaan tentara pendudukan yang kemudian mendirikan pemerintahan pendudukan. Dalam masa ini, Keresidenan Manado disebut Manado-Syucosyo, mulai September 1942 disebut Manado-Sibu, dan sejak 1943 disebut Manado-Syu sampai akhir masa pendudukan Jepang (Manus dkk, 1978; Watuseke, 1968 ; Palit, 1978).

Setelah Jepang menyerah kalah, maka Belanda kembali dan berhasil menguasai serta mendirikan kembali Keresidenan Manado. Tahun 1946 terjadi pemberontakan terhadap Belanda menyebabkan wilayah ini berhasil dibebaskan selama 24 hari (14 Februari - 11 Maret 1946) digabungkan kepada RI yang berpusat di Yogyakarta. Sesudah itu Belanda kembali berkuasa dan sejak 24 Desember 1946 digabungkan ke dalam NIT. Sampai akhir 1949, pemerintahan dipegang dan dijalankan oleh seorang Residen. Ketika NIT akhir 1949 membentuk tiga Komisariat Negara, maka wilayah ini diperintah oleh seorang Komisaris Negara yang kedudukannya dapat disamakan dengan Gubernur. Wilayah Komisariat Negara waktu itu disebut Komisariat Negara Sulawesi Utara dan Maluku Utara dengan Ibukota Manado.

Dengan demikian maka sebuah Komisariat Negara dapat disamakan statusnya dengan sebuah Propinsi sehingga jabatan Komisaris Negara dapat disamakan dengan Gubernur. Wilayah Komisariat Negara ini lebih kecil dari Keresidenan Manado dahulu yang sampai ke Sulawesi Tengah. Walaupun sudah dikurangi dengan Sulawesi Tengah tetapi ditambahkan dengan daerah Maluku Utara, sehingga dapat dikatakan meliputi daerah Minahasa, Sangir Talaud, Gabungan Sulawesi Utara (Gorontalo Bolaang Mongondow dan Buol) serta Maluku Utara. Setelah terwujudnya RI tahun 1950, Komisariat Negara Sulawesi Utara Maluku Utara dihapuskan dan dikembalikan ke status Keresidenan Manado seperti semula (Watuseke, 1968).

Perlu ditegaskan bahwa daerah Sulawesi Utara tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tahun itu tercatat pembentukan Propinsi Sulawesi di mana Sulawesi Utara termasuk di dalamnya. Sebagai Gubernur yang pertama DR. G.S.S.J. Ratulangi yang berkedudukan di Makasar sebagai Ibukota. Namun karena dihalang-halangi oleh politik Belanda di bawah H.J. van Mook, maka beliau tidak dapat secara efektif menjalankan tugasnya bahkan kemudian ditangkap dan dibuang ke Irian Jaya, setelah

bertugas hanya 9 bulan lamanya (Kempen, 1953 ; Manus dkk, 1978).

Propinsi Sulawesi sebagai bagian dari RI nanti diaktipkan lagi mulai 17 Agustus 1950 dengan diangkatnya Acting Gubernur B.W. Lapien kemudian mulai 1 Juli 1951 di bawah Gubernur Sudiro. Status Sulawesi sebagai propinsi berakhir tahun 1960 dengan dibentuknya dua propinsi administratif yaitu Propinsi Sulawesi Selatan/Tenggara Ibukota Makassar dan Propinsi Sulawesi Utara/Tengah Ibukota Manado. Masing-masing propinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Utara/Tengah yang pertama ialah A. Baramuli SH yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden No. 122/M tgl. 31-3-1961 mulai 1 juni 1961.

Sesuai UU No. 47/1960 dan Perpres No. 5/1960 maka wilayah Propinsi Sulawesi Utara/Tengah meliputi Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, Dati II Sangir Talaud, Dati II Minahasa, Dati II Bolaang Mongondow, Dati II Gorontalo, Dati II Buol/Tolitoli, dati II Donggala, Dati II Poso dan Dati II Luwuk/Banggai. Bila dibandingkan maka wilayah ini sama dengan luas wilayah Keresidenan Manado dahulu.

Dalam tahun 1964 terjadi lagi perobahan wilayah di mana Sulawesi Tengah dilepaskan dari Sulawesi Utara. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/1964. Berdasarkan peraturan itu maka terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Gubernur. Wilayah Sulawesi Utara terdiri dari Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, Dati II Sangir Talaud, Dati II Minahasa, Dati II Bolaang Mongondow dan Dati II Gorontalo.

Dengan berlakunya UU No. 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah maka sebutan Kotapraja diubah menjadi Kotamadya dan dati II (Daerah Tingkat II) menjadi Kabupaten. Kemudian berdasarkan UU No. 5/1974 maka Propinsi menjadi Propinsi Daerah Tingkat I, Kotamadya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II. Sebutan dan status yang mengikutinya tetap berlaku sampai sekarang ini sebagaimana sudah dikemukakan di depan.

Yang menduduki jabatan sebagai Gubernur sejak tahun 1961 ketika berstatus Propinsi Sulawesi Utara/Tengah yakni. A. Baramuli SH (1 - 6 - 1961 - 15 - 6 - 1962), F.J. Tumbelaka (15 - 6 - 1962 - 19 - 3 - 1965) dan Sunandar Prijosudarmo (pejabat, 19 - 3 - 1965 - 27 - 4 - 1966). Sejak terbentuknya Propinsi Sulawesi Utara, yang menjadi Gubernur yakni Abdullah Amu (27 - 4 - 1966 - 2 - 3 - 1967, pejabat) H. V. Worang (2 - 3 - 1967 - 2 - 3 - 1972; pejabat 2 - 3 - 1972, 12 - 3 - 1973, 12 - 3 1977, pejabat 12 - 3 - 1977 - 21 - 6 1978), Willy G.A. Lasut, (21 - 6 - 1978 - 20 - 10 - 1979) dan terakhir Erman Harirustaman, (pejabat sejak 20 - 10 - 1979 - sekarang).

Jumlah penduduk Sulawesi Utara dari hasil sensus penduduk yakni 748.000 (1930), 1.351.534 (1961), 1.717.223 (1971), 1.822.960 (1975) dan 1.932.899 (1976). Pertambahan penduduk rata-rata sejak 1930 - 1961 adalah 2 1/2% dan dalam periode berikutnya rata-rata 1,8% (sampai 1976). Mengenai jumlah penduduk menurut golongan agama per daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut.

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
SE SULAWESI UTARA TAHUN 1975**

DAERAH	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU/ BUDHA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
Kodya Manado	46953	98815	29196	6818	181782
Kodya Gorontalo	82525	1946	95	734	85300
Kab. Sangir Talaud	32500	193612	3090	--	229202
Kab. Minahasa	124769	543350	49149	1250	718518
Kab. Bolmong	180807	39403	1829	2776	224815
Kab. Gorontalo	379512	2962	116	753	383343
J U M L A H :	847066	880088	83475	12331	1822960

Sampai tahun 1977, penduduk Sulawesi Utara meningkat jumlahnya menjadi 1.953.824. Persebarannya per daerah yaitu Kotamadya Manado 188.148, Kotamadya Gorontalo 89.619, Kabupaten Sangir Talaud 243.611, Kabupaten Minahasa 623.991, Kabupaten Bolaang Mongondow 263.871, Kabupaten Gorontalo 472.626. Untuk Kota Administratif Bitung terdapat jumlah penduduk sebesar 73.018 jiwa.

Luas seluruh daerah Sulawesi Utara adalah 25.786 Km² yang meliputi 83 Kecamatan dan 1159 desa. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut.

**PERINCIAN JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN LUASNYA
SE PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1977**

DAERAH	PEN- DUDUK	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA	LUAS / KM ²
1	2	3	4	5
Kodya Manado	188148	3	24	117
Kodya Gorontalo	89619	3	39	66
Kab. S. Talaud	243611	16	211	2273
Kab. Minahasa	623991	27	434	4403
Kab. Bolmong	263871	15	203	7600
Kab. Gorontalo	472626	16	213	11030
Koad. Bitung	73018	3	35	297
JUMLAH	1953824	83	1159	25786

Di daerah Sulawesi Utara, sampai tahun 1976 terdapat sebanyak 1839 buah SD (Sekolah Dasar) baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Lembaga-lembaga swasta yang mengelola pendidikan masyarakat jumlahnya 11

buah yaitu : GMIM, RK, Gereja Pantekosta Indoensia, Gereja Protestan Indonesia, Yayasan Eben Haezer, Yayasan Tabita, Yayasan PIKAT, Yayasan YAPIM, PERSIT Kartika Candra Kirana, PERTIWI Propinsi Sulawesi Utara, Yayasan Al-Ikhsan dan lain-lain. Mengenai jumlah dan status SD tersebut adalah sebagai berikut.

**JUMLAH DAN STATUS SD SE PROPINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 1976**

DAERAH	STATUS SD				JUMLAH
	NEG.	SUBSIDI	BERBANTUAN	SWASTA	
1	2	3	4	5	6
Kodya Manado	46	51	17	7	121
Kodya Gorontalo	101	-	3	1	105
Kab. Sangir Talaud	67	114	69	-	250
Kab. Minahasa	194	391	9	41	635
Kab. Bolmong	213	2	30	3	248
Kab. Gorontalo	410	1	3	14	428
JUMLAH :	1042	593	135	69	1839

Jumlah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) di daerah Sulawesi Utara serta jumlah guru dan muridnya adalah sebagai berikut.

**JUMLAH DAN JENIS SLTP, GURU DAN MURID
SE PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976**

JENIS SEKOLAH	JUMLAH	GURU	MURID
1	2	3	4
SMP	240	2497	44016
SMEP	36	509	6642
SKKP	15	184	1719
ST	10	139	1852
JUMLAH	301	3329	53229

Mengenai jumlah dan jenis SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) serta jumlah guru dan murid adalah sebagai berikut.

**JUMLAH DAN JENIS SLTA, GURU DAN MURID
SE PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976**

JENIS SEKOLAH	JUMLAH	GURU	MURID
1	2	3	4
SMA	41	723	11348
SMEA	26	445	6005
SKKA	62	101	828
STM	4	126	1406
SPG	4	175	3026
SGO	3	36	295
JUMLAH	140	1606	22908

Perkembangan dalam bidang ekonomi khususnya sektor pertanian di daerah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut khususnya kopra, cengkih, padi dan jagung. Hasil kopra pada awal PELITA I adalah 170.387 Ton (1969). Produksi kopra sesudah itu berturut-turut sampai tahun 1977 adalah : 188.135 Ton, 171.894 Ton, 171.874 Ton, 151.104 Ton, 153.540 Ton, 175.508 Ton, 180.104 Ton dan 181.000 Ton (angka sementara 1977). Hasil produksi cengkih 1969 adalah 2007 Ton, 1970: 2103 Ton, 1971: 2002 Ton, 1973 : 8000 Ton, 1975: 2800 Ton sedangkan untuk tahun 1979/1980 diperkirakan akan mencapai 20 ribu Ton. Produksi cengkih ini bersifat musiman sehingga jumlah produksi tidak tetap.

Mengenai luas sawah/ladang dan produksi padi/jagung, dapat disampaikan bahwa luas sawah tahun 1969: 37996 Ha, luas ladang padi 1969 yakni 17238 Ha dan luas ladang jagung 1969 adalah 59569 Ha. Untuk tahun 1976, perinciannya adalah sebagai berikut.

**LUAS DAN PRODUKSI PADI SAWAH, PADI LADANG DAN JAGUNG
SE PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 1976 (Ha/Ton)**

DAERAH	PADI SAWAH		PADI LADANG		JAGUNG	
	LUAS	PRODUKSI	LUAS	PRODUKSI	LUAS	PRODUKSI
1	2	3	4	5	6	7
Kodya Manado	110	232	-	-	173	131
Kodya Gorontalo	1760	9220	-	-	4387	362
Kab. S. Talaud	-	-	-	-	361	2562
Kab. Minahasa	32016	128831	19575	19575	56969	67997
Kab. Bolmong	19665	73542	9601	9601	16409	22057
Kab. Gorontalo	19746	86743	10020	10020	39812	38689
JUMLAH	73297	298568	39196	39196	118111	121798

Dalam sektor industri yang terpenting adalah industri pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. Perusahaan-perusahaan minyak kelapa di Sulawesi Utara yang terutama adalah : PT. Bimoli (81 ribu Ton/tahun), PT. Inimexintra (72 ribu Ton/tahun), PT Bukit (54 ribu Ton/Tahun), PT KVO (36 ribu Ton/tahun) dan PT Unicotin Ltd (81 ton tepung kelapa/tahun). Selain itu terdapat beraneka ragam perusahaan industri antara lain industri penggilingan biji-bijian, industri makanan, percetakan/penerbitan, barang-barang kimia dan sebagainya.

A. TUJUAN PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah untuk daerah Sulawesi Utara ialah menggali, mengumpulkan, mencatat, meneliti dan mengolah sumber sejarah yang ada di daerah ini. Kegiatan ini bermaksud menyusun bahan-bahan sejarah periode 1945-1949 menjadi satu naskah sejarah tematis yaitu Sejarah Daerah Sulawesi Utara Zaman Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik). Naskah ini kemudian akan melengkapi penyusunan Sejarah Nasional yang merupakan pencerminan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan dan sasaran Pola Kebijaksanaan Kebudayaan Nasional.

Dalam penyusunan materi sejarah daerah tematis ini hasilnya sedapat mungkin telah diusahakan disusun menurut petunjuk-petunjuk dalam TOR (term of reference) yang telah ditetapkan. Namun di balik itu, selalu saja di sana sini ditemui hal-hal yang datanya tidak tersedia di daerah sehingga usaha pemenuhan sesuai TOR dapat bersifat pemaksaan. Oleh karena itu telah diusahakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia di daerah Sulawesi Utara sedemikian rupa, sehingga tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam TOR dimaksud.

B. MASALAH

Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) merupakan sebagian dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai kesejarahan yang sangat penting, karena terjadinya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, termasuk penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia, tercermin pada masa itu.

Proses perjuangan kemerdekaan nasional terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Sulawesi Utara ini, dengan berbagai corak dan ragamnya. Berdasarkan hal tersebut maka terasa sekali adanya desakan kebutuhan untuk perlu diadakan inventarisasi dan dokumentasi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bentuk naskah secara lebih luas, mendalam dan terperinci, agar didapatkan suatu pengertian mendalam mengenai zaman itu, khususnya di daerah Sulawesi Utara.

Apalagi jika diingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang dengan sendirinya memiliki kebhinekaan budaya. Demikian juga mengenai masalah proses perjuangan kemerdekaan nasional itu sendiri baik di daerah-daerah lain maupun di daerah Sulawesi Utara. Diharapkan bahwa dari kebhinekaan kegiatan perjuangan itu, akan dapat dijangkau ketunggalikaannya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi tematis dari Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) 1945 - 1949 di Daerah Sulawesi Utara ini, disusun meliputi segi-segi kehidupan tata pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama dan kepercayaan, organisasi masyarakat, kepemudaan, kewanitaan, pers serta segala bentuk organisasi profesional lainnya.

Materi pembahasan telah diusahakan agar benar-benar dapat bersifat ke-daerahan, artinya dengan berpedoman pada fokus regiosentrisme. Untuk itu maka dianggap bahwa daerah ini terdiri dari empat lingkungan kesejarahan dan kebudayaan yaitu Minahasa, Sangir Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Kotamadya Manado dan Kota Administratif Bitung dimasukkan dalam lingkungan kesejarahan dan kebudayaan Minahasa demikian pula dengan Kotamadya Gorontalo yang dimasukkan ke daerah Gorontalo.

Berdasarkan pembagian di atas, maka telah diusahakan agar bahan-bahan dan sumber-sumber kesejarahan yang dapat dikumpulkan, diolah dan menjangkau seluruh wilayah administratif yang ada, dalam hal ini seluruh daerah Sulawesi Utara.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN.

Penyusunan naskah ini sebenarnya adalah bagian tugas dari Bidang PSK (Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan) Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Utara. Untuk melaksanakannya maka bidang tersebut mengadakan kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini dengan Fakultas Sastra. Dengan demikian maka penyusunan naskah ini dipercayakan kepada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi Manado. Yang menjadi Pemimpin Proyek adalah salah seorang staf bidang tersebut yang membawahi lima Tim yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Tim. Lengkapnya kelima tim tersebut menggarap lima aspek yakni aspek sejarah, adat istiadat, geografi budaya, ceritera rakyat, serta ensiklopedi musik dan tari.

Masing-masing Ketua Tim menandatangani kontrak kerja dengan Pemimpin Proyek di mana untuk Tim Sejarah ditandatangani Drs. Laurens Th. Manus sebagai Ketua Tim. Susunan Tim selengkapnya sejak penandatanganan kontrak kerja dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Drs. Laurens Th. Manus selaku Ketua Tim/Penanggung jawab merangkap Anggota ;
2. Drs. Anthon Sigarlaki sebagai Anggota;
3. Drs. Robert Tandi sebagai Anggota; dan
4. Drs. Albert E. Rompas sebagai Anggota;

Sambil menunggu pencairan biaya tahap pertama, maka Tim telah mengadakan kegiatan sehingga berhasil menyusun rencana kerja sebagai berikut :

1. Juli s/d Agustus 1979:
 - a. Pertemuan, penyelesaian surat-suratan, diskusi;
 - b. Penentuan sampel, seleksi kepustakaan, surat-surat penugasan;

- c. Penyusunan organisasi, pembagian tugas lapangan diskusi pendahuluan dan penyusunan surat-surat;
- d. Persiapan ke lokasi :
2. September 1979;
 - a. Persiapan administrasi dan perlengkapan;
 - b. Penugasan ke lokasi dan menghubungi pejabat;
 - c. Observasi dan wawancara serta seleksi kepustakaan setempat;
3. Oktober 1979;
 - a. Kembali ke Manado
 - b. Melengkapi wawancara;
 - c. Klasifikasi data;
 - d. Pengolahan data dan diskusi/seminar kecil;
4. Nopember dan Desember 1979;
 - a. Pembagian kerja penulisan naskah per daerah;
 - b. Penulisan naskah integrasi;
 - c. Diskusi isi naskah integrasi;
 - d. Perbaikan, penyusunan dan pengetikan naskah akhir;
5. Januari 1980 :
 - a. Penjilidan;
 - b. Penyerahan kepada Pemimpin Proyek;
 - c. Persiapan revisi.

Sesuai dengan pembagian atas empat lingkungan kesejarahan dan kebudayaan di atas, maka penugasan keempat anggota tim adalah sebagai berikut :

1. Drs. Laurens Th. Manus untuk Minahasa (termasuk Manado dan Bi tung).
2. Drs. Anthon Sigarlaki untuk Sangir Talaud;
3. Drs. Robert Tandi untuk Gorontalo (termasuk Kotamadyanya); dan
4. Drs. Albert E. Rompas untuk Bolaang Mongondow.

Pembagian lokasi penugasan di atas, tidak menutup kemungkinan saling isi mengisi sumber data yang diperoleh masing-masing petugas dimaksud.

Mengenai teknik pengumpulan data, maka telah dilakukan observasi dan wawancara di lokasi masing-masing. Selain itu dilengkapi lagi dengan penelitian kepustakaan setempat serta langsung mengunjungi obyek kesejarahan yang ada hubungannya dengan sumber yang diperoleh. Dalam penelitian kepustakaan, selain dokumen dan buku, tidak ketinggalan pula menggunakan sumber-sumber pers daerah sejauh mana bahan itu dapat diperoleh. Dalam hal ditemui sumber yang saling bertentangan, maka hal itu dibandingkan dan diselaraskan baik dengan buku-buku/dokumen lain, maupun dibawa dalam diskusi.

II. KEADAAN DI DAERAH PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Sejalan dengan ofensif militernya dalam perang Dunia II, maka awal 1942, tepatnya 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya untuk merebut Keresidenan Manado. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Keresidenan Manado meliputi wilayah yang sekarang ini telah menjadi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk mempertahankan keresidenan ini, pemerintah kolonial hanya memusatkan kekuatan militer di Minahasa saja. Hal ini telah lebih dahulu diketahui Jepang yang banyak memiliki mata-mata orang Jepang sebelum pendaratan dilakukan. Dengan demikian maka sasaran militer Jepang hanyalah di Minahasa (manus dkk, 1978)

Pendaratan pasukan Jepang di Minahasa dilakukan pada tiga lokasi yaitu di Kema, Manado dan Kalawiran. Kema dan Manado terletak di tepi pantai dan dilakukan oleh puluhan kapal perang dan pengangkut pasukan. Pendaratan di Kalawiran dilakukan melalui udara yaitu dengan menerjunkan pasukan payung. Baik pasukan yang didaratkan melalui laut maupun yang diterjunkan dari udara, adalah bagian dari Kaigun (Angkatan Laut). Pendaratan, melalui laut dipimpin oleh Letnan Kolonel Hashimoto sedangkan melalui udara dipimpin oleh Letnan Kolonel Horiuchi dibantu Letnan Kolonel Horinte. Dalam satu hari saja, pemusatan pertahanan Belanda di Kema, Airmadidi, Manado, Tinoor, Kakaskasen dan Kalawiran serta tempat-tempat lainnya, berhasil dihancurkan Jepang (Marun duh, 1978; Manus dkk, 1978; Palit, 1979; Woror, 1977).

Sebelum pendaratan itu dilakukan, Keresidenan Manado dikepalai oleh Residen Hirschman. Ia membawahi beberapa Asisten Residen sedangkan Asisten Residen membawahi Controleur. Pada masa itu Keresidenan Manado terdiri dari empat Afdeeling, 10 Onderafdeeling dan lebih dari 20 kerajaan berstatus landschap. Sebagian dari keresidenan yang sekarang ini termasuk wilayah Sulawesi Utara, terdiri dari dua Afdeeling, tiga Onderafdeeling serta 10 kerajaan yang berstatus landschap (Rhijn, 1941; Manus dkk, 1978) Asisten Residen mengepalai Onderafdeeling sedangkan Controleur mengepalai Onderafdeeling. Kedua Afdee-

ling itu yakni Afdeeling Manado dan Afdeeling Gorontalo. Ketiga Onderafdeeling yakni Onderafdeeling Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangir dan Bolaang Mongondow.

Lebih jauh lagi, Afdeeling Manado yang dipimpin oleh Asisten Residen sejak 1911 membawahi kota Manado dan daerah Minahasa serta berkedudukan di Manado sebagai ibukota dari Afdeeling itu. Afdeeling Gorontalo membawahi kota Gorontalo dan daerah Gorontalo di mana Asisten Residen berkedudukan di kota Gorontalo. Onderafdeeling Talaud membawahi seluruh kepulauan Talaud dan controleur berkedudukan di Beo. Onderafdeeling Sangir membawahi seluruh kepulauan Sangir dan Controleur berkedudukan di Tahuna. Onderaf deeling Bolaang Mongondow membawahi wilayah empat kerajaan di sana dan Controleur berkedudukan di Kotamobagu (Sigarlaki dkk, 1977; Manus dkk, 1978; Parengkuan, 1978).

Dengan berhasilnya Jepang menduduki Minahasa, maka sebagai langkah pertama yang dilakukan ialah memerintahkan seluruh personal militer Belanda agar menyerahkan diri. Kemudian dikeluarkan instruksi agar seluruh pejabat sipil dari seluruh Keresidenan Manado agar datang melaporkan diri kepada Komandan Pasukan Pendudukan Letnan Kolonel Horiuchi yang berkedudukan di Langowan (Minahasa); (Marunduh, 1978; Manus dkk, 1978). Instruksi kepada para pejabat sipil itu dikeluarkan sekitar akhir Januari 1942.

Sulawesi Utara pada masa itu diduduki oleh pasukan-pasukan Angkatan Laut (Kaigun) bersama-sama dengan wilayah Indonesia Timur lainnya. Pusat pemerintahan militer. Pusat pemerintahan militer Jepang untuk Indonesia Timur berkedudukan di Makasar (sekarang Ujung Pandang). Organisasi pemerintahannya untuk Indonesia Timur disebut Minseifu yang dipimpin oleh pejabat yang disebut Sokan. Minseifu Indonesia Timur ini membawahi tiga wilayah yang lebih kecil yang disebut Minsei, yaitu Minsey Kalimantan, Minsei Sulawesi dan Minsei Seram (Sihombing, 1962; Manus dkk, 1978). Sulawesi Utara dengan sendirinya termasuk dalam Minsei Sulawesi.

Keresidenan Manado diganti dengan istilah Jepang hingga namanya ialah Menado Syu. Kepala pemerintahan Menado syu mula-mula disebut Menado Syucosyoco. Mulai September 1942 disebut Menado Sibuco tapi sejak 1943 sampai berakhirnya masa pendudukan Jepang, disebut Menado Syuciji. Kantor pusat pemerintahan Menado Syu disebut Minseibu (Manus dkk 1978; Palit, 1978; Watusake, 1968).

Mengenai susunan tata pemerintahan daerah, tidak diadakan perubahan yang berarti dengan pengertian bahwa hanya istilah jabatan Belanda diganti dengan istilah Jepang. Dengan demikian maka susunan pemerintahan masa itu lengkapnya adalah sebagai berikut (Marunduh, 1978; Manus dkk, 1978).

1. Keresidenan Manado disebut Menado Syu, kepalanya disebut Menado Syucosyoco, kemudian Menado Sibuco akhirnya disebut Menado Syu ciji;
2. Afdeeling disebut Ken dan kepalanya disebut Kenkanrikan
4. Kerajaan disebut Su dan raja disebut Suco;
5. Distrik disebut Gun dan kepalanya disebut Gunco;

6. Onderdistrik disebut Fukugun dan kepalanya Fukugunco;

7. Desa disebut Son dan kepala desa disebut Sonco.

Dapat ditambahkan bahwa di Minahasa, wilayah administratif desa masih dibagi lagi atas beberapa bagian yang lebih kecil yang disebut "Jaga" dikepalai oleh "Kepala Jaga". Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Jaga dibantu oleh pamong desa yang disebut "Meweteng." Masa Jepang, Kepala Jaga disebut Kuco dan meweteng disebut Kumico.

Dengan lari atau ditangkapnya para pejabat Belanda maka akibatnya banyak jabatan sipil yang lowong. Lowongan jabatan itu kemudian diisi oleh orang-orang Jepang dan banyak pula yang diisi oleh pejabat-pejabat pribumi. Para pejabat pribumi yang datang melaporkan diri ke Langowan diperintahkan oleh Komandan Tentara Pendudukan Letnan Kolonel Horiuchi agar kembali ke posnya dan bertugas seperti biasa sampai ada ketentuan lebih lanjut. Mulai bulan Mei 1942, ditetapkanlah para pejabat sipil mulai tingkat Kepala Distrik ke atas lengkap dengan istilah jabatan Jepang di atas (Sigarlaki dkk 1977). Namun dalam banyak hal, mereka harus selalu menaati-petunjuk atau perintah yang dikeluarkan oleh para komandan militer yang mendampinginya.

Sejak waktu itu maka Minahasa Ken (Afdeeling Minahasa) adalah terdiri dari enam Gun (Distrik) yakni Manado, Tonsea, Toulour, Kawangkoan, Amurang dan Ratahan. Kemudian dibentuk Langowan Gun yang merupakan pecahan dari sebagian Toulour Gun dan Kawangkoan Gun. Bulan Mei 1942, dibentuk lagi sebuah Gun baru yakni Tomohon Gun yang merupakan pecahan dari Manado Gun (Sigarlaki dkk, 1977). Jadi sampai pada akhir masa pendudukan Jepang, Minahasa Ken terdiri atas delapan Gun yakni Manado, Tonsea, Tondano, Tomohon, Kawangkoan, Lngowan, Amurang dan Ratahan.

Para Gunco (Kepala Distrik) yang diketahui antara lain Tomohon Gunco R.C.K. Lasut, Langowan Gunco Mogot, Amurang Gunco Dotulong. Dalam bulan Mei 1942 diangkatlah A.B.H. Waworuntu sebagai Manado Sico (Walikota Manado) sedangkan dr. A.B. Andu sebagai Minahasa Hyogikai Gico (Ketua Dewan Minahasa). Setelah Jepang mendatangkan para pegawai sipil sendiri, maka jabatan Walikota dan Ketua Dewan diambil alih oleh orang-orang Jepang sehingga A.B.H. Waroruntu diturunkan jabatannya menjadi Manado Huku Gico (Wakil Walikota) sedangkan dr. A.B. Andu menjadi Minahasa Huku Gico (Wakil Ketua Dewan Minahasa). (Palit, 1978; Taulu, 1950).

Setelah Letnan Kolonel Horiuchi mengakhiri masa tugasnya sebagai Komandan Tentara Pendudukan bekas Keresidenan Manado, maka ia diganti oleh Letnan Kolonel Hashimoto selaku Kepala Pemerintahan Militer (Menado Syucosyoco). September 1942 Hashimoto diganti oleh Panglima Yunomura selaku Menado Sibuco dan akhirnya dipegang oleh Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Menado Syiciji sampai penyerahan kepada Sekutu (Palit, 1978; Wowor, 1977; Watusake, 1968; Taulu, 1950).

Di daerah Sangir Talaud, sebelum kedatangan tentara Jepang telah dibentuk sebuah badan yang disebut "Komite Nasional" pada kira-kira bulan Maret 1942. Sangat menyesal bahwa susunan pengurus (pimpinan) badan ini tak diketahui lagi,

selain beberapa orang yang pernah menjadi pimpinan ataupun anggotanya seperti antara lain; Eddy Sanger, Anton Liotohe, Nulus Liotohe, Willem Aer, Maniku dan lain-lain (Makahanap, wawancara 18-9-1979).

Sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Desember 1941 di Siau juga telah didirikan sebuah badan yang disebut Komite Nasional Siau (KNS) dengan pimpinan sebagai berikut :

Ketua	: W.A. Kansil
Wakil Ketua	: M. Hermanses
Panitera I	: H. B. Elias
Panitera II	: C. Ponto
Anggota	: J. Mangary, P. Bogar, H. Bawana.

Maksud Komite ini adalah :

- melikwidasi semua kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sangir Talaud serta menangkap semua orang Belanda dan menyerahkannya kepada Jepang.
- membentuk pemerintah darurat dan menjaga semua inventaris dari pemerintah lama;
- menjemput Jepang dan merundingkan persoalan kemerdekaan Indonesia selanjutnya, sesuai dengan keinginan kaum pergerakan semua (Elias, 1973).

Badan inilah yang dapat dikatakan telah mempersiapkan dan menyambut kedatangan Jepang di daerah Sangir Talaud dengan menangkap pembesar-pembesar pemerintah Hindia Belanda di sana termasuk kepala pemerintahannya yaitu Controleur Krams. Juga pejabat-pejabat kulit putih penting lainnya seperti Direktur HIS, beberapa orang pendeta, semua dengan isterinya masing-masing, serta dr. G. Czesco. Mula-mula mereka ditampung di Asrama HIS di Tahuna. Kemudian bulan April 1942 bersama dengan beberapa anggota pemerintahan pribumi lainnya yang masih setia kepada Belanda, mereka diangkut dengan kapal motor ke Manado untuk diserahkan kepada Jepang, yang telah mendarat di sana sejak 11 Januari 1942. Hal ini dilakukan oleh anggota-anggota KNS di atas dengan didampingi oleh Raja Tahuna waktu itu ialah Engelhard Bastian (Makahanap, wawancara 18-9-1979; Tatimu, 1975).

Bulan Mei 1942, Raja Tahuna Engelhard Bastian bersama para anggota KNS di atas kembali dari Manado ke Tahuna dengan membawa surat penunjukan pemerintah Jepang untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan di daerah Sangir Talaud atas nama pemerintah pendudukan Jepang. Dengan ini maka mulailah pemerintahan Jepang di daerah Sangir Talaud, walaupun mula-mula belum secara langsung.

Pemerintahan darurat oleh Jepang yang dikuasakan kepada Engelhard Bastian ini hanya berlangsung selama setahun lebih dan pada kira-kira bulan Juli 1943, telah mendarat di pelabuhan Tahuna sepasukan tentara Jepang sebanyak kira-kira dengan gelar Jogugu dan di bawahnya adalah para kepala kampung dengan gelar Kapten Laut. Struktur pemerintahan ini ternyata tetap dipertahankan Jepang hanya istilah jabatan diganti dengan istilah Jepang. Dalam hal ini Controleur diganti Bunkenkanrikan, Raja diganti Suco, Jogugu diganti Gunco dan Kapten Laut

diganti Sonco (Monografi Daerah).

Dengan demikian sebagai Bunkenkanrikan adalah Hirano, sedangkan Suco-suco (Raja-raja) yang berkuasa pada masa itu adalah (Monografi Daerah; Binilang,).

Suco Tahuna	: Engelhard Bastian (1942-1944)
Suco Tamako	: W.K.P. Mokodompis (1942-1944) diganti W. Kansil (1945)
Suco Tabukan	: K.J.L. Macpal (1942-1944) diganti Umar Muhammad (1945)
Suco Siau	: P.F. Parengkuan (1942-1945)
Suco-Tagulandang	: W.Ph. Jacobs (1942-1944) diganti oleh Paul A. Tindas (1945)
Suco Talaud	: P.G. Koagouw (1942-1944) diganti oleh Th. Binilang (1944-1949).

Sebelum masuknya Jepang di Gorontalo, atas perintah Residen di Manado dibentuklah Vernielings Corps (VC) atau destroyer-groups (Pasukan penghancur) yang bertugas untuk merusak atau menghancurkan bangunan-bangunan seperti jembatan, irigasi dan bahan-bahan yang dapat dipakai oleh Jepang apabila mereka memasuki Gorontalo. Rencana ini menimbulkan reaksi yang hebat dari tokoh masyarakat Gorontalo antara lain Nani Wartabone, agar menunda tindakan yang merugikan rakyat (Polontalo, 1977).

Di saat-saat situasi agar memburuk akibat pembumihangusan pertama terhadap gudang kopra dari gudang minyak di pelabuhan Gorontalo oleh Belanda, maka pada hari Jumat malam 16 Januari 1942, kaum nasionalis bergerak secara rahasia untuk menghadapi tindakan Belanda. Mereka mengadakan rapat dengan pemimpin-pemimpin rakyat bertempat di rumah kediaman dari R.M. Kusno Dhanupojo di kampung Ipilo kota Gorontalo. Rapat itu menghasilkan keputusan pembentukan suatu badan perjuangan yang disebut "Komite Dua Belas". Susunannya adalah sebagai berikut :

Ketua	: Nani Wartabone
Wakil Ketua	: R.M. Kusno Dhanupojo
Sekretaris I	: M.H. Buluati
Sekretaris II	: A.R. Ointu
Anggota	: Usman Monoarfa, Usman Hadju, Usman Tumu, A.G. Usu, M. Sugondo, R.M. Dhanuwatijo, Sagaf Alhasni, Hasan Badjeber.

Tugas Komite Dua Belas ialah menjaga dan melindungi keselamatan rakyat dan daerah dari segala tindakan yang merugikan rakyat, baik datangnya dari Belanda maupun dari Jepang (Nani Wartabone, wawancara 3-9-1979).

Akibat dari pembumihangusan oleh VC, pemimpin-pemimpin rakyat antara lain Nani Wartabone, R.M. Kusno Dhanupojo, J.A. Pendang Kalengkongan, memulai gerakannya untuk menguasai situasi misalnya menjaga tempat-tempat yang akan dirusak oleh VC seperti jembatan Talumolo, irigasi Lomaya di Tapa, gedung Kantor

Pos dan penimbunan bahan bakar di WSG. Semangat patriotisme secara otomatis timbul dari dalam lubuk hati rakyat yang datang berbondong-bondong dari segala penjuru untuk mengusir kaum penjajah Belanda. Kegiatan selanjutnya yang dijalankan adalah penangkapan dan penawanan para pejabat pemerintah kolonial Belanda antara lain Controleur Dancona, Asisten Residen J. Korn, Hoofd Angent Staat spolie (Komandan Polisi Kota) R. Couper.

Peristiwa penangkapan dan penawanan di atas adalah merupakan kudeta yang berhasil menggulingkan pemerintahan Belanda di daerah Gorontalo, di bawah pimpinan Nani Wartabone. Pada tanggal 23 Januari 1942 terjadilah suatu peristiwa bersejarah dikibarkannya bendera Merah Putih menggantikan bendera Belanda untuk pertama kalinya di Gorontalo. Pengibaran itu diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya di depan ribuan massa rakyat bertempat di lapangan tennis Gorontalo (di muka rumah Asisten Residen).

Selesai menyanyikan Indonesia Raya, diucapkan pidato sambutan kemerdekaan oleh Nani Wartabone. Ia mengatakan antara lain bahwa mulai hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita sudah bebas dari penjajahan Belanda, bendera kita yaitu Merah Putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya (Nani Wartabone, 1977). Selanjutnya Nani Wartabone berpesan kepada rakyat agar menjaga keamanan, dilarang merampok, mencuri dan merusak.

Staf pemerintahannya disebut PPPG (Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo) yang terdiri dari :

Nani Wartabone	: Komandan Komando PPPG
J.A. Pendang Kalengkongan	: Wakil Komando PPPG
R.M. Kusno Dhanupoyo	: Bagian Sipil
A.B. Dauhan	: Pembantu.

Pusat kegiatan pemerintahan sipil dan militer menempati gedung perkantoran NV KIM atau gedung PELNI sekarang.

Untuk konsolidasi pemerintahan maka PPPG diperluas keanggotaannya dan merupakan badan eksekutif yang sempurna sesuai dengan keadaan. Susunan PPPG yang diperluas ini terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pemerintahan sipil militer | : Nani Watabone
J.A. Pendang Kalengkongan
R.M. Kusno Dhanupoyo
Jogugu dan Marsaoleh |
| 2. Sekertaris, Keuangan dan Bendahara | : Ibrahim Ilahude, H. Katili, Ibrahim Poee,
A.W. Siwy, R. Sugondo. |
| 3. Ekonomi | : Hamzah Ilahude |
| 4. BOW (PU) | : A.B. Usman |
| 5. Duane | : Mohamad Ali |
| 6. Kepolisian | : J.A. Pendang Kalengkongan |
| 7. Kehewanran | : drh. R. Wardoyo |
| 8. Kehutanan | : A. Uno |
| 9. Kantor Pos (Telepon) | : A. Ilahude |

10. Penilik Sekolah : A.L. Tamalawe
D. Lumunon
11. Keamanan : Ibrahim Muhamad.

Untuk memelihara jalannya pemerintahan di daerah-daerah, PPPG segera mengatur personalia untuk lima distrik sebagai berikut :

- R. Monoarfa : Jogugu Gorontalo
K. Datau : Jogugu Kwandang
A. Wartabone : Jogugu Limboto
I. Usman : Jogugu Suwawa
M. Hippy : Jogugu Tilamuta.

Selanjutnya PPPG mengangkat sembilan Marsaoleh untuk kesembilan Onderdistrik yang ada, masing-masing :

- Ismail Datau : Marsaoleh Kabila
Kadir Habibie : Marsaoleh Tapa
Abdurrachman Nento : Marsaoleh Telaga
A. Tahir : Marsaoleh Sumalata
B. Hadju : Marsaoleh Paguyaman
S. Bija : Marsaoleh Bumbulan
Junus Olii : Marsaoleh Atinggola
Abudi Ilahude : Marsaoleh Batudaa
A.H. Tangahu : Marsaoleh Bone Pantai.

Lembaga legislatip segera dibentuk dengan pertimbangan agar pemerintahan militer dapat seiring dengan pemerintahan sipil yang diketuai oleh Nani Wartabone.

Pemerintahan nasional di Gorontalo yang dilahirkan oleh Peristiwa 23 Januari 1942, hanya berlangsung sampai 5 Juni 1942, diakhiri setelah adanya perampasan kekuasaan pemerintahan oleh Jepang. Untuk memperingati peristiwa yang bersejarah tersebut, pada bulan Juni 1972, Komando Daerah Militer (KODAM) XII/Merdeka, melalui KODIM 1304 Gorontalo, telah menyerahkan penghargaan kepada masyarakat Gorontalo berupa didirikannya satu Tugu Peringatan di pusat peristiwa, yakni di halaman Kantor Pos Kotamadya Dati II Gorontalo.

Selanjutnya dikutip sambutan Panglima KODAM V/Jaya Mayor Jenderal G.H. Mantik dalam peringatan Peristiwa 23 Januari sebagai berikut (Mantik, 1975 : 3) ;

1. Semangat 23 Januari 1942 di Gorontalo adalah pencerminan watak merdeka, yang ikhlas mengorbankan segala-galanya bagi keutuhan Nusantara. Semangat 23 Januari 1942 Gorontalo adalah manifestasi patriotisme yang setia membela tegaknya Sang Dwi Warna;
2. Dan semangat tersebut perlu terus dikobarkan;
3. Marilah kita teruskan perjuangan membangun, mengisi kemerdekaan dengan semangat 23 Januari 1942, pantang menyerah, bersatu, demi tegaknya Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada awal Juni 1942, datanglah perutusan Jepang ke Gorontalo di bawah pimpinan Yanai. Terjadilah perubahan di mana PPPG diganti dengan Gunco Kaigi, pimpinannya tetap dipegang oleh Nani Wartabone. Akan tetapi kekuasaan Gunco Kaigi hanya berlangsung selama sembilan hari yakni antara tanggal 6 - 14 Juni

1942. Pada awal Juli 1942, ketika tentara Jepang tiba di Gorontalo, Gunco Kaigi tidak berfungsi lagi, diganti dengan Kenkanrikan. Mulai saat itu pemerintahan seluruhnya jatuh ke tangan Jepang sedangkan Nani Wartabone di jadikan sebagai penasehat saja.

Setelah Sekutu mulai melancarkan pemboman, pusat Gunco Kaigi dipindahkan ke pedalaman ke Kabila, di mana terjadilah suatu peristiwa yang mengharukan. Hal ini karena bendera Merah Putih diperintahkan turun oleh pemerintah Jepang, yang dilakukan melalui suatu upacara. Dengan disaksikan oleh umum, nampak Nani Wartabone mencururkan air mata menyaksikan penurunan bendera Merah Putih oleh Jepang.

Selanjutnya untuk memantapkan kekuasaan pemerintah sipil maka Jepang mengatur susunan pemerintahan sebagai berikut : Wilayah bekas Asisten Residen disebut Ken dan kepalanya disebut Bunkenkanrikan. Wilayah Distrik disebut Gun dan kepalanya disebut Sonco. Wilayah Distrik Bawahan disebut Fukugun dan kepalanya disebut Fukugunco. Desa disebut Son, kepala desa disebut Sonco. Di bawah Sonco ada pamong desa yang disebut Kuno (Sun Bone, wawancara 10-9-1979).

Dengan dikeluarkannya instruksi agar semua pejabat sipil datang melaporkan diri ke Langowan (Minahasa), maka semua pejabat yang dahulunya bekerja bagi pemerintah Hindia Belanda di Bolaang Mongondow pergi menghadap memenuhi instruksi tersebut. Kepada para pejabat sipil itu diperintahkan agar menyerahkan semua kontrak politik (Korte Verklaring) yang pernah dibuat dengan pemerintah kolonial Belanda. Semua tanda jasa yang pernah diberikan oleh Belanda harus diserahkan juga. Setelah itu mereka harus menyatakan sumpah setia kepada Tenno Heika. Selesai melaporkan diri maka semua pejabat sipil yang bukan orang Belanda, diperintahkan kembali menjalankan tugas seperti biasa. Raja diganti istilahnya menjadi Suco dengan tanda pengenal Suco yang dilekatkan di tangan kiri (A.H. Gobel, wawancara 12-9-1979).

Pemerintahan Jepang di Bolaang Mongondow dimulai tanggal 9 Maret 1942 yakni saat tibanya Matsuda selaku pembesar Jepang yang dikirimkan oleh Komandan Tentara Pendudukan di Minahasa. Matsuda ditugaskan mengepalai pemerintahan bekas Onderafdeeling Bolaang Mongondow (Bolaang Mongondow Bunken) dengan jabatan sebagai Bunkenkanrikan. Ia memulainya tugasnya dengan memperbaiki bekas kantor pemerintahan Onderafdeeling di Kotamobagu (Monografi Daerah BM,;). Pemerintahan Jepang tidak menempatkan pasukan tentara di daerah Bolaang Mongondow. Daerah itu hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan/peristirahatan pasukan-pasukan yang menempuh jalan darat dari Sulawesi Tengah ke Minahasa.

Pemerintah pendudukan Jepang tidak mengadakan perubahan dalam batas wilayah administrasi bekas Onderafdeeling Bolaang Mongondow, sama halnya dengan di daerah-daerah lainnya dalam wilayah Sulawesi Utara ini bahkan sampai ke Sulawesi Tengah. Selain itu, tidak diadakan pula perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan kecuali digunakannya istilah-istilah Jepang bagi jabatan-jabatan yang ada. Untuk jelasnya maka :

1. **Onderafdeeling Bolaang Mongondow** disebut **Bolaang Mongondow Bunken**;
2. **Controleur** disebut **Bunkenkanrikan**;
3. **Raja** disebut **Suco**;
4. **Presiden Raja** disebut **Renrakuin**;
5. **Kepala Distrik** atau **Penghulu** disebut **Gunco**;
6. **Kepala Onder Distrik** atau **Mayor Kadato** disebut **Fukuyunco**;
7. **Kepala Desa** atau **Sangadi** disebut **Sonco** (Manus, dkk, 1979 : 34).

Adapun pelaksanaan di Bolaang Mongondow Bunken dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut Bunkenkanrikan di mana jabatan itu selama pendudukan berlangsung, dijabat oleh Matsuda. Ia dibantu oleh seorang Sekertaris yang disebut Syokutaku, yang pada waktu itu dijabat oleh Raderi Abdulkadir Surjodirjo. Bunkenkanrikan Matsuda ini membawahi empat kerajaan yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar.

Sejak sebelum pendudukan Jepang, Kerajaan Bolaang Mongondow diperintah oleh Zelfbestuurs Commisie yakni M. Mokodompit dan H.D. Manoppo. M. Mokodompit juga merangkap jabatan Kepala Distrik (Gunco) Mongondow sedangkan H.D. Manoppo merangkap jabatan Kepala Distrik (Gunco) Bolaang. Ke dua Zelfbestuurs Commisie ini memerintah Kerajaan Bolaang Mongondow sejak diberhentikannya Raja Laurens Cornelis Manoppo oleh Belanda tahun 1938, karena dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan soal keuangan kerjaan itu.

Kerajaan Bolaang Mongondow dengan Ibukota Kotobangon, membawahi beberapa distrik dan onder distrik yang terdiri atas :

1. **Distrik Mongondow**, dengan pusat pemerintahan di Kotobangon di bawah Gunco Maks Mokodompit. Distrik ini terdiri atas dua onder distrik yakni Pasi dan Lolayan. Onder distrik Pasi terletak di dataran tinggi Mongondow terdiri dari 20 desa yakni desa Kotamobagu, Pasi, Biga, Pontodon, Mogolaing, Kotabangon, Bilalang, Pangian, Popo Mongondow, Modayag, Moyag, Komangaan, Muntoi, Bintau, Bulud, Otam, Wulud, Lobong, Manembo dan Gogagoman. Pusat pemerintahan di Pasi di bawah Fukugunco J.W. Manoppo; Onder distrik Lolayan terdiri dari 15 desa yakni Molinow, Mongkonai, Mongondow, Poyowa Kecil, Poyowa Besar, Kobo Kecil, Kobo Besar, Matali, Sinindian, Pobundayan, Kopandakan, Bungko, Mopait, Tumobui dan Tungoi; pusat pemerintahan terletak di desa Motoboi Besar di bawah Fukugunco A.B. Damopolii ;
2. **Hulu Distrik Bolaang** dengan pusat pemerintahannya di Inobonto di bawah Gunco H.D. Manoppo. Distrik terdiri dari desa-desa yakni Bolaang, Ambang, Bantik, Lolan, Mariri, Solimandungan. Distrik ini membawahi Onder distrik Lolak dengan pusat pemerintahan di Lolak di bawah Fukugunco O. Dilapanga. Onder distrik terdiri dari desa-desa yakni Lolak, Solok, Tandu, Mongkoinit, Motabang, Buntalo, Ayong, Maelang, Domisik, Sangkub dan Sauk;
3. **Onder Distrik Dumoga** adalah onder distrik yang langsung diperintah Kerajaan Bolaang Mongondow dengan pusat pemerintahannya di Kinolontagan di bawah Fukugunco B.G. Manoppo; Onder distrik terdiri dari desa-desa yakni Kinolontagan, Dumoga, Tapao, Doloduo, Tobayogan, Torosit, Dumagin dan Unggunoi;
4. **Onder Distrik Kotabunan** pusat pemerintahannya di Kotabunan, langsung di

bawah Kerajaan Bolaang Mongondow, di bawah Fukugunco M.J. Manoppo; terdiri atas beberapa desa yakni Kotabunan, Buyat, Tutuyan, Nuangan, Molobok dan Matabulu.

Tahun 1943, pemerintahan Zelfbestuurs Commisie dibubarkan oleh Jepang di mana H.J.C. Manoppo (anak raja L.C. Manoppo) diangkat sebagai raja (Suco). Demikian pula beberapa Gunco, diganti oleh Jepang. Gunco Bolaang H.D. Manoppo diganti oleh J.W. Manoppo. Fukugunco Pasi J.W. Manoppo, diganti oleh K.C. Mokoginta. Fukugunco Lolayan Arsjad B. Damopolii diganti oleh F.J.K. Damopolii. Arsjad B. Damopolii diangkat jadi Gunco Mongondow. Maks Mokodompit diangkat jadi Fukusuco (Wakil Raja) Kerajaan Bolaang Mongondow (S.A. Sugeha, wawancara 11-9-1979).

Kerajaan Bolaang Uki di Bolaang Mongondow Bunken pada ketika Jepang masuk, diperintah oleh Raja A.H. Gobel, dengan Ibukota Molibagu. Kerajaan ini tidak terbagi atas distrik-distrik karena dianggap terlalu kecil. Dalam melaksanakan pemerintahan, Raja (Suco) dibantu oleh pejabat kerajaan yang disebut Jogugu atau Raja Muda. Istilah Jogugu ini kemudian diganti dengan Fukusuco (Wakil Raja) pada waktu pendudukan Jepang. Pada masa itu Fukusuco dijabat oleh W.A. Zulhadji (A.H. Gobel, wawancara 12-9-1979).

Kerajaan Bintauna di Bolaang Mongondow Bunken, ketika Jepang masuk diperintah oleh Raja Muhamad Turadju Datunsolang, dengan pusat pemerintahan di Pimpin. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Raja dibantu oleh Presiden Raja atau Raja Muda yang disebut Fukusuco (Wakil Raja), yang pada masa itu dijabat oleh J.A.M. Datunsolang. Pejabat-pejabat kerajaan Bintauna lainnya ialah Jurutulis Kepala yang dijabat oleh C.P. Mokodenseho, dibantu dua stafnya yakni A.M. Datunsolang dan M.A. Tinumbia. Tugas dari Jurutulis ini adalah pemegang keuangan dan mengatur administrasi pemerintahan kerajaan. Di samping itu ada pengurus pertanian yang disebut mantri pertanian dijabat oleh R.M. Datunsolang. Untuk urusan kesehatan disebut mantri kesehatan, dijabat oleh H. Kolintamu. Untuk urusan jalan disebut Mandor, dijabat oleh Daeng Toleba. Pegawai-pegawai yang bekerja dalam pemerintahan ini dibeslitkan oleh Raja. Kerajaan Bintauna tidak dibagi atas distrik dan onder distrik karena terlalu kecil, hanya meliputi desa-desa yakni Pimpi, Bintauna, Padang, Talaga, Bunia, Batulinti, Bintauna Pante, Kuhanga, Mome dan Huntuk (A.M. Datunsolang, wawancara 15-9-1979).

Kerajaan Kaidipang Besar di Bolaang Mongondow Bunken, diperintah oleh Raja Ram Suit Pontoh dengan Ibukota di Boroko. Raja dibantu oleh Jogugu atau Presiden Raja yang diganti dengan istilah Renrakuin atau Fukusuco (Wakil Raja). Fukusuco adalah penanggung jawab pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari yang pada waktu itu dijabat oleh H.R. Pontoh. Ia diberhentikan tahun 1944 karena dituduh sebagai mata-mata musuh dan diganti oleh J.R. Pontoh. Selain itu terdapat pegawai-pegawai kerajaan yang terdiri Jurutulis Kerajaan, Pembantu Jurutulis dan magang. Jurutulis Kerajaan waktu itu ialah N.J. Rauma, yang bertanggung jawab atas administrasi dan keuangan. Ia dibantu oleh dua Pembantu Jurutulis yakni Djailolo Pomolango dan Male Buhang serta tiga orang magang yakni L.D. Korompot, H. Buhang dan Lati Detu Kramat.

Pada waktu itu Kerajaan Kaidipang Besar terdiri atas dua distrik (Gun) yakni Kaidipang dan Bolaang Itang. Distrik Kaidipang berpusat di Boroko di bawah Fukugunco (Jogugu) H. Buhang. Pada bulan Desember 1944 Fukugunco H. Buhang mengundurkan diri karena alasan telah lanjut usia lalu diganti oleh L.D. Korompot. Distrik Kaidipang masa itu terdiri dari beberapa desa yakni Boroko, Kuala, Bigo, Pontak, Inomunga, Sokoputa, Kumu I, Kumu II, Tuntung, Batutajam, Dolapuli, Buho, Tuntulon dan Kayuogu.

Distrik Bolaang Itang berpusat di Bolaang Itang dengan Kepala Distrik yang disebut Marsaoleh atau Fukugunco yang dijabat oleh S.M. Pontoh. Pada waktu itu distrik ini terdiri atas beberapa desa yaitu Bolaang Itang, Talaga, Tomuagu, Jambusarang, Sonoo, Olot, Pahu, Langi, Iyok, Tote, Nunuka, Mokoditek, Saleo, Bohabak, Binjeita dan Biontong (L.D. Korompot, wawancara 14-9-1979).

Ketika Belanda masih berkuasa, kerajaan-kerajaan yang ada di Bolaang Mongondow berstatus landschap di mana setiap kerajaan :

1. Mempunyai pemerintahan otonom menurut hukum adat masing-masing;
2. Mengatur keuangan dan anggaran belanja sendiri;
3. Mengatur lembaga-lembaga pemerintahan sendiri;
4. Menetapkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di seluruh wilayah onderafdeeling;
5. Menetapkan anggaran belanja dari onderafdeeling;
6. Wajib membayar pajak yang ditentukan dalam onderafdeeling;
7. Bertanggung jawab kepada Het Hoofd van Plaatselijkbestuur di Kotamobagu dalam hal ini kepada Controleur sebagai kepala Onderafdeeling Bolaang Mongondow.

Dengan masuknya Jepang, maka seluruh peraturan di atas tetap dijalankan untuk daerah-daerah swapraja, sepanjang tidak bertentangan dengan kebutuhan Pemerintah militer Jepang. (Bupati KDH, 1979 :).

B. BIDANG SOSIAL EKONOMI.

Daerah Keresidenan Manado terkenal sebagai daerah penghasil kopra sejak zaman kolonial Belanda. Menjelang masuknya tentara Jepang, hasil kopra Keresidenan Manado berturut-turut yakni Sangir Talaud 35 ribu Ton, Minahasa dan Bolaang Mongondow 63 ribu Ton, Gorontalo 6.12 ribu Ton, Teluk Tomini dan Kepulauan Togean 60 ribu Ton, Luwuk-Banggai 12 ribu Ton Donggala dan sekitarnya 16 ribu Ton, sedangkan Tolitoli dan Kwandang 16 ribu ton (Rhijn, 1941).

Dalam masa maleise, harga kopra merosot sekali sehingga mengakibatkan penderitaan di kalangan rakyat. Penderitaan itu lebih diperhebat lagi akibat masuknya tentara pendudukan Jepang, terutama karena kopra sama sekali tidak berharga di pasaran. Banyak areal tanaman kelapa terutama di daerah-daerah dataran rendah dijadikan areal persawahan sehingga kelapa yang ada harus ditebang atau dibiarkan mati. Demikian pula halnya dengan hasil perkebunan lainnya seperti pala, fuli, cengkih, kopi dan sebagainya. Perdagangan dapat dikatakan mati sama sekali karena semua kegiatan diarahkan kepada penyediaan bahan makanan bagi kepentingan perang oleh Jepang.

Sebaliknya penanaman padi semakin diintensipkan di mana padi ditanam khusus untuk keperluan perbekalan oleh Jepang. Rakyat tidak diperkenankan makan nasi. Sebagai gantinya, rakyat diwajibkan menanam tanaman pangan pengganti seperti ketela pohon, ketela rambat, pisang dan lain-lain. Di semua areal yang memungkinkan, padi wajib ditanam dua kali setahun. Hutan dan semak belukar dirombak untuk dijadikan ladang-ladang. Untuk mengamankan ekonomi perang, maka Jepang membentuk suatu organisasi yang disebut Nantaku. Tugas Nantaku ini ialah mengawasi pelaksanaan instruksi-instruksi di sektor pertanian, mengajarkan rakyat teknik-teknik pertanian ala Jepang, mengumpulkan hasil-hasil pertanian untuk keperluan perang ke gudang-gudang, serta menyalurkan bahan makanan yang tersedia untuk rakyat.

Di daerah Sangir Talaud, sebelum kedatangan tentara Jepang keadaan ekonominya dapat dikatakan telah lumpuh akibat berkecamuknya Perang Pasifik di mana daerah ini tidak luput dari serangan pemboman. Di samping itu, pemerintah Belanda di bawah pimpinan Controleur Krams dan pembantu-pembantunya dalam rangka perang Pasifik ini, telah menjalankan aksi bumi hangus dengan membakar gudang-gudang yang penuh berisi kopra untuk mencegah agar semua hasil produksi itu tidak jatuh ke tangan musuh (A. Rompas, wawancara 17-9-1979).

Setelah Jepang masuk maka mula-mula keadaan ekonomi rakyat agak baik karena Jepang baru mau membujuk hati rakyat dengan kemenangannya yang gilang gemilang, sehingga pada waktu itu diadakanlah pembagian distribusi bahan makanan berupa beras, kain sabun, garam dan sebagainya. Akan tetapi setelah Jepang di sana sini mengalami kekalahan dalam perang melawan Sekutu, menghilangkan bahan-bahan distribusi itu dan dimulailah kehidupan yang serba sulit. Bahan makanan pokok berupa beras tidak ada lagi menunggu didatangkan dari Manado, sedangkan daerah ini sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Terpaksalah dianjurkan kepada penduduk untuk menanam ubi, pisang dan lain-lain yang kemudian dijadikan sebagai bahan makanan pengganti beras. Di samping itu diolahlah sagu terutama di Sangir Besar yang terdapat di berbagai tempat. Juga kacang-kacangan terutama di Talaud seperti kacang tanah, kacang hijau, dipergiat penanamannya. Hal ini berlaku pula untuk jenis umbi-umbian di mana masa itu dikenal adanya sejenis ketela yang lazim disebut "bete talaud". Mata pencaharian rakyat Sangir Talaud lainnya adalah nelayan tetapi hanya khusus untuk keperluan sendiri (tidak diekspor).

Di daerah itu, usaha perkebunan seperti halnya di Minahasa dapat dikatakan tidak ada. Produksi utama sebenarnya adalah kopra dan pala tetapi waktu itu tidak berarti apa-apa karena tidak laku di pasaran. Sementara itu, ditempat-tempat yang dianggap berbahaya, rakyat disuruh mengungsi. Rakyat harus pula dapat menyediakan dan menyerahkan bahan makanan kepada Jepang. Selain itu rakyat harus menyediakan tenaganya untuk bekerja paksa seperti romusya. Untuk keperluan itu maka Jepang membentuk sebuah Komite Tenaga Rakyat atau KTR dengan tugas :

1. Mengumpulkan bahan makanan;
2. Mengumpulkan romusya-romusya (pekerja-pekerja kasar) untuk dipekerjakan baik di daerahnya sendiri maupun ke daerah-daerah lain;

3. Membuat benteng-benteng pertahanan.

Penderitaan rakyat semakin parah akibat menghilangnya kain sebagai bahan pakaian. Terpaksalah ada rakyat yang harus memakai karung goni dan lain-lain sebagai pengganti pakaian (Sigarlaki dkk, 1977 : 220-222).

Rakyat benar-benar sangat kekurangan sandang (pakaian) akibat tidak adanya perdagangan. Semua keperluan sehari-harian seperti kain, sabun, tembakau/rokok, minyak tanah, garam, gula dan lain-lain serba tidak ada. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, tidak ada jalan lain selain berusaha sendiri atau memanfaatkan apa saja yang ada. Untuk mendapatkan pakaian mereka menenun kain dari benang kofo, benang nenas dan memintal kapas untuk dijadikan benang. Sebagai bahan penerangan untuk lampu, dipakai minyak kelapa atau getah kenari dan biji jarak bahkan biji sejenis tanaman yang disebut "balacae".

Gula dibuat dari tebu yang diperas dengan alat buatan rakyat secara tradisional. Untuk tembakau (rokok), ada yang menanam tanaman tembakau dan ada yang mempergunakan daun pepaya atau daun-daunan lain yang cocok. Sabun cuci dibuat sendiri atau menggunakan kulit sejenis kayu yang disebut "langika", bahkan ada yang mempergunakan buah jeruk untuk mencuci pakaian. Sebagai selimut, ada yang mempergunakan karung (kalau ada) atau tikar daun. Garam dibuat sendiri dari air laut. Hewan peliharaan seperti kambing, babi, sapi, ayam dan lain-lain sering diambil begitu saja oleh Jepang untuk keperluan mereka bahkan rakyat dilarang membantai atau memakannya. Demikian pula hasil-hasil pertanian, di mana sebagian harus diserahkan kepada Jepang (Lumeling,).

Demikianlah gambaran kehidupan ekonomi rakyat di daerah Sangir Talaud. Kopra dan pala sebagai sumber keuangan rakyat tidak laku di pasaran karena sarana pengangkutan laut tidak ada. Hasil ikan para nelayan sebagai sumber penghasilan nomor dua, hanya dipergunakan untuk kepentingan dari Jepang. Ekspor dan impor macet sama sekali sehingga rakyat pada masa itu menderita sekali terutama soal sandang dan obat-obatan. Namun hal-hal di atas diimbangi oleh rakyat dengan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh kebutuhannya sendiri (Manatar, wawancara 16-9-1979).

Hal ini memang sejalan dengan rencana penguasaan Jepang terhadap Asia Tenggara (Daerah-daerah Selatan) di mana yang dipandang terpenting adalah mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk kepentingan peperangan. Sedangkan penggunaan bagi daerah sumber ini adalah merupakan tujuan utamanya. Untuk pencapaian rencana ini, Jepang melaksanakannya dalam dua tahap yakni tahap pertama, merupakan tahap penguasaan dan tahap kedua, merupakan rencana untuk jangka panjang yaitu menyusun kembali struktur ekonomi di wilayah tersebut di dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan-bahan untuk peperangan. Sedangkan struktur ekonomi yang direncanakan itu terdiri dari wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, yang diberi nama "Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" (Nugroho Notosusanto).

Selanjutnya, penderitaan rakyat di bidang sosial ekonomi di atas ditambah lagi dengan kekejaman Jepang yang melampaui batas perikemanusiaan. Banyak pemimpin rakyat yang dicurigai dan oleh karena itu tidak luput dari pengintaian

Kempetai Jepang, apabila telah di tangan Kempetai ini maka jarang yang bisa lolos dengan selamat. Hukuman mati dengan kepala dipancung adalah jenis hukuman yang lumrah pada masa itu. Hampir semua raja, jogugu termasuk kepala kampung bahkan para pemimpin agama sekalipun, tidak luput dihukum pancung kepala oleh Kempetai. Seorang pemimpin agama yakni G. Tatenkeng serta seorang dokter bangsa Hongaria bernama dr. Cesko, bersama para pemimpin rakyat, ditangkap Kempetai mula-mula sebagai tahanan kemudian dipancung kepalanya. Menurut catatan, terdapat kurang lebih 50 orang tahanan Kempei yang menjalani hukuman tersebut, antara lain (Rompas, wawancara 17-9-1979 ; Ponto, wawancara 13-9-1979) :

1. Raja Tagulandang Jacobs
2. Raja Tabukan L.P. Macpal
3. Raja Manganitu W.M.P. Mokodompis
4. Raja Kendahe Tahuna E. Bastian
5. Bekas Raja Kendahe Tahuna Ch. Ponto
6. Raja Talaud Koagouw
7. Jogugu Tagulandang B. Jacobus
8. Jogugu Ondong E. Marthing
9. Jogugu Tamako Taidi
10. Jogugu Manganitu Macakecum
11. Jogugu Kendahe Anthonie
12. Jogugu Manalu L.P. Macpal
13. Sejumlah Kapten Laut dan pejabat-pejabat lainnya.

Kuburan para korban ini sampai sekarang terdapat di Bunglawang (Tahuna) di mana dalam satu lobang sampai terdapat lima orang yang dikuburkan. Korban-korban perang lainnya terdapat juga di beberapa tempat di daerah Sangir Talaud, misalnya di Ondong Siau, pulau Para dan lain-lain (Makahanap, wawancara 19-9-1979).

Keganasan Jepang ini ternyata telah menimbulkan kebencian rakyat, sehingga beberapa orang menggabungkan diri dengan Sekutu dengan jalan berperahu menuju lautan bebas. Kemudian setelah terlihat oleh pesawat-pesawat Sekutu, mereka diselamatkan lalu dijadikan alat Sekutu untuk menghancurkan pertahanan Jepang di daerah Sangir Talaud. Di antara orang-orang itu antara lain adalah Lekang-pondang (Rompas, wawancara 17-9-1979).

Rasa antipati bahkan kebencian terhadap Jepang akibat penderitaan rakyat di bidang sosial ekonomi telah menimbulkan perlawanan terhadap Jepang. Rakyat yang diancam bahaya kelaparan di pulau Makalehi akhirnya mengadakan perlawanan terhadap Jepang yang terkenal dengan Pemberontakan Rakyat Makalehi pada awal tahun 1945. Mereka di bawah pimpinan dari Salmon Labaeng yang gugur dalam pertempuran sebagai pahlawan bangsa (Elias, 1973 ; Sigarlaki dkk, 1977 Manus dkk, 1978 : 202).

Keadaan ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Bolaang Mongondow ditujukan pula untuk kepentingan perang oleh Jepang. Rakyat diperintahkan mengolah sawah dan ladang untuk menanam padi. Karena itu banyak areal perke-

bunan rakyat yang telah ditanami kelapa dan kopi, diolah untuk ditanami dengan tanaman untuk kepentingan perang seperti padi, kapas, yute, jagung dan lain-lain. Penanaman tanaman-tanaman ini diperintahkan oleh Bunkenkanrikan Matsud melalui pemerintahan swapraja yang harus dilaksanakan oleh seluruh kerajaan di daerah Bolaang Mongondow. Rakyat juga dilarang untuk menjual hasil pertaniannya di pasaran, kecuali kepada suatu badan yang ditentukan yakni Nantaku dan Toyobo yang dibentuk oleh Jepang. Kedua badan ini dipimpin oleh orang-orang Jepang.

Kedua badan ini mempunyai cabangnya sampai ke tingkat Onder distrik (Fukugun) yang dikepalai oleh Fukugunco. Pusatnya adalah di Kotamobagu sebagai tempat kedudukan dari Bunkenkanrikan. Selain kewajiban-kewajiban di sektor pertanian di atas, rakyat setiap tahunnya diwajibkan menyerahkan 100 Kg beras yaitu pada saat-saat pemetikan padi. Penagihan beras ini menjadi kewajiban kepala desa (Sonco) dan kemudian diserahkan kepada Nantaku yang ada di setiap Onder distrik. Kepada yang menyerahkan 100 Kg beras, diberikan imbalan setiap keluarga sebanyak enam meter "kain blacu" dan kain "strep Jepang", ditambah uang sebanyak 15 yen. Semua hasil pertanian termasuk sayur-sayuran, hewan-hewan piaraan seperti ayam, kambing, sapi, babi kerbau dan sebagainya harus diserahkan kepada petugas-petugas Nantaku. Hasil-hasil pertanian dan peternakan itu dijual kepada Nantaku dengan harga yang sudah ditentukan. Kambing misalnya dibayar harganya sampai 10 yen, sapi yang besar sampai 50 yen. Ternak itu dipotong dan dibagikan sebagian kepada petugas-petugas pemerintah Jepang dan sebagian dijual di pasar kepada rakyat. Bahan-bahan kebutuhan rakyat lainnya disalurkan melalui perusahaan-perusahaan Jepang seperti gula, garam, termasuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya.

Apabila rakyat mempunyai kelebihan beras dan jagung, maka dapat dijual di pasar dengan izin dari Nantaku, Toyobo atau Nantaibo. Penduduk di wilayah Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bintauna, sering menjual beras dan jagung di pasar-pasar Bintauna, Buha, Bolaang Itang dan Boroko sedangkan rakyat di Kerajaan Bolaang Uki menjualnya di pasar Pinolosian dan Molibagu. Pasar yang terdapat di ketiga kerajaan di atas, ramai dikunjungi oleh penduduk yang kekurangan bahan makanan dari daerah Gorontalo yang diam di dekat perbatasan dengan daerah Bolaang Mongondow. Demikian juga halnya dengan rakyat di Kerajaan Bolaang Mongondow yang mendapat izin menjual, dapat menjual beras dan jagung di pasar Kotamobagu dan Inobonto. Tempat-tempat itu ramai dikunjungi oleh rakyat yang diam di Minahasa Selatan yang juga membawa dan menjual minuman keras, dan gula merah (gula aren) untuk dijual di pasar Kotamobagu dan Inobonto.

Karena daerah Bolaang Mongondow waktu itu dijadikan oleh Jepang sebagai daerah sumber produksi bahan makanan maka semua gudang besar di Kotamobagu dan tempat-tempat lainnya di sana yang menjadi milik pedagang, diambil alih oleh pemerintah pendudukan. Gudang-gudang itu kemudian dijadikan tempat penampungan bahan-bahan makanan yang dapat dikumpulkan. Pada waktu itu ternak banyak terdapat di Longagon, Kotamobagu, Lolak, Bintauna, Boroko dan

Kotabunan, yang diusahakan oleh Nantaku, sehingga rakyat tidak mengalami kesulitan bahan makanan. Kesulitan rakyat hanya terletak pada kekurangan bahan pakaian dan alat-alat rumah tangga. Rakyat banyak yang dipekerjakan di pabrik-pabrik yang memproduksi kain putih, memintal benang yang terdapat di Kotamoboro dan Boroko.

Rakyat yang berada di pesisir pantai mengadakan usaha penangkapan ikan dan dijual kepada Nantaku yang juga berusaha di sektor perikanan di seluruh daerah pesisir Bolaang Mongondow. Untuk usaha perikanan itu ada yang diberikan gaji sekedarnya untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Mengenai kopra dan hasil-hasil hutan, mulai tahun 1944 Jepang mengadakan pembelian melalui Nantaibo. Kopra dibeli dengan harga 7,5 yen perkuintal ditambah hadiah satu meter kain putih. Hasil hutan seperti damar, rotan dan kayu, diusahakan dan dibayar dengan secukupnya. Hasil-hasil ini semuanya diekspor ke luar Bolaang Mongondow melalui pelabuhan Bolaang Itang. Demikianlah kehidupan bidang sosial ekonomi rakyat di Bolaang Mongondow yang pada kenyataannya adalah mencukupi khusus untuk bahan-bahan makanan sebagai hasil kerja keras di sawah dan ladang, bekerja di pabrik yang didirikan oleh Jepang, penangkapan ikan, serta pengumpulan hasil hutan walaupun dengan pembayaran upah atau harga sekedarnya saja bagi kehidupan rakyat (Piet Manoppo, wawancara 15-9-1979).

Pada saat-saat pertama Jepang memasuki daerah Gorontalo mereka menunjukkan sikap ramah tamah terhadap rakyat untuk memberikan kesan bahwa mereka datang sebagai pembebas melawan penjajah Belanda dengan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia". Akan tetapi lama kelamaan sikap mereka berubah, bukan lagi sebagai pembebas tetapi dalam tindak tanduknya sebagai penjajah (Muh. Djibrin, wawancara 10-9-1979).

Yang paling berat dirasakan dan menyakitkan hati rakyat ialah diberlakukannya pembatasan-pembatasan bagi rakyat untuk menikmati hasil jerih payahnya sendiri dalam mengolah tanah-tanah pertanian. Hal ini karena hasilnya harus diserahkan seluruhnya untuk kepentingan ekonomi Jepang, terutama hasil beras. Jepang mengeluarkan peraturan yang melarang mengeluarkan beras dari satu daerah ke daerah lainnya tanpa mendapat izin. Di daerah Gorontalo tahun 1943 terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan di mana Palaloe bersama empat orang anaknya ditangkap dan dipancung kepala akibat terkena peraturan itu. Mereka diwajibkan menyerahkan 80 liter beras yang diperoleh sebagai upah memotong padi di Kwandang. Mereka menolak menyerahkan beras itu ketika diperintahkan oleh kepala polisi Jepang di Limboto yang bertugas mengawasi lalu lintas bahan makanan. Akibatnya mereka ditangkap lalu dihukum pancung kepala (Nani Wartabone.).

Untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan makanan, maka rakyat diharuskan menanam bahan-bahan makanan antara lain pisang, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan dan sebagainya. Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang dapat dikatakan di daerah Gorontalo tidak pernah terjadi kelaparan-kelaparan (Ointu, wawancara 12-9-1979). Di samping itu rakyat diharuskan menanam kapas untuk dijadikan bahan pakaian karena pada waktu itu sangat sulit memperoleh pakaian. Penanaman kapas ini dikordinir oleh Nantaku.

Sistem perekonomian rakyat di daerah Gorontalo pada masa itu berada di bawah pengawasan yang keras dari Jepang di mana rakyat diharuskan memproduksi hasil-hasil pertanian tetapi hasilnya hanya sebagian kecil dapat dinikmati oleh rakyat, sebagian besar adalah untuk kepentingan Jepang. Perekonomian dikuasai dan diatur oleh Jepang misalnya soal penyaluran bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat. Untuk itu pada setiap desa didirikan suatu badan yang disebut Beikokubu yang tugasnya melakukan penjualan bahan makanan yang disalurkan untuk rakyat. Untuk sandang didirikan Shikiobu sebagai badan penyalur bahan pakaian dan untuk perikanan didirikan Nantoibo.

Hubungan perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah lainnya boleh dikatakan tidak berjalan lancar, karena di samping prasarana hubungan lalu lintas kurang lancar, juga karena kondisi jalan yang buruk. Tambahan lagi yang paling menyakitkan hati rakyat ialah adanya peraturan yang melarang pengangkutan bahan makanan dari desa ke desa dengan penjagaan yang ketat oleh Jepang. Untuk sarana komunikasi antara desa ke desa dipergunakan gerobak yang ditarik oleh kuda atau sapi serta truck tetapi khusus dipergunakan untuk kepentingan Jepang. Untuk kepentingan militer, Jepang membuat jalan dari pesisir Utara Gorontalo menembus ke daerah Bolaang Mongondow yaitu di Boroko. Untuk mengerjakannya maka Jepang banyak mengerahkan tenaga rakyat secara kerja paksa dengan sistem bergilir (U. Monoarfa, wawancara 7-9-1979). Demikian pula dengan pembuatan lapangan terbang Tolotio (sekarang dinamakan Jalaluddin di mana Jepang banyak pula mempergunakan tenaga rakyat. Hal ini rupanya karena Jepang bermaksud mempertahankan daerah Gorontalo dan untuk mempercepat gerakan bantuan militer melalui udara.

Sama halnya dengan di daerah-daerah lainnya, di daerah Minahasa yang menguasai sektor perekonomian adalah badan-badan yang dibentuk oleh Jepang. Kalau dalam urusan pangan adalah tugas dari Nantaku, maka untuk urusan sandang menjadi tugas dari Toyobo. Organisasi Toyobo ini bergerak sampai di desa-desa dan mengkoordinir kegiatan rakyat dalam hal penanaman kapas. Setiap tempat yang kosong seperti di halaman rumah, tepi jalanan, halaman sekolah dan gedung-gedung lain dipenuhi dengan tanaman kapas. Petugas-petugas Toyobo menyediakan bibit, mengajarkan cara-cara menanam serta mengawasi pelaksanaannya. Ketika panen kapas, maka hasilnya harus dipungut oleh yang menanam dan harus langsung diserahkan kepada petugas Toyobo setempat.

Sarana perhubungan hampir lumpuh sama sekali. Bahan bakar untuk kendaraan bermotor sangat langka sehingga hanyalah kendaraan militer dan petugas sipil saja yang berkeliaran di jalan raya. Sarana angkutan umum bagi rakyat Minahasa adalah gerobak dan pedati, baik yang ditarik oleh kuda maupun oleh sapi. Gerobak dan pedati ini menjadi alat angkut utama antar desa dan antar kota di Minahasa. Dengan mempergunakan gerobak dan pedati ini, rakyat mengangkut hasil-hasil kebun ke rumahnya atau untuk dijual di pasar-pasar.

Untuk menjamin pertahanannya, Jepang membangun tiga lapangan terbang di Minahasa yakni Mapanget, Tawaang dan Kalawiran. Juga mereka meneruskan pekerjaan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tonsealama (dekat

Tondano) (Manus dkk, 1978 : 203). Untuk merampungkan semua proyek di atas maka Jepang mengerahkan rakyat dengan sistem semacam romusya yang disebut "giliran". Rakyat yang hampir tak punya cukup waktu untuk mengerjakan sawah ladang, diharuskan pula ikut giliran. Yang ikut giliran bukan saja rakyat tetapi juga dikerahkan sarana angkutan seperti gerobak dan pedati di atas. Dengan demikian maka hal ini turut pula melumpuhkan mobilitas perhubungan dan kegiatan perekonomian rakyat Minahasa.

C. BIDANG SOSIAL BUDAYA.

Dalam masa pemerintah kolonial Belanda, di daerah Sulawesi Utara banyak didirikan sekolah-sekolah. Semua sekolah itu ada yang didirikan oleh pemerintah kolonial dan ada pula atas usaha swasta. Menjelang masuknya Jepang, di Keresidenan Manado terdapat kira-kira 555 lembaga pendidikan yang terdiri dari 437 Volkscholen, 93 Vervolgscholen, satu Kleinhandelsschool, satu Normaal school, 7 Cursussen tot Opleiding van Volksonderwijzers, 3 MULO's dan 13 HIS8en. Khusus untuk wilayah Sulawesi Utara, badan-badan swasta yang mengusahakan pendidikan tingkat Sekolah Rakyat yaitu (Manus dkk, 1978) :

1. Sangir en Talaud Comité sebanyak 123 sekolah di daerah Sangir Talaud;
2. Minahassische Protestant de Kerk 165 sekolah di Minahasa;
3. RK Missie 30 sekolah di Minahasa;
4. Ned.Zend.Gen. Noord Celebes 24 sekolah di Bolaang Mongondow;
5. Belum termasuk yang diusahakan oleh Muhammadiyah, Badan Pendidikan Rekso Suryo, BPPI (PSII) dan yang diselenggarakan atas usaha perorangan lainnya.

Sumber lainnya mengatakan bahwa di Minahasa sudah terdapat hampir 170 sekolah yang dikelola oleh Zending menjelang berdirinya GMIM (Gereja Masehi Injili Minahasa) tahun 1934. Semua sekolah itu dikelola oleh GMIM dengan memperoleh subsidi (bantuan keuangan) dari Zending yang berpusat di Nederland. Hal ini karena beban keuangan untuk menjamin kelangsungan hidup semua sekolah itu terasa sangat berat bagi GMIM (Lintong, 1978 : 30). GMIM juga mendapat bantuan keuangan dari pemerintah f.11.000,- setiap bulan, sedang para pendeta dan guru-gurunya di gaji dan di pensiun oleh pemerintah (Lintong, 1978).

Dengan masuknya Jepang, semua sekolah yang ada diambil alih dan menjadi sekolah pemerintah (Manus, dkk, 1978 ; Lintong, 1978). Mulanya semua sekolah lanjutan dibubarkan Jepang tetapi kemudian dibuka kembali dengan status dan kurikulum yang dikehendaki Jepang, termasuk dimasukkannya bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib mulai tingkat Sekolah Dasar di samping adanya mata pelajaran Nippon Seishing. Semua sekolah dibuka mulai 5 Pebruari 1942. Bagi yang tamat Nippon Go Gakko (pengganti Sekolah Rakyat zaman Belanda) dapat melanjutkan ke sekolah lanjutan yang didirikan kemudian. Tanggal 3 Nopember 1942 didirikan Kyooiin Kanri Yooseisyo atau Sekolah Kanri sebagai tempat mendidik kader guru dan pegawai Jepang yang kelak dijadikan alat propaganda dalam masyarakat. Lamanya pendidikan Sekolah Kanri enam bulan, di mana pendaftaran pertama diikuti oleh seribu orang umur antara 18-34 tahun, dibagi setiap kelas 50

siswa, dipisahkan antara yang lelaki dan wanita (Marunduh, 1978).

Sekolah Kanri ini ditutup 5 Mei 1943 dengan satu angkatan saja yang para lulusannya langsung dipekerjakan pada sekolah dan kantor di seluruh keresidenan (Menado Syu). Mereka sangat dipercaya oleh Jepang sebagai kader dalam mempropagandakan semangat pro Jepang dengan semboyan Tiga A. Tenaga pengajarnya antara lain Kanamori dan Hoshi ditambah para guru Indonesia antaranya dua guru musik yakni Ny. Z. Kawet-Kandou dan K.H.E. Sompie (Marunduh, 1978).

Dalam bidang keagamaan, ketika Jepang masuk ada sedikit kemunduran karena banyak rohaniwan Belanda/Eropah yang ditangkap dan ditawan termasuk Ds. Locher dan Uskup Panis. (Palit, 1978 : 36- 37). Untuk menertibkan kehidupan keagamaan, maka pemerintah Jepang (Menado Syucosyoco) pada bulan Juni 1943 mengeluarkan peraturan sebagai berikut (Taulu, 1950) :

Pasal 1

Minseibu Manado memberi kelulusan kepada pemimpin-pemimpin agama membuka semua geredja dan tempat ibadat

- Melakukan ibadat jaitu saya pada hari Minggu, hal mana untuk agama Islam ditentukan pada hari Jumat.
- Akan tetapi terlarang berpidato dan membentangkan hal-hal yang bukan mengenai agama di dalam dan diluar geredja. Yang diluaskan yaitu bertahlil, bersembah yang dan berkaul.

Pasal 2

- Dilarang memaksa orang-orang memberi derma dalam Gereja.
- Dilarang membuat kebaktian pada hari Sabtu.
- Semua harus indahkan kesehatan dan taklukkan diri ke bawah pemeriksaan dokter.

Pasal 3

- Urusan-urusan tiap agama haruslah seperti urusan sebelum pecah perang.
- Dilarang berbantah-bantah tentang agama.
- Maksud, jaitulah supaya ada persatuan antara agama-agama.
- Pada sekalian pemimpin agama akan diberi satu peraturan baru oleh Minseibu tentang hal melakukan pekerjaan agama.

Dengan ditangkapnya Ds. Locher dan Uskup Panis di atas maka Ketua Sinode GMIM diambil alih oleh Ds. A.Z.R. Wenas sejak 1942 yang kemudian disahkan dalam sidang Sinode tahun 1945 (Lintong, 1978). Uskup Panis semenjak ia ditangkap maka tugas-tugas kegerejaan dilanjutkan oleh H.J.D. Tinangon. Wenas dan Tinangon ini berusaha keras agar pemerintah pendudukan mengizinkan dibukanya semua gedung gereja yang dinyatakan ditutup. Akhirnya keluarlah peraturan tersebut di atas dan mulai 18 Juni 1942, semua gedung gereja dibuka kembali untuk kebaktian umat. Namun jika isi peraturan di atas dilanggar, maka

semua gedung gereja akan ditutup kembali (Palit, 1978).

Pemerintah pendudukan di bulan itu pula mengundang semua pemimpin agama Kristen seluruh Manado Syu untuk mengadakan pertemuan di Manado. Yang hadir waktu itu adalah para rohaniwan pribumi dari organisasi GMIM, RK, Pinkster Gemeente, Pinkster Beweging, Bala Keselamatan, KGPM dan Adventis. Pada tanggal 26 Juni 1942, pertemuan itu menghasilkan terbentuknya Majelis Agama-agama Kristen (MAK) (DGW Sulutteng, 1969 ; Palit, 1978 ; Lintong, 1978). Setahun kemudian MAK dibubarkan bersamaan dengan tibanya beberapa pendeta dan pastor orang Jepang antara 1943-awal 1944. Pada tanggal 12 Januari 1944 dibukalah pertemuan para rohaniwan seluruh Manado Syu yang dihadiri oleh para rohaniwan orang-orang Jepang. Pada akhir pertemuan 30 Januari 1944, terbentuklah satu organisasi persatuan pengganti MAK yang disebut Manado Syu Kirisutokyo Kyookai (MSKK) atau Persatuan Agama Kristen Sulawesi Utara (PAKSU). Sebagai Ketua PAKSU ialah seorang pendeta Jepang bernama DS. Hamazaki (Palit, 1978 ; Taulu, 1950).

PAKSU melaksanakan program usaha-usaha bersama yang sifatnya persatuan agama. Diadakanlah Rensei Koosyuukai atau latihan kilat bagi para pemimpin agama-agama, yang diselenggarakan dari satu distrik (Gun) ke distrik yang lain. Berturut-turut diadakan rensai di Manado September 1944, Tondano September 1944, Motoling Maret 1945, Papakelan Tondano 19-26 Maret 1945, Ranolambot Mei 1945 serta di beberapa tempat lainnya (Taulu, 1950).

Tentang bidang komunikasi massa, secara umum terbagi atas komunikasi darat, laut dan udara serta melalui mass media berupa surat menyurat, surat kabar, radio dan sebagainya. Komunikasi darat sudah diuraikan di depan sedangkan komunikasi laut dan udara seluruhnya dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingan Jepang. Hanya para petugas sipil dan militer saja yang dibolehkan mempergunakan sarana komunikasi laut dan udara sesuai perintah Jepang.

Walaupun demikian, namun pemerintah Pendudukan masih memberikan kesempatan adanya perhubungan melalui pos. Sejak masa penjajahan Belanda, organisasi GMIM telah membuka daerah pekabaran Injil di luar Minahasa yaitu di Sulawesi Tengah. Selama masa pendudukan Jepang, tetap ada hubungan melalui pos dengan pendeta N.S. Tirie yang memimpin daerah pengutusan Injil Sulawesi Tengah. Tambahan lagi GMIM mendapat kunjungan dari Ds. Myahara dari Jepang pada 16-23 Juni 1942 yang mengakibatkan dimantapkannya kembali GMIM sebagai organisasi gereja di Minahasa (Lintong, 1978).

Mengenai surat kabar yang pernah terbit di Minahasa dapat dibagi atas yang ditutup menjelang kedatangan tentara Jepang dan yang tetap terbit atau diterbitkan selama masa pendudukan berlangsung. Yang ditutup menjelang kedatangan Jepang antara lain (Manus, dkk, 1978) :

1. Keng Hoa Poo, mingguan, 1923-1941, pimpinan Liem Hermanses;
2. Pedoman Tani, bulanan, 1925-1941, pimpinan Ch. Manarinsong;
3. Suara Pikat, bulanan, 1925-1942, pimpinan Ny. Loing-Kalangi, Nn. Waworuntu, Ny. Pelengkahu, Ny. Wenas, Ny. Winter-Denga, Nn. Sumolang, Ny. Moningka-Singal;

4. Omhoog, majalah pemuda berbahasa Belanda, 1928-1941, pimpinan E. Katoppo;
5. Menara, mingguan, 1934-1941, pimpinan DR. G.S.S.J. Ratulangi dan O.H. Pantouw;
6. Taman Ibu, majalah wanita suara PKIKM-GMIM, 1937 - 1941, pimpinan Ny. Wenas, Ny. Moningka;
7. Weekblad Manguni, majalah mingguan, 1939-1941, pimpinan dr. Ch. Singal;
8. Utusan, bulanan, 1940-1941, pimpinan W. Kandou.

Yang tetap terbit dan yang diterbitkan dalam masa pendudukan Jepang adalah sebagai berikut :

1. Berita Geredja, 1935-1955, oleh Sinode GMIM;
2. Sinar Baru, 1941-1956, pimpinan Henk Lumanauw dan Jan Torar;
3. Matahari Terbit, harian, 1942-1943, sebagai suara pemerintah pendudukan Jepang di Menado Syu.

Di daerah Sangir Talaud, keadaan pendidikan pada masa pendudukan Jepang berjalan seperti biasa. Hanya saja sudah tentu tidak luput dari beberapa perubahan seperti antara lain semua Sekolah Rakyat, baik sekolah gubernemen 5 kelas, sekolah gubernemen 3 kelas dan sekolah Zending, diganti namanya menjadi Sekolah Rakyat. Sebagian dari SR itu ada yang terutama terdapat di Ibukota Kejoguguan (Fukugun = kecamatan sekarang), dijadikan Sekolah Rakyat 6 kelas. Demikianlah terdapat beberapa perubahan yaitu :

- a. SR yang tadinya sebagai sekolah gubernemen 5 kelas jadi SR Negeri 6 kelas;
- b. SR yang tadinya sekolah gubernemen 3 kelas menjadi SR Negeri 6 kelas;
- c. SR yang tadinya sebagai sekolah Zending menjadi SR Masehi 6 kelas.

Semua SR Negeri tersebut point a dan b urusan pembiayaannya termasuk gaji guru ditangani oleh pemerintah pendudukan. SR Masehi (tersebut c) pengurusan-nya ditangani oleh Pengurus Umum Sekolah Masehi (PUSM) dengan mendapat bantuan berupa subsidi dari pemerintah pendudukan antara lain gaji guru-gurunya (Monografi Daerah).

Perubahan lain terdapat pula di bidang kurikulum. Jika pada masa kolonial Belanda, sekolah berorientasi untuk kepentingan penjajahan Belanda melalui mata pelajaran yang diajarkan, maka pada masa pendudukan Jepang ditujukan kepada kepentingan Jepang. Selain "tiga M" (membaca, menulis, menggambar), juga diajarkan bahasa dan huruf Jepang, baik Katakana maupun Hiragana. Di samping itu ada pembinaan mental yang sangat diutamakan sebagai latihan dasar kemiliteran Jepang (Monografi Daerah; Manatar).

Tujuan pendidikan pada masa itu tidak adalah untuk membuda yakan dan memenangkan tujuan perang Jepang. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka khusus di bidang pendidikan, Jepang memang bil langkah-langkah antara lain (Tingginehe, wawancara 18-9-1979 ; Lumeling) :

1. Murid-murid diajarkan berbahasa Jepang;
2. Sebagian besar pendidikan jasmani diberikan secara militer (bersifat militer);
3. Lagu kebangsaan Jepang juga diajarkan di sekolah-sekolah di samping kepada masyarakat;

4. Pendidikan yang diberikan oleh Jepang terutama adalah Seinendan dan Seinentai seperti misalnya Seinendan di Beo dan Seinentai di Lirung.

Sedangkan keadaan pendidikan pada masa itu dapat dikatakan sangat menyedihkan karena alat tulis menulis tidak ada. Karena buku tulis tidak ada, maka murid-murid terpaksa menulis di batu tulis dengan pecahan batu tulis. Guru-guru yang mengajar adalah guru-guru yang dulunya bertugas pada masa pemerintahan Belanda ditambah guru-guru hasil pendidikan Jepang. Sekolah-sekolah juga hanya terbatas pada Sekolah Rakyat sedangkan sekolah lanjutan belum ada sama sekali (Lumeling).

Kemudian ketika Jepang mulai mengalami pukulan akibat kekalahannya dalam perang (+ 1942/1943) maka keadaan dalam bidang pendidikan inipun mulai mengalami kemunduran di sana sini. Sekolah-sekolah tidak lagi berjalan seperti biasa. Rakyat disuruh menyingkir ke hutan-hutan sehingga anak-anak disan terpaksa ditam pung di tempat-tempat yang terlindung di mana mungkin untuk menerima pendidikan.

Jumlah sekolah di waktu itu tidak bertambah jumlahnya dibandingkan dengan zaman Belanda, malah ada yang terpaksa harus ditutup karena kesulitan dan tekanan ekonomi. Hal ini karena hasil bumi berupa kopra dan pata yang merupakan sumber penghasilan rakyat tidak ada harganya di pasaran. Tambahan lagi adanya gangguan kesehatan akibat ketiadaan obat-obatan. Bahan-bahan kebutuhan pokok terutama sandang pangan yang sukar diperoleh, sangat mempengaruhi kehidupan pendidikan. Dengan demikian tidaklah heran jika jumlah murid mulai berkurang, guru-guru banyak yang berhenti mengajar terutama karena tiadanya jaminan sosial baik dari pemerintah pendudukan maupun dari badan penyelenggara sekolah yang bersangkutan. Terhentinya jaminan sosial berupa gaji menyebabkan ada sekolah yang menggantinya dengan bahan-bahan in natura (hasil bumi) seperti ubi, pisang dan lain-lain. Namun ada juga yang tetap bertahan karena didorong atau merasa terpanggil sebagai guru yang merasa cinta akan bangsa sendiri. Dengan berhentinya guru-guru yang berijazah guru maka lowongannya diisi oleh mereka yang bukan berijazah guru karena juga merasa terpanggil untuk mendidik bangsanya sendiri, sama halnya dengan guru-guru yang tidak mau ikut berhenti. Bersama-sama mereka hanya memperoleh jaminan sosial berupa bahan makanan yang diberikan oleh para orang tua murid secara suka rela pula (Monografi Daerah; Madonsa, wawancara 18-9-1979; Sigarlaki dkk, 1977).

Dalam hal kebudayaan khususnya di bidang kesenian, maka di samping cabang-cabang kesenian asli yang sudah ada sebelumnya (seperti tari gunde, salo, bengko, upase, alabadiri, ransasahabe dan lain-lain), muncul pula cabang kesenian baru di bidang seni tari yakni tari masiroki, tari ampa wayer dan tari ronggeng. Tari ampa wayer adalah tarian yang memakai komando diiringi gerakan seperti pesawat terbang jenis B-29 (milik Sekutu) yang sering terlihat pada waktu itu. Tari ronggeng sejenis tari ampa wayer juga hanya diiringi oleh komando-komando yang disebut ronggeng (terutama di daerah Talaud). Sedangkan tari masiroki ditarikan dengan memakai tongkat diiringi sebuah nyanyian bahasa Jepang yakni nyanyian Masiroki. Tarian-tarian ini kemudian sering dipertandingkan antar sekolah-sekolah maupun

muda mudi dan anggota kelompok-kelompok masyarakat lainnya (Tatimu, 1975; Sigarlaki dkk, 1977; Amiman, wawancara 14-9-1979; Madonsa, wawancara 18-9-1979; Tingginehe, wawancara 18-9-1979).

Khusus di daerah Talaud, pada waktu itu telah dikenal tarian adat Talaud berupa tari kipas, tanam padi, lenso dan lain-lain. Di bidang seni kriya, masyarakat waktu itu telah dapat membuat pakaian dari serat manila (manila hennep) dicampur dengan serat nenas dan benang kapas dari Jepang. Pakaian adat hasil kombinasi serat ini oleh masyarakat Talaud dinamakan "lologga" (Binilang, wawancara 20-9-1979).

Dalam bidang komunikasi, sangat sulit keadaannya. Alat komunikasi antar pulau hanya dipakai perahu layar, perahu londe, perahu pelang (jenis-jenis perahu bercadik), sedangkan motor laut tidak ada. Pembuatan perahu-perahu makin digiatkan sejak dilakukannya pemboman-pemboman oleh pihak Sekutu, di mana setiap Fukugun (kejoguguan = kecamatan) diusahakan pembuatannya atas perintah Jepang. Surat menyurat tidak ada kecuali surat menyurat khusus untuk kepentingan Jepang. Perintah-perintah di bidang pemerintahan sipil hanya disampaikan kepada rakyat secara lisan saja dengan memakai bahasa Jepang (Lumeling).

Di daerah Bolaang Mongondow, sebelum Jepang masuk terdapat sekolah-sekolah baik yang diusahakan oleh pemerintah, landschap maupun swasta. Yang termasuk diusahakan oleh pemerintah disebut sekolah gubernemen. Jenis sekolah ini terdapat di seluruh Onderafdeeling di empat kerajaan yang ada yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna dan Kerajaan Kaidipang Besar. Yang termasuk sekolah gubernemen yakni BVS (Bestuurs Volksschool) 3 tahun, Vervolgschool 4 dan 5 tahun dan Vervolk Onderwijzers 2 tahun. Sekolah landschap yaitu sekolah yang dikelola oleh kerajaan dan dibiayai oleh kerajaan. Jenis-jenis sekolah seperti ini terdapat di kerajaan-kerajaan di sana.

Yang termasuk sekolah swasta yaitu yang dikelola oleh Zending (Sekolah Zending) yang dikelola oleh BPPI dan yang dikelola oleh Neutrale Particuliere School (NPS). Sekolah Zending umumnya 3 sampai 5 tahun, diasuh oleh NZG dan memperoleh subsidi dari kas landschap maupun kas Onderafdeeling. Sekolah Islamiyah diasuh oleh BPPI (Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah) yang dibentuk oleh PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) Cabang Bolaang Mongondow. Neutrale Particuliere School (NPS) diasuh oleh badan swasta yang dipimpin oleh A.E. Lewu.

Dengan didudukinya Bolaang Mongondow oleh Jepang, maka semua sekolah baik yang dulunya dikelola oleh pemerintah kolonial (sekolah gubernemen), landschap, maupun swasta diambil alih menjadi sekolah pemerintah Jepang. Semua sekolah itu memberikan Pelajaran bahasa dan kebudayaan Jepang sebagai mata pelajaran wajib. HIS yang didirikan Zending tahun 1911 diambil alih oleh landschap menjadi HIS Landschap dan pada masa pendudukan Jepang dijadikan sekolah menengah yang disebut Cogo Cugakko dipimpin oleh Hara Si Seikan, dengan para gurunya antara lain Warouw, E.P. Suling dan E. Wagey. Pada masa itu di Kotamobagu terdapat sebuah sekolah Cina yang bernama Yok Chae School pimpinan min Ho. Bahasa Belanda dilarang diberikan di semua sekolah. Penilik

Sekolah atau Shigakuin yang diangkat Jepang masa itu bernama Cons Senduk.

Di bidang kesenian, Jepang mewajibkan kesenian dansa dalam setiap pesta. Kesenian dansa menjadi salah satu acara dalam setiap pesta waktu itu. Rakyat yang menghadiri pesta-pesta wajib ikut acara dansa dan bagi mereka yang tidak mau ikut dianggap sebagai mata-mata musuh. Pada setiap pesta, tarian yang juga sering dibawakan adalah tari dana-dana, termasuk pula dalam pesta perkawinan atau mengadakan selamatan menaiki rumah baru atau selesai memetik padi.

Menjelang masuknya Jepang, di Kotamobagu dibentuk suatu badan yang disebut Badan Proto Sinode yang bermaksud untuk mendirikan gereja yang berdiri sendiri lepas dari Gereja Protestan Indonesia (GPI) atau Indische Kerk. Badan yang diketuai oleh J. Pandegiroet itu, didirikan tahun 1940. Ketika J. Pandegiroet mengundurkan diri, ia diganti oleh Guru E. Tampemawa yang bertugas sampai masuknya Jepang. Badan ini dibantu oleh seorang rohaniawan Belanda yang bekerja bagi Zending di Bolaang Mongondow yakni Pendeta H.J. Nijenhuis. Pendeta Belanda ini ditangkap Jepang bersama isterinya pada tanggal 12 Januari 1942 dan ditawan di penjara Manado. Dengan demikian selama masa pendudukan Jepang, Zending di Bolaang Mongondow dipimpin oleh pendeta-pendeta pribumi antara lain Pendeta Luther Kolopita dan Pendeta P. Kolopita (Rumagit, 1979).

Pimpinan Badan Pekerja Proto Sinode kemudian dijabat oleh H. Lumanauw dan kemudian kembali dipegang oleh J. Pandegiroet. Kebaktian-kebaktian berjalan seperti biasa walaupun Jepang melarang mengadakan khotbah. Banyak inventaris dan sebagian uang kas gereja dirampas oleh Jepang. Dalam masa pendudukan Jepang, pemeluk agama Kristen di Bolaang Mongondow tercatat 16 ribu orang, terdiri dari 7000 orang Minahasa, 5000 orang asal Sangir Talaud dan 4000 orang asli Bolaang Mongondow (Manus, 1978 ; Rumagit, 1979 ; A.E. Lewu, wawancara 19-9-1979).

Di daerah Gorontalo, pada masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah berjalan seperti biasa hanya setiap sekolah wajib memberikan pelajaran bahasa dan kebudayaan Jepang. Bahasa Indonesia tetap dijadikan bahasa pengantar, sebaliknya dilarang mempergunakan Bahasa Belanda. Dengan demikian maka kedudukan bahasa Indonesia menjadi penting dan karenanya semakin berkembang.

Semua sekolah tingkat SR diinstruksikan berjalan seperti biasa. Kemudian Jepang membuka sekolah-sekolah lanjutan, antaranya yang dinamakan Sho Gakko (Sekolah menengah pertama umum) dan sekolah menengah kejuruan. Sekolah lanjutan satu-satunya di Gorontalo didirikan di kota Gorontalo di tahun 1942 yang disebut Tooko Gakkuen (Taman Pelajaran Cahaya Timur). Gedungnya menempati gedung sekolah milik HCS atau SMA Negeri sekarang. Sekolah itu kira-kira setingkat dengan SMP dengan mata Pelajaran melulu ekonomi (Polontalo, 1977).

Tahun 1943 didirikan Sekolah Ekonomi Pertanian atau Noomin Doojoo 3 tahun bertempat di desa Bongoime kecamatan Kabila. Sekolah ini sebagai tempat mendidik penyuluh pertanian yang akan ditempatkan di desa-desa untuk mengajarkan cara-cara pengolahan tanah pertanian secara intensip (pemakaian pupuk, teknik pengolahan tanah dua kali setahun untuk mempertinggi produksi pertanian

dan sebagainya). Pada tahun itu juga didirikan sebuah sekolah guru yang disebut Yoo Seijoo. Juga sekolah pertukangan atau Ko Ngio untuk mendidik tenaga-tenaga yang trampil di bidang pertukangan. Sekolah Kasei (kira-kira setingkat SKKP) didirikan untuk mendidik wanita dalam berbagai ketrampilan rumah tangga. Sekolah milik swasta misalnya Sekolah Islam tetap ada antara lain Madrasah Muhammadiyah di Potanga dan Wongkaditi, juga Taman Pendidikan Az Zakirat di Heledulaa (Tario Po Oe, wawancara, 7-9-1979).

Warisan seni budaya daerah Gorontalo sejak zaman dahulu tetap tumbuh, berkembang dan dipelihara oleh masyarakat. Pada masa pendudukan Jepang, seni budaya daerah tetap berkembang dalam masyarakat terutama dalam hal adat istiadat Uduwo lo Limo lo Pohalaa (Dari dua hingga jadi lima kerajaan yang berserikat), maksudnya menjelaskan tentang adat istiadat kerajaan-kerajaan di Gorontalo, dimulai dari waktu jumlahnya hanya dua kemudian berkembang menjadi lima kerajaan (hingga masuknya Belanda). Adat istiadat dimaksud, walaupun kerajaan sudah dihapuskan sejak tahun 1889 (sesuai Staatsblad 1889 No. 96 dan No. 250), namun tetap dipertahankan bahkan menjadi sendi kehidupan kemasyarakatan di daerah Gorontalo (Manus, dkk 1978 ; Liputo XII, 1949: Haga, 1931).

Kegiatan-kegiatan sosial budaya khususnya dalam kegiatan gotong royong seperti motutulungia (tolong menolong sesama manusia) dan dembulo (bantuan atau sumbangan bagi keluarga yang berduka), tetap berlangsung seperti biasa. Demikian pula halnya dengan seni budaya seperti mobarajanji, momalebohu, pakadanga, mojorigge, tonggobi dan molinggolo (Hintulangi Nadjamuddin, wawancara 3-9-1979). Dapat ditambahkan bahwa hampir 100% penduduk Gorontalo beragama Islam. Namun kepercayaan lama seperti kepercayaan kepada makhluk halus (motolohuta), kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib dan sakti (hulobalangi), tetap dimiliki oleh masyarakat di sana (Tumenggung Sis dkk, 1977 : 39) Manus dkk, 1978).

Dalam bidang komunikasi massa, khususnya surat kabar, terdapat beberapa yang diterbitkan di daerah Gorontalo. Antaranya harian Kesatuan di bawah asuhan Sjarifuddin Panigoro; Persaudaraan di bawah asuhan Karel Panamon; juga Suara Pemuda dipimpin oleh M.S. Ointu, George Bokings dan Azis Hipy (Anwar Haras, wawancara 7-9-1979).

Para langganan sekalian surat kabar itu pada umumnya adalah guru-guru serta mereka yang tahu dan mengikuti tingkat perjuangan kemerdekaan di masa itu. Untuk mengantarkan surat kabar kepada para langganan yang tersebar di desa-desa dipakai kuda sehingga disebut pos kuda. Hal ini karena kondisi jalan yang kurang baik untuk jenis angkutan lainnya sehingga hanya cocok dengan berkuda. Kalau sebelumnya kaum nasionalis sudah puas dengan berlangganan surat kabar dari Jawa, Medan dan Aceh, maka adanya surat kabar daerah dirasa sangat perlu untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mereka yang tersebar di desa-desa, walaupun dalam format atau ukuran yang sangat sederhana sekalipun. Dengan masuknya Jepang maka semua surat kabar di atas masih diperkenankan untuk terbit beberapa kali lagi. Akhirnya dilarang terbit dan pemerintah pendudukan menggantinya dengan Kodomo Shinbun yang merupakan majalah berbahasa

D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN KEGIATAN ORGANISASI POLITIK/SOSIAL DAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL

Sebelum pendaratan dilakukan, Jepang aktif menyiarkan propaganda politik melalui Radio Tokyo yang dapat ditangkap sampai di daerah ini. Dikatakan bahwa Jepang hendak memerdekakan bangsa-bangsa Asia dari tangan penjajah Barat termasuk bangsa Belanda. Oleh karena itu dianjurkan hendaknya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Jepang sebagai sesama bangsa Asia dengan Jepang sebagai "saudara tua". Dan dengan pimpinan Jepang hendak diwujudkan "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya".

Ketika Jepang mendarat di daerah ini, berkumandanglah propaganda "Jepang-Indonesia sama-sama ne" yang maksudnya yakni hendak menerangkan bahwa Jepang dan Indonesia adalah berkulit sama dan telah datang sebagai pembebas dari bangsa yang berkulit putih, dalam hal ini Belanda. Juga ada semboyan "Nippon-Indonesia joto" maksudnya persekutuan antara Jepang dan Indonesia adalah baik demi kepentingan bangsa-bangsa Asia khususnya bangsa Indonesia, serta semboyan-semboyan lainnya yang dikumandangkan di mana-mana. Tidak sedikit rakyat Indonesia di Sulawesi Utara ini yang segera termakan oleh propaganda/semboyan di atas dan menganggap bahwa Jepang memang bersungguh-sungguh untuk melepaskan Indonesia dari tangan penjajah Belanda.

Toko-toko asing dibuka dengan paksa dan rakyat disuruh mengambil akan isinya (Palit, 1978) sedangkan bendera Merah Putih diizinkan berkibar di samping bendera Hinomaru. Bendera Merah Putih berturut-turut dikibarkan di Tahuna 10 Januari 1942, di Gorontalo 23 Januari 1942 bahkan juga sampai di Sulawesi Tengah (Manus, 1978). Di Minahasa para tokoh nasionalis membentuk "Komite 9" untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Belanda tetapi kemudian dibubarkan Jepang dan kepada para pegawai sipil masa Belanda diperintahkan untuk tetap bekerja seperti biasa. Para tawanan politik masa Belanda dibebaskan oleh Jepang antaranya ialah G.E. Dauhan, O.H. Pantouw, M.B. Tumbel dan J.U. Mangowal yang kemudian menggerakkan rakyat untuk membantu Jepang (Taulu, 1950; Wowor, 1977).

Ketika pemerintahan Pendudukan mulai mantap, maka rakyat mulai lagi hidup seperti sebelum adanya pemerintahan Jepang. Kegiatan olah raga diaktifkan lagi dan tidak dihalang-halangi oleh pemerintah pendudukan bahkan mendorong dilakukannya kegiatan-kegiatan seperti itu termasuk kesenian.

Dalam bulan juni 1942, lapangan sepak bola di Tikala Manado menjadi ramai lagi dengan pemuda-pemuda pria dan wanita yang mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga secara sendiri-sendiri. Kegiatan para pemuda ini menarik perhatian para pembesar Jepang seperti Kodama dan Kato yang kemudian turut terjun dan langsung turut melatih para pemuda di sana. Untuk menyalurkan minat para pemuda dalam bidang olah raga, maka kedua orang Jepang itu menginisiatipkan pembentukan wadah organisasi olah raga pemuda, bersama-sama seorang tokoh bernama Mononutu. Dengan pimpinan Kodama, Kato dan Mononutu, maka pada 15 Juli

1942, terbentuklah di Manado suatu badan keolahragaan, Hadir dalam pertemuan pembentukan itu, kira-kira 30 tokoh pemuda dari seluruh Minahasa.

Tahun 1943, wadah keolahragaan itu diperluas lagi dengan mencakup juga bidang kesenian. Wadah inilah yang mengadakan Pekan Olah Raga dan Kesenian pada 1 - 14 Oktober 1943. Pekan tersebut diadakan di lapangan Sparta Tikala Manado dan juga mempergunakan gedung pemerintahan kota (Manado Si) di bagian Timur lapangan tersebut. Pekan tersebut turut diikuti oleh kontingen-kontingen yang datang dari seluruh Keresidenan (Manado Syu). Mereka datang untuk mengikuti pertandingan catur, sepak bola, basket, tinju, bridge, yudo, kendo, silat, bilyard dan sebagainya. Pertandingan kesenian meliputi menyanyi, orkes keroncong, dansa, termasuk orkes keroncong, kecantikan dan seni lukis. Direncanakan akan diadakan pula Pekan Olah Raga dan Kesenian tahun 1944 tetapi tidak dapat terlaksana berhubung semakin gentingnya situasi peperangan, di mana Manado dan kota-kota lainnya di Minahasa mendapat giliran pemboman oleh pihak Sekutu (Taulu, 1950).

Sebagai tambahan dalam bidang pendidikan, sebagaimana sudah dikemukakan di depan, semua sekolah diambil alih oleh pemerintah pendudukan-menjadi sekolah pemerintah. Tanggal 5 Maret 1942 di Manado dibuka Manado Nippon Go Gakko I, pada 28 Maret 1942 dibuka Manado Nippon Go Gakko II, bulan April di Kakaskasen didirikan Noomin Dooyoo, 3 Nopember 1942 didirikan di Manado satu Manado Gaku En. Tahun 1943 di Manado didirikan Manado Cuu Gakko, Tondano Cuu Gakko, Tomohon Syihan Gakko dan Tondano Kyooiin Yoosei Syo. SR zaman Belanda disebut Koo Gakko (Sompie, 1979).

Usaha-usaha menanamkan semangat pro Jepang dilakukan pada semua tingkat pendidikan dan di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengimbangnya, maka tokoh-tokoh nasionalis di Minahasa antaranya Arnold Mononutu, B.W. Lapien, G.E. Dauhan, O.H. Pantouw dan A.B.H. Waworuntu, senantiasa mengingatkan rakyat terutama para pemuda, agar tidak sampai terpengaruh sedemikian rupa sehingga melupakan sasaran perjuangan nasional mencapai kemerdekaan. Usaha-usaha mereka telah menghasilkan terbentuknya AMI (Angkatan Muda Indonesia) di Manado sekitar 1943-1944. Untuk menyelubungi maksud AMI yang hendak memperjuangkan kemerdekaan, maka AMI mengadakan kegiatan-kegiatan olah raga dan secara diam-diam para tokoh di atas membina semangat kemerdekaan kepada para anggotanya. Keanggotaan AMI terbatas di sekolah saja yakni pada Manado Nippon Go Gakko I dan II. Mereka yang menjadi anggota antara lain Elsie Dauhan, Kitty Dauhan, Ida Pantouw, Eddy Gagola, John Rahasia, Fried Parengkuan, Filip Parengkuan, Bert Salaki, Net Raming, Dee Raming, Kari Lolong dan lain-lain di mana beberapa anggota AMI ini kemudian menjadi unsur utama dalam organisasi BPNI yang dibentuk akhir Agustus 1945 (Sompie, 1979; Wowor, 1977; Bujung, 1971).

Tentang interaksi di daerah Sulawesi Utara dengan kegiatan organisasi politik/sosial dan kejadian bersejarah di tingkat nasional, dapat diikuti melalui sejumlah organisasi yang dibentuk selama masa pendudukan Jepang di daerah ini. Sekalian organisasi tersebut, berturut-turut akan disampaikan berikut ini

1. GERAKAN TIGA A

Di tingkat nasional, Gerakan Tiga A dipimpin oleh Mr. Raden Samsudin. Gerakan Tiga A dibentuk 29 April 1942 di Jakarta bertepatan dengan hari lahir Kaisar Hirohito. Gerakan ini bekerja dengan satu semboyan yakni "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia". Propaganda utama dari Gerakan Tiga A yaitu "melepaskan bangsa Asia dari genggaman Barat" (Sihombing, 1962).

Di daerah Sulawesi Utara, propaganda Gerakan Tiga A ini dikumandangkan di mana-mana. Semboyan gerakan sebagaimana di atas selalu menjadi bahan pidato para pemimpin tentara pendudukan maupun aparat pemerintahan sipilnya. Namun di Minahasa sendiri, sebagai pusat pemerintahan pendudukan, tidak pernah diketahui diben tuknya organisasi Gerakan Tiga A dimaksud.

Di daerah Gorontalo, setelah masuknya tentara Jepang 6 Juni 1942, tidak lama kemudian dibentuk organisasi Gerakan Tiga A yang, dengan semboyan-semboyannya, berusaha untuk membangkitkan tekad rakyat agar mendukung dan berdiri sepenuhnya di belakang pemerintahan pendudukan. Nani Wartabone, seorang tokoh nasionalis di sana, diajak Jepang bekerja sama mempropagandakan Gerakan Tiga A. Namun ajakan itu ditolaknya berhubung ternyata Jepang melakukan tindakan yang sangat merugikan rakyat Gorontalo antara lain penurunan bendera Merah Putih awal Juli 1942. Tetapi Jepang tetap melaksanakan propaganda gerakan ini melalui setiap pertemuan kelompok masyarakat terutama dalam rapat-rapat terbuka yang diadakan oleh Pemerintah Jepang.

Di dua daerah lainnya yakni Bolaang Mongondow dan Sangir Talaud, tidak terdengar berita dibentuknya gerakan ini oleh rakyat di sana. Untuk daerah Sangir Talaud, sejak Jepang menguasai daerah ini, mereka melakukan tindakan-tindakan yang demikian kejamnya sehingga mematikan kemauan rakyat dalam berorganisasi dan berpolitik. Di bawah kekejaman Jepang itu, rakyat tunduk tanpa berani berbuat sesuatu untuk menghindarkan kecurigaan pihak Jepang. Walaupun sikap rakyat di atas dapat dikatakan hanya berlangsung pada permulaan masa pendudukan, namun hal itu telah menyebabkan rakyat menjadi buta politik/buta organisasi sama sekali. Tidakkah mengherankan bahwa meskipun Jepang menggembar-gemborkan politiknya melalui Gerakan Tiga A, namun kurang mendapat sambutan di sana. Demikian pulalah halnya dengan organisasi-organisasi yang dibentuk kemudian seperti PUTERA, Keimin Bunka Syidosyo dan sebagainya (Madonsa, wawancara 18-9-1979).

2. Gerakan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat).

Latar belakang pembentukan PUTERA ini ialah mengarahkan segala kekuatan dan tenaga rakyat untuk memberi bantuan kepada usaha-usaha mencapai kemenangan terakhir bagi Jepang dalam peperangannya melawan Sekutu. Melalui PUTERA maka Jepang hendak mengajak para pemimpin dan rakyat Indonesia memikul kewajiban bersama untuk melaksanakan maksud dan tujuan pemerintahan militer Jepang di Indonesia sampai ke daerah-daerah (Sartono Kartodirdjo dkk., 1975).

Organisasi Gerakan PUTERA didirikan 1 Maret 1943 dan diresmikan dalam upacara peringatan setahun jatuhnya Hindia Belanda 9 Maret 1943 di Jakarta. Gerakan PUTERA dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis Indonesia tetapi berada di bawah penilikan yang keras dari Jepang. Para tokoh itu dikenal sebagai "Empat Serangkai" yakni Ir. Sukarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Kiyai Hadji Mas Mansur (Sihombing, 1962).

Di daerah Sulawesi Utara, khususnya hanya ada di daerah Gorontalo. Dua tokoh nasionalis di sana yakni Nani Wartabone dan A.J. Usman, diajak oleh Jepang untuk turut memegang pimpinan Gerakan PUTERA tetapi ditolak oleh keduanya yang mengakibatkan Gerakan ini kurang mendapat sambutan dari rakyat di sana. Oleh karena itu, maka Gerakan PUTERA tidak lama kemudian dibubarkan oleh Jepang.

3. KEIMIN BUNKA SYIDOSYO (BADAN PUSAT KEBUDAYAAN)

Di daerah Sulawesi Utara, khususnya di Gorontalo, Badan Pusat Kebudayaan ini lebih menonjol pelaksanaannya melalui bidang pendidikan. Di mana-mana murid sekolah menerima gemblengan sedemikian rupa agar mereka memiliki dan bersemangat Jepang. Tradisi lainnya yang harus dilakukan oleh para pelajar itu ialah wajib mempelajari dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang "Kimigayo" dan lagu-lagu lainnya dalam melakukan gerak badan (pendidikan jasmani) yang disebut taisho.

Murid-murid diharuskan melakukan Kinrohosi (kerja bakti) misalnya memperbaiki/membersihkan jalan-jalan, sekolah, asrama, mengumpulkan bahan-bahan keperluan peperangan berupa makanan dan di samping itu melakukan latihan jasmani serta latihan kemiliteran. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah di samping wajib mempelajari dan menggunakan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib. Para pelajar diharuskan menghormati adat kebiasaan Jepang.

4. ORGANISASI KEPEMUDAAN (SEINENDAN, SEINENTAI, GAKUKO-TAI)

Di tingkat nasional, gerakan Seinendan diresmikan berdirinya pada 9 Maret 1943 (Sihombing, 1962). Gerakan ini dimulai di pulau Jawa dengan dibentuknya Jawa Seinendan di kota Semarang, lalu menyebar ke setiap kota dan desa di sana. Di daerah Sulawesi Utara, sejalan dengan politik pemerintah pendudukan dalam hal penggemblengan pemuda, juga telah dibentuk barisan-barisan Seinendan di setiap desa. Yang didaftarkan sebagai anggota Seinendan adalah para pemuda yang putus sekolah dan diberikan latihan baris berbaris oleh Jepang (Palit, 1978). Dengan demikian maka khususnya di Minahasa, pada waktu itu terlihat adanya kegiatan-kegiatan organisasi Seinendan di bawah pimpinan Sonco (kepala desa) masing-masing. Tugas Seinendan itu adalah membantu Sonco di dalam tugas-tugas keamanan di desa.

Di daerah Sangir Talaud, walaupun diduduki oleh pasukan-pasukan Kaigun (Angkatan Laut) tetapi banyak juga dijumpai pasukan-pasukan Rikugun (Angkatan Darat). Pasukan Kaigun membentuk Seinendan sedangkan pasukan Rikugun

membentuk Seinentai di daerah itu, untuk menampung para pemuda. Usaha pertama pembentukan Seinendan dan Seinentai itu dimulai dengan meminta para Sonco agar mengirimkan dua orang pemuda, yang akan dilatih oleh Jepang. Mereka kemudian memperoleh latihan baris berbaris, menjaga keamanan, pertahanan, menembak, palang merah, pertanian (membuka kebun) dan lain-lain. Di kemudian hari ternyata bahwa latihan-latihan yang diberikan kepada para pemuda melalui Seinendan dan Seinentai ini, dimanfaatkan untuk perjuangan menentang Belanda. Hal tersebut nyata di bulan Juni 1948 di mana beberapa anggota bekas Seinendan dan Seinentai pimpinan Gottfried Ontorael disertai beberapa anggota antaranya Wando Ontorael, Johan Ontorael, Julius Majöre, Encauras Majöre, Abdon Maninggolan dan Ebsan Unsong, berhasil mengibarkan bendera Merah Putih. Kejadian itu berlaku di Talaud yaitu di rumahnya Jafet Amiman di Esang (Kecamatan Esang). Mereka merebut bendera Belanda lalu merobek warna birunya, kemudian mengibarkan bendera Merah Putih di sana (Amiman, wawancara 14-9-1979).

Di daerah Gorontalo, ketika Jepang masuk ke sana maka semua organisasi kepanduan yang ada dibubarkan, kecuali organisasi Pandu SIAP (milik PSII) dan Pandu Hizbul Wathon (milik Muhammadiyah) yang masih diperkenankan berdiri. Akan tetapi, kemudian sekaliannya dibubarkan dan semua pemuda di sana ditampung ke dalam organisasi Seinendan. Para tokoh yang aktif dalam Seinendan bentukan Jepang ini antaranya H. Hipy, Ibrahim Mahmud dan A.J. Usman (Wantogia, wawancara 6-9-1979). Di Gorontalo, Seinendan didirikan di setiap desa di mana para pemuda diberikan latihan baris berbaris dan juga latihan dasar kemiliteran lainnya. Mereka adalah merupakan barisan cadangan yang bertugas mengamankan garis belakang, apabila peperangan berkecamuk di daerah itu.

Di daerah Bolaang Mongondow, Jepang membentuk pula barisan-barisan Seinendan. Komandan Seinendan untuk seluruh Bolaang Mongondow Bunken ialah Bunkiyokan Cous Senduk. Sebagai langkah pertama pembentukannya ialah mengirimkan empat pemuda untuk dididik di Tomohon (Minahasa). Keempat pemuda itu masing-masing seorang dari setiap kerajaan yakni :

1. Abdurrachman Mokobombang dari Kerajaan Bolaang Mongondow;
2. Abdul Rasjad van Gobel dari Kerajaan Bolaang Uki;
3. Raisji Muhamad Datunsolang dari Kerajaan Bintauna;
4. Piet Sompi dari Kerajaan Kaidipang Besar.

Di Tomohon, yang menjadi Komandan Latihan Seinendan ialah Sompi (bukan yang dikirim dari Bolaang Mongondow) dan sebagai wakil komandan latihan ialah Wangko Remba Talasa (anak raja Poso). Keduanya langsung bertanggung jawab kepada kepala Pemerintahan Militer Manado Syu.

Selesai mengikuti latihan, keempat pemuda itu kembali ke Bolaang Mongondow dan melaporkan diri kepada Cous Senduk selaku Bunkiyokan. Selesai melapor, mereka diperintahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan segera membentuk barisan-barisan Seinendan sampai pada tingkat desa.

Keempat pemuda yang telah mengikuti latihan di atas masing-masing menjadi Komandan Seinendan di tingkat kerajaan dari mana mereka berasal. Sebagai

komandan, mereka disebut Seinendan Kanji dan mendapat/menjalankan perintah dari kepala perusahaan Jepang (Toyobo) yang ada pada setiap kerajaan di sana. Kepala Toyobo tingkat kerajaan dan distrik di Bolaang Mongondow, langsung bertindak mewakili Bunkenkanrikan Matsuda yang memimpin bekas Onderafdeeling itu.

Kemudian dalam pelaksanaannya, Komandan Seinendan (Seinendan Kanji) untuk kerajaan Bolaang Mongondow Abdurrachman Mokobombang, mendapat perintah dari Bunkiyokan Cous Senduk, dan pimpinan Toyobo di Kotamobagu dan Fukugun-fukugun (onderdistrik- onderdistrik) di sana. Di Kaidipang Besar, Seinendan Kanji Piet Sompi mendapat perintah dari pimpinan Toyobo di sana yang dipegang oleh seorang Jepang bernama Matsuda. Di Bintauna, Seinendan Kanji Raisji Muhamad Datunsolang mendapat perintah dari pimpinan Toyobo di sana yang dipegang oleh S. Ishida. Demikian pula untuk Seinendan Kanji Bolaang Uki Abdul Rasjad van Gobel yang juga mendapat perintah dari pimpinan Toyobo setempat.

Dengan usaha para Seinendan Kanji di setiap kerajaan, maka pada setiap desa terbentuklah barisan-barisan Seinendan yang dikepalai oleh kepala desa (Sonco) yang bersangkutan. Dengan demikian maka kepala desa di samping tugasnya juga merangkap tugas sebagai komandan Seinendan tingkat desa dan disebut sebagai Seinendanco.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang menjadi tugas dari Seinendan Kanji di setiap kerajaan di daerah Bolaang Mongondow yakni :

1. Membentuk barisan Seinendan di setiap desa;
2. Setelah Seinendan desa terbentuk, mengerakkannya untuk usaha-usaha di sektor pertanian antara lain membuat saluran-saluran irigasi;
3. Mengerahkan Seinendan untuk pembuatan jalan dengan membantu pelaksanaan tugas dari dinas pekerjaan umum (Sobukuka); antaranya dalam usaha membuka jalan dari Manado ke Gorontalo melewati daerah Bolaang Mongondow; Pimpinan Sobukuka waktu itu dipimpin oleh Nakamura;
4. Turut membantu rakyat di sektor pertanian terutama pada waktu menanam dan memetik padi.

Selain tugas-tugas di atas, Seinendan juga ditugaskan untuk membantu kelancaran perpindahan pasukan yang mempergunakan jalan darat dari daerah Bolaang Mongondow ke Gorontalo yaitu dengan membantu mengangkat kebutuhan-kebutuhan perang serta menyediakan konsumsi untuk pasukan-pasukan Jepang itu.

Para anggota Seinendan bekerja atas dasar sukarela dengan tidak memperoleh gaji dari pemerintah pendudukan, selain hanya memperoleh jaminan berupa rokok, makanan selama bertugas, serta diberikan pakaian dari bahan "kain blaco" atau "strep Jepang". Berbeda dengan romusya, para anggota Seinendan tidak dikirimkan ke luar wilayah pemerintahan kerajaan masing-masing. Bagi para anggotanya, tidak didaftarkan lagi sebagai tenaga kerja paksa di perkebunan-perkebunan kapas dan yute dan juga tidak diberikan tugas turut menjaga keamanan di desanya masing-masing (R.M. Datunsolang, wawancara 12-9-1979).

5. ORGANISASI KEMILITERAN / SEMI MILITER KEIBODAN

Untuk membantu tugas-tugas keamanan dari kepolisian Jepang, maka mereka membentuk suatu barisan pemuda yang pada mulanya di Minahasa disebut Bogodang. Para pemuda yang terdaftar dalam Bogodang kemudian Keibodan ini, diberikan latihan kemiliteran dan kepolisian. Dalam bidang kemiliteran, mereka dilatih memegang dan mempergunakan senjata yang selama latihan berlangsung, sebagai senjata dipakai sebuah bambu runcing. Dalam bidang kepolisian, mereka dilatih menjaga keamanan dalam desa. Latihan-latihan itu dimaksudkan untuk menghasilkan pemuda-pemuda trampil yang bersemangat Jepang untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam menjaga dan meningkatkan keamanan di lingkungan di mana mereka berada. Di Minahasa, Keibodan tingkat desa dikordinir dan dipimpin oleh kepala desa (Sonco), sama halnya dengan pemuda-pemuda yang tergabung dalam Seinendan (Palit, 1978).

Di daerah Sangir Talaud, Jepang juga mengadakan pendaftaran pemuda-pemuda setiap desa untuk dididik menjadi anggota Keibodan yaitu sebagai barisan pembantu polisi. Untuk tingkat kejuguguan (Fukugun = kecamatan sekarang), dibentuk oleh Jepang suatu barisan pembantu polisi yang mereka sebut "jumpo" (Madonsa, wawancara 18-9-1979 ; Binilang, wawancara 20 - 9 - 1979; Nugroho, ; Tompo, wawancara 14-9-1979).

Di daerah Talaud yang menjadi Raja (Suco) ialah Koagouw. Ketika Jepang memberikan instruksi kepada para Suco di seluruh Sangir Talaud untuk mendaftarkan pemuda-pemuda yang akan memperoleh latihan kemiliteran, Suco Koagouw mempergunakan kesempatan itu untuk memperoleh pemuda-pemuda terlatih militer yang akan dipergunakan melawan Jepang. Terdaftarlah kira-kira 60 pemuda dari kerajaan Talaud yang akan mengikuti latihan itu. Untuk menyembunyikan maksud yang dikandung raja itu, maka para pemuda tersebut didaftarkan di bawah kode "MX" yang berarti musuh atau mata-mata musuh. Tapi malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih, kode "MX" itu berhasil diketahui oleh Jepang. Suco Koagouw segera ditangkap, disiksa, diinjak-injak lalu dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh mempersiapkan pemuda yang akan melakukan tugas sebagai mata-mata musuh. Setelah lewat beberapa hari, Jepang menyatakan bahwa raja tersebut telah hilang, melarikan diri entah ke mana perginya (Lumeling, ; Amiman, wawancara 14-9- 1979).

Di daerah Gorontalo, Jepang membentuk pula barisan-barisan pemuda yang tergabung dalam Keibodan. Sebagai pasukan semi militer, para Pemuda itu diharapkan turut serta dalam sistem pertahanan Jepang melawan Sekutu. Hal ini ditempuh oleh Jepang berhubung kemunduran-kemunduran yang dialaminya dalam peperangan melawan Sekutu. Para pemuda yang memiliki semangat nasionalisme Indonesia itu kelak nantinya akan turut serta bersama-sama Jepang mempertahankan tanah air sendiri melawan setiap ancaman yang akan datang.

Di daerah Bolaang Mongondow, organisasi Keibodan yang ada di sana dibentuk oleh Jepang dengan mempergunakan jalur pemerintahan kerajaan, sama halnya dengan di daerah Sangir Talaud. Para pemuda yang selesai mengikuti

latihan-latihan kemiliteran melalui Keibodan, ditugaskan menjaga keamanan di desanya masing-masing. Yang mengkoordinir Keibodan di desa-desa ialah para Sonco masing-masing. Di tingkat Fukugun dan Gun, Keibodan dipimpin oleh Fukugunco atau Gunco yang bersangkutan, yang bertugas membantu polisi di tingkat Fukugun atau Gunco tersebut. Untuk tingkat Kerajaan, maka Keibodan dipimpin oleh kepala polisi kerajaan yang ditugaskan untuk mengatur pelaksanaan tugas Keibodan di wilayahnya. Polisi Kerajaan sejak zaman Belanda, ada di setiap kerajaan yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna dan Kerajaan Kaidipang Besar. Di tingkat Bunken maka Keibodan dipimpin langsung oleh Bunkenkanrikan yang berkedudukan di Kotamobagu.

Di tingkat desa, Keibodan ditugaskan untuk menjaga keamanan dalam desa masing-masing di bawah pimpinan Sonco. Mereka dilatih dan dipersenjatai dengan bambu runcing dan tugasnya ialah mengatasi kekacauan apabila terjadi dalam desa. Selain itu mereka dijadikan sebagai penghubung antar desa dengan desa dan antara desa dengan tingkat Fukugun, misalnya dengan mengantarkan surat-surat kepala desa (Sonco). Jadi mereka juga bertugas sebagai sarana komunikasi di samping tugasnya menjaga keamanan (Piet Manoppo, wawancara 16-9-1979).

HEIHO.

Di tingkat nasional, pemberitahuan yang pertama tentang kesempatan menjadi "serdadu pembantu" dikeluarkan antara bulan April - Mei 1943. Barisan Heiho ini adalah semacam milisi Indonesia, tetapi dari lapisan masyarakat bawah. Barisan Heiho dibentuk dan dibagi sesuai kesatuan tingkat kompi (tsutai) dan tingkat peleton (sotai). Komandan di tingkat tsutai maupun sotai beserta stafnya adalah orang Jepang sedangkan pasukannya terdiri dari orang Indonesia. Pakaian seragam, tanda pangkat (beda dalam warna), gaji dan jaminan bagi Heiho, sama dengan Heitai (perajurit Jepang). Hanya bagi Heiho tidak diberikan pakaian upacara militer. Heiho dimasukkan sebagai bagian yang resmi dalam struktur organisasi angkatan perang Jepang dan terdiri dari Kaigun Heiho dan Rikugun Heiho. (Sihombing, 1962).

Di daerah Sulawesi Utara, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk barisan Heiho. Anggota-anggotanya dipilih di antara mereka yang dipercaya oleh Jepang misalnya para anggota kepolisian. Sebagaimana diketahui, ketika Jepang masuk maka semua anggota kepolisian Belanda di daerah ini langsung dijadikan anggota kepolisian Jepang, kemudian juga dilatih pemuda-pemuda untuk dijadikan polisi Jepang. Dari antara para anggota kepolisian itu, dipilihlah sejumlah orang yang akan dilatih sebagai anggota Heiho. Mereka dikumpulkan di Manado dan sekitar bulan Desember 1943 diangkut dengan kapal selam menuju ke Surabaya untuk menerima latihan di sana (Rotty, wawancara 20-9-1979).

Di daerah Gorontalo, pada tahap berikutnya diadakan pendaftaran pemuda-pemuda yang akan dilatih sebagai anggota Heiho. Beberapa pemuda yang didaftarkan itu antara lain dapat disebutkan yakni Hasan Bunga, Ishak Salola dan Djamaluddin Sadikin. Mereka bersama-sama para pemuda lainnya dikirimkan ke Makasar (sekarang Ujung Pandang) untuk menerima latihan Heiho di sana (Rachman, wawancara 10-9-1979).

Di daerah Sangir Talaud, diadakan juga pendaftaran pemuda-pemuda untuk dididik sebagai anggota Heiho. Ketika Jepang menyerah, maka Belanda mendaftarkan kembali para bekas Heiho di sana untuk dijadikan anggota tentara KNIL. Di antara mereka itu yakni Sumurung, bekas kepala desa Soataloara di Tahuna. Juga Ahmad Tompo yang sekarang sebagai Wakil Ketua DPRD-II Sangir Talaud. Para pimpinan Heiho waktu itu antaranya bernama Sinsuw, Lahunduitan dan lain-lain (Madonsa, wawancara 18-9-1979 ; Tompo, wawancara 14-9-1979).

PPI (PASUKAN PEMUDA INDONESIA).

Sejak September 1944, Minahasa mendapat giliran pemboman oleh pesawat-pesawat Sekutu, sehingga sebagian besar kota terutama Manado mengalami kerusakan berat. Akibatnya maka pusat pemerintahan Manado Syu dipindahkan dari Manado ke Tondano di pedalaman. Markas Besar tentara Jepang dipindahkan pula ke sana dan ditempatkan di Tonsealama (dekat dengan Tondano).

Tapi tanggal 10 Februari 1945, kota Tondano mendapat pula giliran serangan Sekutu di mana antara lain gedung gereja GMIM Tondano hancur. Serangan dan kehancuran yang dialami Jepang menyebabkan mereka semakin berusaha mendekati rakyat agar mau mendampingi mereka dalam peperangannya melawan Sekutu.

Untuk menjajaki kemungkinan ikut sertanya rakyat terutama pemuda di Minahasa dengan rencana mereka mengerahkan tenaga menghadapi Sekutu itu, maka pemerintah pendudukan di Minahasa mengundang beberapa tokoh pemuda untuk mengadakan pertemuan. Pimpinan pertemuan itui alah Yonomura yang bertindak mewakili pemerintah pendudukan. Para pemuda di Minahasa diwakili oleh Henky M.L. Legoh, Andie Masengi, Victor Adam, Kayang Gosal dan beberapa tokoh pemuda lainnya. Pertemuan itu diadakan 15 Februari 1945 di Seretan Tondano.

Dalam pertemuan itu lahirlah kata sepakat dimana para pemuda Indonesia bersedia ikut serta membantu Jepang menyusun kekuatan untuk melawan Sekutu. Para pemuda Indonesia itu akan diorganisir dalam suatu barisan semi militer yang disebut Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). Disetujui oleh kedua belah pihak bahwa semua barisan yang dibentuk oleh Jepang selama ini, akan dileburkan ke dalam PPI. Barisan-barisan dimaksud adalah Seinendan, Keibodan, Kai In Yooseiso, Mi Hari In, Kaigun Heiho, Rikugun Heiho dan lainnya, semuanya akan dilebur dan menjadi Pasukan Pemuda Indonesia. Dengan demikian pada pertemuan itu, lahirlah suatu organisasi semi militer yang terdiri dari pemuda-pemuda, baik yang belum maupun yang sudah pernah menerima latihan militer dari Jepang. Direncanakan juga akan menggabungkan para pegawai Indonesia yang sementara bekerja pada instansi-instansi pemerintah penduduk (Legoh, 1973), Namun sampai beberapa bulan kemudian, tindak lanjut kegiatan dalam rangka PPI tidak pernah terdengar. Kegiatan PPI kemudian muncul lagi setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

BOO EI TEISINTAI

Maksud Jepang dengan membentuk PPI rupanya adalah untuk mengetahui apakah para pemuda Indonesia bersedia bekerjasama dengan mereka untuk memerangi pihak Sekutu. Oleh karena itu tindak lanjut peleburan semua organisasi

yang dibentuknya (Seinendan, Keibodan dan lain-lain) tidak segera dilaksanakan sesuai janjinya dalam pertemuan 15 Pebruari 1945 itu.

Beberapa bulan kemudian, Jepang secara sepihak membentuk satu organisasi pemuda yang baru yang dinamakan Boo Ei Teisintai. Kedalam barisan semi militer ini, akan digabungkan semua organisasi yang dahulunya sesuai rencana dan janji mereka, akan digabungkan ke dalam PPI. Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa Boo Ei Teisintai ini adalah penjelmaan kerjasama antara Jepang dengan rakyat/pemuda untuk bahu membahu melawan Sekutu.

Organisasi semi militer Boo Ei Teisintai ini dibentuk kira-kira pada pertengahan tahun 1945 di Tondano. Yang menjadi Komandan (Daidanco) ialah Wangko F. Sumanti yang diangkat oleh Jepang. Sebagai suatu pasukan, maka Markas dari Boo Ei Teisintai berkedudukan di Tondano. Dalam tahap pertama dileburkan Seinendan, Keibodan, Kai In Yooseiso dan Mi Hari In. Untuk tahap kedua sesuai rencana akan dileburkan Kaigun Heiho dan Rikugun Heiho lengkap dengan persenjataannya, yang berada di bawah komandan Laksamana Muda K. Hamanaka dengan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Takasaki. Tapi ternyata kemudian bahwa peleburan tahap kedua tidak dapat dilaksanakan sampai Jepang menyerah kalah. Organisasi Fujinkai (Wanita-wanita) tidak dimasukkan ke dalam rencana peleburan tahap pertama dan kedua di atas. Para anggota pasukan yang tergabung dalam Boo Ei Teisintai ini menerima latihan kemiliteran yang keras sekali dari para instruktur Jepang. (Wowor, 1977, Sompie 1979).

PASUKAN PTA (PEMBELA TANAH AIR)

Sejak dileburnya semua barisan yang dibentuk oleh Jepang ke dalam Boo Ei Teisintai, maka para anggotanya memperoleh latihan militer yang intensip dari Jepang. Kepada mereka dijanjikan senjata-senjata untuk dipergunakan melawan Sekutu bersama-sama tentara Jepang yang memper-tahankan wilayah Manado Syu (Bekas Keresidenan Manado). Namun sayang sekali rencana Jepang itu tidak dapat terlaksana karena didahului oleh penyerahannya kepada Sekutu 14 Agustus 1945.

Setelah mengetahui bahwa pemerintahnya telah menyerah, maka Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Manado Syuciji sekaligus sebagai Panglima tentara Jepang di wilayah ini, segera mengatur rencana penyerahan pemerintahan sipil dan kekuatan militer kepada rakyat Indonesia. Pemerintahan sipil penyerahannya sudah dilakukan di Tondano tanggal 21 Agustus 1945 dan dua hari kemudian diserahkan kekuatan-kekuatan militer, yang kesemuanya dilakukan dalam suatu upacara.

Untuk menerima penyerahan kekuatan militer maka Jepang secara tergesa-gesa membentuk suatu pasukan yang dinamakannya Pasukan Pembela Tanah Air (Pasukan PTA). Panjinya sama dengan bendera Merah Putih dan bergambar seekor banteng menyeruduk dan bertulisan PTA di sudut kanan atas. Pasukan ini adalah pengganti Boo Ei Teisintai yang dipimpin oleh Daidanco W.F. Sumanti. Dengan terbentuknya Pasukan PTA maka W.F. Sumanti diganti oleh P.A. Tiendas dengan jabatan Hulubalang Besar Pasukan PTA, dibantu oleh seorang Pembantu Utama Hulubalang (kira-kira setingkat Kepala Staf), yang namanya tak diketahui lagi.

Dalam upacara tanggal 23 Agustus 1945 yang diadakan di Tondano, Panglima tentara Jepang yang diwakili oleh Letnan Kolonel Takasaki selaku kepala Staf, menyerahkan panji dari Pasukan PTA kepada Hulubalang Besar P.A. Tiendas. Dengan upacara itu maka resmilah didirikan Pasukan PTA di mana sebagai pemimpin militer maka P.A. Tiendas tidak diangkat oleh Jepang tetapi oleh pemerintah sipil yang sudah mulai memerintah 21 Agustus 1945 di bawah Residen E.H.W. Pelengkahu. Hulubalang Besar P.A. Tiendas ini memiliki staf yang terdiri dari beberapa perwira Indonesia, antaranya G.E. Dauhan, yang menangani urusan-urusan politik dari pasukan itu (Sompie, 1979).

Bersamaan dengan upacara penyerahan militer tersebut, didirikan pula di Tondano sebuah Akademi Militer sebagai wadah pendidikan perwira-perwira untuk Pasukan PTA. Pimpinan Akademi Militer Tondano itu ialah W.F. Sumanti dengan kedudukan selaku Direktur Akademi. Kepala Staf Akademi itu ialah Inspektur Polisi Samsuri sedangkan Kepala Administrasi ialah K.H.E. Sompie. Para instruktur terdiri dari orang Indonesia dan orang Jepang. Para pengajar/instruktur Indonesia antara lain Hidajat SH, dr. R.C.L. Senduk, O.H. Pantouw, G.E. Dauhan, E.D. Johannes SH dan lain-lain (Wowor, 1977). Dapat ditambahkan bahwa para pengajar/instruktur Indonesia di atas semuanya adalah tokoh-tokoh nasionalis yang kemudian memegang peranan besar dalam perjuangan menghadapi Belanda yang kembali untuk menjajah wilayah ini. Namun disayangkan bahwa baik Pasukan PTA maupun Akademi Militer Tondano ini, hanya dapat aktif kira-kira sebulan saja berhubung diinstruksikan untuk dibubarkan oleh Laksamana Muda K. Hamanaka sepulangannya dari Morotai untuk menghadap Panglima Tentara Sekutu yang akan menerima penyerahan wilayah Keresidenan Manado dari tangan Jepang.

6. PENERAHAN ROMUSYA

Di tingkat nasional, pengerahan tenaga Romusya dimulai sekitar tahun 1943. Untuk mengkordinir urusan romusya maka Departemen Dalam Negeri (Naimubu) di Jakarta, membentuk dinas tersendiri yang disebut Romukyoku. Pada mulanya pengerahan romusya dilakukan secara sukarela tetapi karena rakyat mulai mengetahui pengalaman dan penderitaan mereka yang sudah lebih dahulu masuk romusya, maka kemudian pengerahannya dilakukan secara paksa melalui jalur pemerintahan sipil yang ada. Untuk menutupi penderitaan para romusya maka Jepang menyebut mereka sebagai "perajurit ekonomi" atau "pahlawan-pahlawan" yang menjalankan "kewajiban suci" terhadap usaha peperangan melawan Sekutu (Si-hombing, 1962).

Di daerah Sulawesi Utara, pemerintah pendudukan juga mengerahkan tenaga-tenaga sukarela untuk membangun atau menyelesaikan obyek-obyek militer dan obyek-obyek vital lainnya untuk kepentingan pertahanan. Di Minahasa, lapangan terbang Mapangget (sekarang lapangan terbang Sam Ratulangi) yang sudah dimulai pembuatannya sejak zaman Belanda, dilanjutkan oleh Jepang dengan mengerahkan tenaga-tenaga sukarela. Pengerahan tenaga sukarela ala romusya ini di Minahasa disebut "giliran", maksudnya para pekerja dikerahkan dari desa-desa secara bergilir mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Jepang.

Selain lapangan terbang Mapanget, juga romusya dikerahkan untuk melanjutkan pembuatan lapangan terbang Kalawiran dekat danau Tondano, tidak jauh letaknya dengan Pangkalan Air Tasuka di danau itu. Juga romusya dikerahkan untuk membuat lapangan terbang baru yaitu lapangan terbang Tawaang di kecamatan Tenga' sekarang ini. Selain itu dikerahkan juga untuk meneruskan penyelesaian PLTA Tonsealama, termasuk lobang-lobang perlindungan bawah bukit untuk tempat berlindung sekaligus gudang makanan dan mesiu. Lobang perlindungan bawah bukit tersebar di mana-mana di seluruh Minahasa, antaranya dijumpai di Manado, Tonsealama, Tomohon dan Kawangkoan.

Untuk melaksanakan tugas romusya (giliran) ini, maka rakyat dikerahkan demi desa dan disatukan dalam kelompok distrik di tempat melakukan pekerjaan. Setiap kelompok wajib tinggal di lokasi selama sebulan dan diatur bergilir untuk bekerja siang malam. Sesudah itu mereka dapat kembali ke desa asalnya untuk diganti dengan kelompok yang lain. Pada mulanya, bahan makanan untuk kelompok disediakan oleh Jepang tetapi kemudian harus diusahakan sendiri dalam hal ini harus disediakan oleh penduduk desa dari mana kelompok itu berasal. Selain tenaga manusia, untuk pekerjaan giliran atau romusya itu, dikerahkan juga gerobak, dan pedati lengkap dengan sapi atau kudanya. Romusya dikerahkan juga untuk membuat garam di pantai-pantai sekitar Minahasa. Karena beratnya pekerjaan dan kurangnya jaminan hidup, maka banyaklah di antara para romusya itu yang menderita sakit bahkan meninggal dunia di tempat bekerja (Palit, 1978).

Di daerah Bolaang Mongondow, pengerahan romusya dilakukan untuk mengerjakan jalan, kebun kapas dan yute termasuk dipekerjakan di kebun bahan-bahan obat di sana. Rakyat dikerahkan berkelompok desa masing-masing dan langsung dipimpin oleh para anggota Seinendan atau Kaibodan yang berasal dari desa bersangkutan. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan di atas diawasi dengan kerasnya oleh anggota-anggota Kempetai dan Tokeitai. Bagi yang lalai atau menolak bekerja maka ditindaki dengan kejam oleh orang-orang Jepang itu. Pengerahan tenaga romusya ini lamanya antara seminggu sampai sebulan dengan memperoleh upah hanya sebesar lima yen.

Pemerintah pendudukan di Bolaang Mongondow diserahkan tugas untuk membuat jalan yang menghubungkan Minahasa dengan daerah Gorontalo melalui daerah Bolaang Mongondow. Jalan ini berfungsi sebagai sarana untuk kelancaran lalu lintas pasukan dan perbekalan militer antara Manado dan Gorontalo lewat Kotamobagu dan pesisir Utara Bolaang Mongondow. Untuk itu maka rakyat Bolaang Mongondow dikerahkan sebagai romusya dan bekerja hanya dalam batas wilayah kerajaan masing-masing, sampai ke perbatasan dengan daerah Gorontalo yaitu di sungai Ayong dan sungai Kayuogu. Untuk jalan yang di daerah Gorontalo, dikerjakan oleh romusya yang dikerahkan Jepang di sana ditambah yang asal dari Buol dan Toli-toli. Jalan darat di Gorontalo itu melalui lapangan terbang di Isimu (Tolotio) sampai ke kota Gorontalo.

Tanggung jawab pelaksanaan pembuatan jalan di Bolaang Mongondow berada di tangan Dobobu (urusan pekerjaan umum) di Kotamobagu. Dengan selesainya jalan yang menghubungkan Minahasa dan Gorontalo melalui Bolaang

Mongondow di tahun 1944, maka gerakan-gerakan pasukan dan perbekalan militer menjadi lancar. Di daerah ini merupakan tempat peristirahatan bagi pasukan yang menuju maupun dari Minahasa, antaranya mereka beristirahat/singgah di Kotamobagu, Inobonto, Bintauna, Bolaang Itang dan Boroko. Di tempat-tempat itu, sesuai perintah, para anggota Seinendan dan keibodan mengerahkan tenaga romusya untuk menjamin perbekalan tentara dan mengangkut akan perlengkapan militer mereka selama mereka di sana sampai berangkat ke tempat tujuannya (R.M. Datunsolang, wawancara 13-9-1979).

Para romusya dikerahkan juga untuk bekerja di perkebunan-perkebunan kapas dan yute yang ada di Bolaang Mongondow. Mereka dipimpin oleh orang-orang Jepang yang bekerja untuk Nantaku. Selain kebun kapas dan yute, Nantaku membuka kebun obat-obatan dengan mengerahkan tenaga romusya. Di kebun obat-obatan itu ditanam berjenis-jenis tanaman bahan obat seperti tali pahit, rumput dukung anak, mayong benua, sambilato, kaki kuda, kayu kita (kayu telur) dan sebagainya. Beberapa orang Jepang dari Nantaku yang terkenal kejam antara lain bernama Hatori, Maeda, Cukuda, Marukawa (Tunggali, wawancara 17-9-1979). Beberapa anggota Tokeitai dan Kempeitai yang terkenal kejam dalam pengerahan romusya antara lain : Takamoto, Takasi, Fuisaiki dan lain-lain (R.M. Datunsolang wawancara 13-9-1979 ; Tunggali, wawancara 17-9-1979).

Di daerah Gorontalo, pengerahan romusya dilakukan untuk mengerjakan lapangan terbang Tolotio dan jalan yang ada di sana. Pada mulanya pengerahan dilakukan secara sukarela yang diambil dari para petani di desa-desa. Hal ini dengan mudah dilakukan berhubung rakyat masih terpengaruh akan propaganda Jepang untuk menciptakan "Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya".

Lama kelamaan pengerahan dilakukan secara paksa di mana bagi mereka yang membangkang diberikan hukuman yang amat berat. Pengerahan tenaga romusya tidak saja terbatas bagi pria dewasa, tetapi juga diharuskan bagi kaum wanita apalagi para pemuda di sana. Karena para petani pada umumnya diwajibkan melaksanakan romusya, maka hal itu amat besar pengaruhnya dalam produksi pertanian. Oleh karena itu di Gorontalo pada masa itu, mengakibatkan penderitaan yang hebat di kalangan rakyat terutama petani, yang di samping bekerja mengolah tanah-tanah pertanian, wajib juga bekerja sebagai romusya.

Sama halnya dengan di daerah lainnya, pemerintah pendudukan juga mengerahkan tenaga rakyat dalam bentuk romusya yang dipilih dari desa-desa di sana. Mereka diangkut ke luar daerah Sangir Talaud dan dibawa ke Labuhan Uki (Bolaang Mongondow), ke Banggai (Sulawesi Tengah) dan ke Kao (Halmahera-Maluku Utara). Sebagian lagi dipekerjakan untuk kepentingan Jepang di dalam daerah sendiri seperti membuat tempat-tempat perlindungan/pertahanan termasuk mengerjakan ladang untuk produksi bahan makanan tentara. Para romusya ini umumnya sangat menderita di tempat di mana mereka bekerja, karena selain tidak diperhatikan soal jaminan hidup dan jaminan kesehatan, juga diperlakukan secara kejam sekali. Banyak di antara mereka yang menemui ajal di tempat bekerja dan tidak pernah kembali lagi.

Akibat menerima perlakuan yang amat kejam ditambah kekurangan jaminan

hidup dan jaminan kesehatan, maka di antara para romusya itu banyak yang berusaha dan berhasil melarikan diri dari tempat bekerja. Yang dari luar daerah berhasil meloloskan diri dan kembali ke Sangir Talaud dengan naik perahu. Mereka kemudian menceritakan Pengalaman pahit dan mengerikan yang dialami selama dikerahkan sebagai romusya oleh Jepang dan mengajak rakyat yang ada untuk memberontak terhadap Jepang.

Sehubungan dengan larinya para romusya di atas, maka pada masa itu lahir lah jenis tarian rakyat yang dinamakan "tari ampa wayer". Tarian ini digubah berdasarkan ceritera para romusya itu yaitu ceritera tentang pengalaman yang menyedihkan ketika di tempat kerja mendapat serangan pesawat-pesawat pembom bermesin empat (B-29) milik Sekutu. Ceritera disampaikan sambil meniru-niru gerak gerik pesawat yang menukik atau oleng ke kiri dan ke kanan, dalam usaha mencapai sasaran bom yang tepat. Dari ceritera dan gerakan-gerakan pesawat tersebut, diciptakanlah tari ampa wayer seperti sudah disampaikan di atas. Tarian ini kemudian menjadi populer di kalangan rakyat di masa Jepang bahkan sejak itu dipertandingkan oleh anak-anak sekolah, pemuda-pemudi maupun masyarakat umumnya sampai sekarang (Madonsa, wawancara 16-9-1979).

Kekejaman demi kekejaman yang dilakukan oleh Jepang di daerah Sangir Talaud ini, semakin menimbulkan rasa kebencian dan dibalik itu semakin mempertebal rasa persatuan, patriotisme dan nasionalisme di kalangan rakyat. Perlawanan yang dikobarkan rakyat Makalehi pimpinan Salmon Labaeng misalnya, dapat dikemukakan sebagai contoh bangkitnya persatuan, patriotisme dan nasionalisme melawan Jepang. Karena melihat bahwa kedudukan mereka di kalangan rakyat semakin lama semakin berbahaya, maka untuk menghindarkan balas dendam, banyak di antara orang-orang Jepang itu yang melarikan diri baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan ke luar dari daerah Sangir Talaud. Ada yang terang-terangan lari dengan perahu ke Manado atau ke daerah lain (Bolaang Mongondow, Sulawesi Tengah dan lain-lain), dan ada pula yang diam-diam berangkat ke Philipina atau langsung kembali ke Jepang (Makahanap, wawancara 18-9-1979).

7. ORGANISASI KEWANITAAN (FUJINKAI)

Pada tingkat nasional, Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Batas umur terendah untuk jadi anggota barisan Fujinkai adalah 15 tahun dan tidak ada batas maksimum. Tujuannya adalah "membantu balatentara Jepang dengan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukan wanita penduduk asli serta mempertinggi derajat kesusilaan wanita". Perincian tugas Fujinkai yakni :

- a. Mengutamakan kesederhanaan dan berusaha sating latih-melatih sambil mempertinggi derajat kesusilaan wanita;
- b. Mengadakan Zigyobu atau bagian usaha yang permanen atau darurat sifatnya, untuk menjalankan pekerjaan yang perlu dalam lapangan memperbaiki penghidupan di belakang garis peperangan dan dalam lapangan usaha menabung, pendidikan, keselamatan umum dan kesehatan;
- c. Memajukan kesehatan tubuh dengan jalan mengadakan pidato-pidato pada rapat-rapat tentang ilmu tubuh manusia, kesehatan dan makanan;

- d. Menanam keinsafan kewajiban wanita dalam usaha penjagaan negeri di waktu peperangan, terutama tentang memberi penerangan pertolongan pertama dengan jalan mengadakan pidato-pidato atau mendirikan kursus-kursus, serta merapatkan perhubungan dengan Seinendan dan Keibodan;
- e. Mengadakan hubungan yang rapat dengan sekolah-sekolah dan menegaskan pidato-pidato dan latihan tentang pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak dan murid di luar sekolah dan dalam rumah tangga (Sihombing 1962).

Di wilayah Menado Syu (Keresidenan Manado), pembentukan organisasi wanita yang disebut Fujinkai itu, dilaksanakan juga di desa-desa yang ada di sana. Para wanita didaftarkan lalu dilatih dalam tugas-tugas tertentu sesuai harkatnya sebagai wanita. Di tingkat desa, anggota-anggota Fujinkai dikoordinir dan dipimpin oleh kepala desa (Sonco) yang bersangkutan, sama halnya dengan Barisan Seinendan. Anggota Fujinkai disini tidak diberikan latihan kemiliteran seperti halnya dengan para anggota Seinendan, Keibodan dan sebagainya. Oleh karena itu maka Jepang tidak memasukkan Fujinkai sebagai organisasi yang sedianya akan dileburkan ke dalam PPI, Boo Ei Teisintai ataupun Pasukan PTA.

8. KOMITE TENAGA RAKYAT (KTR).

Menyadari semakin gentingnya situasi peperangan yang tidak menguntungkan Jepang, maka di Sulawesi Utara mereka berusaha merangkul para tokoh nasionalis untuk bekerja sama dengan mereka. Dibentuklah di Tondano sebagai pusat pemerintahan pendudukan Menado Syu pada 28 September 1944, sebuah organisasi yang dinamakan Komite Tenaga Rakyat disingkat KTR. Sebagai Ketua ialah G.E. Dauhan. Anggota KTR berjumlah 12 orang yakni :

C.P. Hermanses, F.W. Kumontoy, M.B. Tumbel, A.J. Wafalangi, J. Jocom, J.I. Permata, F. Intama, J. Lengkong, drh. W.J. Ratulangi, O.N. Pakaja, Lie Beng Tiok, K.H.E. Sompie.

Dilihat susunan keanggotaannya, maka KTR dianggap cukup mewakili daerah-daerah Minahasa, Sangir Talaud, Gorontalo ditambah wakil golongan minoritas Cina dan pemuda (Sompie 1979, Harian Lensa Utara, 19-4-1978).

Selesai pembentukan KTR dilanjutkan dengan upacara untuk merayakan perwujudan kerjasama antara Jepang dengan para tokoh nasionalis Minahasa. Upacara dipimpin langsung oleh Laksamana Muda K. Hamanaka bertempat di gedung gereja milik GMIM di Tonsealama 28 September 1944. Hamanaka di dampingi oleh para pembesar sipil dan militer termasuk dinas Ryoomintai dan Sendenbu. KTR ini berfungsi sebagai lembaga legislatif yang mendampingi Menado Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka yang memimpin daerah Sulawesi Utara/Tengah.

Sejak terbentuknya maka KTR menggiatkan usaha menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat sebagaimana dimaksudkan Jepang tetapi dalam kenyataannya melalui pidato para anggotanya, selalu membangkit-bangkitkan semangat nasionalisme menentang segala bentuk penjajahan. Seorang tokoh nasionalis asal Bolaang Mongondow yang dipenjarakan Jepang, atas usaha KTR

telah dilepaskan. Tokoh itu bernama A. C. Manoppo. KTR dalam usahanya di bidang pertanian membentuk Noogyo Teisintai atau Pasukan Bakti Tani dipimpin oleh Taico K.H.E. Sompie dibantu Frans Rumokoy dan Robert Wenas. Dalam bidang politik, KTR menolak usaha yang ada sejak zaman Belanda yang hendak menjadikan Minahasa sebagai propinsi ke 12 dari Nederland. Menjelang kekalahan Jepang, maka KTR memberanikan diri mengajukan tuntutan agar Jepang menyerahkan pemerintahan kepada rakyat Indonesia di Sulawesi Utara/Tengah (Sompie, 1979).

9. MENADO SYUKAI GI IN

Pada awal tahun 1945, diadakan penambahan 15 anggota baru KTR yakni :

E.H. W. Pelengkahu	J.P. Mongula	H. Sumarauw
O.H. Pantouw	J. Palamani	P. Pandeiroth
Singo Uno	Nani Wartabone	H.D. Tinangon
F. Kairupan	J.U. Mangowal	dr. Ch. Singal
R. Wantalangi	Tom Olli	Koesno Dhanupojo.

Selain adanya penambahan 15 anggota baru, diadakan penggantian Ketua dari G.E. Dauhan kepada E.H.W. Pelengkahu. Juga fungsi KTR diroboh dari badan penasehat menjadi semacam Badan Perwakilan dan disebut Menado Syukai Gi In. Sekitar bulan April 1945, fungsinya diroboh lagi menjadi Badan Persiapan Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia untuk wilayah Menado Syu (Keresidenan Manado) (Sompie, 1979 ; Kempen, 1953 ; Wowor, 1977).

Dalam masa jabatan Ketua E.H.W. Pelengkahu ini, dilakukan pernyataan penolakan kedudukan Minahasa sebagai propinsi ke 12 Nederland, menguatkan penolakan yang sudah pernah dikemukakan oleh KTR sebelumnya. Dengan perobahan-perobahan fungsi di atas, membuat Badan ini semakin berani mengajukan tuntutan agar Jepang segera menyelenggarakan penyerahan pemerintahan sipil untuk Menado Syu kepada orang Indonesia. Sumber lainnya menambakan bahwa keanggotaan Badan Persiapan ini diperluas dengan beberapa anggota lagi antaranya dr. R.C.L. Senduk, D.A.Th. Gerungan, H.D. Manoppo, B.W. Lopian dan E.R.S. Warouw. Bulan Agustus 1945 namanya diroboh lagi menjadi Panitia Kemerdekaan Indonesia Sulawesi Utara/Tengah (Wowor, 1977). Panitia inilah yang mempersiapkan diri untuk menerima penyerahan pemerintahan dari tangan Jepang sejak 15 Agustus 1945. Pada hari itu Panitia telah menunjuk calon pemegang jabatan sebagai berikut :

- E.H.W. Pelengkahu sebagai Residen
- G.B. Kullit sebagai Kepala Bidang Pemerintahan
- E. Katoppo sebagai Kepala Bidang Pendidikan, dan
- H.D. Manoppo sebagai Kepala Bidang Pertahanan.

Upacara penyerahan pemerintahan sipil dari tangan Laksamana Muda K. Hamanaka dilaksanakan di lapangan olah raga Tondano tanggal 21 Agustus 1945. Dalam upacara itu bendera Merah Putih dinaikkan dan sebaliknya bendera Hinomaru diturunkan menandakan berakhirnya kekuasaan sipil Jepang di daerah Sulawesi Utara/ Tengah (Sompie, 1979 ; Wowor, 1977).

III. KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN.

A. KEGIATAN MASYARAKAT YANG RELEVAN ATAUPUN YANG MERUPAKAN AWAL DARI PROSES REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK).

1. BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DI DAERAH.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia dipimpin oleh dua orang tokoh nasionalis yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Proklamasi itu diucapkan tepat jam 10.00 bertempat di rumah kediaman Ir. Soekarno jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Menyusul proklamasi kemerdekaan itu, maka dipergunakanlah berbagai sarana komunikasi yang ada untuk menyebarkanluaskannya kepada rakyat di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri.

Berita proklamasi untuk pertama kalinya berhasil ditangkap di Markas Besar Tentara Jepang yang menduduki Keresidenan Manado yang berkedudukan di Tonsealama (Minahasa). Sebelumnya markas itu berkedudukan di Manado tetapi kemudian bersama-sama pusat pemerintahan sipil, bulan September 1944 dipindahkan ke Tondano berhubung kota Manado sudah dihancurkan oleh serangan-serangan Sekutu. Kalau pusat pemerintahan sipil berkedudukan di Tondano, maka Markas tersebut berkedudukan di Tonsealama dekat Tondano. Di markas itu ada fasilitas alat-alat komunikasi radio dan telegrap militer. Dengan fasilitas itu maka setiap harinya selalu ada hubungan dengan Jakarta. Untuk melayani fasilitas-fasilitas komunikasi tersebut, maka Jepang mempekerjakan tenaga-tenaga Indonesia antaranya A.S. Rombot. Telegrafis-markonis A.S. Rombot ini dikirimkan oleh pemerintah Jepang dari Jakarta dan bertugas pada Dinas Perhubungan Markas Besar Tentara di Tonsealama sejak tahun 1944 (Wowor, 1977).

Hari itu tanggal 18 Agustus 1945, ketika A.S. Rombot sedang bertugas menerima berita Domei dari Tokyo, diterimanya kabar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang sudah disiarkan ke seluruh penjuru dunia kemarin harinya. Berita tentang proklamasi itu, diterimanya bersama-sama berita-berita yang hangat tentang situasi terakhir pada waktu itu antaranya tentang kapitulasi Jepang, perintah

gencatan senjata, akibat-akibat kehebatan bom atom yang sudah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan sebagainya. (Wowor, 1977).

Sementara dua orang perwira Jepang yang mengawasi pelaksanaan tugas dinas tersebut berdiskusi dan bercekcok tentang berita-berita yang baru saja diterima itu, maka Rombot pun tidak tinggal diam begitu saja. Diketahuinya bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945 sudah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan untuk Keresidenan Manado di mana Jepang juga sudah sementara mempersiapkan pelaksanaan penyerahan Pemerintahan tanggal 21 Agustus 1945. Dengan demikian maka menurut pemikirannya, berita proklamasi yang baru saja diterimanya, merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para tokoh nasionalis yang ada di Minahasa. Berita itu akan merupakan alasan yang paling kuat untuk melaksanakan penyerahan pemerintahan kepada Indonesia.

Selesai bertugas, segera ia menghubungi salah seorang kawan dekatnya yakni W.F. Sumanti yang pada waktu itu menjabat selaku Daidanco (Komandan) Boo Ei Teisintai yang bemarkas juga di Tondano. Kedua tokoh pemuda ini berdiskusi dan kemudian menyampaikannya kepada tokoh-tokoh nasionalis yang lain tentang isi berita itu. Dapat ditambahkan bahwa berita itu disiarkan pula oleh Markas Besar di Tonsealama ke daerah Sangir Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Tapi tentara Jepang tidak menyampaikannya kepada rakyat.

Di daerah Gorontalo, berita proklamasi untuk pertama kalinya baru diketahui oleh orang-orang Jepang dan masih sangat dirahasiakan untuk diketahui oleh umum. Setelah mendengar berita radio dari Markas Tentara di Tonsealama maka kepala pemerintahan daerah Gorontalo yakni Kinosita selaku Kenkanrikan (setingkat Asisten Residen Belanda), mengundang tokoh nasionalis Nani Wartabone ke tempat kediamannya. Pada waktu itu Kinosita memberitahukan tentang kekalahan Jepang, sambil mengatakan bahwa pada suatu saat, akan diadakan penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah Gorontalo kepada Nani Wartabone.

Sepulangnya Nani Wartabone dari rumahnya Kinosita itu, maka pikirannya dikuasai oleh rencana-rencana memikirkan akan persiapan dan tindakan-tindakan apa yang harus dijalankan sehubungan dengan berita itu dan kemungkinan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada rakyat Gorontalo. Pelaksanaan rencana dan tindakannya itu ialah dikuasainya dinas radio Jepang di Gorontalo. Tindakan penguasaan radio Jepang itu, dilakukan sekitar akhir Agustus 1945. Dengan berhasil dikuasainya dinas radio itu, maka jelaslah didengar berita-berita bahwasanya proklamasi kemerdekaan Indonesia benar-benar sudah dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 (Sun Bone, wawancara 9-9-1979).

Di daerah Sangir Talaud, berita tentang kekalahan Jepang tidak dapat segera diketahui oleh rakyat di sana karena Jepang tidak pernah memberitahukannya bahkan senantiasa berusaha untuk menyembunyikan/merahasiakannya. Demikian pula berita-berita melalui radio tidak pernah sampai ke telinga rakyat karena Jepang sudah sejak lama melarang rakyat mendengar siaran-siaran radio apalagi memiliki pesawat radio. Demikian pula dengan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang tidak pernah sampai kepada rakyat. Hal ini juga karena alat-alat

komunikasi lainnya seperti surat kabar, majalah dan sebagainya pada waktu itu, belum terdapat di daerah Sangir Talaud ini (Madonsa, wawancara 16-9-1979 ; Yuda, wawancara 15-9-1979).

Berita tentang kekalahan Jepang hanya dapat diduga dari tindak tanduk dan gelagat orang-orang Jepang sendiri. Pada waktu itu banyak di antara mereka yang menyuruh rakyat mengantarkannya ke Manado walaupun hanya dengan naik perahu milik rakyat di sana. Dalam perjalanan dengan perahu itu kadang-kadang mereka mendapat serangan dari pesawat-pesawat Sekutu di tengah laut. Juga berita kekalahan Jepang akhirnya diketahui rakyat melalui orang-orang yang diselundupkan oleh Sekutu ke sana pada saat-saat terakhir kekalahan Jepang. Di antara mereka yang diselundupkan oleh Sekutu pada waktu itu ialah seorang asal daerah Sangir Talaud yang bernama Barahama (Maluegha, wawancara 24-9-1979). Tapi akhirnya tidak lama kemudian datanglah pesawat Sekutu yang menyebarkan selebaran yang isinya :

Atas perintahnya Mikado, perang Pasifik selesai. Tentara Jepang menyerah dengan tiada bersyarat dan bertekuk lutut kepada Sekutu.

Ttd.

Mc. Arthur.

Walaupun sudah menerima pamflet tersebut di atas, tapi rakyat menyimpan dan merahasiakan hal itu. Tindakan ini dilakukan karena takut dicurigai oleh Jepang yang dapat mengakibatkan kematian bagi yang menyebarkanluaskannya termasuk kematian seluruh sanak keluarganya sendiri (Manatar, wawancara 27-9-1979 ; Yuda, wawancara 15-9-1979).

Barulah pada bulan September 1945, rakyat di Sangir Talaud dapat mengetahui adanya berita bahwa kemerdekaan Indonesia sudah di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita itu disampaikan sendiri oleh pimpinan tentara Jepang yang ada di daerah itu. Berita tersebut kemudian lebih diyakini rakyat setelah dapat membacanya sendiri melalui surat kabar "Merdeka" dan "Siasat" yang berhasil tiba di sana (Binilang, wawancara 20-9-1979). Berita Proklamasi kemerdekaan yang sudah tersebar luas mulai dari Ibukota Tahuna sampai ke pelosok-pelosok desa itu, disambut rakyat dengan penuh kegembiraan. Sejak saat itu maka salam "Merdeka" dengan mengangkat tangan yang dikepalkan ke atas, mulai menggema di seluruh kepulauan Sangir Talaud (Rompas, wawancara 17-9-1979).

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat dirahasiakan oleh aparaturnya pemerintahan Jepang di daerah Bolaang Mongondow agar jangan sampai diketahui oleh rakyat. Hal ini rupanya dimaksudkan agar jangan sampai timbul balas dendam terhadap orang-orang Jepang yang ada di daerah itu. Untuk diketahui, di daerah tersebut tidak ada pasukan Jepang yang seperti di daerah-daerah lainnya. Yang ada di sana hanyalah sekelompok kecil polisi militer yaitu Tokeitai (Polisi Militer Kaigun) dan Kempetai (Polisi Militer Rikugun). Juga ada sepasukan polisi yang terdiri dari orang-orang Minahasa dan Bolaang Mongondow sendiri, yang dahulunya merupakan polisi Belanda yang diaktipkan sebagai polisi Jepang. Kekuatan

militer dan polisi Jepang ini dianggap tidak cukup dalam melindungi semua orang Jepang yang ada di sana apabila timbul gerakan balas dendam dari rakyat yang telah mengetahui tentang kekalahan mereka melawan Sekutu.

Namun ada seorang perwira Tokeitai bernama Takamoto yang bersahabat dengan J.F.K. Damopolii dan isterinya. Komandan Tokeitai ini memberitahukan kepada Fukugunco J.F.K. Damopolii bahwa Jepang sudah kalah dan bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Penyampaian Takamoto itu turut didengar pula oleh isteri Damopolii yang bernama Nurtina Gonibala, dan disampaikan pada awal September 1945. Tapi Takamoto berpesan bahwa berita-berita itu harus dirahasiakan dahulu. Hal ini adalah untuk menghindarkan timbulnya gerakan balas dendam dari rakyat padahal Jepang tidak memiliki pasukan yang kuat untuk melindungi semua pejabat dan orang-orang Jepang lainnya yang ada di daerah itu. J.F.K. Damopolii dan isterinya Nurtina Gonibala menyanggupi pesan Takamoto itu yaitu agar jangan dahulu segera menyebarkan berita-berita di atas kepada rakyat karena takut akan adanya balas dendam dimaksud. Di pihak lain ternyata orang-orang Jepang semakin menunjukkan sikap yang keras untuk menakut-nakuti agar rakyat jangan mendahului mereka mengadakan tindakan yang tidak mereka kehendaki.

Sementara itu, pada tanggal 17 September 1945, Fukugunco Lolayan J.F.K. Damopolii, ketika ia sedang berada di rumahnya yang terletak antara desa Motoboi Kecil dan desa Molinow, mendapat kunjungan rahasia dari dua orang pemuda. Ternyata mereka adalah para anggota PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) yang bermarkas di Tondano (Minahasa). Kedua pemuda anggota PPI itu yakni John L. Massie dan J. Kolondam, yang ditugaskan oleh N.P. Somba sebagai salah seorang Pimpinan PPI di Tondano, untuk datang menghubunginya. Maksud mereka yaitu agar di Bolaang Mongondow dapat segera dibentuk PPI untuk berjuang membela kemerdekaan Indonesia.

J.F.K. Damopolii meyakini maksud baik dari misi kedua pemuda PPI itu sehingga pada hari itu juga diadakan pertemuan rahasia di rumahnya untuk membentuk pengurus PPI Bolaang Mongondow. Pengurus PPI itu berstatus Komisariat yang susunannya sebagai berikut :

Ketua Komisariat	: J.F.K. Damopolii
Sekertaris	: Nurtina Gonibala
Anggota-anggota	: Abdurrachman Mokobombang S.A. Mokobombang A.H. Raupu S. Daun L. Mokobombang A. Atom M.S. Detu.

Terbentuknya Komisariat PPI Bolaang Mongondow ini masih sangat dirahasiakan kepada Jepang yang dalam pada itu semakin menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap rakyat (Nurtina Gonibala, wawancara 17-9-1979).

Sejalan dengan pembentukan Komisariat PPI di atas maka diadakan pula

usaha untuk mengaktifkan kembali kepengurusan PSII Cabang Bolaang Mongondow yang dibubarkan ketika Jepang menduduki daerah ini. Usaha itu dapat terwujud sehingga pada akhir September 1945, terbentuklah Pengurus PSII Cabang Bolaang Mongondow sebagai berikut :

K e t u a	: J.F.K. Damopolii
Wakil Ketua	: Zakaria Imban
Sekretaris Umum	: F.T. Manoppo
Sekretaris I	: A. Simbala
Sekretaris II	: M. Bambela
Bendahara	: H.M.S. Mustafa
Pembantu-pembantu	: L. Mokobombang
	Hadjir Imban
	M.A. Dolot
	H. Detu
	B. Gilalong.

Walaupun sudah dibentuknya PPI, namun para tokoh PSII (Partai Serikat Islam Indonesia) di atas, sebenarnya belum merasa yakin terhadap berita tentang kemerdekaan Indonesia sebagaimana sudah disampaikan oleh J.F.K. Damopolii dan isterinya lebih dahulu. Oleh karena itu untuk mempertebal keyakinan kebenaran berita itu, maka tokoh-tokoh PSII yang ada di sana seperti Hadjir Imban, Zakaria Imban dan F.T. Manoppo, mengutus beberapa pemuda untuk mengeceknya. Para pemuda yang akan diutus itu ialah Saleh Mokobombang, Abdurachman Mokobombang dan Saridin Daun. Ketiganya diperintahkan pergi ke Molibagu (Ibukota Kerajaan Bolaang Uki) yang letaknya berbatasan dengan daerah Gorontalo (di pantai Selatan). Hal ini karena semua peristiwa yang terjadi di daerah Gorontalo, beritanya kebanyakan masuk ke daerah Bolaang Mongondow melalui kota Molibagu, yang selalu ada hubungan dengan Gorontalo.

Di Molibagu, ketiganya memperoleh kabar bahwa Nani Wartabone di Gorontalo telah menerima berita bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh dua tokoh nasionalis Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama rakyat Indonesia di mana telah ditunjuk selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan kabar yang dibawa oleh ketiga pemuda di atas, maka yakinlah kini para tokoh PSII di Bolaang Mongondow bahwa Indonesia sudah merdeka sesuai informasi yang disampaikan oleh Takamoto dan dua pemuda utusan PPI John L. Massie dan J. Kolondam yang diutus oleh N.P. Somba selaku salah seorang pimpinan PPI yang bermarkas di Tondano sebelumnya.

Dengan demikian maka semakin giatlah para tokoh nasionalis di Bolaang Mongondow dalam menyusun kekuatan membela kemerdekaan Indonesia. Untuk menghimpun kekuatan pemuda seluruh Bolaang Mongondow maka pimpinan PSII di sana dengan segera membentuk Pemuda Muslimin Indonesia (PMI). Pimpinan PMI Cabang Bolaang Mongondow itu diketuai oleh K. Imban. Dengan diaktipkannya kembali PSII dan PMI di sana maka di seluruh kerajaan, distrik, onderdistrik dan desa dibentuk pula pimpinan PSII lengkap dengan pimpinan PMI setempat yang

kemudian ikut serta terjun dalam perjuangan membela kemerdekaan (Hadjir Imban, wawancara 18-9-1979).

Selain mengaktifkan PSII dan PMI sebagaimana sudah diutarakan di atas, maka mereka juga meningkatkan perjuangannya melalui wadah PPI. Pimpinan Komisariat PPI Bolaang Mongondow yang diketuai oleh J.F.K. Damopolii itu, membentuk satu barisan kelaskaran yang dinamakan "PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow". Sebagai Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow diangkatlah Abdurrachman Mokobombang. PPI Laskar Banteng ini terdiri dari pasukan pemuda dan pasukan wanita. Pasukan wanita hanya terdiri dari satu kompi saja, dengan Komandan Nurtina Gonibala (isteri J.F.K. Damopolii). Yang menjadi anggota pasukan wanita PPI Laskar Banteng ini hanyalah terbatas di desa Motoboi Kecil dan desa Molinow di dekat Kotamobagu (Ibukota daerah Bolaang Mongondow). Mereka hanya bersenjatakan satu pucuk pistol dan selainnya bambu runcing. Baik pasukan pemuda maupun pasukan wanita seluruhnya di bawah komando Abdurrachman Mokobombang selaku Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow.

Selain pasukan wanitanya, maka PPI Laskar Banteng terdiri dari beberapa kelompok di tempat kedudukan Markas Besarnya yang berlokasi di perkebunan milik J.F.K. Damopolii yang terletak di sekitar desa Motoboi Kecil. Sebagai Komandan masing-masing Kelompok itu ialah S.A. Mokobombang, A.H. Raupu, Saridin Daun, L. Mokobombang, A. Atom dan M.S. Detu. Pada setiap kerajaan, didirikan pula markas PPI Laskar Banteng tingkat kerajaan setempat. Untuk Kerajaan Bolaang Uki yang bermarkas di Molibagu, berada di bawah pimpinan Husein Tanta selaku Komandan, dan yang bermarkas di Pinolosian di bawah M. Gonibala selaku Komandan.

Para anggota PPI Laskar Banteng ini diberikan sehelai kain berwarna Merah Putih sebagai tanda keanggotaan. Selain yang berada di tangan pasukan wanitanya, maka PPI Laskar Banteng yang bermarkas besar di Motoboi Kecil memiliki persenjataan berupa 6 pucuk pistol, beberapa pucuk LE dan satu peti granat, sedangkan selainnya bersenjata bambu runcing. Seluruh senjata yang dimiliki PPI di atas, adalah hasil pemberiannya Takamoto yang pada waktu itu sebagai Komandan Tokeitai Bolaang Mongondow. Dengan adanya senjata-senjata yang diberikan oleh Takamoto itu, semakin bersemangatlah para pemuda yang tergabung dalam PPI di atas. Mereka mempropagandakan bahwa Jepang telah menyerah dan telah memberikan senjata-senjatanya kepada para pemuda Indonesia. Dengan propaganda seperti itu maka dengan segera PPI Laskar Banteng berhasil memperluas keanggotaannya sampai ke desa-desa yang sebelumnya belum ada anggota atau ranting PPI desa. Jadi dengan demikian maka PPI Laskar Banteng adalah merupakan pasukan inti kelaskaran di seluruh daerah Bolaang Mongondow pada waktu itu (Nurtina Gonibala, Wawancara 17-9-1979).

2. PENGIBARAN BENDERA SANG MERAH PUTIH.

Sejalan dengan perkembangan peperangan yang tidak menguntungkan bagi Jepang, maka mereka mulai memberikan konsesi-konsesi kepada rakyat Indonesia.

Di tingkat nasional, pemerintah pendudukan memperkenankan pengibaran bendera Merah Putih di samping tetap mempertahankan berkibarnya bendera Hinomaru. Hal ini dilakukan bertepatan dengan perayaan hari lahir Kaisar Hirohito yaitu mulai 29 April 1945.

Di wilayah Menado Syu (Keresidenan Manado yang meliputi Sulawesi Utara/Tengah sekarang), pemerintah pendudukan telah membentuk KTR September 1944 yang awal 1945 fungsinya dirobah menjadi Menado Syukai Gi In diketuai oleh E.H.W. Pelengkahu. Pembentukan KTR kemudian Menado Syukai Gi In itu, dimaksudkan agar para tokoh nasionalis di sana bersama seluruh rakyat bekerjasama dengan Jepang dalam situasi peperangan yang semakin gawat waktu itu bagi Jepang. Dan sebagai imbalannya maka Jepang memperkenankan dilakukannya propaganda tentang kemerdekaan Indonesia sejak September 1944. Pada 29 April 1945, bertepatan dengan dibentuknya Badan Persiapan Pemerintahan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) untuk wilayah Menado Syu yang merupakan perubahan fungsi Menado Syukai Gi In, maka pemerintah pendudukan di sana secara resmi memperkenankan pengibaran bendera Merah Putih secara serentak oleh seluruh rakyat, dengan dipelopori oleh para tokoh nasionalis yang duduk sebagai anggota BPPKI di atas.

Pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan sejak 29 April 1945 itu, diawali dengan suatu upacara yang resmi diadakan oleh pemerintah pendudukan Menado Syu. Tempat upacara tersebut yaitu di halaman pusat pemerintahan Menado Syu yang berlokasi di desa Wulauan Tondano sejak dipindahkan dari Menado bulan September 1944 akibat serangan Sekutu. Yang bertindak selaku Inspektur Upacara waktu itu ialah Laksamana Muda K. Hamanaka sendiri, selaku Suciji (Kepala Pemerintahan Menado Syu). Ketika tiba pada titik acara pengibaran bendera Merah Putih, maka seorang pemuda nasionalis bernama Arie Sahelangi menggerek bendera sampai ke puncak tiang diiringi dengan penghormatan bendera oleh seluruh peserta upacara dipimpin oleh inspektur upacara (Sompie, 1979).

Sejak saat itu maka bendera Merah Putih selalu dipancangkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Hal inipun berlaku dalam segala kegiatan yang diadakan oleh BPPKI terutama ketika mengadakan propaganda kepada rakyat. Kegiatan propaganda yang dilakukan oleh BPPKI itu, selain dihadiri dan dipimpin oleh anggota-anggotanya, juga turut dihadiri oleh petugas-petugas Jepang. Setiap pembicara dalam acara seperti itu, baik orang Indonesia maupun orang Jepang, sebelum berbicara harus lebih dahulu membungkuk hormat (saikerei) kepada bendera Merah Putih (Sompie, 1973).

Perubahan fungsi berturut-turut dari KTR menjadi Menado Syukai Gi In kemudian menjadi BPPKI sebagaimana sudah disampaikan di depan, dapat dianggap merupakan langkah maju yang amat berarti bagi rakyat Indonesia di daerah ini. Dengan formal menjadi BPPKI maka setiap usulnya akan sangat diperhatikan oleh Jepang. Hal ini terbukti ketika BPPKI menyampaikan usul mengulangi/menekankan yang sudah pernah dikemukakan oleh KTR dan Menado Syukai Gi In lebih dahulu yaitu tentang tuntutan penyerahan pemerintahan kepada rakyat Indonesia. Menanggapi usul itu maka pemerintahan pendudukan mengambil jalan tengah dengan

menawarkan bentuk pemerintahan yang disebut "Jiyuu". Ketika diselidiki lebih jauh, ternyata jiyuu berarti pemberian otonomi (Sompie, 1979). Oleh karena itu maka tawaran tersebut tidak diterima berhubung BPPKI menuntut kemerdekaan sepenuhnya.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945, BPPKI diroboh fungsinya sehingga menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) wilayah Sulawesi Utara/Tengah, yang sesuai rencana, akan menerima penyerahan pemerintahan sipil untuk wilayah tersebut di atas. Sampai pada saat itu susunan PPKI tersebut adalah sebagai berikut :

E.H.W. Pelengkahu (Ketua)	Lie Beng Tiok	P. Pandeiroth
G.E. Dauhan	K.H.E. Sompie	H.D. Tinangon
C.P. Hermanses	O.H. Pantouw	dr. Ch. Singal
F.W. Kumontoy	Singo Uno	R.M. Koesno Dhanupojo
M.B. Tumbel	Furir Kairupan	dr. R.C.L. Senduk
A.J. Walalangi	R. Wantalangi	D.A.Th. Gerungan
J. Jocom	J.P. Mongula	H.D. Manoppo
J.I. Permata	J. Palamani	B.W. Lapiarr
F. Intama	Nani Wartabone	E.R.S. Warouw
J. Lengkong	J.U. Mangowal	Z. Kandou
drh. W.J. Ratulangi	Tom Olii	Ch. D. Pontoh.
O.N. Pakaja	H. Sumarauw	

Sejak dibentuknya PPKI tersebut, maka mereka mengadakan sidang-sidang membahas khusus langkah-langkah persiapan pelaksanaan penyerahan pemerintahan itu. Kemudian tanggal 21 Agustus 1945, diadakanlah upacara penyerahan pemerintah sipil dari tangan Jepang ke tangan rakyat Indonesia. Dalam upacara itu bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Laksamana Muda K. Hamanaka. Dalam upacara itu pula dilakukan pengibaran bendera Merah Putih disusul penurunan bendera Hinomaru, yang semuanya dilakukan secara khidmat, menandakan berakhirnya pemerintahan pendudukan di wilayah ini.

Di daerah Sangir Talaud, dalam masa pendudukan Jepang, berturut-turut telah dilakukakn pengibaran bendera Merah Putih oleh rakyat di sana. Misalnya dapat disebutkan pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan oleh rakyat di Makalehi tahun 1944. Kemudian di desa Kembali Tarorane di Ulu Siau yang dilakukan tanggal 16 Juni 1945. Pengibaran bendera Merah Putih itu dilakukan tepat ketika pulau Siau sedang mengalami serangan tembakan meriam dari kapal perang Sekutu yang melakukan perondaan waktu itu di sana. Sambil memasuki pelabuhan Ulu Siau, kapal perang Sekutu itu melakukan penembakan meriam ke darat, tetapi rakyat tetap bertahan meneruskan upacara pengibaran bendera Merah Putih dan baru bergerak menyingkirkan diri setelah upacara yang dipimpin oleh S.K. Sa lindeho itu selesai dilakukan (Elias, 1973 ; Sigarlaki dkk, 1977).

Selanjutnya tepat ketika di Jakarta dikumandangkan tentang proklamasi kemerdekaan dan pengibaran bendera Merah Putih, di Tahuna (Ibukota daerah Sangir Talaud) pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan pula pengibaran bendera

tersebut. Pengibaran bendera itu dipimpin oleh Hirano selaku Kenkanrikan (setingkat Asisten Residen Belanda) Sangir Talaud di mana bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru di sebelah kanannya. Upacara itu dihadiri oleh semua raja (Suco) dan kepala distrik (Gunco) yang diundang hadir atas perintah Kenkanrikan Hirano. Selain itu turut pula dihadiri oleh para kepala desa (Sonco) khusus yang berada di pulau Sangir Besar di mana Ibukota Tahuna berkedudukan. Sebelumnya Kenkanrikan Hirano telah mengumumkan kepada rakyat di sana bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun karena pada umumnya para pemimpin rakyat yang hadir pada waktu itu dapat dikatakan "buta politik", maka kebanyakan di antara mereka tidak dapat mengetahui arti dan hubungan pengumuman itu dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih pada waktu itu (Makahanap, wawancara 18-9-1979).

Pengibaran bendera Merah Putih di daerah Gorontalo untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 23 Januari 1942. Sekitar tanggal tersebut, aparaturnya sipil Belanda yang ada di sana semuanya ditangkap oleh rakyat yang dipimpin oleh Nani Wartabone, R.M. Koesno Dhanupojo, J.A. Pendang Kalengkongan dan kawan-kawannya. Dengan berhasilnya perebutan kekuasaan 23 Januari 1942 itu, maka langsung diikuti dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di kota Gorontalo lalu meluas sampai ke pelosok-pelosok desa di daerah itu. Ketika Jepang menguasai daerah ini, maka mereka melarang pengibaran bendera Merah Putih kira-kira pertengahan tahun 1942.

Larangan itu dengan sendirinya batal ketika Kenkanrikan Kinosita menyerahkan pemerintahan kepada Nani Wartabone pada tanggal 9 September 1945. Pada hari itu diadakan suatu upacara bertempat di lapangan sepak bola kota Gorontalo dan dalam kesempatan itu, Kenkanrikan Kinosita secara resmi menyerahkan pemerintahan kepada rakyat di sana yang diterima oleh Nani Wartabone. Dalam upacara itu dilakukan pula pengibaran bendera Merah Putih secara khidmat yang diikuti oleh segenap peserta upacara.

Upacara itu dihadiri oleh semua aparaturnya sipil dan militer Jepang, tokoh-tokoh nasionalis yang telah datang bersama-sama rakyat yang berjejal-jejal memenuhi lapangan tersebut. Untuk kedua kalinya dengan perasaan terharu dan penuh khidmat, rakyat di Gorontalo menyaksikan penggerekan bendera Merah Putih ke angkasa, diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul penurunan bendera Hinomaru. Rangkaian peristiwa tersebut di atas dianggap menandakan berakhirnya pemerintahan pendudukan Jepang yang selama bertahun-tahun menyebabkan kesengsaraan rakyat. Mulai pada saat itu maka Nani Wartabone bertindak selaku Kepala Daerah Gorontalo sedangkan A.J. Usman selaku pimpinan militer pada waktu itu (Buku Peringatan 35 Tahun, 1977).

Menyusul penyerahan pemerintahan dan pengibaran bendera Merah Putih 9 September 1945 itu, maka dibentuklah badan yang disebut Dewan Nasional. Yang menjadi anggota dari Dewan Nasional itu ialah semua Kepala Distrik (Jogugu) serta Kepala Onderdistrik (Marsaoleh) ditambah para pemuka masyarakat lainnya mewakili semua aliran dan golongan yang ada di daerah Gorontalo. Dewan Nasional ini terdiri atas 20 anggota dan merupakan suatu badan legislatif yang mendampingi

Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan di sana. Sejak saat itu maka bendera Merah Putih dengan megah berkibar mulai dari pusat pemerintahan di kota Gorontalo sampai ke pelosok-pelosok desa di daerah itu.

Rakyat di daerah Bolaang Mongondow untuk pertama kalinya melihat bendera Merah Putih pada akhir tahun 1939. Pada waktu itu diadakan rapat umum yang diselenggarakan oleh GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dalam rangka Gerakan Indonesia Berparlemen (Manus dkk, 1978). Kemudian segera setelah terbentuknya PPI Laskar Banteng 17 September 1945, maka hari itu juga dilakukan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran tersebut dilakukan di tempat kedudukan dari Markas Besar PPI Laskar Banteng yaitu di perkebunan milik J.F.K. Damopolii di sekitar desa Motoboi Kecil. Tempat kedudukan markas besar itu sangat dirahasiakan agar jangan sampai diketahui oleh pemerintah pendudukan Jepang yang masih berkuasa sambil menunggu datangnya tentara Sekutu. Begitu pula dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang juga dilakukan secara diam-diam, dihadiri oleh rakyat yang diam di sekitar tempat itu.

Upacara pengibaran bendera Merah Putih oleh PPI Bolaang Mongondow 17 September 1945 itu, dipimpin oleh Ketua Komisariat J.F.K. Damopolii yang juga sementara menjabat sebagai Fukugunco Lolayan. Sebagai komandan upacara ialah Abdurrachman Mokobombang yang kemudian diangkat menjadi Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow. Upacara itu turut disaksikan oleh John L. Massie dan J. Kolondam yang datang sebagai utusan Markas Besar PPI di Tondano (Minahasa). Yang ditugaskan sebagai penggerek bendera waktu itu ialah Hasima Mokobombang dan Chaerani Tongi. Yang dikibarkan adalah bendera Merah Putih yang dibawa oleh kedua utusan di atas.

Sementara itu semua orang Jepang yang ada di daerah Bolaang Mongondow, diangkut oleh tentara Sekutu ke Minahasa sebagai tawanan perang. Kemudian polisi Jepang (yang terdiri dari orang-orang Indonesia) terus diaktipkan menjadi polisi Belanda dengan kekuatan kira-kira satu peleton. Mereka tetap berkedudukan di Kotamobagu sebagai Ibukota daerah Bolaang Mongondow. (Nurtina Gonibala, wawancara 17-9-1979).

B. PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH

1. Sikap Pasukan Jepang

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, bahwa sejak 29 April 1945, telah dibentuk di Tondano sebuah badan yang dinamakan BPPKI diketuai oleh E.H.W. Pelengkahu dengan lebih 30 anggotanya. Sejak tanggal tersebut, pemerintah pendudukan yang dipimpin oleh Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka, memperkenalkan secara resmi pengibaran bendera Merah Putih berdampingan dengan bendera Hinomaru, dimulai dengan suatu upacara yang khidmat di halaman kantor Minseibu di desa Wulauan Tondano.

Tanggal 15 Agustus 1945, yaitu sehari sesudah penyerahan Jepang kepada Sekutu diumumkan melalui radio Tokyo oleh Kaisar Hirohito, pemerintah pendudukan di wilayah ini secara tergesa-gesa merubah fungsi BPPKI menjadi PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia) wilayah Sulawesi Utara/Tengah dengan pimpinan dan anggota yang sama. Menurut keterangan, hal ini dilakukan atas

nasehat dan desakan beberapa orang tokoh nasionalis yang ada antaranya B.W. Lopian, dr. A.B. Andu, dr. R.C.L. Senduk, R.M. Koesno Dhanopojo, dan G.E. Dauhan (Sompie, 1979 ; Kempen, 1953).

Dengan terbentuknya PPKI di atas, maka dengan segera diadakan sidang-sidang yang khusus membahas langkah-langkah persiapan pelaksanaan penyerahan pemerintahan itu. Dari sidang PPKI sesudah tanggal 15 Agustus 1945, tersusunlah aparatur pemerintahan sipil yang akan mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang sebagai berikut :

Residen	: E.H.W. Pelengkahu
Kepala Dept. Pemerintahan	: G.B. Kullit
Kepala Departemen Pendidikan	: E. Katoppo
Kepala Departemen Pertahanan	: H.D. Manoppo.

Pejabat-pejabat yang ditunjuk tersebut semuanya diambil dari antara para tokoh nasionalis moderat yang selama masa pendudukan bertugas dalam kepamongprajaan (Sompie, 1977).

Sidang PPKI waktu itu juga memilih tiga orang yang akan mewakili rakyat dalam upacara penyerahan yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Ketiga orang itu masing-masing adalah :

E.H.W. Pelengkahu	mewakili golongan pamongpraja
Z. Kandou	mewakili golongan wanita, dan
Ch. D. Pontoh	mewakili golongan pemuda.

Untuk tugas itu maka ketiganya akan diambil sumpahnya oleh PPKI, demikian pula dengan para pejabat yang duduk di dalam struktur pemerintahan sipil di atas (Sompie, 1979 ; Wowor, 1977).

Enam hari kemudian yaitu tanggal 21 Agustus 1945, diadakanlah upacara yang khidmat tentang penyerahan pemerintahan sipil untuk Keresidenan Manado (Menado Syu) dari tangan Jepang ke tangan rakyat Indonesia. Upacara yang secara resmi tentang penyerahan tersebut dilakukan di kompleks kantor Minseibu di desa Wulauan Tondano, dengan Inspektur upacara ialah Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka sendiri. Tiga titik acara utama dalam upacara itu ialah :

1. Acara penyerahan tampuk pemerintahan sipil dari tangan Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Suciji (Residen) dengan protokol orang Jepang dan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar;
2. Acara penerimaan tampuk pemerintahan sipil kepada tiga orang yang mewakili rakyat masing-masing E.H.W. Pelengkahu, Z. Kandou dan Ch.D. Pontoh di mana dipimpin oleh protokol orang Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar;
3. Acara penaikan bendera Merah Putih dan penurunan bendera Hinomaru sehingga bendera kita secara tunggal berkibar di angkasa (Sompie, 1979) ; Wowor, 1977).

Dua hari kemudian yaitu tanggal 23 Agustus 1945, diadakan lagi suatu upacara peresmian pembentukan pasukan yang akan mendukung pemerintahan sipil di atas yang disebut Pasukan Pembela Tanah Air atau Pasukan PTA. Upacara itu diselenggarakan bertempat di lapangan bola kaki kota Tondano dengan

disaksikan oleh ribuan rakyat yang ada di sana. Upacara itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Takasaki selaku Kepala Staf pasukan Jepang yang menduduki Keresidenan Manado, atas nama Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka. Selesai upacara, diadakanlah defile oleh Pasukan PTA keliling kota Tondano, diikuti oleh para pemuka masyarakat, aparaturnya, prajurit dan barisan-barisan anak-anak sekolah (Sompie, 1979; Wowor, 1977).

Menyusul penyerahannya pemerintahan sipil oleh Laksamana Muda K. Hamanaka 21 Agustus 1945, di kota Gorontalo diadakan pula penyerahan pemerintahan oleh Kenkanrikan Kinostita kepada Nani Wartabone. Hal ini diadakan pada tanggal 9 September 1945. Penyerahan pemerintahan tersebut adalah sesuai dengan janji Kinostita sebelumnya yaitu bahwa pemerintahan kelak akan diserahkan kepada rakyat Indonesia. Hal ini karena menurut pendapat Kinostita sendiri, ia lebih setuju diserahkan kepada rakyat Indonesia daripada dikembalikan kepada Belanda.

Sebagai usaha pertama setelah diambil alihnya pemerintahan dari tangan Jepang itu, maka Nani Wartabone menyusun Dewan Nasional yang beranggotakan 20 pemuka masyarakat dan sesudah bersidang, dewan ini menghasilkan suatu keputusan yang disebut "Putusan Dhamua Dua" yang isinya adalah sebagai berikut (Panitia Peringatan 35 Tahun, 1977) :

Dengan mencabut semua peraturan yang bertentangan dengan putusan ini, maka dengan ini ditetapkan :

1. Pemerintahan di Gorontalo adalah bagian dari pemerintahan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan di Gorontalo dipimpin oleh seorang pegawai yang disebut Kepala Daerah;
3. Dalam melakukan kewajibannya, Kepala Daerah dibantu oleh Dewan Kebangsaan dan segenap pegawai menurut susunan yang sekarang telah berlaku atau yang di kemudian hari akan diadakan perubahan.

Adapun susunan Dewan Nasional atau Dewan Kebangsaan pada waktu itu adalah sebagai berikut :

K e t u a	: Ajuba Wartabone
Badan Harian	: Moh. Ali
Sekretaris	: H.U. Katili
Bagian Perekonomian	: Sun Bone, Abdullah Ismail Datau
Bagian Keamanan	: Abdullah Amu, A. Tumu
Bagian Perguruan/Kesehatan	: dr. J. Sabu, Idrak Jasin
Bagian Lalu Lintas	: Abubakara Usman, H. Anis.

Di samping menghasilkan keputusan di atas, Dewan Nasional telah mengambil keputusan menolak kembalinya kekuasaan NICA sebagai penjajah dan dewan dinyatakan bekerja dan berjuang di bawah bendera kebangsaan Merah Putih dalam lingkungan pemerintahan Republik Indonesia (Sun Bone, wawancara 11-9-1979).

Dari rentetan peristiwa di atas, pada kenyataannya tidak dihalang-halangi oleh pasukan Jepang yang ada di daerah Gorontalo yang menunggu datangnya pasukan Sekutu. Dilakukannya penyerahan pemerintahan di atas jelas menunjukkan sikap pasukan Jepang yang ingin menghindarkan timbulnya reaksi dan tindakan balas

dendam dari rakyat terhadap mereka. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka selama berlangsungnya masa pendudukan adalah sangat kejam sehingga di-kawatirkan bahwa setelah rakyat mengetahui penyerahan mereka kepada Sekutu, maka rakyat dapat terdorong untuk membalas kekejaman sebagaimana yang pernah mereka lakukan selama ini. Namun hal itu ternyata tidak dilakukan oleh rakyat dan sementara itu pemerintahan yang dipimpin oleh Nani Wartabone selaku Kepala Daerah terus berjalan seperti biasa sampai tibanya tentara Sekutu di daerah tersebut.

Di daerah Sangir Talaud, tindak lanjut penyerahan pemerintahan sipil kepada Residen E.H.W. Pelengkahu tidak terasa sama sekali. Hal ini karena pasukan Jepang bersikap menutup-nutupi perkembangan-perkembangan terakhir yang terjadi baik di Minahasa maupun di tingkat nasional/internasional terhadap rakyat di sana. Juga tentang berita bahwa Jepang sudah menyerah kalah kepada Sekutu dan bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Hanya satu hal yang dilakukan yaitu diadakannya upacara pengibaran bendera Merah Putih dipimpin oleh Kenkanrikan Hirano yang dilakukan bersamaan dengan hari proklamasi yaitu 17 Agustus 1945 di Tahuna (Ibukota daerah Sangir Talaud). Namun pada waktu itu sama sekali tidak dijelaskan tentang proklamasi dan penyerahan pemerintahan di atas apalagi dikatakan bahwa selama masa pendudukan, rakyat di sana adalah "buta politik" sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu.

Namun walau bagaimanapun ketatnya Jepang menyimpan rahasia perkembangan situasi pada waktu itu, akhirnya rakyat dapat mengetahuinya juga melalui berita dari mulut ke mulut maupun dengan mempelajari tindak tanduk orang-orang Jepang yang dengan diam-diam ataupun terang-terangan telah mulai meninggalkan daerah ini dan pergi ke Minahasa atau ke tempat-tempat lainnya yang mereka kehendaki. Pasukan Jepang lainnya ketika Sekutu tiba, ditawan dan diangkut dengan kapal perang El Libertador sebagai kapal Sekutu yang pertama kali berlabuh di sana sejak penyerahan Jepang (Rompas, wawancara 17-9-1979).

Sama halnya dengan di daerah Sangir Talaud, maka di daerah Bolaang Mongondow, pasukan Jepang bersikap sangat merahasiakan tentang situasi terakhir pada masa itu yakni untuk menghindarkan tindakan balas dendam dari rakyat terhadap mereka yang sedang menunggu kedatangan tentara Sekutu. Untuk sekedar menutup-nutupi rahasia dan kekawatiran mereka maka pasukan Jepang yang hanya terdiri atas sekelompok anggota Tokeitai dan Kempetai itu, melakukan tindakan yang lebih keras kepada rakyat yang dicurigai. Tetapi Komandan Tokeitai Takamoto malah bersikap sebaliknya yaitu dengan mendekati tokoh nasionalis yang duduk dalam pemerintahan sebagai Fukugunco Lolayan yakni J.F.K. Damopolii sekeluarga. Kemudian pada bulan September 1945 ia memberikan sejumlah senjata kepada PPI Laskar Banteng yang sudah terbentuk untuk membela kemerdekaan Indonesia (Nurtina Gonibala, wawancara 17-9-1979).

2. Hambatan-hambatan

Sebagaimana sudah diutarakan di halaman 72, dan 93, menyusul penyerahan pemerintahan 21 Agustus 1945, pada tanggal 23 Agustus 1945 dilanjutkan dengan

pembentukan suatu pasukan yang disebut Pasukan PTA. Pasukan ini adalah merupakan bentukan baru menggantikan pasukan Boo Ei Teisintai di bawah Komando Daidanco W.F. Sumanti. Sebagai pemimpin dari pasukan PTA ialah P.A. Tiendas dengan jabatan selaku Hulubalang. Daidanco W.F. Sumanti untuk seterusnya ditugaskan sebagai Direktur Akademi Militer Tondano. Akademi ini secara organisatoris berada di bawah Hulubalang Pasukan PTA P.A. Tiendas sebagai wadah pendidikan para perwira untuk pasukan tersebut.

Sementara itu Laksamana Muda K. Hamanaka dipanggil untuk menghadap Panglima Sekutu yang berkedudukan di Morotai. Di sana ia menerima petunjuk-petunjuk seperlunya tentang penyerahan pemerintahan dan tugasnya untuk menjaga keadaan status quo. Ia kembali ke Tondano 5 September 1945, dan besoknya ia mengeluarkan pengumuman bahwa ia mengambil alih pemerintahan sipil yang sudah diserahkan kepada rakyat Indonesia tanggal 21 Agustus 1945, untuk dikembalikan kepada keadaan seperti semula.

Selanjutnya ia memanggil pimpinan Pasukan PTA agar datang menghadap kepadanya. Pada waktu itu Hulubalang Pasukan PTA P.A. Tiendas berhalangan hadir dan diwakili oleh Pembantu Utama Hulubalang (setingkat Kepala Staf, namanya tidak diketahui lagi). Melalui Pembantu Utama Hulubalang itu, Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka menginstruksikan agar (Sompie, 1979) :

1. Membubarkan Pasukan PTA;
2. Menutup Akademi Militer di Luaan Tondano;
3. Semua senjata api harus diserahkan kembali;
4. Semua bambu runcing harus dibakar.

Instruksi Hamanaka di atas disampaikan kepada P.A. Tiendas disertai keterangan bahwa Pembantu Utama Hulubalang sudah menyatakan penolakan melaksanakan isi instruksi di atas di depan Hamanaka. Selanjutnya Pembantu Utama Hulubalang juga menjelaskan langkah-langkah yang telah diambilnya terlebih dahulu yakni (Sompie, 1979) :

1. Kepada para anggota Pasukan PTA dan calon-calon perwira yang sementara mengikuti Akademi supaya :
 - a. Meneruskan perjuangan di hutan (bergerilya); atau
 - b. Menggabungkan diri dengan pasukan di daerah lain jika hal itu memungkinkan, atau
 - c. Berusaha menyusup ke dalam pasukan KNIL/NICA yang akan segera tiba;
2. Bambu runcing jangan dibakar semua, sebagiannya digali dan disimpan di dalam tanah sebagai tanda bahwa perjuangan akan diteruskan dengan gerakan di bawah tanah.

Hulubalang P.A. Tiendas ternyata menyetujui langkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pembantu Utama Hulubalang di atas. Kemudian Hulubalang P.A. Tiendas memutuskan bahwa ia akan pergi ke Tagulandang (Sangir Talaud) dan dari sana akan diatur rencana perlawanan selanjutnya.

Hambatan yang lebih besar lagi datang bersamaan dengan mendaratnya pasukan Sekutu dari unsur tentara Australia dengan diboncengi oleh aparaturnya SONICA dan tentara KNIL pada tanggal 8 Oktober 1945. Dua hari kemudian yaitu

10 Oktober 1945, dilangsungkanlah upacara penyerahan pemerintahan Keresidenan Manado dari tangan Jepang kepada pihak Sekutu. Pemerintahan sipil dengan segera diambil alih oleh SONICA. Penyerahan militer diterima oleh Letnan Kolonel Muir dari tentara Australia. Sejak saat itu maka para pejuang kemerdekaan di daerah ini melanjutkan perjuangannya melalui gerakan di bawah tanah untuk melawan pemerintahan NICA (Sompie, 1979 ; Palit, 1978). Setelah mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang, maka NICA pada 12 Oktober 1945 mengeluarkan peraturan pertama. Peraturan itu menyangkut soal ketentuan nilai mata uang dimana satu rupiah Jepang nilainya ditetapkan sebesar 2,5 sen uang NICA (Taulu, 1950 ; Wowor 1977).

Pemerintahan nasional pimpinan Nani Wartabone yang telah terbentuk di Gorontalo 9 September 1945, tidak luput pula dari hambatan-hambatan. Hal ini karena kenyataannya masih ada kekuatan militer asing dalam hal ini tentara Jepang di daerah tersebut, yang walaupun pemerintahan sudah diserahkan oleh mereka namun mereka tetap bersikap mengawas-awasi jalannya pemerintahan. Rasa benci dan dendam yang hidup di kalangan rakyat, sewaktu-waktu dapat meledak menjadi bentrokan dengan anggota-anggota pasukan Jepang di atas. Untuk mencegah terjadinya hal demikian, maka pemerintahan nasional sangat membutuhkan senjata yang sampai pada waktu itu tidak pernah diperoleh. Tambahan lagi tersiar berita bahwa Belanda sedang bersiap-siap untuk kembali mengatur pemerintahan di sana bersama-sama tentara Sekutu yang akan datang untuk melucuti tentara Jepang.

Di daerah Bolaang Mongondow, setelah terbentuknya PPI Laskar Banteng 17 September 1945, dilanjutkan dengan rencana untuk menaikkan bendera Merah Putih di halaman kantor pemerintahan di Kotamobagu. Perlu diketahui bahwa sejak menyerahnya pasukan Jepang maka anggota-anggota bekas veld politie (Belanda) yang dijadikan polisi Jepang, telah diaktifkan kembali sebagai polisi Belanda sambil menunggu tibanya aparat pemerintah NICA di sana. Mereka berkekuatan sekitar satu peleton, bersenjata lengkap dan terdiri dari orang-orang Indonesia yang dipimpin oleh Herry Harun Manoppo yang menggantikan O. Warikki sebagai Buco pada masa Jepang masih berkuasa di daerah itu. Ketika para pemuda yang tergabung dalam PPI Laskar Banteng hendak mengibarkan bendera Merah Putih di halaman kantor pemerintahan daerah, maka mereka diserang oleh anggota-anggota polisi Belanda sehingga maksud itu gagal.

Pelaksanaan rencana menaikkan bendera Merah Putih itu adalah termasuk bagian dari rencana mendirikan pemerintahan RI untuk daerah Bolaang Mongondow yang disusun oleh J.F.K. Damopolii pada waktu itu. Rupanya rencana itu bocor sehingga Damopolii ditangkap pada tanggal 27 September 1945. Pada hari itu ia sedang berada di rumahnya di Motoboi Kecil ketika empat orang polisi pimpinan J. van Boychen datang lalu langsung menangkapnya dan dibawa ke Manado.

Setelah Damopolii ditangkap maka isterinya Nurtina Gonibala langsung mengambil alih kepemimpinan PPI dan PSII di daerah Bolaang Mongondow sebagai pimpinan darurat. Dalam kedudukannya itu maka ia menginstruksikan agar PPI Laskar Banteng meningkatkan perjuangan gerilya melawan Belanda, sambil tetap menyusun kekuatan dan memantapkan latihan-latihan kemiliteran bagi para

anggota (Nurtina Gonibala, wawancara 17-9-1979).

Di daerah Sangir Talaud, situasi sejak menyerahnya Jepang tidak diikuti dengan usaha membentuk pemerintahan RI untuk daerah itu. Pasukan Jepang masih tetap sangat merahasiakan kekalahan mereka dan berusaha menutup-nutupi hal itu terhadap rakyat. Namun berita itu akhirnya tersebar juga di sana dari mulut ke mulut diperkuat dengan sikap pasukan Jepang yang mulai meninggalkan posnya masing-masing baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Barulah setelah berlabuhnya kapal perang El Libertador sekitar bulan Oktober 1945 di Tahuna, yakinlah rakyat bahwa benar-benar Jepang sudah menyerah dan sekarang menjadi tawanan perang Sekutu. Namun hal itu tidak juga disusul dengan usaha mendirikan pemerintahan RI di sana berhubung turut memboncengnya aparatur pemerin tahan SONICA yang mulai berusaha memutar roda pemerintahan terutama mulai awal tahun 1946 (Yuda, wawancara 15-9-1979).

3. Partisipasi masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan pemerintahan RI di daerah ini menyatakan diri dalam berbagai bentuk. Para pemuda yang dahulunya tergabung dalam Boo Ei Teisintai pimpinan Daidanco W.F. Sumanti, serentak ikut meleburkan diri ke dalam Pasukan PTA pimpinan Hulubalang P. A. Tiendas. Latihan militer yang pernah diterimanya dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pasukan di samping siap sedia dalam tugas menjaga keamanan jalannya pemerintahan yang sudah diserahkan oleh Jepang 21 Agustus 1945. Tetapi ketika pemerintahan diambil alih lagi oleh Hamanaka 6 September 1945, maka banyak di antara anggota pasukan ini yang langsung bergerak di bawah tanah atau bergerilya di hutan-hutan. Para pemuda di Tondano mengaktifkan kembali PPI yang dahulunya dibentuk pada tanggal 15 Pebruari 1945 di Seretan, kali ini di bawah pimpinan E.D. Johannes SH, H.M.L. Legoh, Alex Pakasi, J.M.L. Supit, Wim Pangalila, E.A. Parengkuan, G.A. Maengkom, Kayang Gosal, Andi Masengi, Victor Adam, J. Kumaunang, Rachmat Pulukadang dan kawan-kawannya. Para anggota gerilya yang berjuang di hutan-hutan, mendapat dukungan dari rakyat antara lain dengan menyediakan makanan, obat-obatan, pakaian dan sebagainya termasuk merahasiakan kegiatan mereka terhadap Belanda.

Di daerah Gorontalo, partisipasi masyarakat menyatakan diri dengan dukungan sepenuhnya terhadap pemerintahan daerah pimpinan Nani Wartabone sejak 9 September 1945. Rakyat dengan taat dan gembira diliputi rasa lega mengibarkan bendera Merah Putih sampai ke desa-desa di sana. Para tokoh masyarakat, tokoh politik, aparatur pemerintahan sipil bersama-sama menunjukkan partisipasi yang nyata dalam menjalankan roda pemerintahan waktu itu.

Di samping itu dibentuk pula badan perjuangan kelaskaran seperti PKR (Pasukan Keamanan Rakyat), TIM (Tentara Indonesia Merdeka), Laskar Rakyat, yang sebagian besar terdiri dari para pemuda bekas Keibodan dan Heiho yang pernah dilatih secara militer oleh Jepang. Seluruh barisan kelaskaran di atas langsung berada di bawah komando A.J. Usman yang ditugaskan membantu urusan keamanan bersama-sama dengan Abdullah Amu dan A. Tumu (Usman, 1972 ; Sun Bone, wawancara 11-9-1979).

Di daerah Sangir Talaud, partisipasi masyarakat di sana khususnya dalam hal pembentukan pemerintahan RI di daerah tersebut dapat dikatakan hampir tidak ada karena memang usaha ke arah itu tidak sempat dilakukan pada waktu itu. Apalagi dapat dikatakan bahwa rakyat "buta politik" sebagai akibat tekanan-tekanan Jepang selama masa pendudukan. Jadi sejak kapitulasi Jepang sampai tibanya pasukan Sekutu dan aparaturnya SONICA, rakyat hanya menurut saja apa yang dikatakan atau yang diatur oleh para raja, jogugu maupun kepala desanya masing-masing, yang tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik selama masa pendudukan Jepang maupun sampai pada waktu dimulainya lagi pemerintahan Belanda.

Namun suatu hal yang perlu ditambahkan bahwa rakyat di sana walaupun tidak sempat menunjukkan partisipasinya dalam pembentukan pemerintahan RI, tidak mau menerima begitu saja kembalinya Belanda itu. Memang banyak juga yang setuju dengan kembalinya Belanda, tetapi banyak pula yang menentangnya. Di antaranya timbul reaksi yang tidak setuju yakni dari kaum nasionalis beragama Islam. Mereka di bawah pimpinan Hamzah Adariku, Ali Adariku, Ahmad Tompo dan lain-lain. Sedangkan di pihak lain, kaum nasionalis di bawah pimpinan L.M. Kansil, sudah sejak dahulu senantiasa berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia baik dari bangsa Belanda maupun dari bangsa Jepang. Namun karena situasi yang kurang menguntungkan maka gerakan yang dipimpinnya hanya dapat melakukan kegiatan di bawah tanah saja (Yuda, wawancara 15-9-1979).

Sama halnya dengan di daerah Sangir Talaud di atas demikian jugalah halnya di daerah Bolaang Mongondow. Hanya bedanya yaitu di daerah ini sudah ada usaha untuk mendirikan pemerintahan RI bulan September 1945, ketika orang-orang Jepang belum diangkut sebagai tawanan Sekutu. Walaupun polisi Jepang (yang terdiri dari orang-orang Indonesia) sudah menyatakan diri sebagai polisi Belanda, namun hal itu tidaklah merupakan halangan bagi rakyat terutama pemuda yang telah tergabung dalam PPI Laskar Banteng. Ketika usaha mereka digagalkan dengan serangan para polisi Belanda maka dilanjutkan dengan semangat yang lebih berkobar-kobar lagi. Mereka menyusun kekuatan dan mengadakan latihan-latihan militer.

Mengenai latihan-latihan militer itu, diadakan di desa Molinow dekat Kotamobagu di lapangan bola kaki yang terdapat di sana. Seorang bekas anggota Heiho yang dibawa Jepang ketika masih berkuasa, menyumbangkan tenaganya untuk melatih para pemuda yang dipersiapkan untuk merebut pemerintahan di daerah itu. Orang itu bernama Agust Sukarni yang didatangkan Jepang dari pulau Jawa. Para pelatih pemuda lainnya ialah Harun Mamonto (Komandan PPI Laskar Banteng Kecamatan Lolayan), T. Dolot, A.B. Mamonto dan Nurtina Gonibala (Komandan pasukan wanita PPI Laskar Banteng). Latihan seperti itu dilakukan sejak September sampai Nopember 1945 dan baru dihentikan akibat serangan pasukan KNIL yang berlangsung ditempatkan Belanda di desa tersebut.

Akibat serangan Belanda maka Markas pasukan yang berkedudukan dalam desa dipindahkan ke perkebunan Tanoyan. Dipindahkannya kedudukan markas mempunyai dua keuntungan yaitu terhindar dari serangan mendadak dan kedua terjamin dukungan logistiknya. Hal ini diperkuat lagi dengan dukungan rakyat yang

tetap menyediakan makanan dan sebagainya yang diperlukan oleh pasukan tersebut. Ketika hal ini diketahui oleh Belanda, maka rakyat tidak diperkenankan ke kebun tanpa memiliki surat izin dari komandan KNIL setempat. Tetapi rakyat tetap berusaha sedapat mungkin membantu pasukan tersebut dengan selalu menghindarkan diri dari mata-mata yang banyak disebarkan oleh Belanda untuk mengawasi kegiatan mereka (Hadjir Imban, wawancara 17-9-1979).

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANGAN BERSENJATA) DI DAERAH

1. Perebutan kekuasaan dari Jepang di daerah

Di daerah Sulawesi Utara/Tengah, sebenarnya Jepang bermaksud menyerahkan kekuatan tempurnya secara damai kepada rakyat Indonesia, sesuai rencana dari Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka dan Kepala Staf Letnan Kolonel Takasaki. Mengenai hal ini sudah cukup diuraikan di depan. Persiapan ke arah penyerahan pemerintahan sudah diatur sejak 15 Agustus 1945 dan penyerahan dilakukan 21 Agustus 1945. Sebagai tindak lanjut penyerahan pemerintahan maka 23 Agustus 1945 diserahkan pasukan tempur yang disebut Pasukan PTA di bawah pimpinan Hulubalang P.A. Tiendas. Hal itu berlangsung secara damai di lapangan bola kaki di Tondano dengan Inspektur Upacara Letnan Kolonel Takasaki mewakili Hamanaka. Hanya saja pada itu tidak turut diserahkan pasukan Kaigun Heiho, Rikugun Heiho dan pasukan lain berikut semua persenjataannya, berhubung hal itu sesuai rencana akan dilakukan kemudian. Bahkan sudah dibentuk pula Akademi Militer Tondano, dipimpin Direktur Daidanco W.F. Sumanti yang sebelumnya ditugaskan memimpin pasukan Boo Ei Teisintai (gabungan dari Barisan Seinendan, Keibodan, Tokubetsutai, Kai In Yooseiso, dan Mi Hari In, tidak termasuk Fujinkai). Bendera Hinomaru tidak berkibar lagi sejak 21 Agustus 1945 dan sebagai gantinya berkibirlah dengan megah bendera Merah Putih. Dalam upacara itu, panji Pasukan PTA diserahkan dari tangan Takasaki kepada P.A. Tiendas. Panji itu berwarna Merah Putih dengan gambar "banteng menyeruduk" dan tulisan PTA di sudut kanan atas (Sompie, 1979; Taulu, 1956).

Tetapi awal September 1945, Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka dipanggil untuk menghadap pimpinan Sekutu yang bemarkas di Morotai. Ia kembali lagi ke Minahasa tanggal 5 September 1945 dan besoknya mengeluarkan instruksi agar Pasukan PTA dibubarkan, Akademi Militer Tondano ditutup serta pemerintahan sipil yang sudah diserahkan diambil alihnya kembali. Rupanya ia diperintahkan Sekutu untuk menjaga keadaan status quo di wilayah tugasnya. Aparatur pemerintahan sipil tidak mampu berbuat apa-apa untuk membangkang isi instruksi di atas sedangkan Pasukan PTA belum sanggup melawan dengan kekuatan senjata, berhubung hanya sedikit sekali senjata yang ada dan itupun hanya di tangan para komandan pasukan saja. Jadi dengan demikian walaupun ada kandungan maksud untuk melawan atau merebut senjata Jepang, namun berhubung alat senjata untuk itu dapat dikatakan tidak ada, maka pimpinan Pasukan PTA memilih tindakan lain. Mereka tidak akan membuang tenaga dan jiwa menyerang pasukan Jepang yang masih lengkap persenjataannya, untuk menyusun kekuatan dalam menghadapi

Belanda yang tidak lama lagi akan tiba. Oleh karena itu dilakukanlah persiapan-persiapan yang perlu untuk melakukan gerakan di bawah tanah dan sebagian lagi pergi masuk hutan untuk bergerilya melawan Belanda.

Untuk maksud melakukan perang gerilya melawan Belanda maka diak tipkan kembali PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) yang pernah dibentuk 15 Pebruari di Seretan Tondano ketika Jepang masih berkuasa. Pengaktipan itu dilakukan sekitar awal bulan September 1945 dengan markas besar ditempatkan di Tondano. Pimpinan PPI waktu itu ialah E.F. Johannes SH, H.M.L. Legoh, N.P. Somba, Alex Pakasi, J.M.L. Supit, Wim Pangalila, Engel A. Parengkuan, G.A. Maengkom, Kayang Gosal, Andi Masengi, Victor Adam, J. Kumaunang, Rachmat Pulukadang dan kawan-kawannya. Para penghubung yang terdiri dari para pemuda nasionalis ditugaskan ke beberapa daerah antaranya di Bolaang Mongondow untuk mengaktipkan PPI di daerah bersangkutan sebagai kekuatan penentang kembalinya Belanda.

Untuk melakukan gerakan di bawah tanah, maka sejak akhir Agustus 1945, telah dibentuk sebelumnya di Manado suatu organisasi pemuda nasionalis yang dinamakan Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI). Untuk memunculkan dan memperkenalkan diri kepada rakyat sekaligus secara terbuka menentang Belanda, maka BPNI menerbitkan surat kabar "Catapult" (berbahasa Belanda) dan "Suara Indonesia Muda" (berbahasa Indonesia). Kedua surat kabar itu bersama-sama dipimpin oleh John Rahasia dan Ch.D. Pontoh. Penggandaan dan penstensilan surat kabar kebanyakan mempergunakan fasilitas dari instansi NICA, tanpa diketahui oleh Belanda.

Di daerah Gorontalo, setelah tersiar berita tentang kekalahan Jepang, maka hal itu segera menimbulkan reaksi serta tanggapan di kalangan para tokoh nasionalis dan rakyat di daerah tersebut. Ada yang merasa gembira terutama pemuda tetapi ada pula yang masih ragu-ragu karena belum ada pemberitahuan resmi dari pemerintah pendudukan. Tapi kaum nasionalis yang pernah merebut kekuasaan Belanda 23 Januari 1942, menanggapi hal itu sebagai suatu kesempatan yang baik untuk sekali lagi merebut kekuasaan yang kali ini dari tangan Jepang.

Namun hal itu diperhadapkan dengan suatu masalah yaitu tidak adanya persenjataan di pihak kaum nasionalis, sehingga walaupun mereka memiliki semangat yang berapi-api, tapi bayangan kegagalan menghambat mereka untuk menyerang pasukan-pasukan Jepang yang masih lengkap persenjataannya. Dalam situasi seperti itu Kenkanrikan Kinosita memanggil Nani Wartabone untuk membicarakan soal penyerahan kekuasaan pemerintahan di sana. Kemudian pada 9 September 1945, dilakukan upacara penyerahan pemerintahan kepada rakyat yang diterima oleh Nani Wartabone yang seterusnya bertindak selaku Kepala Daerah Gorontalo dalam pemerintahan nasional. Bendera Merah Putih berkibar menggantikan bendera Hinomaru sejak tanggal itu. Kesemua peristiwa ini akhirnya meredakan tekad pemuda untuk menyerang Jepang, dan sebaliknya semangat diarahkan bagi mendukung kelangsungan hidup pemerintahan nasional di bawah pimpinan Nani Wartabone waktu itu. Pada waktu semangat pemuda sedang ber-

nyala-nyala, para tokoh nasionalis di sana menasehatkan bahwa menyerang Jepang berarti akan membawa korban yang tidak diinginkan di pihak rakyat berhubung tidak adanya senjata. Tindakan Jepang dengan menyerahkan kekuasaan ke tangan rakyat menunjukkan bahwa perhitungan kaum nasionalis di sana tepat (Daiton H. Wantogia, wawancara 6-9-1979).

Mengenai perebutan kekuasaan dari tangan Jepang di daerah Sangir Talaud dapat dikatakan tidak pernah terjadi selain pemberontakan rakyat pernah dilakukan oleh rakyat Makalehi terhadap Jepang Maret 1945 tetapi ternyata gagal (Manus dkk, 1978 ; Elias, 1973). Setelah itu maka walaupun rakyat di sana ingin berontak atau merebut kekuasaan dari Jepang, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain bergerak secara sembunyi-sembunyi saja berupa gerakan di bawah tanah. Hal ini ternyata ketika diketahui Jepang, telah mengakibatkan jatuhnya korban di pihak para pemimpin dan pengikut-pengikutnya, seperti misalnya yang dialami oleh Raja Koagouw dari Kerajaan Talaud.

Di daerah Bolaang Mongondow, menyusul berita yang sifatnya dirahasiakan tentang kekalahan Jepang yang disampaikan oleh komandan Tokeitai bernama Takamoto kepada Fukugunco Lolayan J.F.K. Damopolii awal September 1945, maka pada pertengahan bulan itu, Damopolii didatangi oleh dua orang utusan dari Markas Besar PPI di Tondano (Minahasa). Dengan adanya berita bahwa Jepang sudah kalah dan Indonesia sudah merdeka, maka misi kedua utusan PPI itu berhasil yakni dengan terbentuknya PPI Komisariat Bolaang Mongondow pada 17 September 1945 dengan ketuanya J.F.K. Damopolii. Polisi Jepang segera menyatakan diri sebagai polisi Belanda sehingga usaha PPI untuk merebut kekuasaan digagalkan mereka. Hal itu terjadi pada tanggal 17 September itu juga, dan dengan demikian maka mulai saat itu PPI Laskar Banteng mengintensipkan latihan-latihan dan mulai menjalankan perang gerilya ketika Belanda dengan NICA nya mulai memerintah daerah Bolaang Mongondow.

2. Timbulnya organisasi kemiliteran dan perjuangan (BKR Kelaskaran).

Penyerahan pemerintahan sipil untuk Keresidenan Manado sudah diserahkan oleh Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka kepada Residen E.H.W. Pelengkahu dalam jabatannya selaku Ketua PPKI Sulawesi Utara/Tengah tanggal 21 Agustus 1945. Dua hari kemudian Letnan Kolonel Takasaki membentuk dan menyerahkan Pasukan PTA atas nama Laksamana Muda K. Hamanaka kepada Hulubalang P.A. Tiendas. Pasukan PTA ini dimaksudkan sebagai organisasi militer yang sedianya akan menunjang jalannya pemerintahan Keresidenan Manado di bawah Residen E.H.W. Pelengkahu. Namun diakui bahwa Jepang bertindak cukup hati-hati dengan tidak segera menyerahkan persenjataan yang dibutuhkan Pasukan PTA untuk mengamankan jalannya pemerintahan waktu itu. Dengan tidak adanya senjata dimaksud maka Pasukan PTA dapat dianggap sebagai wadah tanpa isi. Hanyalah dengan modal semangat nasionalisme yang tinggi maka para pemimpinnya menempuh kebijaksanaan dengan menginstruksikan kepada para anggotanya untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda dan bukannya berusaha merebut senjata dari tangan Jepang waktu itu. Hal ini sudah cukup diuraikan pada halaman di depan.

Oleh langkah kebijaksanaan seperti di atas maka Pasukan PTA dapat dikatakan dengan sendirinya bubar. Namun para tokoh nasionalis tidak berputus asa karena mereka segera mengaktifkan kembali PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) yang dahulunya yakni 15 Februari 1945 pernah dibentuk Jepang. Oleh para tokoh PPI yang bermarkas di Tondano (Minahasa) ini dibentuklah staf komando yang berkedudukan di Markas Besar dilengkapi dengan sektor-sektor di seluruh Minahasa bahkan ke seluruh daerah yang lain di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah bahkan sampai ke luar wilayah ini. Kalau BPNI berpusat di Manado dan dikatakan bergerak secara legal dengan menerbitkan dua surat kabar-"Catapult" dan "Suara Indonesia Muda", maka PPI bergerak secara ilegal dan bertujuan melaksanakan perang gerilya terhadap kekuasaan NICA. Keanggotaan rangkap dalam PPI maupun BPNI tidak merupakan halangan bahkan semakin memperkuat kedua organisasi pemuda pejuang itu.

Tingkat Markas Besar PPI di Tondano dipimpin oleh E.D. Johannes SH, H.M.L. Legoh, Alex Pakasi, J.M.L. Supit, Wim Pangalila, N.P. Somba, Engel A. Parengkuan, G.A. Maengkom, Kayang Gosal, Andi Masengi, Victor Adam, J. Kumaunang, Rachmat Pulukadang, dan lain-lain. Staf perlengkapan Markas Besar dipimpin oleh Wim Pangalila, N. Kumaunang, J. Karinda, J. Runtu dan kawan-kawannya. Para Penghubung/Kordinator Pemuda di sana ialah E. Matulandi, E. Runturambi, L.J. Mewengkang, B. Wowor, J. Musu, J. Worek dan lain-lain (Legoh, 1973 ; dilengkapi keterangan Nurtina Gonibala di halaman di depan).

Untuk menyusun kekuatan maka PPI membentuk Sektor-sektor baik di tempat kedudukan Markas Besar (di Tondano) maupun di tempat-tempat lainnya di Minahasa, bahkan dipersiapkan juga untuk daerah-daerah lainnya di luar Minahasa. Sektor-sektor di Minahasa, berikut Komandan Sektor, Kordinator Sektor dan para pembantunya yakni (Legoh, 1973) :

1. Kota Tondano, terbagi atas empat sektor yaitu :

- a. Tondano Kota : Alex Pakasi, Jo Lumanauw, Gaston Rampen, J. Kolondam, A. Umar, Jan Lumanauw dkk;
- b. Kampung Jawa Tondano : Rachmat Pulukadang, Usman Pulukadang, dkk;
- c. Tondano Barat/Kodya/Tataaran : J. Pangemanan, V. Lewu, M. Lawu, J. Parengkuan dkk;
- d. Tondano Timur/Tondano Pante : Kayang Gosal, H.M.L. Legoh, V. Lumingkewas, R. Tairas, V. Mamengko, D. Sumele, A.S. Lengkong, J. Pakasi, J. Angkouw, T. Hermanus, J. Kindangen, dkk;

2. Kota Manado, terbagi atas tiga sektor :

- a. Manado Utara : John Rahasia, Chris D. Portoh, J. Mailangkay, Tjoku, M. Mamansage, Boan Adji, Jerrit Kansil, dkk;
- b. Manado Tengah : M. Canon, Njong Lombang, Jo Damopolii, Abdul Madjoka, Hamzah Darise, dkk;
- c. Manado Selatan : No Tooy, Leo Taroreh, J. Warbung, W. Mongan, Max Roringkon, dkk;

3. Kakas : W.H. Maleke, John Malonda, F. Rondonuwu, N. Manapa, W. Malonda, W. Kusoy, dkk;

4. Tomohon : F.H.L.W. Mondong, F. Wongkar, Karel Wondal, Gus Warouw, S. Montolalu, G. Pangkerego, M. Rumajar, H.D. Kowaas, G. Wowor, dkk;
5. Airmadidi : V. Mandey, B. Wenas, Albert Tanod, David Sompi, Jong Mandey, Nona Gusta Ngantung, Paulus Coen de Breving, dkk;
6. Dimembe-Likupang : Frans Korah, S. Manangka, B. Mamahit, C.I. Pondaag, Kaunang, Manus, A.R. Rotty, P. Tangkudung, W.S. Bolang;
7. Minawerot : Boas Karamoy, Wim Kotambunan, Bonny Lengkong, Emor Sumampouw, Lewan Wowor, A.K. Maldangkay, A. Pangemanan, dkk;
8. Girian - Bitung : Butje Sumampouw, H. Watuna, A. Pangau, Abdullah Hamid Assegaf, W.A. Tangkudung, Supu Saridin, dkk;
9. Paso : H.S. Kaeng, A.W. Kaeng, E. Sanger, dkk;
10. Remboken : Jus Mamusung, Constantijn Mamahit, Jan Rombot, F. Wowor, D. Tangkowitz, J. Kairupan, J. Lisangan;
11. Langowan : W. Saerang, R.C. Massie, D. Mumu, S. Sirang, Djim Gobel, Ali Aldjahani, dkk;
12. Tompaso : Gerzon Tewu, Pieter Kembuan, J.V. Dajoh, B. Supit, dkk;
13. Tompaso Baru : H.B. Estefanus, Jootje Liogu, Jan Rey, dkk;
14. Kawangkoan : Wevin Taulu, G. Mendur, Gertje Supit, Ton Lumentah, E.R.S. Bujung, A.I. Monintja, H. Sondakh, dkk;
15. Leilem : M.W. Pelealu, W. Kusoy, A. Kairupan, M. Pelenkahu, dkk;
16. Sonder : A. Linu, A.L. Tambuwun, J. Komalig, B. Rawung, dkk;
17. Amurang : Henky Kaligis, J. Sariowan, Junus Oflagi, Wim Tamburian;
18. Motoling : Jan Piay, W. Paath, F. Nander, W. Makaliwe, E. Bujung, Eddy Rambis;
19. Ratahan - Tombatu : Jan M. Methusala, Hans Lengkoan, Piet Salasa, Goan Sangkaen, J. Parengkuan, W. Josep, dkk;
20. Belang : H. Safar, F. Kindangen, J. Sumilat, dkk.

Di luar daerah Minahasa, termasuk sampai ke Sulawesi Tengah, dalam persiapan dibentuk pula sektor-sektor lengkap dengan komandan sektor dan kordinator sektor sebagai berikut (Legoh, 1973; ditambah keterangan dari Nurtina Gonibala untuk Bolaang Mongondow) :

1. Kotamobagu : Saleh Mokobombang, H. Pandelaki, I. Pinontoan, J.F.K. Damopolii, Nurtina Gonibala, Abdurrachman Mokobombang, dkk;
2. Molibagu : Ibrahim Mooduto, R. van Gobel, Husein Tanta, dan di Pinolosian : M. Gonibala;
3. Gorontalo : Nani Wartabone, Hasan Usman, J.A. Pendang Kalengkongan, R.M. Koesno Dhanupojo, Abdul Tangahu, Lotulong Mantiri, dkk;
4. Tahuna Sangir Talaud : F. Sanger, P. Tamarindang, Anthon Liotohe, dkk;
5. Tabukan Sangir Talaud : F.D.R. Andaria, dkk;
6. Tamako Sangir Talaud : E. Rampisala, F. Lahengko, A. Kantor, dkk;
7. Poso : Wangko, L. Talasa, J.K. Janis, Abdul Latif, Mangitung, Sinus Pangemanan, R. Mangolo, Abdul Muis Rengga, B. Kawadi, J.S. Pangkey, Abubakar Baginda, Holidu Dandu, Niode, A.A. Rawung, J. Panguru, E. Lagaronde, Sesuri, Olikinsol, dkk;

8. Tolitoli : Jules Makalew, Paul Sigar, dkk;
9. Luwuk-Banggai : Aziz Larekeng, W. Pedju, Radja Sukuran Amir, J. Monoarfa, dr. Sutarjo, P. Maluegha;
10. Bunta : Amin Larekeng, Tees Bula, dkk;
11. Pagimana : Jusuf Monoarfa, S. Kardiati, dkk;
12. Tentena : A. Sanger, L. Bandola, A.D. Taulu, dkk;
13. Palu-Donggala : Abdullah Amu, Abdul Gani, Suwondo, Gerard Solang, dkk.

Dengan demikian maka ternyata untuk daerah Minahasa saja, PPI telah menyusun kekuatan pada 25 Sektor di mana Tondano dan Manado terdiri dari beberapa sektor tertentu pula. Kemungkinan memperluas kegiatan PPI di luar wilayah Keresidenan Manado turut diperhitungkan pula dengan menggunakan orang-orang yang kebanyakan berasal dari wilayah ini. Daerah-daerah yang termasuk rencana perluasan perjuangan dari PPI pada waktu itu ialah Sulawesi Selatan, Irian Barat (sekarang Irian Jaya) dan Kalimantan. Mereka yang ditunjuk sebagai Koordinator/Penghubung di daerah tersebut adalah sebagai berikut (Legoh, 1973) :

1. Sulawesi Selatan : Donggeng, Daeng Ngasa, Abdurasjid Daeng Lurang, Djumarang Daeng Ngaro, Sjamsuddin Basa Daeng Rambo, Djamaudin Daeng Tunru, Malombasang Daeng Tawang, Andi Bahruddin, Dinar Daeng Sila, Marthin Rondonuwu, Wim Langoy, P. Jacob, G. Sumarauw, R.W. Mongisidi, dkk;
2. Irian Barat : Tololiu, A. Sumanti, Mardi, Jouwe, Wursaye, F. Gumalang, Taliwongso, Rumengan, J. Tepi, W. Pakasi, Silas Papare, F. Kaisopo, Jootje Kaligis, A. Koromat, M. Indey, L. Rumkorem, Eljuso, Abraham Bouw, J.A. Limara, dkk;
3. Kalimantan : H. Runturambi, dkk.

Sementara tahap konsolidasi dijalankan oleh PPI, maka salah seorang pemimpinnya dari Markas Besar di Tondano diutus untuk menemui seorang bintanga KNIL di Manado yakni Sersan Ch.Ch. Taulu yang punya banyak pengaruh di kalangan para anggota KNIL yang ditempatkan di Minahasa pada waktu itu, terutama dalam Kompi 7 yang bermarkas di Teling. Pertemuan itu dilakukan di rumah kediaman Ch.Ch. Taulu di Titiwungen Manado tanggal 5 Nopember 1945 dan dilakukan secara rahasia. Dalam pertemuan itu dibentangkan tentang kekuatan yang dimiliki PPI untuk melawan Belanda sejalan dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Yang menjadi masalah pada pertemuan itu yakni siapakah yang harus memulakan perjuangan dan bagaimanakah cara untuk melaksanakannya. Pertemuan itu berkesimpulan bahwa perebutan kekuasaan adalah hal mutlak yang harus dilakukan dan untuk itu diperlukan senjata yang pada waktu itu dimiliki oleh Belanda (Legoh, 1973).

Walaupun Sersan KNIL Ch.Ch. Taulu bekerja dalam dinas militer Belanda namun jiwa patriotisme bagi tanah air Indonesia nyata ketika ia menyatakan kesanggupannya untuk turut terjun dalam perjuangan. Dikatakannya bahwa walaupun ia dan Sersan S.D. Wuisan dan kawan-kawan lainnya sementara itu memakai uniform Belanda, namun mereka tetap memiliki jiwa patriotisme yang cinta kepada tanah air Indonesia. H.M.L. Legoh juga mengemukakan bahwa jumlah kekuatan PPI

waktu itu sekitar 20.000 anggota yang siap memegang senjata di mana sebagian besar di antaranya sudah pernah menerima latihan militer dari Jepang (Legoh, 1973).

Dengan demikian maka pembentukan dan tujuan perjuangan organisasi kelaskaran PPI, diimbangi dan diperkuat dengan adanya gerakan penentang dalam tubuh militer Belanda sendiri di bawah pimpinan Sersan Ch.Ch. Taulu dan Sersan S.D. Wuisan. Untuk itu maka Taulu menyusun rencana perjuangan sebagai berikut (Taulu, 1956) :

1. Harulah dipergunakan anggota-anggota tentara untuk mengadakan aksi berhubung mereka memiliki fasilitas persenjataan yang diperlukan;
2. Aksi harus bertujuan untuk :
 - a. mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;
 - b. melemahkan kedudukan NICA;
 - c. menunjukkan bahwa orang Minahasa yang biasanya diejek sebagai pendukung Twaalfde Provincie, sesungguhnya tidak mau ketinggalan dan menyadari kewajibannya terhadap Ibu Pertiwi;
 - d. memberikan teladan dan dorongan kepada para anggota KNIL berkebangsaan Indonesia terutama yang berasal dari Minahasa yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk bertindak mengikuti jejak di Minahasa.
3. Pelaksanaan aksi itu harus dijalankan dengan lisan, rahasia dan bertingkat-tingkat sebagai berikut :
 - a. bahwa janji Ratu Wilhelmina dalam pidato radio 8 Desember 1942 tidak ditepati, ternyata dalam NICA masih tetap dijalankan perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan kebangsaan dalam soal gaji dan jaminan-jaminan lainnya seperti masa sebelum perang;
 - b. mengajuk perasaan tentang Proklamasi Kemerdekaan RI di bawah bendera Merah Putih bilamana ayat a. memuaskan;
 - c. mengajuk perasaan tentang revolusi di Jawa bilamana ayat b. memuaskan;
 - d. mengajuk perasaan jika di Minahasa diadakan perebutan kekuasaan bilamana ayat c. memuaskan.

Rencana kegiatan di atas dijalankan oleh Sersan Ch.Ch. Taulu dan rekannya Sersan S.D. Wuisan. Sebagai hasilnya maka mereka berhasil merangkul kawan-kawan dalam KNIL sebagai berikut : Sersan Wim Waney, Kopral W.F. Sumanti, Sersan F. Bismar, Kopral A.S. Rombot, Kopral S. Mende, Kopral J. Runtukahu, Kopral J. Sambuaga serta beberapa anggota KNIL lainnya seperti : No Korompis, Gustaaf Sumarauw, Jus Kotambunan, Mas Sitam, Gerzon Andries, L. Item, N. Anes, P. Malonda, A.A. Sigarlaki, S. Kumaunang, O. Rumambi, M. Rotinsulu, F. Korah, Suparmin dan sebagainya. Langkah berikutnya maka Sersan W. Waney ditugaskan sebagai penghubung dengan PPI di Sektor Amurang. Kopral W.F. Sumanti sebagai Penghubung dengan PPI Sektor-sektor di Manado dan Tondano. No Korompis sebagai Penghubung untuk PPI Sektor Tondano, Langowan, Kawangkoan dan Tomohon. Kopral J. Sambuaga sebagai Penghubung untuk PPI Sektor-sektor di Manado dan Tonsea. No Tooy seorang pegawai sipil dalam dinas telepon militer ditunjuk sebagai Penghubung untuk PPI Sektor- sektor

di Manado. Dapat ditambahkan bahwa selain bergiat di kalangan militer, Taulu dan rekan-rekannya aktif juga mengadakan hubungan dengan para pejabat sipil dalam dinas CONICA. Di antaranya diadakan kontak terus menerus dengan B.W. Lapien yang waktu itu adalah Hukum Besar (Kepala Distrik) Manado (Desember 1945 - Februari 1946) juga dengan Maurits Tangkilisan yang waktu itu sebagai Hukum Kedua (Camat) Kauditan Minahasa (Taulu, 1956 ; Watuseke, 1968).

Sejalan dengan perkembangan di Minahasa, di daerah Bolaang Mongondow juga dibentuk organisasi kemiliteran/perjuangan yang disebut PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow. Organisasi ini adalah perluasan organisasi perjuangan serupa dari Minahasa yaitu PPI yang bermarkas besar di Tondano. Sebagai Komandan PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow ialah Abdurrachman Mokobombang. Organisasi ini dibentuk 17 September 1945 di Motoboi Kecil Kotamobagu. Sejak tanggal pembentukannya, PPI Laskar Banteng memperluas keanggotaannya sampai ke desa-desa di seluruh daerah Bolaang Mongondow. Untuk tiap wilayah setingkat kecamatan, dibentuk pasukan di bawah seorang Komandan Sektor. Sedangkan di tingkat markas di Motoboi Kecil, terdiri dari beberapa pasukan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komandan Kelompok. Pasukan wanita hanya terdiri atas satu kelompok dengan Komandan Kelompok Nurtina Gonibala. Baik para komandan sektor, komandan kelompok (pria) maupun komandan kelompok wanita, taktis organisatoris berada di bawah Komandan PPI Laskar Banteng Abdurrachman Mokobombang.

Jabatan sebagai Komandan PPI Laskar Banteng itu dipegang oleh Abdurrachman Mokobombang atas penunjukan dari Ketua Komisariat PPI daerah Bolaang Mongondow J.F.K. Damopolii, yang ditunjuk/dihubungi oleh dua pemuda utusan dari Markas Besar PPI di Tondano Minahasa. J.F.K. Damopolii ini waktu itu menjabat sebagai Fukugunco (setingkat Camat) yang diangkat sejak Jepang berkuasa di sana. Karena jabatannya itu maka ia bersahabat dengan Komandan Tokeitai Takamoto. Ketika sudah jelas bahwa Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, maka Takamoto menyerahkan sejumlah senjata ringan seperti LE, pistol, amunisi dan sejumlah granat kepada Damopolii yang langsung menyerahkannya kepada PPI Laskar Banteng untuk digunakan dalam perang gerilya melawan Belanda.

Sejak September 1945, PPI Laskar Banteng menyelenggarakan latihan-latihan militer di sekitar desa Molinow di Kotamobagu. Para pemuda dan wanita dilatih memegang dan mempergunakan senjata di bawah para pelatih yang dahulunya pernah dilatih Jepang dalam Heiho, Keibodan dan sebagainya. Lapangan olah raga yang terletak dekat mesjid di desa itu dijadikan sebagai pusat latihan. Kegiatan latihan itu berlangsung terus menerus sampai bulan Nopember 1945.

Pada bulan itu, sepasukan KNIL berkekuatan satu kompi didatangkan dari Minahasa atas permintaan Komandan Polisi Belanda Herry Harun Manoppo (memegang jabatan itu oleh pengangkatan Jepang). Kompi KNIL itu dipimpin oleh Komandan Kapten Latuperissa. Bersamaan dengan datangnya pasukan itu maka NICA menempatkan seorang Controleur yaitu Langendon untuk Bolaang Mongondow yang berarti status Onderafdeeling seperti sebelum perang dijalankan

kembali di sana.

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, Ketua Komisariat PPI merangkap Ketua PSII Cabang Bolaang Mongondow J.F.K. Damopolii ditangkap oleh polisi Belanda pada 27 September 1945 dan sejak saat itu dibentuk pimpinan darurat di bawah isterinya Nurtina Gonibala. Di bawah pimpinannya maka PPI Laskar Banteng meneruskan latihan-latihan militer dengan sasaran jangka pendeknya yakni merebut kekuasaan Belanda di daerah Bolaang Mongondow sedangkan tujuan untuk jangka panjang yakni mendirikan pemerintahan sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah itu. Dengan ditangkapnya Damopolii dan dipenjarakan di Manado maka rupanya rencana PPI Laskar Banteng dibocorkan oleh Belanda. Dengan demikian maka pasukan KNIL datang dan segera membantu polisi Belanda mengadakan penangkapan-penangkapan.

Hal ini dijalankan Belanda mengingat bahwa anggota-anggota PPI Laskar Banteng aktif mengadakan penghadangan-penghadangan serta pemutusan kawat-kawat telepon di daerah itu, selain aktif mengadakan latihan-latihan, dengan mempergunakan senjata-senjata yang pernah diserahkan oleh Jepang itu. Yang ditangkap pada waktu itu ialah (Nurtina Gonibala, wawancara 17-9-1979) :

1. Nurtina Gonibala, pimpinan darurat PPI Laskar Banteng dan PSII Cabang Bolaang Mongondow, di samping jabatannya sebagai Komandan Kelompok Wanita PPI Laskar Banteng;
2. P.U. Kombo, aktivis PSII dan Kepala Desa Poyowa Kecil;
3. L. Mokobombang, Kepala Desa Molinow;
4. Abdurrachman Mokobombang, aktivis PSII dan Komandan PPI Laskar Banteng seluruh Bolaang Mongondow;
5. Saleh A. Mokobombang, salah seorang Komandan kelompok PPI Laskar Banteng dan Penghubung dengan PPI Laskar Banteng wilayah Kerajaan Bolaang Uki; yang berpusat di Kotamobagu;
6. Saridin Daun, salah seorang Komandan Kelompok di Markas PPI Laskar Banteng merangkap Penghubung dengan PPI Laskar Banteng yang berpusat di Molibagu;
7. A.H. Raupu, salah seorang Komandan Kelompok di Markas PPI Laskar Banteng;
8. Harun Mamonto, Ketua PMI-PSII Kecamatan Lolayan;
9. Agust Sukami, salah seorang Pelatih PPI Laskar Banteng di Markas PPI Laskar Banteng;
10. Hatidah Mokobombang, Ketua Onder Departemen Wanita PSII daerah Bolaang Mongondow.

Semua mereka ditahan dalam penjara Kotamobagu selama tiga bulan, kecuali Nurtina Gonibala yang kemudian dikirim ke Manado dan sempat dipenjarakan bersama-sama dengan para pelopor pemberontakan 14 Februari 1946 setelah berhasil digagalkan Belanda 11 Maret 1946 (Nurtina Gonibala, wawancara 17-9-1979). Dengan ditangkapnya sebagian pimpinan inti oleh Belanda, maka para pemimpin lainnya segera memindahkan markas PPI Laskar Banteng ke perkebunan Tanoyan. Dari sana maka mereka terus menerus melancarkan perang gerilya

melawan Belanda.

Di daerah Gorontalo, sejak diserahkannya pemerintahan daerah itu oleh Jepang 9 September 1945, maka pemerintahan nasional di sana di bawah pimpinan Nani Wartabone selaku Kepala Daerah yang diangkat dan disetujui oleh Dewan Nasional segera mengaktifkan organisasi-organisasi kelaskaran untuk mengamankan jalannya Pemerintahan daerah itu. Di daerah tersebut dibentuk beberapa organisasi kelaskaran dengan nama berbeda-beda. Antaranya muncullah Pasukan Keamanan Rakyat (PKR), Tentara Indonesia Merdeka (TIM) dan seba gainya. Semua organisasi kelaskaran itu berada di bawah Komandan A.J. Usman yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah Nani Wartabone (Usman, 1972).

Pusat latihan kelaskaran terletak di Suwawa. Senjata-senjata yang berasal/diperoleh dari Jepang, disimpan di Tabuliti (suwawa) dan tempat itu dijadikan pusat latihan bagi para pemuda yang dengan sukarela menjadi anggota pasukan keamanan. Pada waktu itu terdapat sekitar 100 pemuda terlatih yang siap sedia menghadapi segala kemungkinan gangguan keamanan baik dari pihak Jepang maupun dari pihak Belanda yang dikabarkan akan datang bersama-sama tentara Sekutu. Selain mereka, maka seluruh rakyat tua muda, lelaki wanita, siap sedia dengan lembing, keris, pedang, bambu runcing, dan sebagainya, dan aktif menjaga keamanan lingkungannya masing-masing dan lingkungan kota Gorontalo.

Berbeda dengan di ketiga daerah lainnya, di daerah Sangir Talaud, tidak pernah dibentuk organisasi kelaskaran, selain organisasi-organisasi semi militer yang pernah dibentuk oleh Jepang. Namun para anggota organisasi semi militer bentukan Jepang itu tidak mengadakan kegiatan apa-apa untuk mengorganisir diri membentuk organisasi kelaskaran. Barulah kemudian setelah Belanda berkuasa, suatu organisasi politik bernama Barisan Pemuda Republik Indonesia (BAPRI) membentuk Barisan Keamanan di Siau khusus untuk menunjang tuntutan agar daerah itu keluar dari NIT yang dibentuk oleh Belanda (Elias, 1973).

3. Partisipasi masyarakat

Sejak dimulainya kegiatan oleh Sersan Ch.Ch. Taulu untuk memberontak terhadap Belanda maka ia bersama rekan-rekannya, aktif secara rahasia mengadakan perundingan-perundingan dengan para pemimpin pemuda yang tergabung di dalam PPI (bermarkas di Tondano) dan BPNI (bermarkas di Manado). Hal ini dimulai 5 Nopember 1945, ketika H.M.L. Legoh dari Markas Besar PPI menjumpai Taulu dan mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya di Titiwungen Manado.

Dalam setiap pertemuan rahasia itu, selalu mereka usahakan agar jangan sampai diketahui Belanda, dengan melakukan berbagai cara. Antara lain dapat disebutkan ketika diadakan rapat rahasia di rumahnya Sersan S.D. Wuisan di Titiwungen Manado. Resminya pertemuan mereka adalah dalam bentuk perayaan ulang tahun. Untuk itu maka isteri Wuisan bernama Maas Tangkilisan menyediakan bermacam-macam kue dan hidangan lainnya di ruangan depan di mana banyak orang berkumpul dan bersukaria. Sedangkan di ruangan lain dibagian belakang, dilangsungkanlah rapat rahasia dimaksud. Dengan demikian maka NEFIS

dan PID tidak curiga berkumpulnya begitu banyak orang di rumah itu.

Di daerah Gorontalo, dalam usaha untuk menunjang jalannya pemerintahan pimpinan Nani Wartabone di sana, rakyat ketika Jepang masih berkuasa (sebelum datangnya Sekutu) tetap merahasiakan tempat-tempat kedudukan pasukan pemuda dan tempat latihan mereka. Demikian juga ketika Belanda datang dengan membonceng tentara Sekutu. Pasukan-pasukan Pemuda dalam bentuk organisasi kelaskaran seperti PKR dan TIM mendapat bantuan berupa obat-obatan dari anggota-anggota masyarakat, baik yang berdinasi di lembaga-lembaga kesehatan, dari dokter Indonesia di sana, bantuan kelompok maupun perorangan, yang kesemuanya diberikan dengan ikhlas dan rela demi untuk kelangsungan perjuangan menegakkan pemerintahan RI di daerah itu. Walaupun tidak terdapat dapur umum, namun di sana bantuan masyarakat berupa beras senantiasa diberikan kepada para anggota pasukan yang berdatangan dari tiap desa. Juga pasukan yang datang atau memang bertugas menjaga keamanan desa memperoleh jaminan perbekalan dari rakyat berupa beras dan lauk pauk lainnya.

Di daerah Bolaang Mongondow, sementara berlangsungnya latihan-latihan kelaskaran dari PPI Laskar Banteng, maka oleh rakyat di sana selalu disediakan bantuan berupa makanan kepada para anggota laskar itu. Ketika para pimpinan laskar ditangkap oleh Belanda, maka markas dipindahkan ke perkebunan Tanoyan. Dengan masuk hutannya para anggota laskar itu, maka rakyat tidak memutuskan bantuan perbekalan mereka untuk pasukan yang melaksanakan perang gerilya di sana. Tapi akhirnya partisipasi mereka dapat diketahui oleh Belanda. Mulai pada saat itu maka rakyat yang tidak memiliki surat izin ke kebun oleh komandan polisi/tentara setempat, tidaklah diperkenankan pergi kekebunnya sendiri. Barangsiapa yang melanggar peraturan Belanda itu maka ditangkap dan diperlakukan secara kejam oleh Belanda. Rakyat bertambah sulit untuk membantu pasukan gerilya dengan perbekalan makanan disebabkan banyaknya mata-mata musuh yang tidak segan-segan melaporkan hal itu kepada polisi atau tentara. Namun hal itu tidak mampu menghalangi berlangsungnya dukungan rakyat terhadap gerilya dengan mencari berbagai macam cara untuk tetap membantu pasukan-pasukan gerilya Laskar Banteng yang berada di hutan-hutan. Juga rakyat selalu memberikan informasi tentang kekuatan dan kedudukan pasukan musuh kepada PPI Laskar Rakyat yang melancarkan perang gerilya di sana.

Markas mereka terletak kira-kira 15 Km dari Kotamobagu di tempat bernama Tanoyan. Ketika rakyat tidak diperkenankan membawa makanan ke kebun maka mereka mengizinkan kepada anggota-anggota laskar untuk mengambil bahan makanan berupa padi dan jagung yang ada di kebun-kebun mereka sebagai bekal bergerilya. Anggota-anggota laskar yang tidak bertugas sering datang membantu petani yang sedang mengerjakan kebun ladang atau sawahnya tanpa setahu Belanda. Dalam kesempatan itu maka rakyat memberikan bantuan berupa garam dan obat-obatan kepada pasukan gerilya itu.

Untuk kebutuhan markas di Tanoyan, maka di situ didirikan dapur umum yang khusus untuk anggota gerilya yang bertugas di markas atau bagi pasukan yang datang ke sana dari sektor-sektor lainnya. Dapur umum itu menyediakan makanan

atau bekal bagi pasukan yang ditugaskan mengadakan penghadangan-penghadangan mobil atau pasukan Belanda, yang sedang mengadakan patroli di jalan-jalan. Pengurus dapur umum di markas Tanoyan itu ialah Hatidah Mokobombang dan Gilly Mokobombang. Setelah suksesnya perebutan kekuasaan di Minahasa 14 Februari 1946, maka tidak lama kemudian datanglah Residen B.W. Lapien dan Komandan Sersan F. Bisman ke Bolaang Mongondow. Sejak saat itu maka markas Tanoyan ditinggalkan, dan pindah ke Kotamobagu. Tanoyan hanya dijadikan sebagai tempat latihan anggota PPI Laskar Banteng di sana.

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI DAERAH

1. Sikap masyarakat

Tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito di Tokyo menyatakan penyerahan tanpa syarat kepada Sekutu dan berita itu diteruskan dari Jakarta ke Minahasa tanggal 17 Agustus 1945 yang diterima oleh markonis-telegrafis A.S. Rombot pada markas tentara Pendudukan di Tonsealama. Tanggal 28 Agustus 1945 Jepang mengumumkan di semua tempat tawanan di Manado, Tomohon dan Airmadidi bahwa keadaan sudah aman kembali dan para tawanan mulai saat itu sudah bebas pergi ke mana saja. Bagi yang memerlukan perawatan intensip dapat segera diberangkatkan ke Morotai (Maluku Utara) sebagai basis Sekutu (Wowor, 1977 ; Palit, 1978).

Awal September 1945, kepala pemerintahan pendudukan Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka dipanggil menghadap ke Morotai untuk melaporkan diri kepada Sekutu. Tanggal 5 September ia berada kembali di Tondano (Minahasa) dan mengumumkan bahwa pemerintahan sipil yang sudah diserahkannya kepada orang-orang Indonesia 21 Agustus 1945 diambil alihnya kembali sedangkan pasukan yang dibentuknya (Pasukan PTA) dinyatakan bubar. Sejak saat itu maka konsinyasi pasukan Jepang dan penjagaan terhadap pos-pos dan markas-markas mereka diperkeras dan diperketat. Di Manado sudah ditempatkan oleh Sekutu sebuah delegasi kecil yang ditinggalkan oleh Letnan Kolonel Muir (Australia) untuk mengawagi ketentuan-ketentuan penyerahan Jepang terhadap Sekutu termasuk inventarisasi perlengkapan perang dan soal tawanan (Wowor, 1977 ; Sompie, 1979).

Kalau di Jakarta pasukan Sekutu mendarat 29 September 1945 maka di Minahasa mereka mendarat berangsur-angsur mulai 8 Oktober 1945 melalui pelabuhan Manado di bawah pimpinan Letnan Kolonel Muir. Tentara Sekutu di bawah pimpinannya terdiri dari unsur tentara Australia dan tentara Belanda di mana turut membonceng aparatur pemerintahan sipil Belanda dalam jajaran (slagorde) SONICA. Pada tanggal 8 Oktober itu, diadakan serah terima militer di kota Manado dari tangan Laksamana Muda K. Hamanaka selaku Panglima dari tentara pendudukan Jepang wilayah Sulawesi Utara/Tengah kepada Letnan Kolonel Muir mewakili Sekutu. Pemerintahan sipil untuk wilayah tersebut yang berkedudukan di Ibukota Tondano, diserahterimakan tanggal 10 Oktober 1945 oleh Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka kepada Letnan Kolonel Coomans de Ruyter (Belanda) selaku pemimpin pemerintahan SONICA (Staff of Nederland Indies Civil Administration).

Akhir Oktober 1945 SONICA diganti dengan istilah CONICA (Command of Netherland Indies Civil Administration) sampai medio 1946 di waktu istilah CONICA diganti dengan Residen yang menandakan bahwa pemerintahan Hindia Belanda seperti sebelum perang dipulihkan kembali (Wowor, 1977 ; Watuseke, 1968).

Ketika Manado dihancurkan oleh serangan Sekutu mulai 7 September 1944, pusat pemerintahan Jepang dipindahkan ke Tondano bulan itu juga. Dengan datangnya Sekutu dan CONICA maka mereka tidak mendirikan pusatnya di Manado atau Tondano melainkan di Tomohon. Di kota itu Sekutu mendirikan markasnya yang disebut Headquarters dan pemerintahan SONICA mendirikan sebuah Hoofdkwartier. Pelucutan dan penawanan bagi tentara Jepang dilakukan oleh tentara Australia dibantu oleh tentara KNIL yang dibawa serta oleh SONICA. Usaha menjalankan kembali pemerintahan sipil dilakukan oleh orang-orang Belanda dipimpin SONICA Letnan Kolonel Coomans de Ruyter. Pasukan Australia yang ditempatkan di Tomohon berjumlah 60 anggota dan menempati bekas gedung sekolah Cugakko yakni SMP Gonzaga sekarang ini. Dapur umumnya menggunakan dapur susteran Walterus Tomohon di mana dipekerjakan wanita-wanita setempat sebagai petugas dapur umum itu (Wowor, 1977 ; Palit, 1978).

Ketika melihat bahwa Jepang sudah menyerah dan mulai melepaskan para tawanan mereka, maka timbullah rasa lega di kalangan masyarakat karena menganggap bahwa sudah lepas dari kekejaman dan penindasan serta penderitaan yang hampir tak tertanggungkan selama dijajah Jepang. Dengan demikian maka kedatangan tentara Sekutu bagi rakyat dipandang sebagai lambang kemenangan atas kelaliman yang selama itu dilakukan oleh Jepang. Pasukan-pasukan Australia menunjukkan sikap yang ramah tamah terhadap penduduk sedangkan orang-orang Jepang yang dilapurkan oleh rakyat sebagai terlalu kejam, segera dihukum tembak mati oleh tentara Australia itu. Bagi bekas pejabat-pejabat Jepang penyelesaian hukuman dilakukan melalui proses pengadilan militer.

Berbeda dengan pandangan mereka terhadap tentara Sekutu, maka terhadap aparaturnya SONICA dengan tentara KNIL nya, rakyat mulai menunjukkan sikap yang curiga. Apalagi ketika dua hari setelah penyerahan pemerintahan sipil (12 Oktober 1945), SONICA mengeluarkan peraturan soal moneter di mana satu rupiah Jepang hanya dinilai dua setengah sen uang NICA yang sangat mengejutkan bagi rakyat. Surat kabar "Pelita" yang pro Belanda diterbitkan kembali dan mulai berfungsi sebagai trompet Belanda.

Dalam bidang pemerintahan sipil, Distrik Tonsea utara dan Distrik Tonsea Selatan yang dibentuk masa Jepang, disatukan kembali menjadi Distrik Tonsea oleh NICA. Larangan untuk mengibarkan bendera Merah Putih yang sudah dicabut oleh Jepang, diberlakukan kembali oleh NICA. Di bidang kemiliteran, NICA membentuk LOC (Leger Organisatie Centraal) yang tugasnya ialah mendaftarkan kembali semua orang yang pernah bertugas dalam dinas militer Belanda sebelum pendudukan Jepang seperti bekas anggota Kortverbanders, Langeverbanders, Reserve Corps, milisi (pribumi dan Eropah) termasuk anggota pasukan polisi (vel-denalgemene politie). Dari yang datang mendaftarkan diri, dipilihlah di antara mereka yang dianggap masih tetap setia kepada Belanda lalu diaktifkan kembali

sesuai bidang tugasnya dahulu (Wowor, 1977).

Di bidang teritorial, NICA menghimpun kembali semua kekuatan lama yang pro Belanda seperti para pamongpraja, guru dan pegawai lainnya, termasuk mereka yang pernah ditawan Jepang karena pernah membantu Belanda. Rehabilitasi bagi yang diterima oleh LOC dan para pamongpraja dan sebagainya di atas, dilakukan secara menyolok sekali antara lain dengan diberikannya jaminan sosial yang baik sekali. Diperhadapkan dengan kenyataan bahwa rakyat biasa pada umumnya masih sangat menderita akibat kekejaman Jepang, maka rehabilitasi di atas menciptakan kontradiksi di kalangan masyarakat. Hal ini semakin membentuk solidaritas di kalangan rakyat terutama bagi kaum nasionalis yang berjuang bagi kemerdekaan dan keadilan untuk seluruh rakyat, juga di wilayah ini. Tingkat perekonomian rakyat masih sangat rendah akibat musnahnya rumah-rumah dan sumber mata pencaharian, merajalelanya penyakit, ketiadaan pakaian dan sebagainya yang dialami sejak Jepang masih berkuasa (Wowor, 1977).

Di pihak lainnya, kaum nasionalis yang menghendaki kemerdekaan melakukan tiga macam cara untuk melawan Belanda. Ada yang langsung masuk hutan untuk melancarkan gerilya dan ada pula yang diam-diam melakukan gerakan di bawah tanah di kota-kota dan desa-desa. PPI diaktifkan kembali dan memelopori perlawanan gerilya terhadap Belanda. BPNI dibentuk pada akhir Agustus 1945 dan bergerak di bawah tanah dengan pusatnya di kota Manado di mana diterbitkan dua surat kabar untuk mengimbangi surat kabar "Pelita". Di pihak lain maka banyak pula kaum nasionalis yang tanpa setahu NICA berhasil menyusup ke dalam tubuh pemerintahan mereka. Ada yang masuk menjadi anggota pamongpraja dalam dinas sipil NICA dan ada pula yang mendaftarkan diri masuk anggota dinas militer NICA dengan KNIL nya. Orang-orang asal daerah ini yang menjadi anggota tentara Sekutu melalui keanggotaan mereka di dalam tentara NICA, ternyata memiliki jiwa patriotisme yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan kaum nasionalis yang ada di kalangan masyarakat. Ketika mereka dihubungi oleh para tokoh nasionalis dalam hal ini dari PPI awal bulan Nopember 1945, dengan serta merta mereka menyediakan diri untuk berbakti bagi tanah air Indonesia, mengingkari sumpah setia mereka terhadap Belanda yang pada waktu itu masih termasuk dalam jajaran (slagorde) Sekutu.

Menghadapi kedatangan tentara Sekutu dan tentara NICA maka rakyat di daerah Gorontalo menganggap bahwa hal itu sebagai usaha untuk menjajah kembali daerah itu yang sudah menyatakan diri lepas dari penjajahan dan merupakan bagian dari Pemerintahan RI. Karena itu maka kedatangan tentara Sekutu dan tentara NICA harus ditantang sebab tentulah maksud mereka yakni hendak menjajah dan penjajahan bagaimanapun juga bentuknya, tetap akan menyebabkan penderitaan bagi seluruh rakyat (A. Tangahu, wawancara 9-9-1979).

Untuk itu maka Kepala Daerah Nani Wartabone dan Komandan Pasukan A.J. Usman, berusaha mengumpulkan senjata-senjata Jepang dan ditampung di Tabuliti (Suwawa). Tempat itu merupakan depot latihan para pemuda dalam bidang kemiliteran di mana sudah terdapat 100 pemuda terlatih yang siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Di samping itu maka seluruh rakyat juga siap sedia

dengan senjata apa saja yang dapat dipakai menghadapi musuh seperti lembing, keris, bambu runcing, pedang dan sebagainya. Para pemuda diorganisir sebagai pasukan penjaga kota dan desa. Menghadapi situasi seperti itu maka mereka yang masih pro Belanda diam-diam lari meninggalkan Gorontalo pergi ke Manado yang diketahuinya sudah diduduki tentara Sekutu dan tentara Belanda.

Pada tanggal 26 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Kapten Mac Donald (mewakili Letnan Kolonel Muir) tiba dari Manado di pelabuhan Kwandang (pantai Utara sedang pelabuhan Gorontalo di pantai Selatan). Ia disertai oleh seorang Belanda bekas Controleur bernama Felix yang juga membawa sepasukan tentara NICA. Sehubungan dengan kedatangan tentara Sekutu dan tentara Belanda itu, maka para pemimpin dan seluruh rakyat terutama Pemuda di Gorontalo bersikap waspada. Nani Wartabone dikawal oleh sepasukan laskar segera berangkat dari kota Gorontalo ke kota Kwandang. Ia pergi menemui Kapten Mac Donald untuk menanyakan maksud kedatangan pasukan-pasukan itu. Mac Donald menjawab bahwa kedatangannya adalah untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang di daerah itu (Mimbar Indonesia No. 22 3-6-1950). Karena melihat kesiapsiagaan rakyat di sana maka Kapten Mac Donald rupanya merasa takut untuk pergi ke kota Gorontalo dan sebaliknya berangkat kembali ke Manado untuk menambah pasukan Sekutu.

Menghadapi perkembangan itu maka Dewan Nasional Gorontalo yang beranggotakan semua pamongpraja (Jogugu, Marsaoleh dan para tokoh masyarakat lainnya) segera mengadakan rapat. Dalam rapat itu dipertegas lagi keputusan untuk tetap setia kepada pemerintahan RI waktu itu. Tanggal 30 Oktober 1945, sepasukan tentara Sekutu di bawah pimpinan Mayor Wilson tiba di pelabuhan Gorontalo (tidak lagi di pelabuhan Kwandang di pantai Utara). Ia mengatakan bahwa Sekutu bersedia membuka perundingan dengan pihak pemerintahan nasional yang berkuasa di Gorontalo.

Dengan demikian maka diadakanlah perundingan antara delegasi Sekutu pimpinan Mayor Wilson dan delegasi Indonesia pimpinan Nani Wartabone. Perundingan itu berlangsung di kota Gorontalo sebagai Ibukota daerah itu. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan sebagai berikut :

1. Pihak Sekutu mengakui pemerintahan nasional dan menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada Nani Wartabone;
2. Pertanggungjawaban soal keamanan dan kemiliteran serta tugas melucuti tentara Jepang diserahkan kepada tentara Australia yang melakukannya atas nama Sekutu.

Namun rupanya hasil perundingan di atas tidak cukup memuaskan sebagian pemimpin daerah di sana karena menganggap bahwa peranan dan kedudukan mereka terancam oleh diberlakukannya persetujuan dimaksud. Mulailah timbul berbagai issue, cemohan dan ejekan ke alamat Nani Wartabone selaku Kepala Daerah Gorontalo waktu itu. Hal ini ditimbulkan dan dipelopori oleh orang-orang atau golongan-golongan yang tidak senang dengan pemerintahan nasional pimpinan Nani Wartabone, dan lebih menyukai pemerintahan yang pro Belanda.

Sekitar jam 08.00 pagi tanggal 26 Nopember 1945, sebuah kapal perang Sekutu (Australia) berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Kapal itu membawa aparatur

NICA pimpinan bekas Asisten Residen bernama Korn dan bekas Controleur Felix (yang terakhir pernah datang di Kwardang bersama Kapten Mac Donald pada 26 Oktober 1945). Kedua orang Belanda itu membawa serta sepasukan Algemeene Politie untuk memduduki kota Gorontalo (Kodam XIII/Merdeka, 1977). Untuk Mayor Wilson, kedatangannya ini merupakan kali yang kedua di mana yang pertama kali 30 Oktober 1945.

Tanggal 30 Nopember 1945, Mayor Wilson mengundang para pemimpin pemerintahan nasional untuk datang berunding di atas kapal perang Australia yang sedang berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Yang datang memenuhi undangan berunding waktu itu ialah Nani Wartabone, H.U. Katili, A. Wartabone, A. Uno, dr. J. Sabu, Ismail Datau, Djafar Arbie, Idrak Jasin, Umar Basalama, Mohammad Ali, Abubakar Usman, H. Anis, dr. Wardoyo dan Sun Bone. Dengan tidak merasa curiga, semua mereka pergi ke kapal memenuhi undangan itu.

Dalam perundingan itu Mayor Wilson menawarkan penempatan pasukan Sekutu di daerah Gorontalo dengan alasan katanya untuk menjaga keamanan menghadapi kemungkinan-kemungkinan di mana sebagian tentara Jepang masih bersembunyi di hutan-hutan. Nani Wartabone menjawab bahwa semua tentara Jepang dan aparat sipilnya tidak berada lagi di daerah Gorontalo sehingga ia menolak penempatan pasukan Sekutu, apalagi daerah Gorontalo dikatakannya sudah aman. Perundingan tanpa hasil itu ditutup kemudian semua anggota delegasi Indonesia dipersilakan turun ke darat, kecuali Nani Wartabone, yang dinyatakan sebagai tawanan. Hari itu juga ia dibawa dengan kapal perang oleh Mayor Wilson ke Manado kemudian dipenjarakan di Tomohon dan dari sana dikirim ke penjara Cipinang dan baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan.

Mendengar bahwa Kepala Daerah Nani Wartabone ditangkap dan ditawan Sekutu, maka seluruh rakyat di sana merasa kecewa. Mereka mengirimkan pernyataan kepada Dewan Nasional agar segera bertindak. Tetapi Dewan Nasional mengatakan bahwa Nani Wartabone akan segera dilepaskan kembali dan karena itu jangan melakukan tindakan apa-apa. Penangkapan Nani Wartabone 30 Nopember 1945 itu dilakukan oleh Sekutu atas tipu muslihat NICA dan merupakan suatu pengkhianatan dan pelanggaran aturan perundingan. Hal ini telah menyebabkan gagalnya persiapan-persiapan rakyat terutama pemuda-pemuda untuk melawan Belanda karena kehilangan pimpinan yang akan memberikan komando untuk bertindak.

Tanggal 1 Desember 1945, sekali lagi diadakan perundingan antara Mayor Wilson dengan pihak Dewan Nasional. Perundingan diadakan di darat di gedung bekas rumah kediaman Asisten Residen Gorontalo. Perundingan berjalan secara informal antara Ajuba Wartabone selaku Ketua Dewan Nasional dan delegasi Sekutu (dimana turut orang-orang Belanda) pimpinan Mayor Wilson. Hasil perundingan itu adalah sebagai berikut :

1. Ajuba Wartabone dilantik menjadi Kepala Daerah untuk daerah Gorontalo yang berstatus Oonderafdeeling;
2. Bendera Merah Putih tidak boleh dikibarkan di semua tempat kecuali di kantor-kantor pemerintahan atau pada waktu ada perayaan yang layak untuk itu;

3. Lambang kebangsaan sama sekali tidak boleh dipakai;
4. Semua persenjataan termasuk senjata api, amunisi, granat tangan dan sebagainya, selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 1945, sudah harus diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini akan diteruskan kepada Sekutu;
5. Keamanan dan ketenteraman umum ditugaskan kepada tentara NICA, demikian pula tugas penawanan dan perlucutan senjata tentara Jepang yang masih berkeliaran (Sun Bone,). Keputusan-keputusan tersebut di atas diumumkan pada hari itu juga di lapangan kota Gorontalo di hadapan seluruh rakyat yang sedang menunggu-nunggu di sana. Hasil perundingan di atas nampaknya sangat mengecewakan hati rakyat dan para pemuda yang sedang berjuang waktu itu. Menurut pendapat mereka, Dewan Nasional kurang jujur terhadap sumpah dan janjinya yaitu akan tetap setia kepada pemerintah RI sesuai Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Lain halnya pula dengan di daerah Bolaang Mongondow di mana sebelum tentara Sekutu dan tentara NICA datang, pasukan polisi Jepang yang terdiri dari orang-orang Indonesia segera menyatakan diri sebagai polisi Belanda. Hal ini terjadi sekitar bulan September 1945. PPI Laskar Rakyat yang terbentuk 17 September 1945 segera menyerang polisi Jepang yang sudah membelot menjadi polisi Belanda itu, namun sayang sekali gagal karena persenjataan yang kurang dan juga karena kurang terlatih dalam pertempuran.

Karena menyadari kekurangan-kekurangan di atas maka PPI Laskar Rakyat memusatkan latihan kemiliteran di desa Molinow, tidak jauh dari Kotamobagu sebagai tempat kedudukan polisi Belanda. Tanggal 27 September 1945, Ketua Komisariat PPI Bolaang Mongondow J.F.K. Damopolii (yang juga sementara menjabat selaku Fukugunco atau Camat Lolayan) ditangkap oleh sekelompok polisi rahasia yang datang dari Manado, pimpinan J. van Boyehen. Sejak saat itu maka isterinya Nurtina Gonibala memegang pimpinan darurat atas Komisariat PPI dan pimpinan Laskar Rakyat Bolaang Mongondow.

Di bawah pimpinannya, maka latihan-latihan pemuda yang dilakukan oleh para pelatih PPI Laskar Rakyat tetap dilangsungkan di pusat latihan desa Molinow. Walaupun pusat latihan itu hanya dua kilometer letaknya dengan Kotamobagu sebagai tempat kedudukan polisi Belanda yang merangkap tugas untuk menjalankan pemerintahan sementara atas daerah itu, namun mereka tidak hiraukan di mana latihan tetap dilangsungkan seperti biasa. Direncanakan bahwa medio Nopember 1945 selesai latihan terakhir, akan dilanjutkan pada malamnya dengan penyerangan terhadap polisi Belanda untuk mendirikan pemerintahan RI untuk daerah itu.

Rupanya rencana PPI Laskar Rakyat dapat diketahui oleh mata-mata atau polisi Belanda di sana. Hari latihan terakhir dilakukan medio Nopember 1945. Pada hari itu sejak jam 07.00 pagi, telah berkumpul sekitar 400 pemuda yang akan diikuti sertakan dalam penyerangan dan perebutan kekuasaan. Sekitar jam 10.00, datanglah satu regu polisi Belanda yang langsung menyerbu dan menembaki markas PPI Laskar Rakyat di sekitar lapangan tempat latihan diadakan. Segera terjadi tembak menembak di mana seorang anggota polisi bernama Kambey

tertembak dan pahanya luka. Di pihak pemuda, tidak ada yang jatuh korban jiwa atau luka-luka. Serangan polisi dilanjutkan terhadap para pemuda yang sedang mengadakan latihan di lapangan desa itu. Akibat serangan polisi itu, maka para anggota PPI Laskar Rakyat mengundurkan diri ke luar desa untuk menghindarkan jatuhnya korban di kalangan rakyat.

Selesai mengadakan serangan, pasukan polisi juga mengundurkan diri ke Kotamobagu. Komandan Polisi Herry Harun Manoppo mengirimkan berita dan meminta bantuan pasukan dari Manado. Atas permintaannya maka datanglah satu kompi pasukan KNIL pimpinan Kapten Latuperissa. Pasukan KNIL itu langsung ditempatkan di desa Molinow sebagai pusat latihan bagi PPI Laskar Rakyat Bolaang Mongondow. Menyusul pasukan KNIL itu datanglah Controleur Langendon yang diangkat oleh Residen Coomans de Ruyter untuk menjalankan pemerintahan Onderafdeeling Bolaang Mongondow atas nama NICA.

Controleur Langendon langsung menjalankan pemerintahan NICA di Bolaang Mongondow dengan pusatnya di Kotamobagu. Ia segera memerintahkan Komandan Polisi Herry Harun Manoppo dan Kapten Latuperissa untuk mengarahkan pasukan masing-masing dalam menangkap para anggota PPI Laskar Rakyat. Dalam rangkaian penangkapan yang dilakukan oleh pasukan polisi dan tentara NICA itu maka beberapa pimpinan inti PPI Laskar Rakyat berhasil ditangkap. Mengenai hal ini dapat dilihat kembali di halaman depan. PPI Laskar Rakyat mengundurkan diri ke hutan-hutan dan mendirikan markasnya di perkebunan Tancyan. Dari rentetan kejadian di atas jelas bahwa rakyat daerah Bolaang Mongondow bersikap menolak kehadiran tentara NICA di daerahnya, sedangkan tentara Sekutu lainnya tidak ditempatkan di sana.

Di daerah Sangir Talaud, tentara Sekutu yang datang di sana dari Manado, dipimpin oleh Letnan Ponto sebagai salah seorang putera daerah itu. Letnan Ponto ini juga membawahi tentara NICA yang datang bersama tentara Sekutu. Para anak buah pasukan pimpinan Letnan Ponto itu kebanyakan terdiri dari putera daerah Sangir Talaud yang dahulunya dibawa oleh Jepang ke Morotai sebagai romusya. Di Morotai mereka lari dari tugasnya dan membentuk "Pasukan Gerilya Morotai" untuk melawan Jepang. Ketika Sekutu menguasai Morotai, mereka dialihkan menjadi tentara Sekutu dan waktu Jepang menyerah mereka ditugaskan ke Minahasa sebagai pasukan Sekutu. Dari Minahasa mereka ditugaskan kembali ke daerah Sangir Talaud untuk melaksanakan tugas-tugas Sekutu di sana.

Karena tentara Sekutu dan tentara NICA terdiri dari para putera daerah sendiri, maka rakyat Sangir Talaud tidak menunjukkan sikap yang membenci mereka karena sama-sama pernah mengalami kekejaman di bawah telapak kaki pendudukan Jepang sebelumnya. Tentara Sekutu dan tentara NICA yang datang mendarat di sana menurunkan dan membagi-bagikan makanan, pakaian dan obat-obatan untuk membantu rakyat yang serba kekurangan. Hal mana tidak pernah rakyat alami selama masa pendudukan Jepang. Semua sekolah yang ada di sana dipersiapkan untuk dibuka kembali walaupun baru 1 Nopember 1946 dibuka kembali di Tahuna. Namun kesemua hal yang dilakukan oleh tentara Sekutu dan tentara NICA di sana berhasil menimbulkan sikap yang positif di kalangan rakyat

(Manatar, wawancara 16-9-1979) ; Binilang, wawancara 20-9-1979 ; Yuda, wawancara 15-9-1979).

2. Akibat-akibatnya.

Untuk Keresidenan Manado, akibat kedatangan dari tentara Sekutu dan tentara NICA ialah dilikwidasiannya Pemerintahan sipil pimpinan Residen E.H.W. Pelengkahu yang memerintah sejak diserahkannya pemerintahan itu oleh Jepang 21 Agustus 1945. Dengan tidak mengakui E.H.W. Pelengkahu sebagai Residen maka NICA mengangkat Letnan Kolonel Coomans de Ruyter selaku SONICA kemudian menjadi CONICA dan sejak pada pertengahan 1946 jabatannya menja di Residen seperti sebelum perang dengan Jepang. Upacara penyerahan militer diterimakan kepada Letnan Kolonel Muir 8 Oktober 1945 dan 10 Oktober 1945 dilaksanakan serah terima pemerintahan sipil kepada SONICA Coomans de Ruyter.

Tanggal 12 Oktober 1945, SONICA Coomans de Ruyter mengeluarkan peraturan moneter di mana uang Jepang dinilai hanya seperempat puluh uang NICA yang mulai diberlakukan waktu itu. Diberlakukannya peraturan moneter di atas sangat mengejutkan rakyat dan mengacaukan perekonomian yang sama sekali belum pulih setelah Jepang menyerah. Hal ini mengakibatkan kesengsaraan rakyat semakin menghebat. Di pihak lain tanpa menghiraukan kesengsaraan rakyat banyak, pemerintah NICA memberikan jaminan sosial yang berlebih-lebihan kepada aparaturnya sendiri, baik dalam hal pangan, sandang dan sebagainya di samping memperoleh penghargaan dan kedudukan yang baik bagi yang menyatakan diri setia kepada Belanda.

Menghadapi kenyataan ini, maka sebagai akibatnya, para tokoh nasionalis mulai bergerak baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Para pemuda mengaktifkan kembali PPI yang pernah dibentuk Jepang 15 Pebruari 1945 yang kali ini mendirikan markas besarnya di Tondano. Di Manado para pemuda mendirikan BPNI akhir Agustus 1945. Dengan dibubarkannya Pasukan PTA 6 September 1945, maka PPI dan BPNI menampung para anggotanya dan melanjutkan perjuangan melawan Belanda, bersama-sama para pemuda lainnya. Para pemuda yang pernah mendapat latihan militer dari Jepang, masuk menjadi anggota dinas militer dan sipil NICA, tanpa setahu Belanda bahwa mereka punya hubungan yang erat sekali dengan kaum nasionalis di daerah ini.

Dengan mulai mantapnya pemerintahan NICA maka Belanda mulai menjalankan kembali diskriminasi khususnya bagi anggota militernya berbangsa Indonesia yang jaminan sosialnya dibeda-bedakan dengan yang berkebangsaan Belanda. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para anggota KNIL namun belum dapat bertindak berhubung sedang mencari dukungan dari rakyat. Ketika para anggota KNIL itu dihubungi oleh pimpinan pemuda nasionalis dari PPI maka disusunlah rencana untuk memberontak terhadap Belanda. Keyakinan itu diperteguh lagi ketika dua orang pemuda yang berhasil menyusup ke dalam dinas militer NICA (Kopral A.S. Rombot dan Kopral W.F. Sumanti) menghubungi Sersan Ch.Ch. Taulu tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan usaha untuk

merebut kekuasaan NICA waktu itu. (Wowor, 1977).

Di daerah Gorontalo, kedatangan tentara Sekutu dan tentara Belanda serta hasil keputusan perundingan antara Delegasi Nasional dengan mereka, mengakibatkan kekecewaan di kalangan rakyat di sana. Sebagai tindak lanjutnya maka mulai 1 Desember 1945 daerah Gorontalo diperintah oleh Belanda yang dijalankan oleh CONICA pimpinan Felix selaku Asisten Residen sedangkan Ajuba Wartabone yang menggantikan Nani Wartabone (yang sudah ditangkap) hanya sebagai Controleur dan Landrechter saja.

Dengan demikian maka roda pemerintahan sipil dijalankan kembali seperti sebelum perang dunia II. Pasukan polisi dan tentara NICA ditugaskan masuk keluar kampung untuk memata-matai rakyat yang ingin melawan pemerintahan NICA. Yang dicurigai ditangkap, ada yang langsung dianiaya dan ada pula yang dijebloskan ke dalam penjara. Ada yang dianiaya dan disuruh memakan sobekan-sobekan bendera Merah Putih. Walaupun tindakan polisi dan tentara NICA itu sangat kejam terhadap rakyat, namun semangat juang mereka tidak dapat dipatahkan begitu saja. Rakyat yang menginginkan kemerdekaan sangat besar jumlahnya dan sama sekali tidak dapat dipengaruhi untuk memihak Belanda ataupun berkompromi.

Rakyat di daerah Gorontalo waktu itu tetap yakin bahwa kemerdekaan adalah haknya dan suatu waktu pasti akan terwujud walaupun tanpa pimpinan sekalipun. Hal ini dapat dilihat ketika suatu waktu para pemuda di bawah pimpinan Junus menyerbu tangsi NICA di Gorontalo. Namun rencana penyerbuan rupanya sudah bocor ke tangan NICA oleh mata-mata yang banyak disebarkan di desa-desa di sana. Dalam penyerbuan tersebut, seorang pemuda bernama Haruna gugur terkena tembakan Belanda. Sejak saat itu maka penjagaan di setiap kompleks polisi dan militer NICA semakin diperkuat dengan mempergunakan senjata-senjata yang dapat dikatakan jauh lebih modern yang sama sekali belum dimiliki oleh para pejuang di sana.

Akibat serangan polisi dan tentara NICA terhadap kedudukan- kedudukan PPI Laskar Rakyat di Bolaang Mongondow maka mereka mengundurkan diri ke hutan-hutan dan mendirikan markasnya di perkebunan Tanoyan. Dari markas itu dilancarkanlah serangan-serangan gerilya terhadap patroli-patroli yang dilakukan oleh polisi dan tentara NICA di daerah itu. Tempat-tempat penghadangan gerilya yakni jalan-jalan antara Inobonto-Kotamobagu, Kotamobagu-Molibagu, serta jalan-jalan di pantai Utara mulai Inobonto, Bintauna, Bolaang Itang sampai ke Boroko di Kaidipang Besar.

Pasukan-pasukan dari PPI Laskar Rakyat memutuskan jaringan kawat telepon di seluruh daerah Bolaang Mongondow dan obyek-obyek vital dan militer tidak luput dari serangan granat tangan oleh anggota-anggotanya. Hal ini dilakukan atas instruksi Nurtina Gonibala sebelum ia ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Manado. Walaupun kehilangan sejumlah pemimpinnya, namun PPI Laskar Rakyat tetap meneruskan perjuangan gerilya melawan kekuasaan NICA di daerah Bolaang Mongondow sampai Pebruari 1946. Pada waktu itu kekuasaan berhasil direbut oleh

para pejuang kita di Manado sehingga anggota-anggota gerilya PPI Laskar Rakyat turun dari hutan-hutan lalu menduduki seluruh daerah Bolaang Mongondow dan membantu mendirikan pemerintahan pro RI untuk daerah itu.

IV. PERJUANGAN DI DAERAH

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA I

Aksi militer Belanda I ini dilakukan pada bulan Juni 1947. Dengan demikian maka dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai perjuangan di daerah sebelum aksi itu dilakukan. Aksi militer itu sendiri tidak langsung melibat daerah ini namun dalam beberapa hal punya pengaruhnya sampai ke daerah-daerah, juga daerah Sulawesi Utara.

Mengenai situasi di Minahasa sebelum aksi militer itu dilakukan, baiklah kiranya apabila dikemukakan kota per kota yang penting khususnya Tomohon, Manado, Tondano dan Girian (Bitung Tonsea). Kota Tomohon merupakan Ibukota sementara untuk Keresidenan Manado berhubung kota Manado sedang mengalami kerusakan berat akibat pemboman Sekutu pada waktu itu. Kepala pemerintahan NICA Letnan Kolonel Coomans de Ruyter dan Troepencommandant KNIL Letnan Kolonel de Vries serta Markas Tentara Sekutu pimpinan Letnan Kolonel Muir, berkedudukan di Tomohon. Markas tentara KNIL sekompleks dengan markas tentara Sekutu karena KNIL sekaligus merupakan unsur tentara Sekutu waktu itu. Dinas Telekomunikasi militer pusatnya di kota ini di mana seorang pemuda nasionalis A.S. Rombot berhasil menyusup dan dipangkatkan Kopral berhubung pengalamannya bekerja dalam dinas itu sewaktu Jepang berkuasa. Kantor pemerintah NICA letaknya terpisah dengan markas tentara Sekutu dan KNIL yaitu di Kakaskasen Tomohon. Di Tomohon adalah pusat kegiatan Zending (GMIM) dan Misi (Gereja RK) dan sekaligus sebagai pusat urusan persekolahan untuk kedua badan kegerejaan itu.

Para pemimpin Pemuda nasionalis di Tomohon antara lain Sam Manangka, Hasan Usman, Gerrit Wowor, Karel Wondal, Gustaf Warouw dan M. Rumajar. Mereka mengadakan kegiatan untuk mengorganisir para pemuda di kota itu untuk berjuang melawan NICA. Seorang tokoh pemuda nasionalis dari Sulawesi Tengah (Luwuk Banggai) bernama F.H.L.W. Mondong dipenjarakan di kota ini demikian pula dengan Nani Wartabone dari Gorontalo (Wowor, 1977).

Di Manado ada pemusatan tentara KNIL dan Polisi Belanda. Tentara Sekutu dari unsur tentara Australia mulanya berkedudukan di Tomohon berkekuatan 60 anggota tapi kemudian dipindahkan ke Manado di mana bulan Desember 1945 di pindahkan ke lain tempat. Asrama tentara yang terkenal dengan nama "Tangsi Hitam" dan "Tangsi Putih" berada di bukit Teling di kota Manado. Komandan Garnizun Manado ialah Kapten (KNIL) Blom. Juga terdapat markas NEFIS, PID, CPM, serta Mahkamah Militer. Unsur-unsur pemuda nasionalis yang berhasil menyusup ke kalangan tentara dan polisi, aktif membina persatuan untuk kepentingan perjuangan.

Di kota ini berpusat organisasi pemuda nasionalis yaitu BPNI di bawah pimpinan John Rahasia, Chris D. Pontoh dan Mohamad Canon di mana markasinya ada di desa Sindulanga (Manado Utara) dan dari sana mengorganisir para pemuda nasionalis di kota Manado untuk melawan Belanda. BPNI menerbitkan dua surat kabar yakni "Catapult" berbahasa Belanda dan "Suara Indonesia Muda" berbahasa Indonesia. Kedua surat kabar itu hanya distensil di mana sering mempergunakan fasilitas perkantoran NICA tanpa diketahui oleh mereka (Wowor, 1978).

Kota Tondano pernah jadi Ibukota Keresidenan Manado sejak September 1944 sampai penyerahan Jepang. Panglima dari tentara Jepang merangkap Suciji Laksamana Muda K. Hamanaka yang pernah berkedudukan di kota itu dalam tawanan dari tentara Sekutu di Morotai untuk diadili. Di kota ini pemerintah NICA tidak menempatkan pasukan KNIL kecuali satu detasemen polisi Belanda.

Para pemuda nasionalis di Tondano sekitar bulan Oktober 1945 mengaktifkan kembali PPI yang bermarkas besar di sana. Selain itu mereka juga aktif jadi anggota BPNI yang berpusat di Manado. Para tokoh nasionalis di sana antaranya A.H.A.A. Kawilarang, Engel A. Parengkuan, J. Kumaunang, E. Matulandi, J. Wantalangi, Wim Pangalila, H.M.L. Legoh, Rachmat Pulkadang dan lain-lain. Sebagian di antara mereka aktif bergerak di bidang pendidikan untuk mendidik kader bagi perjuangan melawan Belanda yaitu dengan mendirikan Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan (SMRK) kira-kira setingkat dengan SMP sekarang ini (Legoh, 1973; Wowor, 1977).

Di kota Girian, Sekutu mendirikan kamp tawanan untuk menampung 8000 tawanan perang Jepang. Semua senjata mereka dilucuti tanggal 13 Oktober 1945 oleh tentara Australia lalu ditenggelamkan di teluk Manado. Yang menjaga kamp tawanan itu ialah satu kompi KNIL pimpinan Letnan van Emden. Para pemimpin pemuda nasionalis di Girian dan sekitarnya antara lain Nona Gusta Ngantung, Victor Mandey, Emor Sumampouw, Butje Mamahit dan lain-lain (Wowor, 1977; Kempen, 1953).

BPNI dan PPI bekerja erat sekali bahu membahu menyusun kekuatan untuk melawan Belanda, disokong oleh sejumlah anggota militer berkebangsaan Indonesia yang berdinasi dalam tentara KNIL dan pamongpraja tanpa setahu Belanda waktu itu. Mereka merencanakan mengadakan pemberontakan pada 10 Desember 1945 namun sayang sekali membangkitkan kecurigaan NICA sehingga dibatalkanlah gerakan itu. Namun NICA tetap mencari alasan kuat untuk menangkap para pemimpin pemuda di Manado.

Tanggal 15 Desember 1945, para pemimpin BPNI-PPI mengadakan rapat rahasia di desa Sindulang. Selesai rapat maka mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Sementara meninggalkan tempat rapat itu, dua pemuda Ch.D. Pontoh dan Sam Manangka, diserang oleh segerombolan pemuda yang bersenjatakan alat-alat tajam dan pemukul-pemukul dari besi. Serentak para pemuda PPI-BPNI datang membantu. Seperti sudah diatur lebih dahulu, tak antara lama kemudian lewatlah sebuah kendaraan patroli NEFIS yang mulai melakukan penangkapan terhadap diri para pemuda yang membela diri itu. Penangkapan itu mengawali serentetan penangkapan yang dilakukan Belanda terhadap setiap pemuda nasionalis yang dicurigai di kota Manado dan sekitarnya. Hampir semua pemimpin pemuda ditangkap dan dua surat kabar BPNI diberangus sedangkan John Rahasia dan Chris D. Pontoh diajukan ke pengadilan dengan tuduhan "mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan kerusuhan" (Wowor, 1977; Legoh, 1973).

Sementara itu di kota Tondano, para tokoh nasionalis di sana membentuk "Yayasan Pendidikan Kebangsaan" atas prakarsa Engel A. Parengkuan yang dimulainya sejak bulan Nopember 1945. Sebagai Ketua Yayasan itu ialah A.H.A.A. Kawilarang seorang pensiunan konsulen pertanian yang berjiwa nasionalis. Yayasan ini mendirikan "Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan" (SMRK) dengan Direktur Engel A. Parengkuan, sekaligus sebagai pengajarnya. Para pengajar lain antaranya Ny. Senduk-Kaligis, J. Kumaunang, Ben Matulanai, J. Wantalangi, Jo Supit, Andi Masengi, E.V. Kaseger, Ny. A. Muntu Modjo, Ny. Adam, Hidajat, E.D. Johannes SH, E. Katoppo dan lain-lain. Guru-gurunya harus berijazah Hoofd dan Hulp-Akte sesuai persyaratan yang diberikan oleh Inspeksi Pengajaran NICA yang berkedudukan di Tomohon waktu itu.

Gedung sekolah dari SMRK sementara menggunakan bekas sekolah MULO sebelum perang. SMRK ini resmi berdiri tanggal 6 Januari 1946 di Tondano. Dalam upacara pembukaannya, dinaikanlah bendera Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya diikuti 200 siswa dan undangan dari segala golongan dan lapisan masyarakat yang menghadiri upacara itu. Walaupun Belanda sama sekali tidak setuju dengan pengibaran bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun para pendirinya tidak menghiraukan hal itu. Malahan pada setiap hari Senin diadakan upacara bendera di halaman sekolah di mana selalu dikibarkan bendera Merah Putih dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti oleh wejangan-wejangan direktur untuk memantapkan semangat kebangsaan di kalangan para siswanya. Suatu ketika setelah resmi berdiri, para siswa SMRK itu berpawai dari Tondano ke Tomohon sambil melambai-lambaikan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan melewati Markas Besar KNIL dan Kantor CONICA di mana Coomans de Ruyter berada. Hal ini sangat mengejutkan pihak Belanda namun mereka tidak bertindak apa-apa terhadap para siswa dan guru SMRK itu (Wowor, 1977).

Penangkapan yang dilakukan NICA di Manado dan sekitarnya dapat melumpuhkan kegiatan BPNI-PPI untuk sementara saja. Karena tidak punya cukup bukti maka mereka yang ditangkap sejak 15 Desember 1945 mulai dilepaskan lagi

sehingga dapat aktif lagi bergiat melalui BPNI-PPI. John Rahasia dan rekannya Ch. D. Pontoh tetap akan diajukan ke pengadilan karena tuduhan yang ditiimpakan kepada mereka, walaupun keduanya sudah dilepaskan dari tahanan NICA.

Taktik Belanda melalui Comité van Initiatief

Belanda menyadari bahwa walaupun BPNI-PPI walaupun untuk sementara waktu dapat dilumpuhkan, namun mereka tidak mungkin sama sekali mematikan semangat rakyat terutama para pemuda untuk mengejar cita-cita memerdekakan diri. Oleh karena itu Belanda berganti siasat dengan mendekati beberapa tokoh nasionalis yang lebih moderat. Sebagai hasilnya maka terbentuklah organisasi yang dinamakan "Comité van Initiatief" akhir Desember 1945. Para tokoh nasionalis yang moderat yang duduk dalam badan itu antaranya D.A. Th. Gerungan, E. Katoppo, R. C. L. Lasut, B. W. Lapien, A.B.H. Waworuntu dan lain-lain. Komite ini diharapkan Belanda dapat menjadi tempat menyalurkan inspirasi dan aspirasi para pemuda radikal yang akan dipimpin oleh tokoh-tokoh moderat di atas. Kegiatan komite ini sejak pembentukannya tidaklah pernah diumumkan, bahkan maksud didirikannya juga belumlah juga dilaksanakan. Hal ini nanti berlaku pada bulan Januari 1946 (Wowor, 1977).

Para pemuda nasionalis tidak menghiraukan adanya Comité van Initiatief bentukan Belanda itu. Di Minahasa setiap 10 Januari diadakan upacara peringatan persahabatan Nederland-Minahasa yang berlaku sejak 10 Januari 1679 saat ditandatanganinya piagam persahabatan antara para pemimpin rakyat Minahasa waktu itu dengan Belanda. Para pemuda merencanakan menghalang-halangi upacara peringatan 10 Januari 1946 dilanjutkan dengan perebutan kekuasaan dari tangan NICA. Upacara itu selalu dilakukan di depan tugu yang terletak di suatu lapangan kecil di tengah-tengah kota Manado yang dinamakan "Tugu Persahabatan Nederland - Minahasa" yang di masa pendudukan Jepang diruntuhkan tetapi dibangun kembali ketika NICA berkuasa. Upacara itu dilakukan berdasarkan semboyan usang "de innige lotsverbondenheid tussen Minahsa en Nederland" yang sangat dibenci pemuda.

Untuk melaksanakan aksi itu maka para pemuda mengadakan rapat rahasia berturut-turut di mana rapat terakhir diadakan 7 Januari 1946 di desa Sindulang di kebun milik pemuda Maurits Mamansage. Rapat rahasia itu menghasilkan suatu Ikrar Pemuda yang pada pokoknya menetapkan bahwa aksi perlawanan terbuka terhadap kekuasaan Belanda harus diadakan 10 Januari 1946 pada saat upacara peringatan di atas. Dibentuklah regu-regu penyerbu yang akan bergerak di bawah pimpinan para pemuda yang menyusup ke dalam KNIL yang akan diikutsertakan dalam upacara itu. John Rahasia akan memakai pakaian seragam putih dan bersama adiknya akan mengibarkan bendera Merah Putih di tiang bendera yang sedianya akan dikibarkan bendera Belanda. Jika ia ditembak dan tewas maka bajunya yang berlumuran darah yang berubah menjadi warna Merah Putih akan menjadi lambang perjuangan bagi para pemuda selanjutnya (Wowor, 1977; Legoh, 1973).

Karena sifat kerahasiaannya maka hanya beberapa cabang BPNI-PPI yang

diberitahukan. Gerzon W. Bawengan diutus ke Airmadidi, Willy Pantouw diutus ke Tondano dan Sam Manangka ke Tomohon untuk memberitahukan dan mempersiapkan para pemuda di sana. Namun rencana mereka bocor juga ke tangan NICA sehingga sejak 7 - 9 Januari 1946, Belanda melakukan penangkapan yang meluas dari Manado ke seluruh Minahasa. Pemuda Reyers Kansil tertembak dan luka parah sementara para pemuda lain diperlakukan sangat kejam. Penjara-penjara di Manado, Tomohon dan Tondano penuh sesak dengan para pemuda BPNI-PPI antaranya John Rahasia, Ch. D. Pontoh, M. Canon, Jerrit Kansil, Maurits Mamansage, Wim Pangalila, Sukandar, Ben Wowor, Usman Pulukadang, Louis Paat, Jeppy Polii dan lain-lain. Semua anggota KNIL yang dicurigai dikonsinyir di Asrama Teling agar mereka tidak turut mendukung gerakan pemuda nasionalis itu. Dengan ditangkapnya para pemuda BPNI dan PPI di atas, maka barulah upacara peringatan di atas dapat dilaksanakan Belanda walaupun dengan suasana yang muram (Wowor, 1977; Legoh, 1973).

Setelah peristiwa di atas maka Belanda mengaktifkan kembali Comité van Initiatief. Untuk meyakinkan pemuda bahwa Belanda bermaksud baik dengan komite itu, maka para tokoh yang ditangkap akibat peristiwa 15 Desember 1945 dan 7 - 9 Januari 1946 mulai dilepaskan satu persatu. Cabang-cabang Comité van Initiatief dibentuk mulai tingkat Distrik Onderdistrik sampai ke desa-desa di seluruh Minahasa. Comité van Initiatief ini tidak beranggotakan pemuda perorangan tetapi organisasi-organisasi pemuda seperti pemuda Kristen, Pemuda Islam, Pemuda Katolik dan Pemuda Nasionalis dengan pengurus pusatnya di Tomohon (Wowor, 1977).

Pembentukan komite ini sampai ke tingkat desa sangat dipercepat berhubung Belanda merencanakan mengadakan Kongres Pemuda 9 Februari 1946. Mengetahui hal ini maka para pemuda dalam BPNI-PPI bermaksud menggunakan kesempatan itu untuk menggunakan forum yang diakui Belanda sebagai tempat menyampaikan suara hati pemuda nasionalis yang menginginkan kemerdekaan penuh. Maksud mereka dipusatkan di Tondano dengan dibentuknya organisasi Persatuan Indonesia Muda (PIM) yang akan ikut dalam kongres tersebut. Mulanya Kepala Distrik Tondano tidak setuju adanya PIM karena ia ditugaskan membnetuk Cabang Comité van Initiatief di Tondano sebagai wadah pemuda yang akan mengirimkan delegasinya ke Kongres. Namun karena desakan dan tekanan pemuda maka akhirnya ia merestui adanya PIM. Hal ini merupakan kemenangan bagi BPNI-PPI sebab melalui PIM yang diakui itu, mereka dapat ikut berperan dalam kongres tersebut.

PIM dibentuk 19 Januari 1946 sebagai taktik bagi pemuda BPNI-PPI agar dapat ikut dalam kongres. Dalam rapat pembentukannya dibacakan surat dari DR. G.S.S.J. Ratulangi, yang sementara menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang diangkat pemerintah RI. Dengan adanya surat tersebut maka semangat pemuda semakin dipertebal untuk berjuang bagi kemerdekaan. Pimpinan PIM terdiri dari beberapa pemuda antaranya Wim Pangalila, Rachmat Pulukadang, Ben Wowor, Chris D. Pontoh, Nona Wuli Supit dan sebagainya. Sebagai penasehatnya ialah E.D. Johannes SH, seorang yuris dan nasionalis yang sebelumnya telah menyusun

anggaran dasar PIM yang dapat diterima oleh NICA.

Dengan demikian maka Belanda mengadakan kongres pemuda 9 Februari 1946 di desa Kinilow dekat kota Tomohon. Ketua Kongres pemuda waktu itu ialah Ds. W.J. Rumambi. Ketika kongres sedang berjalan, pimpinan kongres mengajukan suatu konsep yakni menyatukan semua organisasi pemuda yang ada dengan menghilangkan segala identitas dan perbedaan di antara organisasi-organisasi itu, yang segera ditolak dengan keras oleh delegasi PIM. Bayangan kegagalan sebenarnya sudah terlihat sejak dibukanya kongres di mana ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebagian menyanyikan refreinnya "Indonees Indonees mulya mulya" tetapi sebagian besar menyanyikan "Indonesia Raya, Merdeka-Merdeka" di mana kata "merdeka" diucapkan dengan suara penuh semangat dan gegap gempita. Pimpinan kongres mulai saat itu sampai berakhirnya kongres tidak mampu menguasai suasana dan dengan demikian maksud diadakannya oleh Belanda digagalkan oleh para pemuda nasionalis (Wowor, 1977).

Perebutan kekuasaan oleh KNIL dan Pemuda

Sementara Belanda bergiat mengsucceskan Kongres Pemuda di atas, para pejuang dalam KNIL serta tokoh-tokoh pemuda dalam BPNI-PPI mengadakan pula kegiatan yang luar biasa. Kegiatan mereka kurang diperhatikan sebab pada waktu itu perhatian Belanda sedang ditujukan ke Kinilow di mana Kongres dilangsungkan. Ikut sertanya sebagian tokoh BPNI-PPI melalui delegasi PIM dalam kongres itu berhasil mengelabui mata Belanda sehingga kegiatan yang diadakan di Manado kurang diperhatikan oleh mereka.

Setelah unsur-unsur pemuda nasionalis berkali-kali gagal merebut kekuasaan NICA maka tampilah unsur-unsur militer yang berjiwa nasionalis yang sementara dalam dinas KNIL di Manado-Minahasa. Kedua unsur nasionalis itu mengadakan rapat tanggal 7 Februari 1946 di rumah kediaman dari Hukum Besar B.W. Lapien di desa Singkil (Manado Utara). Rapat berikutnya diadakan tanggal 9 Februari 1946 di rumah Sersan KNIL S.D. Wuisan di desa Titiwungen (Manado Selatan) dimana di depan rumah diadakan acara hari ulang tahun sedangkan di bagian belakang dilangsungkan rapat rahasia untuk mengelabui mata NICA. Rangkaian rapat rahasia dari kedua unsur di atas langsung dipimpin oleh Sersan Ch. Ch. Taulu dibantu oleh Sersan S.D. Wuisan (Legoh, 1973, Kempen, 1953). Hasil lengkap rangkai rapat kedua unsur itu adalah sebagai berikut (Kaeng, 1971):

1. Kode/isyarat yang digunakan :

- a. Siang hari, dengan mengacungkan dua jari ke atas yang melambangkan bendera Merah Putih;
- b. Malam hari, menegur dengan angka "dua" yang harus dijawab "delapan" maksudnya penambahan dua angka genap harus berjumlah sepuluh di mana kode teguran ini khusus untuk hari pertama gerakan;
- c. Malam hari, bilamana perlu kode/isyarat dapat dirobah dengan "empat" dijawab "enam" yang penting jumlahnya "sepuluh".

2. Mengirimkan berita ke semua markas pemuda sampai ke sektor-sektor mengenai saat pelaksanaan gerakan;

3. Menetapkan tanggal 13 Februari 1946 lewat tengah malam tepatnya jam 03.00 - 14 Februari 1946 sebagai saat pelaksanaan gerakan;
4. Apabila salah satu pimpinan tertangkap, maka gerakan dapat di percepat jam pelaksanaannya;
5. Aksi harus dijalankan sangat rahasia dan sedapat mungkin tanpa menimbulkan keributan;
6. Menyergap rumah jaga Teling I dan Teling II dan diteruskan merebut gudang senjata dan amunisi, perlengkapan pakaian dan makanan;
7. Menangkap semua orang Belanda, Indo Belanda dan semua orang Indonesia yang dicurigai serta menguasai semua pos militer dan polisi;
8. Menangkap semua orang yang dicurigai yang tinggal di luar asrama militer dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar nama dan alamat mereka;
9. Menangkap semua orang Belanda yang berstatus partikular/sipil di seluruh wilayah Sulawesi Utara;
10. Disusahakan tidak melepaskan tembakan kalau tidak perlu kecuali untuk membela diri, membela kawan atau jika memang terjadi tembak menembak dengan musuh.

Tanggal 10 Februari 1946, Sersan Ch. Ch. Taulu dan Sersan S.D. Wuisan ditangkap oleh CPM atas perintah Komandan Garnizun Manado Kapten Blom. Semua peluru dan amunisi yang ada di tangan anggota Kompi 7 di Markas Teling dilucuti kecuali senjata mereka. Beberapa pemimpin BPNI-PPI antaranya John Rahasia dan M. Canon ditangkap Belanda. Semua tindakan Belanda di atas menunjukkan bahwa rencana mereka telah diketahui. Namun sesuai rencana No. 4 di atas, maka pimpinan lainnya segera mengatur agar gerakan dapat dipercepat. Diadakan rapat rahasia sekali lagi 12 Februari 1946 yang dihadiri oleh B. W. Lapien di mana diputuskan untuk mempercepat pelaksanaan gerakan mereka.

Selesai rapat maka terjadi kesibukan yang luas biasa namun tidak sempat membangkitkan kecurigaan Belanda. Gerakan militer dimulai tepat jam 01.00 tanggal 14 Februari 1946 oleh delapan anggota Kompi 7 pimpinan Kopral J.M. Runtukahu. Mereka membawa senjata tanpa peluru tapi berhasil memperdayai regu piket jaga malam di asrama Teling I. Bintara piket dan anak buahnya dilucuti dan dilanjutkan dengan menguasai gudang senjata/amunisi, pakaian dan makanan yang ada di kompleks asrama itu. Sersan Ch. Ch. Taulu dan Sersan S. D. Wuisan dibebaskan dari tempat tahanan dan langsung keduanya mengambil alih pimpinan gerakan dimaksud. Taulu sebagai pemimpin tertinggi dan Wuisan selaku komandan operasi. Semua tentara Belanda dan orang sipil di Manado termasuk Komandan Garnizun Kapten Blom ditawan oleh unsur-unsur militer dan BPNI-PPI yang dipersenjatai.

Para tawanan dibagi dua di mana yang perwira termasuk Kapten Blom dan Letnan Verwajen ditawan di asrama Teling I sedangkan yang bintara dan tamtama di penjara Manado. Anggota keluarga mereka ditahan rumahkan di tempat masing-masing dan dijaga ketat oleh para pemuda BPNI-PPI yang sudah dipersenjatai untuk membantu tentara kita. Hanya dalam waktu delapan jam saja yakni sampai jam 09.00 14 Februari 1946 seluruh jajaran KNIL dan orang-orang sipil di kota

Manado menyerah dan berhasil ditawan tanpa membuang peluru sebutirpun juga. Gerakan dilanjutkan ke Tomohon dipimpin oleh Sersan Frans Bisman yang membawa dua peleton tentara bersenjata lengkap untuk menangkap CONICA Letnan Kolonel Coomans de Ruyter dan Troepencommandant KNIL Letnan Kolonel de Vries yang berkedudukan di kota itu.

Ketika pasukan tiba di batas kota, Sersan F. Bisman mengirim utusan menemui Kepala Kepolisian NICA Inspektur Polisi Samsoeri meminta agar ia mau jadi perantara supaya para pemimpin NICA itu mau menyerah tanpa pertumpahan darah. Sementara Samsoeri melaksanakan tugasnya menemui para pimpinan NICA itu, lewatlah sebuah Jeep militer yang dikendarai oleh seorang Letnan Belanda. Letnan itu tidak mau berhenti setelah melihat bahwa pasukan yang menyetopnya memakai bendera Merah Putih malahan ia langsung menembak dan menewaskan sopir pada kendaraan komandan Sersan F. Bisman. Tentara kita membalas tembakan itu dan berhasil menewaskan letnan KNIL tersebut.

Siasat yang dijalankan Sersan F. Bisman ternyata sukses ketika Inspektur Samsoeri membawa berita bahwa semua pemimpin NICA dan pasukan-pasukannya menyerahkan diri dan meminta agar tentara kita dapat datang menemuinya secara damai (Kempen, 1953). Dengan demikian di hari itu juga (14 Februari 1946) seluruh aparat NICA baik sipil maupun militer menyerahkan diri. Kenyataan ini membuktikan kepada semua orang bahwa hanya dengan gerakan militer beberapa jam saja, seluruh kekuasaan sipil dan militer NICA dalam wilayah Sulawesi Utara/Tengah berhasil direbut dengan mudah oleh para pejuang kita di daerah ini.

Menyusul suksesnya gerakan itu diadakan rapat yang dipimpin oleh unsur-unsur militer dan dihadiri oleh unsur-unsur pemuda BPNI-PPI serta dihadiri oleh unsur-unsur pamongpraja yang berjiwa nasionalis. Rapat itu diadakan di rumahnya Hukum Besar B.W. Lapien di Singkil. Dalam rapat itu dipilih untuk sementara B.W. Lapien selaku Residen menggantikan CONICA Coomans de Ruyter yang sudah ditawan. Unsur-unsur militer yang melaksanakan gerakan ditetapkan sebagai Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara (TRISU) dipimpin oleh Ch. Ch. Taulu yang diangkat menjadi Letnan Kolonel menggantikan Troepencommandant Letnan Kolonel de Vries yang juga sudah ditawan. Di bawah Letnan Kolonel Ch. Ch. Taulu ialah Kapten (KNIL) J. Kaseger yang sudah diangkat jadi Komandan TRISU dengan pangkat Mayor, walaupun sebenarnya ia sama sekali tidak turut serta dalam gerakan tersebut. Kaseger ini adalah lulusan Akademi Militer Breda dan memang sudah berpangkat Kapten ketika Taulu dan Wuisan melancarkan gerakan. Pengangkatan Kaseger dalam pangkat dan jabatannya dilakukan atas dorongan Taulu sendiri untuk merangkul perwira KNIL itu (Taulu, 1956). Seorang perwira KNIL lainnya yakni Letnan Kolonel dr. Tumbelaka turut juga dirangkul tapi ternyata kemudian bahwa keduanya lebih memihak Belanda (Kempen, 1953).

Hasil rapat malam 14 Februari 1946 itu dituangkan dalam Maklumat yang dikeluarkan tanggal 15 Februari 1946 sebagai berikut :

MAKLOEMAT NO. 1

1. Kemarin malam djam 01.00 tanggal 14 Febroeri 1946 oleh pedjoeang2 KNIL dibantue oleh pemoeda2 telah dapat mereboet dengan soekses sekali Pemerintah Belanda (NICA) Soelawesi Oetara dibawah pimpinan Fourier Ch.-Ch. Taulu, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Repoebluk Indonesia jang telah diprolamirkan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
2. Rakjat diminta membantoe sepenoehnja perdjoeangan terseboet diatas dengan tenang-tenang sadja.
3. Kepada pedjoeang-pedjoeang diseloeroeh Soelawesi Oetara oemoemnja di Minahasa choesoesnja diperintahkan oentoek segera mengambil alih Pemerintahan Belanda diseloeroeh pelosok.
4. Keamanan diseloeroeh Soelawesi Oetara oemmoemnja di Minahasa choesoesnja haroes dijamin oleh Tentara Repoebluk Indonesia Soelawesi Oetara.
5. Kantor-kantor Pemerintahan haroes tetap djalan seperti biasa.
6. Kegiatan-kegiatan ekonomi haroes tetap djalan seperti biasa (pasar2, toko2, sekolah2, haroes tetap diboeka seperti biasa).
7. Barangsiapa jang berani mengadakan pengatjaoean beroepa penganiajaan, pentjoelikan, perampokan, pemboenoehan dsb. akan segera dihoekoem mati dimoeka oemoem.
8. Selesai.

Manado, 15 Febroeri 1946
Pemimpin tertinggi
Ch. Ch. Taulu.

Dengan suksesnya gerakan itu maka pimpinan gerakan segera mengundang seluruh aparatur pemerintahan yang ada untuk mengadakan pertemuan di Manado di gedung Minahasa raad di mana hadir para pemimpin dari Minahasa, Bolaang Mongondow dan Gorontalo termasuk para tokoh pemuda pejuang. Pertemuan diadakan 16 Pebruari 1946 di mana berhasil membentuk Dewan Musyawarah Rakyat Sulawesi Utara yang diketuai oleh Residen B.W. Lapien. Dewan ini bertugas untuk membentuk pemerintahan RI di Sulawesi Utara. Hasil musyawarah itu dituangkan dalam maklumat tanggal 17 Pebruari sebagai berikut :

MAKLOEMAT NO. 2

Dimakloemkan bahwa pada tanggal 16 - 2 - 1946 soedah diadakan rapat oemoem digedong Minahasa Raad jang dipimpin oleh Poetjoek Pimpinan Ketentaraan Indonesia Soelawesi Oetara, dihadiri oleh Kepala2 Distrik dan

Onderdistrik di Minahasa, Radja dari Bolaang Mongondow, Kepala Daerah Gorontalo, pemimpin2 Pemoeda Indonesia. Rapat ini telah menetapkan B. W. Lopian menjadi Kepala Pemeritahan Sipil Soelawesi Oetara.

Semoea perintahnja haroes ditoeroeti.

POETJOEK PIMPINAN KETENTARAAN SOELAWESI OETARA

Ch. Ch. Taulu Letnan Kolonel,
J. Kaseger Major,
F. Bisman Kapten.

S. Wuisan Major,
A.F. Nelwan Kapten,

Musyawaharah itu juga memutuskan memberikan kekuasaan kepada para pemuda melalui Letnan Kolonel Ch. Ch. Taulu untuk membantu menegakkan ketertiban dan keamanan khususnya di Minahasa sebagai berikut :

SOERAT KEKOESAAAN

Poetjoek Pimpinan Tentara Indonesia di Manado memberi kekoesaan kepada Pasoekan Pemoeda Indonesia, bermarkas besar di Tondano mengatoer dan mengambil tindakan dalam pendjagaan ketenteraman dan kesedjahteraan rakjat dan negeri diseleroeroeh Minahasa, bersama-sama dengan pemerintahan Negeri dan Pasoekan Kepoelisian Indonesia, didalam lingkoengan kekoesaan Tentara Indoensia.

Manado, 16 Boelan 2 1946

**Poetjoek Pimpinan
Tentara Indonesia di Manado**

**Ch. Ch. Taulu
Luit. Kolonel.**

Oleh keluarnya surat kuasa tersebut, maka hal itu merintis jalan terjadinya penggabungan seluruh organisasi pemuda pejuang menjadi satu wadah perjuangan yakni PPI atau Pasukan Pemuda Indonesia. Untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam tingkat perjuangan waktu itu maka PPI mengadakan konsolidasi mulai tingkat Markas Besar di Tondano sampai ke desa-desa di seluruh Minahasa termasuk kota Manado. Seluruhnya disusun dalam bentuk komando yang untuk tingkat Markas Besar dikepalai oleh Hulubalang Besar yang dijabat oleh E. D. Johannes SH yang dahulunya pernah jadi penasehat PIM, BPNI dan PPI. Kepala Staf PPI ialah Wim Pangalila. Di Manado dibentuk pula satu Markas Besar yang

merupakan bagian dari Markas Besar Tondano dipimpin oleh Hulubalang John Rahasia dan Wakil Hulubalang Mohamad Canon (Wowor, 1977).

Sejumlah personal di Markas Besar PPI Tondano yang menangani urusan-urusan tertentu adalah :

Urusan Umum	: Rachmat Pulukadang
Urusan Keuangan	: Nona Wuli Supit
Urusan Perhubungan	: Ben Wowor
Urusan Penerangan	: Ch. D. Pontoh
Urusan Pendidikan/Pengajaran	: Engel A. Parengkuan
Urusan Perekonomian	: J. Kumaunang
Urusan Latihan	: E. Matulandi
Urusan Agama/Kebudayaan	: F. Dendeng
Urusan Kesehatan	: A. Tampi
Komandan Markas Besar	: J. Lumingkewas.

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, sejak Oktober 1945, PPI sudah membentuk sektor-sektornya di Minahasa, Bolaang Mongondow, Sangir Talaud, Gorontalo sampai ke Sulawesi Tengah dan daerah-daerah lainnya dimana untuk Minahasa dan Manado telah dibentuk 25 sektor. Pemimpin PPI tingkat Distrik kemudian disebut Hulubalang, sedangkan tingkat Onderdistrik disebut Hulubalang Muda yang masing-masing dibantu oleh staf tertentudan membawahi anggota-anggota di sektor masing-masing (Wowor, 1977). Para guru dan siswa SMRK Tondano dialihkan menjadi Corps Pelajar (CP) di bawah komandan J.E. Sanger dibantu oleh Constantijn Warouw, J.L.S. Lelengboto, Frans Pangalila, Max Kamagi, R.E.S. Bujung, Tangkudung, Jolli Waworuntu, Masinambow, Ali Hulukati, W.H. Silangen dan lain-lain (Legoh, 1973). Para anggota PPI dan CP itu dilatih militer oleh instruktur-instruktur TRISU di Manado dan Tondano. Sesuai dengan rencana, PPI dan CP akan memperoleh senjata yang akan diberikan oleh TRISU sesuai tugasnya untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban umum di samping sebagai kekuatan yang akan dipergunakan untuk menghadapi serangan balasan pihak Belanda.

Sejak berhasilnya gerakan perebutan kekuasaan NICA di daerah ini maka dilanjutkan dengan usaha menghubungi pemerintah RI yang berpusat di Yogyakarta. Dinas perhubungan militer yang dipimpin oleh Kopral A. S. Rombot dan Kopral D Kawilarang walaupun memiliki fasilitas komunikasi namun karena putusnya hubungan dengan dunia luar, meminta bantuan dari dinas perhubungan PTT yang berkedudukan di desa Kamasi di Tomohon dipimpin oleh Tan Ing Hwa dibantu oleh A.J. Lalamantik. Kedua anggota TRISU itu membawa naskah berita kepada A.J. Lalamantik dan setelah disetujui oleh Tan Ing Hwa maka isi naskah tersebut disiarkan. Stasiun Pemancar PTT Tomohon memiliki empat pemancar yaitu YFD, YFD2, YFD4, dan YFD3. Keempat pemancar itu diparalelkan masing-masing dengan gelombang 3, 5, 7 megacycles dan 6815 kcs sehingga hanya dengan satu kunci pengetok (morse-key) saja, berkumandangnya di udara empat pemancar dengan gelombang yang berbeda-beda di mana diharapkan salah satu di antaranya akan dapat ditangkap oleh dunia luar (Lalamantik, 1979).

Keempat pemancar itu diparalelkan oleh Tang Ing Hwa dan yang mengirim berita adalah A. J. Lalamentik, disaksikan oleh Kopral A. S. Rombot dan Kopral D. Kawilang dari Dinas PHB (Perhubungan) TRISU. Siaran itu dilakukan tanggal 15 Februari 1946 setelah lewat senja hari. Berita yang disiarkan waktu itu isinya antar lain disebutkan bahwa Pemerintahan Belanda telah berhasil direbut oleh pejuang-pejuang KNIL dan Pemuda dan telah beralih kepada Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta; bahwa orang-orang Belanda tua dan muda semua telah dikumpul dan berada dalam keadaan baik di satu kamp di Sario Manado; tawanan orang-orang Jepang tetap berada dalam kamp-kamp; pekerjaan-pekerjaan berjalan seperti biasa dan keadaan tetap tenang. Naskah berita itu ditantangani oleh Pucuk Pimpinan Pemerintahan Sipil dan Militer setempat waktu itu.

Untuk menarik perhatian dunia internasional akan panggilan siaran radio PTT maka A.J. Lalamentik mempergunakan tata cara pemanggilan internasional yang berlaku untuk itu yaitu dengan mengetok "CQ (3 x) de YFD/YFD2/YFD3/YFD4" beberapa kali diulang, sedikit-sedikitnya lima kali, kemudian diawali dengan kata-kata "TO ALL WHOM IT MAY CONCERN" baru disusul dengan berita seperti disebutkan di atas. Panggilan ini menarik perhatian kapal SS Luna sebuah kapal barang (vrachtschip) Belanda. Markonis di kapal itu adalah seorang kebangsaan Australia bernama Mr. Robert Ensleigh yang secara kebetulan adalah teman seprofesi dari A.J. Lalamentik. Berita itu segera diteruskan oleh Mr. Robert Ensleigh. Menurut berita, siaran itu telah ditangkap di Ujung Pandang, Yogyakarta, Brisbane (Australia), San Fransisco (Amerika Serikat) dan Nederland. Tanggal 16 Februari 1946 berita itu telah disiarkan oleh Radio Australia dan warta beritanya dapat ditangkap di Yogyakarta dan juga dimonitor oleh Dinas PHB TRISU di Manado (Lalamentik, 1979; Taulu, 1956; Wowor, 1977).

Beberapa hari setelah penyiaran tersebut diatas, Kopral A.S. rombot dan Kopral D. Kawilarang datang menemui A.J. Lalamentik untuk meminta bantuannya menghubungi Markas Besar Sekutu di Ujung Pandang dengan maksud untuk mengundang mereka datang ke Manado menyaksikan suksesnya perebutan kekuasaan sekaligus pemberitahuan bahwa daerah ini sejak waktu itu adalah bagian tak terpisahkan dari RI. Lalamentik menyanggupi permintaan itu lalu meminta kepada Tang Ing Hwa menghidupkan pemancar YFD3/6815 kcs untuk memanggil kapal laut-kapal laut. Dikumandangkannya panggilan sesuai tata cara waktu itu yakni "CQ (3 x) de YFD3 QRK ?" beberap kali diulang dan sekali lagi menarik perhatian rekan A.J. Lalamentik di kapal SS Luna bernama Mr. Robert Ensleigh. Menurut keterangan, panggilan itu dapat dipastikan diterima juga oleh kapal MV El Libertador, tetapi markonis di kapal itu enggan menyahut. Kedua markonis di kapal MV El Libertador masing-masing bernama Karel Westerbeek dan Nico Ceinola keduanya berkebangsaan Belanda, sehingga walaupun kedua markonis itu teman dekat A.J. Lalamentik ketika masih mengikuti pendidikan di Radiocursus PTT dan di Radio-Instituut voor Marconisten, namun mereka tidak bersimpati kepada Indonesia, berlainan dengan Mr. Robert Ensleigh yang berkebangsaan Australia di atas.

Mendengar panggilan rekannya di Tomohon itu, maka Robert Ensleigh menanyakan apa yang menjadi keperluannya. Dengan segera A.J. Lalamentik memin-

ta agar SS Luna dapat menjadi stasiun perantara untuk menghubungi Markas Sekutu di Ujung Pandang. Permintaan itu disetujui dan terjalinlah hubungan dengan Ujung Pandang melalui pemancar SS Luna atas jasa baik dari markonis Robert Ensleigh itu. Kalau ia tidak bersedia maka tentu saja tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh dan dengan begitu tidak mungkin mengundang datangnya Komisi Sekutu ke pelabuhan Manado (Lalamentik, 1979)

Sebagai hasil rentetan siaran radio yang disiarkan dari Tomohon maka berita perebutan kekuasaan di daerah ini mengisi siaran-siaran warta berita dan surat kabar di dalam negeri dan di luar negeri. Berita itu ditampung dan disiarkan oleh United Press International (UPI) sehingga selain disiarkan Radio Australia, juga disiarkan oleh BBC London dan Radio San Fransisco. Juga dimuat dalam surat kabar dan untuk dalam negeri antaranya oleh surat kabar Merdeka yang diterbitkan di Jakarta. Siaran pers yang dimuat oleh surat kabar Merdeka di Jakarta itu dimuat seminggu setelah perebutan kekuasaan yakni (Wowor, 1977).

PEMBERONTAKAN BESAR DI MINAHASA

Djakarta, 21 Pebr.

Berita-berita yang diterima di Djakarta dari Soelawesi Oetara, dan belum dapat dibenarkan, menyatakan, bahwa di Manado terjadi pemberontakan dikalangan serdadoe Boemipoetera, yang tidak menyebabkan pertempuran darah. Demikian dikabarkan oleh United Press.

"Kaoem Pemberontak" itu meminta perantaraan Australia, dan tidak mau mendengar lain orang. Orang-orang Eropah di daerah itoe telah mengondoeerkan diri ke Manado iboe kota Minahasa. Kegelisahan di daerah tersebut mendjajar ke Gorontalo.

Kemarin telah tiba dengan pesawat terbang di Manado seorang opsir penghoeboeng Inggeris.

Pemerintahan sipil di bawah Residen B. W. Lapien mengadakan rapat raksasa tanggal 22 Pebruari 1946 bertempat di lapangan Sparta Tikala Manado dihadiri oleh para pejabat sipil dan militer serta puluhan ribu rakyat di kota Manado. Rapat raksasa itu diadakan pada pagi hari dan pada malamnya di Tondano ini turut dihadiri oleh para pejabat sipil dan militer di daerah ini. (Wowor, 1977).

Memenuhi undangan pemerintahan RI Keresidenan Manado pimpinan Residen B.W. Lapien dan Letkol Ch. Ch. Taulu, maka pada 23 Pebruari 1946, Komisi Sekutu dari Ujung Pandang tiba dengan kapal laut MV ET Libertador di pelabuhan Manado. Kapal berbendera Belanda itu (4000 DWT) dipimpin oleh Letkol Colson (Inggeris) yang membawahi sejumlah perwira Australia dan Belanda. Letkol Taulu melalui utusan mengadakan perundingan pendahuluan mengenai status kapal agar diberi netral yang berarti bahwa bendera Belanda di kapal itu harus diturunkan, diganti dengan bendera Sekutu. Juga diminta agar keselamatan delegasi

Indonesia dijamin sepenuhnya mengingat pengalaman dari Nani Wartabone yang ditawarkan selesainya perundingan dengan Sekutu di kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan Gorontalo 30 Nopember 1945. Semua usul itu disetujui oleh Delegasi Sekutu (Taulu, 1956).

Dari rangkaian perundingan pendahuluan, dicapai kata sepakat bahwa perundingan akan dibuka jam 09.00 sampai jam 20.00 tanggal 24 Pebruari 1946. Yang akan berunding yakni Delegasi Indonesia dan Delegasi Belanda dengan Delegasi Sekutu sebagai penengah perundingan. Delegasi Sekutu terdiri atas Letkol Colson (Inggeris - Ketua), Mayor Wilson (Australia - anggota), Kolonel Giebel (Belanda - Anggota), dan Kolonel de Rooy (Belanda - anggota). Delegasi Belanda terdiri atas Coomans de Ruyter (Ketua) dengan anggotanya Letkol de Vries; A.I. Lutheyn dan de Leeuw di mana keempat orang itu sementara berstatus tawanan pihak Indonesia yang disetujui untuk dibebaskan sebagai delegasi Belanda. Delegasi Indonesia terdiri dari Residen B.W. Lapien (Ketua) dengan para anggota Letkol Ch. Ch. Taulu, D.A.Th. Gerungan, E. Katoppo, Hakim Hidajat SH, Ch, D. Pontoh, W. Saerang dan A.B.H. Waworuntu (Taulu, 1956; Wowor, 1977; Kaeng, 1971; Taulu, 1950; Kempen, 1953).

Setelah perundingan dibuka maka Colson menawarkan usul Sekutu yaitu supaya kekuasaan diserahkan kembali kepada NICA barulah kemudian dibicarakan syarat-syarat yang dikehendaki pihak Indonesia. Perubahan kekuasaan harus dilakukan berangsur-angsur dimulai dengan larangan pengibaran bendera Merah Putih. Lapien menolak keras usul itu di mana dikatakan bahwa penyerahan kekuasaan dan larangan pengibaran bendera adalah dua hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Pontoh memperkuat jawaban Lapien dengan mengatakan bahwa kedua hal itu akan menyebabkan pertumpahan darah.

Colson melanjutkan usulnya dengan menuntut agar semua senjata di pihak Indonesia harus diserahkan kepada Sekutu sebagai pemiliknya yang sah. Taulu menolak dengan mengatakan bahwa senjata adalah syarat mutlak untuk memelihara keamanan dan ketertiban termasuk menjaga kamp tawanan 8000 orang Jepang di Girian Tonsea. Colson mengusulkan agar Delegasi Indonesia mau turut bersamanya ke Ujung Pandang untuk melanjutkan pembicaraan yang sama sekali ditolak oleh seluruh anggota delegasi kita.

Delegasi Belanda mengutarakan rasa tidak puasny terhadap perebutan kekuasaan dengan kekerasan dari tangan mereka. Delegasi Belanda menuduh bahwa sebenarnya pemberontakan itu hanya berkisar pada soal tuntutan persamaan jaminan bagi tentara menyangkut perbaikan gaji, makanan, rokok dan sebagainya. Delegasi kita membantahnya dengan mengatakan bahwa perebutan kekuasaan bukanlah menyangkut soal-soal diatas, bukan menyangkut kepentingan perorangan dan tidak pula berdiri sendiri karena itu adalah demi kepentingan seluruh rakyat yang ingin merdeka sepenuhnya sesuai jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ditambahkan bahwa delegasi Indonesia tidak akan mempertimbangkan semua hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan dari rakyat yang sudah dikemukakan di atas, dan akan tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sampai tetes darah yang penghabisan.

Namun delegasi Sekutu tetap bersisi keras agar kekuasaan harus dikembalikan kepada NICA namun pihak kita dengan nada yang sama kin keras tetap mempertahankan pendirian. Menanggapi nada keras pihak kita maka Giebel menggergatak bahwa kalau tidak mau menyerahkan kembali kekuasaan kepada NICA maka Minahasa akan dibom dengan bom atom. Taulu menjawab bahwa pihak kita sama sekali tidak takut dan bahwa lebih baik Minahasa dihancurkan dengan bom atom daripada mengembalikan kekuasaan kepada Belanda; bendera Merah telah berkibar dan harus tetap berkibar, demikian dikatakan Taulu.

Pertulah ditambahkan bahwa perundingan berjalan lambat sekali berhubung harus melalui juru bahasa karena tidak semua mengerti bahasa Inggris, bahasa Belanda maupun bahasa Indonesia yang ketiganya dipergunakan dalam perundingan tersebut. Pada pertengahan perundingan, Colson dan Wilson mempersilahkan kedua delegasi lainnya langsung berunding sepeninggal kedua orang itu maka perkembangan baru terjadi di mana sisa delegasi Sekutu yang terdiri dari dua perwira Belanda memihak delegasi Belanda yang ada. Delegasi Belanda saat itu bersikap membujuk antaranya dengan mengatakan bahwa apabila kekuasaan diserahkan kembali, maka pihak mereka berjanji akan memperhatikan keinginan kita soal keselamatan dan keamanan diri masing-masing anggota delegasi kita. Minahasa akan disesuaikan statusnya menjadi propinsi ke 12 dari Nederland. Di Minahasa akan didirikan akademi militer untuk mendidik tentara pribumi sebagai kader pimpinan militer di kemudian hari. Bagi yang sekarang berstatus militer sekarang ini, akan dinaikkan pangkat tiga sampai empat tingkat ke atas. Para pemimpin kita akan diperkenalkan ke Jakarta untuk langsung menyampaikan keinginan kepada pemerintah pusat mereka di sana. Bagi para anggota militer yang telah berkeluarga akan didirikan perumahan-perumahan yang layak. Namun delegasi Indonesia sama sekali tidak terbujuk dengan usul-usul lunak delegasi Belanda di atas.

Mereka gagal dengan bujukan maka delegasi Belanda lalu mengulangi gertakan bahwa Minahasa akan di bom dengan atom sebagaimana sudah dikemukakan Giebel sebelumnya. Tapi pihak kita tidak mau kalah atau merasa gentar dengan gertakan itu. Melaporkan keseluruhan jalannya perundingan maka Taulu menulis bahwa (Taulu, 1956). :

Kami telah berunding dari djam 9.00 sampai pada djam 19.45. Kami telah merasa se-akan2 kami dipperlakukan sebagai tawanan. Kami sama sekali tak mendapat makanan. Minuman hanya satu kali ... overste Inggris dan groot-majoor Australia itu tak turut berunding lagi. Mereka ini telah turut berunding sampai kira2 pada pertengahan djalannya perundingan.

Kira2 pada djam 19.00 setelah kami merasa bosan dan kuatir djangan-djangan Belanda2 ini telah mendjalankan siasat litjik, maka mulailah kami djuga mendjalankan siasat kami. Sehingga pada satu waktu salah satu Belanda menanja : "Apa sebab sdr. Taulu sebentar2 melihat djam ?" Kami djawab : "Saja rasa, orang diplomaat sebagai tuan, tak perlu lagi menanja soal itu; sekarang lagi seperempat djam, djam delapan".

Menjelang berakhirnya perundingan, tercapailah semacam kompromi antara ketiga pihak di mana pihak Sekutu kembali menggabungkan diri. Satu-satunya kompromi waktu itu ialah bahwa delegasi Indonesia diserahkan tugas untuk menjalankan referendum dalam waktu 24 jam melalui suatu kongres rakyat untuk mengetahui pendapat dan jawaban rakyat akan semua usul Sekutu selama perundingan berlangsung. Jawaban rakyat melalui kongres dimaksud sudah harus diterima oleh Sekutu besoknya yakni 25 Pebruari 1946. Delegasi Indonesia tiba kembali di pelabuhan Manado lima menit sebelum jam 20.00 sebagai batas waktu perundingan. Dapat ditambahkan bahwa kalau batas waktu itu lewat tanpa kabar maka pihak kita akan mengambil tindakan-tindakan militer yang perlu untuk menjamin keselamatan delegasi Indonesia (Taulu, 1956; Wowor, 1977).

Tanggal 25 Pebruari pagi, delegasi Sekutu diundang turun ke darat untuk mengadakan rondrit sementara delegasi Indonesia mempersiapkan pelaksanaan kongres rakyat dimaksud. Mereka dijemput dipelabuhan dengan upacara kebesaran militer lalu dibawa dengan pengawalan dengan TRISU dan PPI ke Asrama Teling. Dari sana mereka diantar meninjau semua kamp tawanan baik kamp tawanan Belanda di Saria Manado maupun kamp tawanan Jepang di Girian Tonsea. Dalam perjalanan mengelilingi Minahasa, delegasi Sekutu melihat langsung akan keadaan masyarakat dimana TRISU dan PPI ternyata sanggup menjamin keamanan dan ketertiban (Wowor, 1977; Taulu, 1956).

Residen B.W. Lopian dan pembantu-pembantunya mengundang semua tokoh masyarakat dari seluruh lapisan yang ada untuk mengambil bagian dalam kongres rakyat. Pelaksanaan referendum itu dipimpin oleh B.W. Lopian dan Ch. D. Pontoh yang duduk dalam delegasi Indonesia sebelumnya. Tokoh-tokoh yang hadir antaranya Nani Wartabone, G.E. Dauhan, M.B. Tumbel, O.N. Pakaja, A.H.A.A. Kawilarang, O.H. Pantouw, C. P. Hermanses, Ds. A.Z.R. Wenas, A.J. Mchede, J.I. Permata dan sebagainya. Walaupun terdengar juga suara yang tidak puas namun dengan dukungan seluruh pmdua yang telah tergabung dalam PPI, maka akhirnya kongres memutuskan untuk menolak semua usul Sekutu dan Belanda. Kongres waktu itu memutuskan untuk memutuskan semua perundingan dengan Belanda dan bahwa Revolusi Kemerdekaan Indonesia harus berjalan terus (Wowor, 1977).

Delegasi Sekutu selesai mengadakan rondrit ke seluruh Minahasa, beristirahat di Markas Besar TRISU dan PPI di Asrama Teling Manado, untuk menantikan lengkapnya kembali delegasi Indonesia karena sebagiannya sedang mengikuti Kongres Rakyat yang diadakan di Tomohon. Ketika Residen B.W. Lopian dan pimpinan lainnya tiba, maka Colson membuka kembali perundingan bertempat di markas itu. Delegasi Belanda juga lengkap hadir setelah diundang turun dari kapal. Colson kemudian mempersilahkan Ketua Delegasi Residen B.W. Lopian membacakan hasil kongres dimaksud, yang oleh Lopian disampaikan sesuai keputusan di atas lalu menyerahkan hasilnya kepada Colson.

Begitu mendengar penyampaian Lopian serta menerima hasil keputusan tertulis darinya, maka Colson mengeluarkan secarik kertas dari dalam saku bajunya yang rupanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Isi secarik kertas itu kemudian dibacanya dengan suara lantang sebagai berikut (Wowor 1977):

Mulai hari ini Sulawesi Utara berada dalam keadaan perang dengan Sekutu berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut :

1. Kekuasaan setempat bertanggung jawab atas penjagaan para tawanan Jepang di Girian. Pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan Sekutu dalam soal ini berarti, bahwa para pemegang kekuasaan di daerah ini akan dituntut sebagai penjahat perang sesuai perjanjian internasional;
2. Kepada warga-warga Belanda di daerah ini atas kehendak mereka masing-masing harus diberikan kesempatan untuk dievakuasi ke Pulau Morotai dengan menggunakan kapal *El Libertador*, yang untuk maksud ini telah siap di pelabuhan Manado.

Atas nama Pimpinan Sekutu
Wilayah Indonesia Timur
Dibuat pada tanggal 25 Februari 1946
Tertanda : COLSON

Selesai Colson membacakannya maka B.W. Lapien atas nama delegasi Indonesia menyatakan menerima baik isi pernyataan di atas lalu perundingan ditutup oleh Colson dan dinyatakan selesai. Delegasi Sekutu dan delegasi Belanda bersiap-siap untuk kembali ke kapal. Coomans de Ruyter yang mengetuai delegasi Belanda, sambil duduk di atas batu menangis tersedu-sedu dan berkata : *"Hoe is het mogelijk dat dit volk, waarvan zijn innige verbondenheid met Nederland bekend staat, toch tot een opstand in gekomen ! Dit land dat ik altijd heb lief gehad .."* Artinya, mana mungkin rakyat daerah ini yang terkenal mempunyai hubungan akrab dengan Belanda, sampai hati mengadakan pemberontakan Tanah ini yang saya cintai sejak dahulu ... (Wowor, 1977 - 1972).

Walaupun demikian menurut Taulu, perundingan itu bukanlah yang terakhir karena sudah disetujui untuk mengadakan perundingan lanjutan beberapa waktu kemudian. Dan sejalan dengan isi perundingan maka mulai 26 sampai 27 Februari 1946, semua orang Belanda dan Indo Belanda yang memilih status tawanan, diangkut ke kapal MV *El Libertador* untuk diungsikan ke Morotai. Para alim ulama Kristen dan Katolik warga Belanda tidak mau ikut mengungsi karena lebih mengutamakan tugas kegerejaan mereka di daerah ini.

Menghadapi bahaya yang semakin besar, maka PPI meminta agar TRISU segera mempersenjatai para pemuda yang telah menerima latihan militer. Melalui nota resmi, Rachmat Pulukadang dari Markas Besar PPI di Tondano mengajukan permintaan 3300 pucuk senjata api yang terperinci penggunaannya untuk kubu-kubu pertahanan di Tondano, Tomohon, Remboken, Kakas, Eris, Langowan, Kawangkoan, Tumpaan, Amurang, Motoling, Ratahan dan Tonsea. Komisariskomisaris PPI untuk daerah Sangir Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo, sudah ditunjuk dan mulai bekerja membina pemuda disana.

Di balik semangat perjuangan itu, terlihat bahwa moral tentara umumnya menurun karena logistik yang sudah sangat mengawatirkan di mana gaji dan pensiun hanya tersedia untuk dua bulan saja. Pembelanjaan kamp tawanan Jepang

di Girian menghadapi kemacetan sementara mulai timbul aksi perang urat syaraf yang dilancarkan oleh bekas Kapten KNIL J. Kaseger yang sudah diangkat jadi Mayor TRISU serta para pengikutnya. Sekitar 20 ribu pensiunan yang tersebar di desa-desa merupakan potensi yang sesungguhnya menentang politik pemerintahan nasional pimpinan Lapien dan Taulu. Kapal perang Belanda Piet Hein Kelihatan mondar mandir pada perairan di daerah ini sementara Belanda mempersiapkan pasukan penyerbu di Morotai untuk menyerbu Minahasa. Sekutu mengirim berita radio dari Ujung Pandang bahwa delegasinya akan tiba dengan kapal terbang dan minta dijemput di pangkalan air Tasuka di danau Tondano tapi pada waktunya ternyata tidak muncul. Malahan tanggal 7 Maret 1946 sebuah pesawat Sekutu datang menyebarkan pamflet di Minahasa menghasut agar rakyat memberontak terhadap pemerintahan nasional pimpinan Lapien dan Taulu di daerah ini (Wowor, 1977).

Ternyata pimpinan TRISU terlambat menyalurkan senjata sesuai permintaan Markas Besar PPI. Senjata-senjata untuk sektor-sektor PPI di Manado baru diserahkan awal Maret dan 10 Maret 1946 dikeluarkan order penyerahan senjata untuk Markas Besar PPI Tondano. Hulubalang Besar PPI E.D. Johannes SH disertai Kepala Staf Wim Pangalila serta F.H.L.W. Mondong, Willy Pantouw dan A.H.A.A. Kawilarang, datang dengan sebuah truck besar untuk mengangkut senjata dimaksud. Sementara senjata-senjata dari Markas Besar TRISU di Teling Manado dimuat ke atas truck tersebut, tiba-tiba terdengar tembakan-tembakan gencar di kompleks markas. Mayor J. Kaseger yang membelot rupanya sudah memulakan aksi balasan untuk menjatuhkan kepemimpinan Taulu dan Lapien. Pada tanggal 11 Maret 1946 itu, Komandan TRISU Letkol Ch. Ch. Taulu dan stafnya termasuk Hulubalang Besar E.D. Johannes SH dan staf yang mengiringinya ke Manado, ditangkap oleh pasukan lawan yang ternyata dipimpin oleh Sersan Kusoy dan Sersan Bolang.

Adapun pasukan musuh itu berasal dari kompi yang ditugaskan menjaga kamp tawanan Jepang di Girian. Mereka datang dengan mengendarai sebuah truck dan sebuah jeep militer dengan kekuatan diperkirakan satu peleton lengkap. Mengenai kisah penangkapan yang mereka jalankan, dapat diikuti dalam surat kabar pro Belanda yakni "Pelita" yang terbit 13 April 1946 No. 42 dan 20 April 1946 No. 44. Tulisan itu dibuat oleh salah seorang anggota pemberontak Kaseger, dan dimuat secara bersambung dalam surat kabar tersebut di atas. Secara garis besar diungkapkan tentang rencana mengadakan aksi balasan pimpinan Mayor J. Kaseger dan kawannya Mayor Latuperissa serta Sersan Mayor Mamahit dan Sersan Lapien. Pelaksana aksi balasan adalah Sersan Kusoy dan Sersan Bolang. Bendera Merah Putih di kamp mereka diturunkan, lalu dinaikkan bendera Merah Putih Biru tanggal 10 Maret 1946. Inspeksi pasukan TRISU pimpinan Kopral J.M. Runtukahu dihancurkan oleh mereka di sekitar kamp Girian (Taulu 1950).

Mengenai pengkhianatan Kaseger itu disampaikan Taulu bahwa setelah ia ditangkap oleh Sersan Kusoy, maka ia dibawa ke Tomohon untuk menemui Kaseger tapi ternyata Kaseger ada di Manado sehingga dibawa kembali ke Manado. Ketika tiba di Manado, ia ditipu dengan berita bahwa pihak Sekutu sedang

menunggunya di kapal perang Piet Hein yang sedang berlabuh di pelabuhan. Selanjutnya Taulu mengatakan (Taulu, 1956) :

Kami dihantarkan ke kapal dengan kawan-kawan kami sendiri, jang kemudian ternyata bahwa mereka adalah kaki tangan Belanda seperti Kaseger.

Setibanja di atas kapal, tiba-tiba kami dikepung oleh Marine-marine Belanda dengan perkataan : "Eindelijk hebben wij de hoofdmutter te pakken !"

Mendengar perkataan itu, kami terkejut lalu berkata "Ik kom hier om te confereren !"

Mereka menjawab : "Kom maar, volg mij!", lalu kami turut kepada jang memanggil. Dimuka satu kamar dekat kamar mesin, ia tiba-tiba berhenti lalu membuka pintu kamar itu.

"Hier heb je je vrienden" berkata ia. Nampak pada kami dalam kamar itu sdr-sdr Lopian, Wuisan, Nelwan, Bisman, Warouw ...

Lalu kamar dikuntji.

Disitu barulah kami mengerti, bahwa Kaseger cs telah mengkhianat terhadap bangsanja sendiri bahwa kami telah ditangkap dengan tipu ...

Para anggota TRISU dan PPI yang tetap setia kepada pemerintah RI yang belum ditangkap, segera menyusun kekuatan untuk menghadapi musuh yang ternyata dipimpin seluruhnya oleh Kapten KNIL J. Kaseger selaku komandan operasi NICA. Segera setelah Markas Besar PPI di Tondano menerima berita bahwa pimpinan inti TRISU dan PPI sudah ditangkap, maka para pimpinan yang tinggal antaranya Rachmat Pulukadang, E. Lewu, A. Pangemanan bersama seorang anggota TRISU bernama No Korompis, melakukan gerakan kilat dengan menyerbu markas detasemen polisi Tondano. Senjata-senjata yang dirampas dari polisi Tondano dibagi-bagikan kepada para pemuda PPI yang dipimpin oleh Willy Kotambunan, Arie Muntu dan Alex Pakasi. Pasukan CP dari SMRK pimpinan Johan Worek, Harry Siwy, Eddy Kumontoy dan J.P. Tooy, merebut satu kendaraan militer milik RAAF (Sekutu). Dengan beberapa pucuk senjata yang ada, anggota-anggota CP itu berangkat menuju Kakas, Langowan dan Kawangkoan untuk merebut senjata-senjata yang di tangan para anggota polisi NICA di sana (Wowor, 1977).

Hari itu juga Markas Besar PPI dipindahkan dari kota Tondano ke pinggiran kota ke Kampung Jawa Tondano mempergunakan rumahnya Usman Pulukadang. Kubu pertahanan didirikan di sekitar markas besar dan dijaga oleh anggota-anggota yang bersenjata. Besoknya, 12 Maret 1946, sebuah mobil patroli KNIL lewat di situ dan terja dilah tembak menembak sementara mobil berlari kencang di mana seorang anggota PPI bernama Raun Sambouw tewas terlanggar peluru otomatis KNIL. Masih beberapa hari lamanya PPI bertahan di Tondano pimpinan No Korompis dan kawan-kawannya anggota PPI. Kemudian lalu mereka mengundurkan diri ke desa-desa di sekitar kota antaranya ke Tonsaru, Peleloan dan Papakelan.

Semua operasi pihak lawan dipimpin oleh Kapten Kaseger selaku Territorial Commandant KNIL. Karena ia melihat bahwa kota Tonda no sangat tidak aman maka ia menawarkan perundingan dengan TRISU dan PPI yang bertahan di sekitar kota itu.

Pasukan TRISU dan PPI waktu itu di bawah komandan No Korompis dibantu para pimpinan PPI antaranya E.V. Kaseger (adik Kapten Kaseger sendiri) yang sebelumnya adalah guru dan instruktur militer bagi para siswa SMRK Ton-dano. Taktik Kapten Kaseger ternyata berhasil dimana dengan perantara dua anggota PPI yakni Nona Wuli Supit dan Ben Wowor, semua pasukan pimpinan No Korompis menyerah setelah berusaha bertahan seminggu lamanya (Wowor, 1977).

Sejak saat itu maka dapat dikatakan seluruh pimpinan PPI sudah ditangkap kecuali John Rahasia yang masih terus bergerilya di Minahasa Utara dan pulau-pulau di sekitarnya. Para anggota yang tertangkap memenuhi ruangan penjara-penjara di Manado dan Tomohon. Demikian juga dengan para anggota TRISU. John Rahasia akhirnya tertangkap setelah mencoba lari ke Sulawesi Selatan. Dari Mamuju ia dibawa ke Ujungpandang akhirnya dibawa ke Manado. Dari sekian banyak anggota PPI dan TRISU termasuk para pejabat sipil lainnya, 46 di antaranya diproses oleh Mahkamah Militer NICA yakni Krijgraad te Velde van Makassar te Manado. Yang anggota militer dinyatakan dipecat tidak dengan hormat dari KNIL. Hukuman seluruhnya berjumlah 410 tahun penjara. Ada yang menjalaninya di Manado dan banyak pula yang di tempat lain seperti di Morotai, Balikpapan, Cipinang, Sukamiskin, Struyswijk, Nusakambangan, Glodok, dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain (Wowor, 1977; Taulu, 1950). Barulah setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, mereka dibebaskan oleh pemerintah RI. Demikianlah riwayat yang dibentangkan secara garis besarnya saja mengenai peristiwa perebutan kekuasaan di daerah ini yang disponsori oleh para anggota KNIL dan pemuda yang berjiwa nasionalis.

Perjuangan di daerah Sangir Talaud dalam masa sebelum aksi militer Belanda I (pertama) dijalankan oleh para tokoh nasionalis di sana yang berusaha sekeras mungkin untuk membuka mata rakyat yang dikatakan sebagai "buta politik" untuk mengenal hakekat kemerdekaan sebagaimana sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Hal itu dimulai ketika pada bulan Oktober 1945 terbentuk organisasi politik yang dinamakan Partai Rakyat Indonesia (PARI) yang pengurusnya adalah sebagai berikut :

Ketua	: L.M. Kansil
Wakil Ketua	: H. Pasandaran
Panitera	: R. Kansil

dan dilengkapi dengan beberapa anggota.

Pada tanggal 17 Nopember 1945, setelah upacara sederhana memperingati proklamasi kemerdekaan, PARI yang berpusat di Siau (Sangir Talaud) mengirim kawat kepada pemerintah RI di Jakarta. Setelah setahun tanpa balasan maka pada 12 Desember 1946 dikirimkan surat yang agak panjang disusul dengan kawat menyatakan dukungan terhadap pemerintah RI yang baik surat maupun kawat-kawat itu dibalas oleh pemerintah RI dari Yogyakarta sebagai berikut (Elias, 1973) :

2 batavia 97 74 / 69 13 12.45

= 1c = kansil ketoea partai rakjat indonesia peling siaoe sangihe talaud

no k 73 komma pm telah terima kawat sdr tg 17/12/46 dan soerat tg 12/12/46

ttk oesaha rakjat sangihe talaud dalam mepertahankan kesatoean negara repoeblrik indonesia sangat dihargai ttg segala oesoel-oesoel sdr telah diketahoei ttg keprtjajaan penoeh atas kesanggoepan sdr2 seleoroeh rakjat indonesia mengikoeti perd joeangan sdr2 ttg terima kasih komma merdeka ttg habis =

sekertaris perdana menteri

**ontvangen te Taroena Radio
13-1-1947 ten 10.23 javatijd**

Sementara menunggu jawaban di atas, untuk meningkatkan semangat perjuangan, maka PARI pimpinan L.M. Kansil di Siau mengadakan upacara penaikan bendera Merah Putih pada 1 Januari 1946. Akibatnya maka L.M. Kansil dan adiknya E. Kansil dipenjarakan. Ketika dibebaskan beberapa waktu kemudian, keduanya dipesankan NICA agar jangan mengulangi lagi kegiatan seperti itu, namun keduanya tidak menghiraukan tekanan tersebut.

Untuk menghimpun potensi perjuangan wanita maka PARI membentuk organisasi Persatuan Wanita Indonesia Siau atau PERWANIS yang susunan pengurusnya sebagai berikut (Elias, 1973; Sigarlaki dkk, 1977) :

Pengawas Umum	: Ibu F. Pasandaran - Lalisang
Ketua	; Ibu Nona Mohede
Panitera	: Ibu A. Elias-Pangulimang
Bendahara	: Ibu K. Paparang - Rindu
Anggota-anggota	: Ibu F. Bawoleh Nona Theodora Tamaka Nona Adelaide Sebentar.

Sedangkan untuk menghimpun potensi perjuangan pemuda, maka PARI membentuk organisasi Barisan Pemuda Republik Indonesia (BAPRI). PARI, PERWANIS dan BAPRI ini yang menyelenggarakan penaikan bendera Merah Putih 1 Januari 1946 di Peling Siau.

Ketika pada bulan Pebruari 1946 para pejuang kita sukses merebut kekuasaan di Manado/Minahasa, maka BAPRI mengutus dua anggotanya untuk menemui Letkol Ch.Ch. Taulu serta pimpinan lainnya untuk mengetahui kemungkinan memperluas perjuangan itu ke Sangir Talaud. BAPRI memperoleh jawaban bahwa aksi lanjutan akan dilakukan bulan Maret 1946 ke daerah Sangir Talaud dengan basis di pulau Siau. Untuk itu maka BAPRI hendaknya mempersiapkan pasukan seperlunya. Namun pada saatnya, ternyata kekuasaan sudah direbut kembali oleh NICA dengan mempergunakan pasukan TRISU yang mengadakan pengkhianatan di Manado pimpinan Kapten J. Kaseger. Dengan demikian maka persiapan itu gagal namun BAPRI senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap usaha pecah belah pihak Belanda waktu itu. (Elias, 1973).

Markas BAPRI terletak di Ondong Siau dan dalam periode perjuangan fisik, pimpinannya berganti-ganti tetapi yang paling lama menjadi ketua ialah L.N. Paparang dari Hiung. Tahun 1947 seorang infiltran dari Yogyakarta tiba di Siau. Ia

bernama Letnan Tribudhaja asal dari Solo yang isterinya seorang wanita Siau. Letnan itu segera terjun melatih para pemuda BAPRI dalam bidang kemiliteran kepada mereka. Peranan BAPRI akan menjadi lebih nyata setelah pengakuan kedaulatan untuk berjuang mewujudkan Negara Kesatuan (Elias 1973).

Partai BNI di Manado pimpinan J. Jocom mendirikan anak cabang di Siau yang dipimpin oleh L.M. Kansil. Sebagai penghubung antara anak cabang Siau dan pusat partai di Manado maka ditunjuk seorang anggota bernama J. Dauhan. Partai BNI juga menunjuk Hamzah Adariku sebagai pembantu untuk memimpin BNI di pulau Sangir Besar (Yuda dan Bentelu, wawancara 8-1-1978).

Dalam periode ini, perlawanan rakyat Gorontalo terhadap NICA semakin meningkat dengan terbentuknya Gerakan Kebangsaan Indonesia (GERKINDO) pada medio 1946 yang diprakarsai oleh beberapa pemuda antaranya :

- A. Uno, kepala kehutanan
- Ismail Datau, marsaoleh Kabila
- Sun Bone, kepala pertanian
- drh. Wardhojo, dokter kehewanian
- dr. J. Sabu, dokter pemerintah
- Dj. Arbie, pedagang
- M. Ali Wongsodojo, kepala douane
- A.J. Usman, dinas pekerjaan umum
- A. Amu, marsaoleh Bone Pante.

GERKINDO bergerak membina para pemuda Gorontalo untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Pecahan dari GERKINDO melahirkan organisasi kelaskaran Angkatan Pemuda Indonesia (API) di bawah pimpinan M.S. Ointu. API ini kemudian berubah menjadi Angkatan Pemuda Republik Indonesia (APRI). Di bawah pimpinan Djakaria dan rekannya Said Basumbul, maka APRI mengadakan sejumlah aksi sabotase terhadap Belanda antaranya pembakaran gudang-gudang kopra milik Het Koprafonds dan pelemparan granat di tangsi NICA (Kodam XIII/Merdeka, 1978). Setelah diketahui Belanda bahwa dalang sabotase APRI itu adalah kedua pimpinannya di atas, maka mereka menangkap Djakaria dan Said Basumbul lalu dikirim ke Nusakambangan. Ketika aksi militer Belanda II berlangsung, keduanya berhasil melarikan diri dari Nusakambangan, lalu bergabung dengan TNI di pulau Jawa.

Pimpinan APRI beralih ke tangan dr. J. Sabu yang terus melanjutkan aksi sabotase terhadap NICA. Akibatnya dokter itu ditangkap dan dibuang ke Morotai. Sejak itu maka GERKINDO mengintensipkan latihan-latihan militer secara rahasia di lapangan Merdeka berdekatan dengan markas pemuda di jalan Merdeka kota Gorontalo sekarang ini. Lapangan itu kebetulan terlindung dengan deretan rumah rakyat dan pusat latihan terletak di belakang rumahnya Anwar Djaafara yang dijadikan markas pemuda. Untuk membakar semangat perjuangan maka diterbitkan surat kabar "Suara Pemuda" dengan penanggung jawab N.G. Ointu (Mimbar Indonesia No. 22 1950).

Sejak ditangkapnya berturut-turut pimpinan pemuda maka dapat dikatakan organisasi kelaskaran menjadi lumpuh namun tidak berarti bahwa perjuangan

menjadi menurun. Kesatuan-kesatuan kelaskaran sejak saat itu bertindak sendiri-sendiri tanpa pimpinan pusat lagi namun sekaliannya mempunyai satu keyakinan dan satu sasaran perjuangan yakni bahwa mereka membela proklamasi kemerdekaan negaranya dan untuk itu kaum penjajah harus diusir. Tidak dapat dilupakan adanya peranan kaum wanita dalam perjuangan antara lain dapat disebutkan yakni Zus Wartabone (Boki), Ekin Nesin, Fin Bijai, Ni Kok Tien, Kusnah Mangantje, Salma Djafara dan Saerah Abas.

Di daerah Bolaang Mongondow, dalam periode ini para anggota PPI Laskar Rakyat yang bermarkas di perkebunan Tanoyan, melanjutkan perang gerilya melawan NICA. Penghadangan patroli-patroli maupun mobil-mobil Belanda serta pemutusan hubungan telepon, seringkali dilakukan. Ketika di Manado, TRISU dan PPI berhasil merebut kekuasaan dari tangan NICA maka daerah ini dikunjungi Residen B.W. Lapien dikawal sepasukan TRISU pimpinan Kapten F. Bisman. Perkunjungan itu mengakhiri untuk sementara masa tiga bulan melakukan perang gerilya melawan Belanda di daerah itu.

Mereka pergi mengunjungi markas KNIL di desa Molinow dan memerintahkan kepada komandannya Kapten Latuperissa agar menurunkan bendera Merah Putih Biru dan menaikkan bendera Merah Putih di markas itu. Diturunkannya bendera Belanda disaksikan oleh para anggota PPI Laskar Banteng yang semakin mengobarkan semangat mereka untuk segera turun dari hutan-hutan. Oleh pimpinan daerah di bawah Residen B.W. Lapien dan Kapten F. Bisman, mereka diperintahkan agar kembali ke desa masing-masing dan memperkuat pertahanan lingkungannya. Markas PPI Laskar Rakyat di Tanoyan diperintahkan untuk ditinggalkan dan tempat itu dijadikan sebagai basis latihan para anggota PPI yang akan menerima latihan militer. Para pimpinan PPI Laskar Rakyat yang dipenjarakan oleh Belanda dilepaskan semuanya dan mereka segera kembali ke Bolaang Mongondow untuk mengibarkan bendera Merah Putih di semua instansi pemerintahan sipil dan kepolisian.

Dengan ditangkapnya para pimpinan TRISU dan PPI serta pemerintahan sipil pro RI di daerah ini, maka Belanda kembali berkuasa dan mulai berusaha menegakkan kembali tertib hukum kolonial di daerah ini. Bulan Maret 1946 Residen Coomans de Ruyter kembali memerintah dan kemudian diganti oleh Residen J. Oberman dengan Asisten Residen Minahasa ialah A.I. Lutheyn (1946-1947). Pemerintah NICA waktu itu menjalankan politik "hak menentukan nasib sendiri" yang membuka jalan aktipnya kembali kaum politisi di daerah ini (Wowor, 1977). Banyak organisasi sosial dan politik baik yang pro Belanda maupun yang pro RI telah muncul selama periode sebelum dilancarkan aksi militer Belanda I di mana beberapa di antaranya akan dikemukakan berikut ini.

Pada 25 Maret 1946, muncul organisasi politik bernama *Twaalfde Provincie* (TWAPRO) diketuai oleh Jan Mawikere dengan pusatnya di desa Matani (Tomohon) di rumahnya Jan Mawikere sendiri. Para anggota kebanyakan adalah pensiunan dinas militer KNIL, guru dan pegawai lainnya yang puluhan ribu banyaknya tersebar di seluruh desa di Minahasa. TWAPRO dengan cepat tanpa susah payah berhasil mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Tujuan TWAPRO yakni memper-

juangkan terwujudnya Minahasa sebagai propinsi ke 12 dari Negeri Belanda (Posumah, 1978). Trompet TWAPRO ialah surat kabar mingguan "Kesatuan Kerajaan" yang terbit di Manado (Taulu, 1950).

Bulan Juni 1946 berdiri Gerakan Pembangunan Indonesia Serikat (GEPNIS) yang resmi berdiri 28 Agustus 1946. Para pendirinya ialah E. Katoppo, G.A. Maengkom, A.C. Manoppo, A.B.H. Waworuntu, J.M.L. Supit dan lain-lain. Ikut sertanya beberapa anggota pamongpraja NICA memberikan pengaruh positif bagi GEPNIS. Ketika GEPNIS mulai kehilangan pengaruhnya maka beberapa pemimpinnya mendirikan Gerakan Indonesia Merdeka (GIM) dipelopori M. Sondakh, J.M.L. Supit, F. Gerungan, J. Pandelaki dan lain-lain. Cabang GIM didirikan di Tomohon, Manado dan Tondano dengan massa sekitar 1500 anggota. Suara GIM ialah surat kabar "Gerakan" (Taulu, 1950; Kempen, 1953). Tujuan GIM sejalan dengan GEPNIS yakni berjuang menuju terbentuknya Negara Indonesia Merdeka yang berbentuk federal (Wowor, 1977). Dibekukannya GEPNIS dan dibentuknya GIM pada 1 Juni 1947 merubah sifatnya dari pro Belanda menjadi pro RI terutama sejak Desember 1947 (Posumah, 1978).

Bulan Juli 1946, beberapa tokoh pemuda nasionalis yang pernah aktif dalam BPNI dan PPI, mendirikan Partai Indonesia Raya (PIR). Mereka itu antaranya J.A. Dengah, Nona Gusta Ngantung, V. Mandey, A.S. Tanod dan kawan-kawannya. PIR sempat mendirikan cabangnya di Airmadidi dan Minawerot sebelum dilarang oleh Belanda (Taulu, 1950 ; Posumah 1978).

Tanggal 28 September 1946 didirikan di Manado organisasi politik Barisan Nasional Indonesia (BNI) dengan pelopornya G.E. Dauhan, M.B. Tumbel, J. Jocom, J.I. Permata, H.M. Taulu, A. Mangindaan, S. Mamesah, J. Sarijowan, J. Walewangko, Ch. Wala, O. Wensen, M.D. Kartawinata dan lain-lain. Jumlah massa sekitar 7500 anggota. Azas BNI yakni membangkitkan dan memperkokoh perasaan kesatuan Negara Republik Indonesia. Jalan mencapainya yakni berjuang di kalangan rakyat dan dengan rakyat. Usaha-usahnya yakni menentang dan menolak semua tindakan dan pola-pola kebudayaan yang sifatnya merusak atau menghambat terwujudnya kedaulatan Negara Republik Indonesia; menginsafkan rakyat akan perlunya memperjuangkan terwujudnya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat (Taulu, 1950 ; Posumah, 1978 ; Kempen, 1953).

Dalam Kongres BNI 12 - 14 Nopember 1946 di Manado dibicarakan tentang usaha mempersenjatai rakyat melawan Belanda untuk mewujudkan pemerintahan RI di daerah ini. Organisasi ini mendirikan cabang di seluruh Minahasa dan di Sangir Talaud dan di Poso (Sulawesi Tengah). Jumlah cabang tercatat 37 buah dan jumlah anggota meningkat menjadi 12000 orang. Lambang BNI adalah "Banteng" sedangkan trompetnya adalah mingguan "Menara" (Taulu, 1950).

Pada 10 Nopember 1946 terbentuk di Manado organisasi pemuda nasionalis bernama Pemoeda Indonesia Soelawesi Oetara (PISO) dipelopori oleh F.H.L.W. Mondong, Ch. D. Pontoh, Nona Gusta Ngantung, Ben Wowor, H.J. Runtu, Usman Pulukadang, J. Karamoy, B. Supit, W. Warouw, A. Buchary, P.M. Simangunsong, J. Oflagi, L. Anes, L. Wongkar dan lain-lain. PISO sebenarnya sudah dirintis sejak Maret 1946. PISO dalam programnya dapat dianggap merupakan kelanjutan dari

PPI dan BPNI serta PIM yang sudah dilarang oleh NICA. Beberapa di antara para pendiri di atas adalah bekas tokoh dari ketiga organisasi pemuda terdahulu. Penasehat PISO waktu itu ialah drh. W.J. Ratulangi. PISO menerbitkan surat kabar dinamakan "Suara Piso" di bawah asuhan Ch. D. Pontoh. Karena PISO memperjuangkan penumbangan kekuasaan NICA sesuai jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, maka NICA berusaha menyusupkan infiltran ke dalamnya dan akibatnya dua orang pemimpinnya yakni F.H.L.W. Mondong dan Gusta Ngantung ditangkap NICA.

Dengan ditangkapnya kedua pemimpin PISO itu maka pusat organisasi dipindahkan dari Manado ke Tondano dan selanjutnya dipimpin oleh H.J. Runfu, P.M. Simangunsong dan Usman Pulukadang. PISO mendirikan cabangnya di Manado, Tomohon, Tondano, Sonder dan Tompaso di mana para anggotanya memperoleh kartu anggota yang bergambar "pisau belati" (Wowor, 1977 ; Taulu, 1950 ; Posumah, 1978).

Dalam periode sebelum aksi militer Belanda I ini, walaupun PPI dinyatakan terlarang akibat keterlibatannya selama perebutan kekuasaan NICA yang lalu, namun keyakinan untuk melanjutkan perjuangan menentang Belanda menjiwai seluruh anggotanya. Perjuangan bersenjata dilanjutkan secara gerilya dengan nama yang berbeda-beda baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Semangat mereka dipertebal lagi dengan masuknya beberapa perwira TRI yang dikirim dari Yogyakarta (Jawa Tengah) untuk menggerakkan dan membantu perlawanan di daerah ini. Dengan demikian muncullah beberapa organisasi pelanjut perjuangan PPI secara gerilya baik di hutan-hutan maupun di dalam kota-kota.

Sejak menyerahnya No Korompis yang memimpin TRISU dan PPI di Tondano Maret 1946, maka perlawanan dilanjutkan oleh beberapa pemimpin lain antaranya R. Pulukadang yang segera mendirikan organisasi kelaskaran Indonesia Muda di sekitar Tondano. Perjuangan IM lebih meningkat dengan tibanya Letnan R. Lumingas dari Jawa. Letnan TRI itu sebelumnya pernah turut berjuang dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya melawan Sekutu. Selain Letnan R. Lumingas, tahun 1947 tiba sejumlah perwira TRI dari Jawa. Mereka adalah orang-orang Minahasa yang resminya sebagai orang yang ingin pulang ke daerah yang memperoleh fasilitas pengangkutan kapal laut dari NICA. Setibanya di Minahasa semua mereka menyebar dan membantu perjuangan kelaskaran untuk melawan kekuasaan NICA. Antaranya ialah Kapten Alex E. Rotty dan Kapten Constantijn Mamahit (A.E. Rotty, wawancara 7-9-1979 ; Wowor, 1977).

Kelanjutan PPI di Remboken ialah terbentuknya organisasi kelaskaran Corps Kebangsaan Sukarela (CKS) pimpinan Bus Tombeng dibantu Kapten C. Mamahit di atas. Di Kakas di bentuk Pasukan Pemuda Kakas (PPK) pimpinan Willy Malonda dan kawan-kawannya. Di Tondano di samping IM ada lagi organisasi pelanjut PPI pimpinan Sam Mangindaan dan Rens Kindangen. Di Tompaso dibentuk organisasi kelaskaran P-3 pimpinan V. Rorimpandey dan Gerson Tewu. Di Minahasa Tengah Minahasa Selatan ada Pasukan P-7 pimpinan Junus Oflagi, F. Runtuwuwu dan Jo Rey dibantu seorang perwira TRI yang bernama Jootje Kaligis yang berhasil menyusup dari Samarinda (Kalimantan Timur). Selain itu Kaligis membentuk organi-

sasi pemuda pelajar bernama Kepanduan Indonesia Merdeka (KIM) yang antara 1947 - 1948 digembleng dalam latihan-latihan kemiliteran dengan mempergunakan tanda pangkat dan disiplin militer. Ketika Kaligis pulang ke Jawa, diteruskan oleh E.R.S. Bujung yang berhasil memperluas perjuangan KIM sampai ke Amurang, Kawangkoan dan Tomohon (Wowor, 1977).

Pada tahun 1946 ini muncul organisasi politik Perkumpulan Masyarakat Katolik (PEMAKAT) pimpinan J.B. Terok, F.Th. Kambey dan F. Wowor. Programnya nampak agak pro Belanda sebab menyokong terbentuknya negara federal. Oleh karena itu tahun itu juga sebagian pemimpinnya mendirikan Partai Katolik yang pro RI. Mereka itu ialah F.Th. Kambey dan A. Rompis (Taulu, 1950 ; Wowor, 1977 ; 1972 ; Posumah, 1978).

B. MASA AKSI MILITER BELANDA I

Sesudah persetujuan Linggajati ditandatangani 25 Maret 1946, suasana politik di Indonesia bukan semakin cerah malah sebaliknya semakin keruh. Belanda menjalankan aksi sesuai tafsirannya sendiri akan isi persetujuan itu. Mereka menuntut agar RI menghapuskan blokade ekonomi terhadap kota-kota di Jawa dan Sumatera. RI harus menerima langkah-langkah ke arah pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS) sesuai kehendak Belanda. Karena RI tidak mau menuruti semua tuntutan di atas maka Belanda memberikan ultimatum 27 Mei 1947 di mana RI harus memberikan jawaban yang memuaskan terhadap Belanda kalau tidak maka mereka tidak mau lagi mengakui isi persetujuan di atas. Pada 28 Juni 1947 hampir saja Belanda melakukan aksi militer dan barulah tanggal 21 Juli 1947 aksi militer itu dilancarkannya terhadap semua kedudukan RI di Jawa dan Sumatera.

Daerah Sulawesi Utara memang secara geografis letaknya jauh terpisah dari Jawa dan Sumatera tapi daerah ini secara tidak langsung turut menderita akibat tindakan-tindakan Belanda dalam rangka aksi militernya. Hal ini mengingat bahwa daerah Sulawesi Utara pernah menyatakan diri tidak dapat dipisahkan dari RI selama 14 Pebruari sampai 11 Maret 1946 sebagaimana sudah dikemukakan di depan. Dengan demikian maka untuk menjaga jangan sampai hal itu terulang lagi sementara mereka menjalankan aksi militer di Jawa dan Sumatera, maka NICA mendatangkan satu divisi KL yang dinamakan "Divisi 7 Desember" pimpinan Letkol J. van Marle. Divisi ini memperkuat pertahanan Belanda sebelum sampai sesudah dilancarkannya aksi militer I. Para pensiunan KNIL yang besar jumlahnya di daerah ini sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali menjadi Reserve Corps Belanda. Pasukan polisi terutama PID besar sekali peranannya dalam usaha menindas gerakan di bawah tanah dalam periode ini. Di kota Tomohon didirikan satu Depot Latihan pimpinan Letkol van Baarsel untuk mendidik anggota-anggota militer yang kemudian ditugaskan baik di daerah ini maupun ke daerah-daerah lainnya (Wowor, 1977 ; 1972).

Di pihak lainnya, menghadapi tekanan yang semakin berat dari pihak Belanda, maka para pejuang RI di daerah ini membentuk organisasi kelaskaran bernama Laskar Rakyat Republik Indonesia (LRRI) 10 Pebruari 1947 dipelopori oleh F.H.L.W. Mondong, Nona Gusta Ngantung, P.M. Simangunsong, R. Longdong, Arsjad

Buchary, Junus Offagi, H.M. Taulu dan kawan-kawannya. Dinyatakan bahwa dengan terbentuknya LRRI maka organisasi PPI secara resmi serentak dilebur ke dalam LRRI. Dengan demikian maka secara otomatis semua bekas pimpinan PPI menjadi pimpinan LRRI di sektor masing-masing untuk melanjutkan perlawanan gerilya terhadap Belanda (Posumah, 1978).

Markas Komando LRRI berada di rumahnya F.H.L.W. Mondong di desa Talete (Tomohon). Staf markas komando yang dipimpin F.H.L.W. Mondong itu terdiri dari B. Wowor, K. Wondal, N.Th. Rumajar, Alex Pua, S.B. Wangkay, Paul Rumajar, J. Kaindeh, Boy Potu, Piet Ngantung, Lexy Anés, Alex Liogu, B. Liogu, J.H. Tular, J. Potu, Jonky Kumontoy, S.I. Rumajar, Wong Pai Sau, G. Warouw, A. Achmad dan lain-lain (Posumah, 1978).

Wilayah perjuangan gerilya dari LRRI disebut "Komando Wilayah Daerah" yang terdiri atas tujuh "wilayah sedang" dan satu "wilayah besar" sebagai berikut (Posumah, 1978) :

1. Komando Wilayah Daerah I (Tomohon dan sekitarnya) di bawah Komandan F. Wongkar;
2. Komando Wilayah Daerah II (Tondano dan sekitarnya) di bawah Komandan F. Runtuuwu dibantu J. Talumikir;
3. Komando Wilayah Daerah III (Airmadidi dan seluruh Tonsea) di bawah Komandan V. Mandey dibantu oleh Nona Gusta Ngantung;
4. Komando Wilayah Daerah IV (Kawangkoan dan sekitarnya) di bawah Komandan H.M. Taulu dibantu Ton Lumentah;
5. Komando Wilayah Daerah V (Kakas-Remboken dan sekitarnya) di bawah Komandan C. Mamahit;
6. Komando Wilayah Daerah VI (Ratahan, Tombatu, Belang dan sekitarnya) di bawah Komandan J. Methusala dibantu oleh Palassa;
7. Komando Wilayah Daerah VII (Amurang dan sekitarnya) di bawah Komandan Henky A. Kaligis;
8. Komando Wilayah Besar (Manado dan sekitarnya) di bawah Komandan Chris D. Pontoh dibantu Mat Pulukadang.

LRRI sebagai satu organisasi kelaskaran dalam masa ini berkekuatan sekitar 3550 anggota yang terdaftar dalam setiap wilayah komando yang ada.

Untuk memperoleh senjata maka LRRI berusaha mengadakan hubungan dengan pihak luar antaranya dengan seorang pelaut Australia bernama O'Malley. Dalam hal ini ditugaskan kepada Nona Gusta Ngantung untuk menghubunginya di mana senjata akan ditukarkan dengan emas dan tempat penukaran yakni ditentukan di pantai Tondano. Hubungan itu terjadi bulan Juni 1947 yakni sebulan sebelum dilancarkan aksi militer pihak Belanda yang pertama. Karena kesalahan waktu bertemu apalagi Belanda mengadakan pengawasan yang ketat, maka pertukaran itu gagal bahkan Gusta Ngantung ditangkap dan dipenjarakan (Wowor, 1977).

Kemudian LRRI berusaha membuat senjata sendiri dengan bahan dasar berasal dari senjata rusak peninggalan tentara Jepang. Bengkel senjata didirikan secara rahasia di sebuah gua di puncak gunung yang dinamakan "Mata Tombak" di sekitar Remboken. Bengkel senjata LRRI ini dipimpin oleh Frits Mamahit dan

menghasilkan senjata ringan seperti Colt, Sten, FN dan senapan ringan. Bengkel senjata ini telah menghasilkan senjata untuk kebutuhan satu kompi yang dibagi-bagikan untuk sektor Tondano, Eris, Kakas dan Remboken (Wowor, 1977).

Pada masa pemerintahan Asisten Residen Minahasa A.I. Lutheyn (1947-1948) maka NICA mengaktifkan kembali Dewan Minahasa yang intinya adalah para anggota yang pernah duduk dalam dewan itu sebelum masa pendudukan Jepang. Dewan ini sebenarnya dipulihkan kembali tahun 1946 yang tugasnya antara lain (Watusseke, 1968) :

1. Menyalurkan hasrat rakyat serta memperhatikan usul-usul rakyat dalam soal ketataprajaan serta pemerintahan Minahasa sebagai daerah otonom;
2. Memperjuangkan kepentingan-kepentingan Minahasa itu kepada pejabat-pejabat yang berwenang;
3. Memberikan pertimbangannya dalam segala urusan pemerintahan yang memerlukan pertimbangan dewan.

Hasil diaktipkannya dewan itu ialah dijadikannya Minahasa sebagai daerah otonom tahun 1947. Untuk itu pejabatnya bukan lagi Asisten Residen tetapi mulai tahun 1948 disebut Kepala Daerah di mana Kepala Daerah Minahasa yang memerintah waktu itu ialah D.A.Th. Gerungan (1947-1949) menggantikan Asisten Residen A.I. Lutheyn. Dewan Minahasa Sementara (dibentuk 1946) dibubarkan setelah terpilihnya 22 anggota Dewan Minahasa hasil pemilihan umum bulan Maret 1948. Kepala Daerah bertugas rangkap sebagai Ketua Dewan Minahasa pada waktu itu (Watusseke, 1968 ; Posumah, 1978).

Perjuangan parlementer dari organisasi-organisasi yang pro RI untuk merebut kursi di dewan itu tidak kalah sengitnya dibandingkan dengan perjuangan gerilya di hutan-hutan. Hal ini karena unsur-unsur yang pro Belanda sangat aktif dan didukung dengan kuatnya oleh Belanda sendiri. Kekuatan politik di dewan itu terbagi atas tiga yakni yang menghendaki bentuk federal (GIM, Hoofdenbond, PEMAkat) yang ingin bergabung dengan Belanda (TWAPRO) dan yang pro RI (KRIS, BNI, Partai Katolik). Namun sayang sekali komposisi kekuatan dalam dewan tidak jelas (Wowor, 1977 ; Posumah, 1978).

Dewan Minahasa ini berkedudukan di Manado yang dalam pada itu telah menjadi Ibukota Minahasa sejak 1947 yang dipindahkan dari Tomohon di tahun itu. Sebagai Ibukota maka Manado berstatus Kotapraja Gaya Baru yang langsung berada di bawah Kepala Daerah Minahasa, walaupun sejak 1949 memiliki Walikota sendiri yakni Ny. A.M. Waworuntu (akhir 1949 - 1951) namun kedudukan itu masih berada di bawah Kepala Daerah Minahasa (Posumah, 1978).

Presiden NIT melalui surat keputusan 20 Maret 1948 No. 2/Pr.V/48 (LN-NIT 1948/22) yang dilaksanakan dengan surat keputusan Residen Manado 25 Maret 1948 No. R/12/2/15 berlaku mulai 22 Maret 1948, membagi daerah Minahasa atas enam distrik yakni Manado, Tonsea, Kawangkoan, Ratahan, Tondano dan Amurang (GKDH, 1974). Selanjutnya mengenai pembagian distrik atas onderdistrik (distrik bawahan) adalah sebagai berikut (Watusseke, 1968 : Lamp. X.B : Posumah, 1978) :

1. Kota Manado
2. Distrik Manado, terdiri atas :

- a. Distrik Bawahan Manado Utara
- b. Distrik Bawahan Manado Selatan
- 3. Distrik Tomohon, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Tomohon
 - b. Distrik Bawahan Tombariri
- 4. Distrik Tonsea, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Airmadidi
 - b. Distrik Bawahan Kauditan
 - c. Distrik Bawahan Girian
 - d. Distrik Bawahan Tatelu
- 5. Distrik Toulour, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Tondano
 - b. Distrik Bawahan Eris
 - c. Distrik Bawahan Kakas
- 6. Distrik Kawangkoan, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Kawangkoan
 - b. Distrik Bawahan Tumpaan
 - c. Distrik Bawahan Langowan
- 7. Distrik Amurang, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Amurang
 - b. Distrik Bawahan Tenga'
 - c. Distrik Bawahan Tompasobaru
- 8. Distrik Ratahan, terdiri atas :
 - a. Distrik Bawahan Ratahan
 - b. Distrik Bawahan Tombatu.

Dalam periode ini muncul lagi satu organisasi pro RI dan satu yang pro Belanda. Yang pro Belanda ialah Komite Ketatanegaraan Minahasa (KTM) dipimpin dr. V.L. Ratumbuang yang baru saja datang dari Yogyakarta. Tujuan KTM ialah hendak mendirikan satu Negara Minahasa lepas dari NIT dari RI maupun dari Nederland dan merupakan salah satu negara di dunia, jadi jauh lebih ekstrim dari TWAPRO yang hanya menghendaki status propinsi ke 12 untuk Minahasa. Saat KTM didirikan tidaklah jelas tetapi dipastikan antara 1947 - 1948. Selain dr. V.L. Ratumbuang, pemimpin lainnya yakni E.D. Dengah, O. Mawuntu dan Dimpudus (Posumah, 1978).

Organisasi pro RI yang didirikan dalam periode ini ialah suatu organisasi pemuda nasionalis yang dinamakan Kebaktian Rakyat Indonesia Sosialis atau KRIS (perlu dibedakan dari KRIS yang merupakan organisasi kelaskaran di pulau Jawa yang merupakan singkatan dari Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi). PISO yang didirikan 10 Nopember 1946 di Manado dirasakan perlu dibubarkan berhubung banyaknya kaki tangan NICA yang berhasil menyusup dan untuk itu dibentuklah KRIS ini. Para pendirinya yakni G.A. Maengkom, F.H.L.W Mondong, Karel Supit, Nona Gusta Ngantung, P.M. Simangunsong dan L. Anes. KRIS ini didirikan 12 Januari 1948 yang azasnya adalah sosialisme sedangkan tujuannya adalah untuk

mewujudkan kesatuan Indonesia sepenuhnya serta tersusunnya masyarakat yang sosialis (Posumah, 1978; Taulu 1950).

Dengan demikian kalau untuk perjuangan gerilya ada LRRI maka untuk perjuangan pemuda dalam bidang politik ada KRIS. KRIS berhasil mendirikan cabang-cabangnya di Manado, Tomohon, Tondano, Sonder, Tompaso, Amurang, Airmadidi dan tempat-tempat lainnya di Minahasa. Sebagai suara KRIS maka diterbitkan "Gelora Masa" sebagai pengganti "Suara Piso" yang dahulunya diterbitkan PISO. KRIS ikut dalam pemilihan anggota Dewan Minahasa Maret 1948, memperoleh 1758 suara dan punya wakilnya di dewan itu (Taulu, 1950 ; Posumah, 1978).

Para pemuda pejuang pada waktu itu memiliki keanggotaan rangkap dalam LRRI dan KRIS sehingga kedua organisasi itu dalam tindakan-tindakannya melawan Belanda, senantiasa bahu membahu. Seorang pimpinan LRRI merangkap anggota KRIS bernama Jonky Kumontoy berhasil mengambil dokumen rahasia di kantor NICA yang merupakan laporan-rahasia Residen Manado DR. Morison yang sedianya akan dikirimkan ke Jakarta. Laporan itu diserahkan dan dimuat dalam surat kabar Gelora Masa milik KRIS. Sebagai akibatnya maka penanggung jawab surat kabar Ch.D. Pontoh bersama G.A. Maengkom dan F.H.L.W. Mondong, ditangkap Belanda. Kedua pimpinan KRIS itu sekaligus merangkap pimpinan LRRI, di mana Maengkom adalah Ketua Umum KRIS dan Mondong adalah Komandan LRRI seluruhnya.

Sejak saat itu surat kabar Gelora Masa diberangus oleh Belanda dan kedua pimpinan di atas dipenjarakan antaranya G.A. Maengkom dipenjarakan dua tahun di Manado. Karena ditangkapnya F.H.L.W. Mondong maka KRIS membentuk Pimpinan Pusat Darurat Badan Perjuangan KRIS yang susunannya sebagai berikut (Posumah, 1978) :

Ketua	: L. Anes
Sekretaris	: A. Liogu, dan Gusta Ngantung
Anggota-anggota	: A. Pua, N.Th. Rumajar, J.H. Tular, Karel Wondal, S.I. Rumajar dan J. Kumontoy.

Pimpinan Pusat Darurat ini tetap bertugas walaupun kemudian F.H.L.W. Mondong selesai menjalankan hukuman penjara, dan memiliki peranan yang besar untuk menghancurkan pasukan KNIL dan polisi NIT dalam periode sesudah 1949 di Minahasa.

C. MASA AKSI MILITER BELANDA II DAN PERIODE PERANG GERILYA.

Pada tanggal 9 Maret 1948, pemerintah kolonial menghapuskan status pemerintahan NICA dan didirikan Pemerintah Federal Sementara yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal DR. H.J. van Mook (DPR-GR, 1970 ; Tatang Sastrawiria et al, 1954). Pemerintah Federal Sementara ini mengakui dan mengikutsertakan semua negara bagian yang terbentuk sebelumnya kecuali RI. Dari sudut pandangan pemerintah federal ini maka RI diakui hanya berkuasa de facto atas Jawa dan Sumatera sesuai persetujuan Linggajati yang ditegaskan lagi dalam perjanjian

Renville kemudian di mana RI hanya diakui sederajat dengan NIT, NST dan lain-lain yang dibentuk Belanda. Hal ini ditentang mati-matian oleh RI baik melalui perundingan maupun dengan kekuatan militer karena sama sekali tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Untuk menjalankan bentuk federasi kepada ketatanegaraan Indonesia maka Pemerintah Federal Sementara mengadakan konperensi bulan Juli 1948 di Bandung. Konperensi itu menghasilkan terbentuknya BFO (Bijzonder Federaal Overleg) yang beranggotakan para menteri negara bagian bentukan Belanda. Kelak pengakuan kedaulatan diberikan oleh pemerintah Belanda melalui Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag 1949 kepada RIS yang terbentuk dari RI dan BFO ini.

Dalam pada itu van Mook diganti oleh DR. L.J.M. Beel selaku Wakil Tinggi Mahkota. Ia diganti karena pemerintah Nederland tidak menyetujui rencananya untuk membentuk pemerintahan federal di Indonesia. Tapi Wakil Tinggi Mahkota Beel menyempurnakan rencana van Mook yang terkenal dengan "Rencana Beel". Dalam rencana itu Belanda menghendaki agar pihak RI memberikan kekuasaan yang luas dalam mengatur soal militer sampai terwujudnya Negara Indonesia Serikat di mana seorang Belanda akan memimpin semua tentara RI dan tentara Belanda yang ada di Indonesia. Karena RI di bawah Kabinet Hatta dianggap lamban menjawab usul-usul itu maka Belanda memberikan ultimatum yang harus dijawab dalam waktu 24 jam.

Pemerintah RI tidak sempat bersidang untuk menjawab usul dimaksud berhubung waktunya sangat singkat sehingga Belanda menganggap bahwa RI mengabaikannya. Pada 19 Desember 1948 mulailah dilancarkan aksi militer II di mana Ibukota RI Yogyakarta diduduki dan Presiden, Wakil Presiden dan sejumlah Menteri ditangkap. Sebelumnya telah dikirimkan berita ke Bukittinggi meminta agar Menteri Kemakmuran yang sedang berada di sana segera membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI). Juga dikirim berita ke New Delhi (India) agar para pemimpin di sana membentuk Pemerintah RI dalam pengasingan (exile government).

Pemerintah NIT waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Idris Anak Agung Gde Agung merangkap Menteri Dalam Negeri yang memimpin 15 anggota kabinet lainnya (Kempen, 1953). Keresidenan Manado di bawah Residen DR. Morison sedangkan Minahasa di bawah Kepala Daerah D.A.Th. Gerungan yang juga merangkap Ketua Dewan Minahasa. Kekuatan politik sudah terbagi atas dua bagian yaitu yang pro Belanda (TWAPRO, Hoofdenbond, PEMAKAT, GIM) dan yang pro RI (BNI, KRIS, LRRI, Partai Katolik). Kecuali LRRI, maka semua organisasi di atas terwakili dalam Dewan Minahasa bentukan Belanda.

Dalam periode ini, kegiatan kelaskaran seluruhnya dilakukan atas nama LRRI untuk melawan Belanda dengan sistem gerilya. LRRI di Tompaso membentuk satu pasukan kecil yang dinamakan Tentara Rela Mati (TRM) dipimpin Gerson Tewu, A. Tjuwale, R. Rorimpandey, D. Wondal, J. Momongan, J. Kumontoy dan lainnya. Mereka bermaksud melancarkan pemberontakan bersenjata dalam periode ini. Namun pada bulan Oktober 1948, sebelum sempat menjalankan aksinya, para pemimpin dari TRM itu ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh Belanda (Taulu, 1950): CKS di Remboken pimpinan Bus Tombeng dan Kapten TNI C. Mamahit (yang

menyusup dari Jawa) melakukan perjuangan gerilya melawan Belanda atas nama LRRI. Mereka aktif mengganggu kedudukan-kedudukan Belanda di Remboken sampai ke Kakas. Kapten TNI ini lebih dikenal dengan nama Tein Mamahit yang tewas dalam suatu serangan di Kakas pada 25 Oktober 1949. Oleh karena itu maka Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong menunjuk Letnan AURI Ch. Talumikir untuk menggantikan kedudukan Mamahit selaku Komandan LRRI Komando Wilayah Daerah V (Kakas-Remboken dan sekitarnya) (Posumah, 1978 ; Wowor, 1977).

Perlawanan gerilya di Minahasa berlangsung terus sejalan dengan yang terjadi di Jawa dan Sumatera serta di daerah-daerah lain dalam periode ini. Dengan ditandatanganinya Persetujuan Roem-Royen 7 Mei 1949, maka untuk sementara perlawanan gerilya mereda sesuai perintah gencatan senjata yang dikeluarkan kedua belah pihak. Namun Belanda tetap berusaha memperkuat dirinya, sehingga di Minahasa perlawanan terus dilanjutkan oleh LRRI dibantu oleh sejumlah perwira TNI yang sebelumnya diselundupkan membantu perlawanan gerilya di daerah ini terhadap Belanda.

Hal ini nyata ketika pada 10 Oktober 1949, para anggota KRIS mengadakan penyerbuan ke Markas Polisi Tondano dan berhasil merebut sejumlah senjata tanpa mengalami kerugian jiwa. Sebelumnya 8 Oktober 1949, mereka sedang mengadakan perayaan organisasi KRIS yang turut dihadiri oleh J. Wajong yang baru datang dari Yogyakarta dan menjabat selaku Wakil Komisaris/Sekertaris Jenderal Pemerintahan Propinsi Sulawesi yang berkedudukan di Yogyakarta (berhubung propinsi Sulawesi Masih dikuasai Belanda).

Perayaan 8 Oktober 1949 itu dihadiri oleh sejumlah tokoh KRIS antaranya Bert Supit, Sj. Taulu, Ompi, Moninka, L. Anes, N.Th. Rumajar, Ch. Talumikir, F. Runtunuwu, J. Watuseke, F. Tuju dan sebagainya di mana kebanyakan di antara mereka menjabat sebagai pimpinan LRRI yang sedang menjalankan perang gerilya melawan Belanda. Hal ini diketahui dengan jelas oleh pihak Belanda yang merencanakan untuk menangkap para pemimpin tersebut. Rencana Belanda ini dapat diketahui pula oleh para pemimpin di atas sehingga mereka memutuskan untuk mendahului gerakan musuh. Dengan pimpinan Ch. Talumikir, F. Runtunuwu, J. Watuseke dan kawan-kawannya, maka KRIS menyerbu markas polisi di Tondano 10 Oktober 1949 di mana semua senjata polisi yang berdinam waktu itu berhasil jatuh ke tangan KRIS.

Setelah berhasil merampas senjata maka mereka kemudian melarikan diri ke arah pantai Tondano untuk menyusun kekuatan menghadapi tindak balasan Belanda. Dengan segera Belanda mengerahkan pasukan polisi dan KNIL untuk melakukan pengejaran tetapi sia-sia saja. Kemudian Belanda memperkuat markas polisi dengan kekuatan satu peleton dibantu satu regu anggota KNIL (Posumah, 1978).

Pada 25 Oktober 1949, sepasukan LRRI dari Remboken di bawah pimpinan Kapten TNI C. Mamahit menyerbu polisi Kakas untuk merebut senjata-senjata mereka. Dalam serangan yang dipersiapkan terlalu tergesa-gesa itu, polisi di Kakas dibantu oleh seorang pensiunan kopral KNIL yang berhasil menangkap Mamahit sehingga Mamahit terluka parah dan tewas tanpa perawatan seperlunya. Gerakan

LRRI dan KRIS di atas berhasil merebut senjata polisi di Tondano dan Kakas sebanyak 35 pucuk dengan korban seorang saja yakni Kapten TNI C. Mamahit. Untuk itu maka Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong menunjuk Letnan AURI Ch. Talumikir menggantikan kedudukan Mamahit selaku pimpinan Komando Wilayah Daerah V sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Sementara itu, para pemimpin LRRI memutuskan untuk meningkatkan perjuangan dengan mengadakan pembagian tugas organisasi di mana LRRI membentuk Laskar Front Pemuda (LFP) di bawah Komandan L. Anes (yang sedang menjabat Ketua Pimpinan Pusat Darurat LRRI). LRRI akan meneruskan perjuangan gerilya khusus untuk melucuti senjata polisi Belanda sedangkan LFP ditugaskan untuk mendekati para anggota tentara Belanda (KNIL) agar menyeberang ke pihak RI. Untuk itu maka L. Anes dibantu oleh sejumlah personalia yakni A. Liogu, Piet Ngantung, Alex Pua, J.H. Tular, Gusta Ngantung, V.Mandey, W. Saerang, Karel Wondal, U. Pangkrego. Untuk tetap memelihara koordinasi antara LRRI dan LFP maka ditunjuk dua anggota yakni J. Kumontoy dan N.Th. Rumajar. Beberapa anggota KNIL dengan segera menggabungkan diri ke dalam LFP tanpa sepengetahuan Belanda antaranya A.H. Mengko, Mamengko, Angkouw, L. Saerang, J. Pusung, F. Bolang, Tumonggor, Pontoh, S. Mondong dan Tuturoong. Kepada mereka selanjutnya ditugaskan oleh LFP untuk mempengaruhi para anggota KNIL lainnya yang berada di markas Teling Manado dan menyusun kekuatan untuk menggabungkan diri dengan LFP. Berkat kegiatan para anggota KNIL yang diam-diam menjadi anggota LFP itu, maka perlahan-lahan sejumlah senjata milik KNIL diserahkan kepada LFP sehingga LFP semakin kuat kedudukannya (Posumah, 1978). Dengan demikian maka perlawanan gerilya terhadap Belanda semakin menghebat di Minahasa.

Di daerah Gorontalo, dalam periode ini terus dilakukan gerakan-gerakan di bawah tanah yang dipelopori oleh para pemuda nasionalis di daerah tersebut. Walaupun sebagaimana sudah dikatakan di depan, para pemimpinnya banyak yang telah ditangkap Belanda dan dipenjarakan, namun mereka tetap aktif bergerak dalam perjuangan gerilya. Bahkan perjuangan mereka ternyata memperoleh simpati di kalangan para anggota militer Belanda. Seorang anggota KNIL bernama A.J. Aniesz berusaha mempengaruhi rekan-rekannya agar mau membantu perjuangan gerilya di sana. Namun sebelum pengaruhnya meluas, ia ditangkap dan dipenjarakan (Mimbar Indonesia No. 22, 3 Juni 1950). Kaum gerilya di Gorontalo suatu ketika menyerang iring-iringan mobil yang membawa para anggota KL dan KNIL yang menuju ke Marisa. Jembatan-jembatan yang akan dilalui dirusak atau dibakar. Tetapi kemudian Belanda dapat menangkap para pemimpinnya sehingga Adam Pade, Abas DoE dan H.N. Bokings dimasukkan ke dalam penjara.

Di daerah lain yakni di Bolaang Mongondow, perjuangan di sana ditandai pula oleh dibentuknya cabang BNI yang berpusat di Manado. Rapat pembentukan cabang BNI Bolaang Mongondow diadakan di gedung SMP Cokroaminoto dipimpin oleh pimpinan BNI dari Manado yakni G.E. Dauhan, Abdul Madjid, M.D. Kartawinata. Dalam rapat ini maka M.D. Kartawinata ditunjuk selaku ketua cabang dibantu oleh C.S. Gobel, A.U. Mokoginta dan lain-lain.

Organisasi Barisan Rakyat Revolusioner Indonesia (BRRI) yang terbentuk di Tondano (Minahasa) 17 Juni 1946 yang dipimpin oleh H.H. Waworuntu Labaika (Ketua Umum), Masloman (Ketua I), Laurens Kindangen (Ketua II), Constantijn Mamahit (Sekertaris Umum) dan beberapa pembantu yakni J. Kindangen, Frits Mamahit dan I. Kindangen, diperluas pula sampai ke Bolaang Mongondow.

Di Minahasa, BRRI membentuk Wilayah Pertahanan I sedangkan Bolaang Mongondow sebagai Wilayah Pertahanan II. Untuk wilayah pertahanan I terdiri dari empat sektor yakni :

1. Sektor pertahanan Tondano pimpinan Komandan G.A. Maengkom;
2. Sektor pertahanan Tatelu pimpinan Komandan H.R. Ticoalu;
3. Sektor Pertahanan Tomohon pimpinan Komandan J.P. Pitoy dibantu Jan Rombot;
4. Sektor Pertahanan Remboken dipimpin Komandan H.H. Waworuntu Labaika, J. Mamahit, L. Mamusung, Alex Kairupan.

Wilayah Pertahanan II Bolaang Mongondow dipimpin oleh A.C. Manoppo dibantu oleh Johan Pontoh, R. Mokoginta (H.H. Waworuntu Labaika, wawancara 17-10-1979).

Selain memimpin BRRI Bolaang Mongondow, maka A.C. Manoppo juga memimpin Gerakan Indonesia Merdeka (GIM) yang sejak tahun 1946 telah terbentuk di sana. Susunan pengurus GIM waktu itu ialah :

Ketua	: A.C. Manoppo
Wakil Ketua	: Johan Pontoh
Sekretaris	: R. Mokoginta
Seksi Pemuda	: J.C. Mokoginta, H.D. Manoppo, U.S.A. Mokoagow, Rumondor.
Seksi Organisasi	: Frans A. Mokoginta, Frits Mokoginta, B. Pandelaki
Seksi Keuangan	: R. Mokoginta.

GIM membentuk ranting di hampir semua desa di Bolaang Mongondow di mana sebagian besar kepala desa (Sangadi) menjadi pimpinan ranting GIM di sana. Cabang-cabang didirikan di tingkat kerajaan antaranya untuk :

Kerajaan Kaidipang Besar	: Donggala Korompot
Kerajaan Bintauna	: A.M. Datunsolang
Kerajaan Bolaang Uki	: Muhammad Kadulla, dan B.J. Kadulla.

Rakyat daerah Sangir Talaud sejak masa aksi militer I sampai masa aksi militer Belanda II dan periode perang gerilya, tidak mampu berbuat apa-apa karena tekanan yang keras yang dilakukan Belanda terhadap daerah itu. Berita dan perkembangan yang terjadi di daerah lain terutama dari Jawa, dapat dikatakan kurang sekali diketahui oleh rakyat di daerah ini akibat pengawasan yang keras di atas. Pasukan KNIL di bawah Letnan Ponto berhasil digunakan Belanda untuk mengawas-awasi sesama bangsanya di daerah ini.

Ketika Belanda mengadakan aksi militernya yang kedua, maka beberapa tokoh nasionalis setempat yang tergabung dalam BNI dipanggil menghadap. Para pemimpin itu yakni Hamzah Adariku, Ahmad Tompo, Wellem Aer, Abdul Hamid Mustir, A.H. Tarib dan lain-lain. Mereka ketika menghadap ditanyai apakah mereka tahu bahwa Yogya sudah diduduki dan bahwa pemerintah RI sudah ditawan. Ini merupakan salah satu tindakan intimidasi yang dialami oleh kaum nasionalis di daerah Sangir Talaud. Sebagian di antara para pimpinan BNI itu yakni Ahmad Tompo, Hamzah Adariku dan Wellem Aer, sudah ditahan sejak Belanda melancarkan aksi militer I. Sedangkan Abdul Hamid Mustir, A.H. Tarib dan rekan mereka lainnya ditangkap pada masa aksi militer Belanda II. Mereka ditahan di Tahuna lalu di bawa ke Manado dan baru dibebaskan ketika Belanda mengakui kedaulatan kita (Yuda, wawancara 15-9-1979 ; Tompo, wawancara 14 dan 18-9-1979; Madonsa, wawancara 18-9-1979).

D. INTERAKSI DI DAERAH DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL.

1. Maklumat Pemerintah No. X.

Melalui Maklumat Pemerintah No. X tanggal 3 Nopember 1945 dijelaskan kebijaksanaan pemerintah pusat RI yang menyukai berdirinya partai politik dengan ketentuan bahwa semua partai politik itu harus memperkuat perjuangan kemerdekaan Indonesia menentang usaha kembalinya Belanda. Dengan begitu maka partai-partai tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Sejalan dengan maklumat tersebut di atas maka hampir pada semua daerah di Indonesia, termasuk di daerah Sulawesi Utara ini, tercatat tumbuhnya sejumlah partai politik dan organisasi massa bukan saja yang pro RI tetapi banyak juga yang pro Belanda.

Sebagaimana sudah dikemukakan di depan, gerakan kepartaian terutama muncul di tahun 1946 yakni sesudah perebutan kekuasaan NICA oleh para pejuang yang pro RI pada tanggal 14 Pebruari 1946 sampai 11 Maret 1946. Memang sebelumnya sudah banyak partai politik yang berdiri di Jawa yang mendirikan cabangnya di daerah ini misalnya PSII, PKI, PNI, PARTINDO, PARINDRA, Persatuan Minahasa dan sebagainya. Semua partai politik itu lenyap di masa pendudukan Jepang antara 1942 - 1945 tetapi kemudian muncul lagi sesudah itu. Di antara 1945 - 1950, didirikan pula banyak organisasi politik yang bukan merupakan cabang dari daerah lain yang kebanyakan berpusat di Manado dan Minahasa. Beberapa di antaranya pro RI dan ada pula yang pro Belanda atau setidaknya-tidaknya pro bentuk federal untuk negara Indonesia sesuai yang direncanakan oleh Belanda. Terutama di Minahasa, hal ini nyata sekali ketika diadakan pemilihan anggota Dewan Minahasa, di mana yang pro RI adalah BNI, KRIS, LRRI, dan Partai Katolik; yang pro Belanda adalah TWAPRO ; dan yang pro bentuk federal adalah GIM, Hoofdenbond dan PEMAKAT.

Di daerah-daerah lainnya antaranya di Sangir Talaud, pada bulan Oktober 1945 muncul organisasi politik Partai Rakyat Indonesia (PARI) pimpinan L.M. Kansil. PARI ini kemudian melahirkan PERWANIS dan BAPRI. Juga di daerah itu

didirikan cabang BNI dari Manado. Di daerah Bolaang Mongondow sejak 1946 telah terbentuk GIM pimpinan A.C. Manoppo.

Selain itu di Minahasa menjelang pengakuan kedaulatan, telah dibentuk satu organisasi politik pro Belanda yang dinamakan Gerakan Republik Indonesia Timur (GRIT). GRIT ini diperkirakan berdiri antara Juli-Agustus 1949 atas anjuran DR. Soumokil kepada Ketua TWAPRO Jan Mawikere (Posumah, 1978). Dalam periode ini pula, para aktivis PNI bergabung dengan para pemimpin Persatuan Pemuda Indonesia mendirikan Front Kesatuan Republik Indonesia (FKRI) yang bergerak di luar Dewan Minahasa. FKRI ini menuntut agar Dewan yang dibentuk sesuai hasil pemilihan Maret 1948 itu segera dibubarkan dan diganti dengan "Komite Nasional Daerah" (Posumah 1978).

2. Perjanjian Linggajati.

Perjanjian Linggajati ditandatangani oleh pihak Belanda dan pihak Indonesia 25 Maret 1946. Tetapi karena Belanda tidak puas atas sikap Indonesia maka mereka melancarkan aksi militer I mulai 21 Juli 1947. NIT yang telah didirikan 24 Desember 1946, ketika aksi itu dilancarkan berada di bawah Perdana Menteri Nadjamuddin Daeng Malewa yang mengemukakan pendirian yang menyetujui dilancarkan aksi oleh Belanda terhadap RI pada saat itu. Terhadap pendirian Perdana Menteri NIT itu maka seluruh partai politik yang pro RI menyatakan kekecewaan dan penyesalannya.

Di Minahasa, BNI segera mengadakan pertemuan di Manado yang membicarakan tentang aksi militer itu serta persetujuan Linggajati dan masalah-masalah tingkat nasional lainnya. Pertemuan BNI itu diadakan 8 Agustus 1947 yang menghasilkan sebuah pernyataan ditandatangani oleh J. Jocom dan J.I. Permata selaku pimpinan BNI pada waktu itu. Isi pernyataan dimaksud adalah sebagai berikut (Kempen, 1953) :

Berhubung dengan suasana politik Indonesia pada dewasa ini, maka Barisan Nasional Indonesia, Pusat Manado, memaklumkan pendiriannya, sebagai ternjata dibawah ini :

A. MENGENAI REPUBLIK INDONESIA.

Menegaskan sekali lagi keputusan Kongres Barisan Nasional Indonesia di Sonder pada tgl. 27/28 Djuni 1947, yang menjatakan bahwa :

- 1. Tetap mengakui Republik Indonesia, sebagai bentukan Negara Indonesia jang sah.*
- 2. Tetap mengakui Pemerintah Republik Indonesia sebagai wakil dari seluruh Bangsa Indonesia.*
- 3. Tetap mempunyai kepertajaan sepenuhnya kepada Pemerintah Republik Indonesia.*

B. TENTANG NASKAH LINGGARDJATI.

Sampai saat penghabisan kami pertaja, bahwa naskah Linggardjati ialah dasar jang utama dalam hal penjelesaian soal Indonesia-Belanda.

Tetapi berhubungan dengan adanya tindakan Belanda, yang kami anggap sebagai "Agressie Militair" yang tidak mengindahkan serta yang telah melanggar dan membatalkan Naskah Linggajati, maka kami yakin bahwa satu-satunya jalan sekarang untuk menyelesaikan masalah Indonesia - Belanda dengan tjara damai, ialah :

Pertjampuran tangan Internasional dengan tjara mengadakan Komisi yang terdiri dari wakil-wakil beberapa Negara, yang ditentukan oleh Dewan Keamanan Persekutuan Bangsa-bangsa.

C. MENGENAI NEGARA INDONESIA TIMUR.

1. Kami tetap berpegang kepada keputusan Kongres Barisan Nasional Indonesia di Sonder pada tgl. 27/28 Djuni 1947, jaitu :

"Terpaksa menyetujui adanya N.I.T. yang lahirnya tidak setjara demokratis".

2. Setelah mendengar pidato dari Perdana Menteri N.I.T. Nadjamuddin Dg. Malewa dimuka tjorong radio Djakarta pada tgl. 22 Djuli 1947, yang menjatakan persetujuan atas tindakan Belanda terhadap Republik Indonesia, maka Barisan Nasional Indonesia menjatakan :

a. Bahwa Barisan Nasional Indonesia sama sekali tidak setuju dengan isi pidato P.M. Nadjamuddin Dg. Malewa, yang mengandung persetujuan atas tindakan Belanda yang dimulai pada tgl. 21 Djuli 1947 itu.

b. Bahwa berhubungan dengan yang tersebut diatas itu, maka kami menjatakan tidak kepertjajaan kami atas beleid Pemerintah Negara Indonesia Timur.

D. PENUTUP.

Sebagai penutup, Barisan Nasional Indonesia sekali lagi menjatakan, bahwa Barisan Nasional Indonesia tetap mempunyai kejakinan, supaja soal Indonesia diselesaikan dengan cara damai.

Demikianlah sikap masyarakat yang pro RI di Minahasa terhadap situasi politik tingkat nasional pada waktu itu. Dari pernyataan BNI di atas maka jelas terlihat bahwa rakyat di Minahasa, terus menerus mengikuti perkembangan politik, baik di daerah sendiri sampai ke tingkat nasional bahkan turut menyumbangkan pendapatnya untuk tingkat internasional. Khusus mengenai Perjanjian Linggajati, maka BNI konsekwen dengan persetujuan delegasi dan Pemerintah RI akan isi persetujuan dengan Belanda itu. Dalam hal ini BNI yakin bahwa naskah Linggajati ialah dasar yang utama dalam hal penyelesaian soal Indonesia-Belanda.

Rakyat di daerah Sangir Talaud sebenarnya mulai timbul harapan bahwa akan segera tercipta perdamaian dengan ditandatanganinya perjanjian Linggajati di atas. Dengan adanya perjanjian dimaksud maka pastilah pertentangan antara Indonesia dan Belanda (Yuda, wawancara, 15-9-1979). Namun disayangkan bahwa sebelum isi perjanjian itu benar-benar dapat dilaksanakan, sudah dilancarkan aksi militer oleh pihak Belanda.

Hal serupa dialami sekali lagi ketika ditandatanganinya perjanjian Renville 17 Januari 1948. Terhadap isi kedua perjanjian di atas, ada yang bersikap menerima

dan ada yang menentangnya. Mereka yang pro RI turut pula menentang dengan mengadakan aksi berupa demonstrasi dan memuat sikapnya dalam surat kabar Menara milik BNI yang berpusat di Manado. Akibatnya maka beberapa di antara mereka yang pro RI itu dipanggil menghadap untuk diperiksa kemudian ditahan. Di antara mereka tercatat beberapa orang antaranya sudah dikemukakan di depan.

3. Politik Divide et Impera DR. H.J. van Mook.

DR. H.J. van Mook memegang jabatan selaku Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak 14 Desember 1944 sampai tahun 1948 kemudian diganti oleh DR. L.J.M. Beel selaku Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Sejak menyerahnya Jepang, van Mook memindahkan pusat pemerintahannya dari Australia ke Jakarta dan mendirikan pemerintah NICA dengan maksud untuk mendirikan kembali pemerintahan Hindia Belanda seperti sebelum pecahnya perang dengan Jepang. Pemerintahan NICA di bawah van Mook ini menghadapi perlawanan yang gigih dari rakyat Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 di dalam wadah Negara Republik Indonesia sesuai UUD 1945.

Menghadapi kenyataan ini maka van Mook menjalankan politik memecah belah untuk menghancurkan RI. Sebagai langkah pertama ialah diadakannya Konferensi Malino 15-25 Juli 1946 disusul Konferensi Denpasar 8 - 24 Desember 1946 yang melahirkan suatu negara boneka yang disebut Negara Indonesia Timur 24 Desember 1946. Sesudah NIT, berturut-turut didirikan Negara Pasundan 4 Mei 1947 disempurnakan 23 Februari 1948, Negara Madura 20 Februari 1948, Negara Sumatera Selatan 30 Agustus 1948 dan sebagainya. Selain itu Belanda membentuk sejumlah daerah otonom di luar negara-negara boneka tersebut di atas dan di luar wilayah RI antaranya Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur dan Banjar, di samping menentukan status Irian Barat sebagai daerah tersendiri (DPR-GR, 1970 Kempen, 1953).

Menghadapi sikap memecah belah yang dijalankan oleh van Mook itu maka rakyat di daerah Sulawesi Utara yang pro RI tetap berwaspada. Di daerah ini Belanda sempat mendirikan pemerintahan NICA di bawah Coomans de Ruyter yang kemudian diganti oleh Residen DR. Morison. Dalam masa pemerintahan Coomans de Ruyter, rakyat berhasil merebut kekuasaan di bawah pimpinan Letkol Ch.Ch. Taulu dan B.W. Lapien, yang segera mengirimkan berita ke Yogyakarta di mana dinyatakan bahwa Daerah Sulawesi Utara adalah bagian yang tak terpisahkan dari RI. Hanyalah atas pengkhianatan dari beberapa gelintir orang pro Belanda dalam tubuh KNIL maka Belanda dapat kembali berkuasa di sini. Namun rakyat tetap menjalankan gerakan-gerakan yang menentang kekuasaan mereka.

Hal ini nyata dengan dikeluarkannya pernyataan oleh Barisan Nasional Indonesia (BNI) sesuai hasil kongresnya di Sonder 27-28 Juni 1947 yang ditandatangani sekali lagi melalui pernyataannya 8 Agustus 1947 sebagai hasil pertemuan BNI di Manado sekitar tanggal itu. Dalam hal ini BNI tetap mengakui pemerintahan RI yang berkedudukan di Yogyakarta, dan hanya dengan terpaksa mengakui

adanya NIT sebagai suatu kenyataan. Mengenai hal itu dapat diikuti kembali pada halaman 199-200 di depan. Belanda menentang terbentuknya beberapa organisasi politik seperti Hoofdenbond, TWAPRO, KKM dan sebagainya di Minahasa, dengan maksud untuk memecah belah kekuatan rakyat Indonesia di Minahasa. Terhadap tindakan Belanda itu maka kekuatan yang pro RI membentuk beberapa organisasi pula untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda seperti BNI, LRRI, KRIS, Partai Katolik dan kemudian FKRI.

Rakyat di daerah Sangir Talaud khususnya di Siau membentuk PARI pimpinan L.M. Kansil bulan Oktober 1945. Sadar akan bahaya dilakukannya politik memecah belah, maka PARI mengirimkan surat dan kawat ke Yogyakarta menyatakan dukungan kepada pemerintah RI. Surat dan kawat PARI itu kemudian dibalas oleh pemerintah RI di mana dinyatakan rasa terima kasih pemerintah atas usaha PARI di Peling Siau Sangir Talaud itu.

Rakyat di daerah Sangir Talaud pada pernyataannya di masa itu terbagi atas dua golongan yakni :

1. Golongan/aliran yang pro Belanda yang dipelopori oleh para raja yang berkuasa di sana waktu itu;
2. Golongan/aliran yang pro RI yang tergabung dalam BNI.

Mengenai kegiatan yang pro Belanda dan yang pro RI sudah cukup dikemukakan di depan di mana yang pro Belanda bersikap menerima daerah itu tergabung ke dalam NIT sedang yang pro RI, bersama-sama yang berada di Minahasa, dengan dipelopori oleh BNI, menyatakan terpaksa mengakui NIT dan berusaha berjuang menghapuskan NIT menuju terwujudnya Negara Kesatuan RI.

Menjelang pembentukan NIT, wilayah pemerintahan Keresidenan Manado terdiri dari :

1. Daerah Minahasa (termasuk Manado)
2. Daerah Sangir Talaud
3. Daerah Sulawesi Utara (gabungan dari daerah Gorontalo, Bolaang Mongondow dan Buol)
4. Daerah Sulawesi Tengah.

Sesuai pembagian daerah di atas maka van Mook meminta dikirimkan wakil-wakil daerah untuk menghadiri Konperensi Malino 15 - 25 Juli 1946. Mereka yang dikirim ke konperensi itu yakni :

1. Dari Minahasa : E.D. Dengah dan J.P. Mongula
2. Dari Sangir Talaud : Raja W.A. Sarapil
3. Dari Daerah Sulawesi Utara : H. Katili.

Kemudian ketika van Mook mengadakan Konperensi Denpasar 8 - 24 Desember 1946, diutuslah dari :

1. **Daerah Minahasa :**
 1. The Sing Hoo SH
 2. Achmad Sechan Bachmid
 3. Th. M.H. Janssens
 4. F.A.P. Pitoy
 5. E.D. Dengah

6. E. Katoppo

7. H.J. Wenas

2. Daerah Sangir Talaud :

1. Raja W.A. Sarapil

2. J.E. Tatengkeng

3. Daerah Sulawesi Utara :

1. A.C. Manoppo

2. Ajuba Wartabone

3. Tom Olii.

Dengan terbentuknya NIT 24 Desember 1946, maka beberapa peserta konperensi di atas, duduk sebagai anggota DPR Sementara NIT yakni :

1. Wakil dari Minahasa :

1. E.D. Dengah

2. E. Katoppo

3. H.J. Wenas

2. Wakil dari Sulawesi Utara :

1. Ajuba Wartabone

2. Tom Olii

3. Wakil dari Sangir Talaud :

1. J.E. Tatengkeng

2. Raja W.A. Sarapil.

Walaupun beberapa orang dari daerah ini aktif mengikuti Konperensi Malino, Konperensi Denpasar dan kemudian duduk dalam parlemen NIT bahkan ada pula yang menjadi Menteri (Kempen, 1953), namun di antara mereka seringkali melontarkan suara yang tidak mau menyetujui dibentuknya NIT yang terpisah dari RI sebagai negara kesatuan. Di antaranya adalah Ajuba Wartabone yang mengatakan dalam konperensi bahwa rakyat Sulawesi Utara tidak mau menyetujui adanya negara federasi dari van Mook dan tetap berpendirian mengakui pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta (Usman, 1972)

Adapun sistem yang dijalankan untuk mengirimkan wakil ke konperensi-konperensi di atas, khusus di daerah Sangir Talaud dilakukan melalui sistem perwakilan. Sistem itu dimulai dari tingkat desa di mana setiap desa di sana harus mengirimkan dua orang wakil yang disebut "kishman". Kemudian para kishman yang terpilih itu, mengadakan rapat untuk memilih dua orang yang akan mewakili daerah Sangir Talaud di mana telah terpilih Raja W.A. Sarapil yang mewakili golongan raja-raja dan J.E. Tatengkeng yang mewakili golongan rakyat biasa. Kebetulan Raja W.A. Sarapil waktu itu menjabat selaku Ketua Dewan Raja-raja Sangir Talaud dan karena ia terpilih menjadi anggota parlemen sementara NIT maka kedudukannya itu diganti oleh B.J. Medellu. Kelak B.J. Medellu ini menjadi Kepala Daerah Sangir Talaud yang kedua. Baik Raja W.A. Sarapil maupun J.E. Tatengkeng kemudian duduk selaku utusan BFO dalam KMB di Den Haag 1949 (Yuda, Wawancara 15 - 9 - 1979; Tompo, Wawancara 14 dan 18 - 9 - 1979; Pandji Negara,)

E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN/KEHIDUPAN.

1. Tata Pemerintahan.

Dalam uraian-uraian terdahulu sudah dikemukakan mengenai ikut sertanya para tokoh nasionalis di Minahasa dalam kegiatan menjalankan pemerintahan di Minahasa. Para tokoh nasionalis itu dapat dibagi atas mereka yang bersikap moderat dan mereka yang sangat anti penjajahan. Mereka yang bersikap moderat menjalankan taktik dengan bekerja baik dalam instansi-instansi Jepang maupun NICA/Belanda. Namun hubungan antara mereka yang moderat dan yang terus menerus menentang penjajahan itu tidak pernah meruncing atau terputus, bahkan bagaikan telah terjalin saling pengertian antara kedua golongan itu.

Dalam masa perjuangan revolusi ini, golongan yang moderat dan yang menentang menyadari saling ketergantungan mereka dalam memperjuangkan persatuan rakyat menuju terwujudnya cita-cita negara kesatuan RI. Sebagai contoh, beberapa surat kabar seperti "Catapult" dan "Suara Indonesia Muda" diketik dan distensil dengan mempergunakan fasilitas-fasilitas instansi-instansi NICA yang dikuasai oleh para tokoh yang moderat (Wowor, 1977). Hal ini terhenti ketika John Rahasia dan Ch.D. Portoh sebagai penanggung jawab kedua surat kabar itu ditangkap dan surat kabar diberangus oleh Belanda (Wowor, 1977). Saling pengertian dan kerja sama ini nyata sekali ketika suksesnya perebutan kekuasaan oleh TRISU dan PPI tanggal 14 Februari 1946 di Manado. Para tokoh nasionalis yang moderat dengan segera terjun membantu mengambil alih pemerintahan sipil dari tangan mereka yang memihak Belanda. B.W. Lapien yang sebelumnya diangkat Belanda selaku Hukum Besar (Kepala Distrik) Manado, segera ditunjuk selaku Residen menggantikan Coomans de Ruyter.

Untuk dapat bersuara dalam lembaga pemerintahan bentukan Belanda, maka BNI, KRIS dan Partai Katolik sebagai organisasi-organisasi yang pro RI, sebagai taktik ikut dalam pemilihan anggota Dewan Minahasa bulan Maret 1948. KRIS berhasil memperoleh 1.758 suara dan BNI 28.038 suara sehingga organisasi-organisasi itu mempunyai wakilnya dalam dewan itu. Namun dalam sidang-sidang Dewan Minahasa, ketiga organisasi di atas aktif menyerang kebijaksanaan politik pemerintah Belanda di daerah ini.

Di luar Dewan Minahasa, para aktivis PNI dan Persatuan Pemuda Indonesia membentuk FKRI yang kemudian menuntut dibubarkannya dewan dimaksud. Walaupun FKRI tidak turut duduk dalam dewan, namun fraksi yang pro RI dalam dewan itu antaranya anggota M. Sondakh, R.M.A. Dahlan, O.F. Pua dan juru bicara M.B. Tumbel, mendesak agar Dewan menyatakan bahwa Minahasa adalah bagian dari wilayah RI (Posumah, 1978). Hal serupa sudah lebih dahulu dikemukakan oleh BNI tahun 1947 sebelum terbentuknya Dewan Minahasa hasil pemilihan umum Maret 1948.

Dalam periode ini, pemerintahan di Sangir Talaud dipimpin oleh Dewan Raja-raja dengan seorang Ketua yaitu Raja Tabukan W.A. Sarapil dengan lima anggota yakni Raja Kendhar/Tahuna F. Adriaan, Raja Manganitu Ambon Darondo,

Raja Siau Ch. David, Raja Tagulandang Paul Tindas dan Raja Talaud Th. Binilang (Yuda, wawancara 15-9-1979; Binilang, wawancara 20-9-1979; Elias, 1973; Adrian.). Di samping pemerintahan oleh Dewan Raja-raja maka Belanda menempatkan seorang Controleur di Tahuna sebagai Kepala Onderafdeeling Sangir Talaud, seorang Controleur di Ulu Siau selaku Hoofd van Plaatselijk Bestuur (HPB) dan seorang Adspirant Controleur di Beo (Talaud) selaku HPB (Ponto, wawancara 13-9-1979 ; Sigarlaki dkk, 1977). Hal ini hanya berlangsung sampai terbentuknya NIT 24 Desember 1946 (Manatar, 16-9-1979).

Dapat dikemukakan bahwa masih terdapat ketidaksepakatan mengenai orang-orang Belanda atau Indonesia yang memegang jabatan pemerintahan di Sangir Talaud terutama sesudah tahun 1946. Ada yang menyebutkan seorang Belanda bernama Bertsch sebagai Sekertaris Dewan Raja-raja dengan pembantunya B.J. Medellu yang pernah jadi jaksa sebelum pendaratan Jepang. Dikatakan bahwa Controleur Belanda pertama sesudah perang yakni Burger yang ditempatkan NICA tahun 1947 (Rompas, wawancara 17-9-1979). Ada yang mengatakan yang mana Burger sudah memerintah sejak 1946 mendampingi Dewan Raja-raja di atas (H.C.H. Makahanap, wawancara 18-9-1979).

Sumber lain mengatakan Krams sebagai Controleur yang pertama dalam pemerintahan NICA yang membawahi raja-raja di atas (Yuda, wawancara 15-9-1979). Yang lain mengatakan Raja W.A. Sarapil sebagai pejabat pertama yang memerintah atas nama NICA kemudian setelah pejabat NICA datang, raja itu diturunkan menjadi Raja Tabukan. Dengan dibentuknya Dewan Raja-raja dalam masa NIT, Sarapil diangkat selaku Ketuanya dan dalam jabatan itu ia diang gap selaku Kepala Daerah Sangir Talaud yang pertama. Ketika Sarapil terpilih jadi anggota Senat NIT maka ia diganti oleh B.J. Medellu, yang dianggap sebagai Kepala Daerah yang kedua (Sarapil, wawancara 18-9-1979 ; Tompo, wawancara 14-9-1979).

Namun sejak terbentuknya NIT maka sesuai Denpasar Regeling 1946, daerah ini menjadi salah satu daerah NIT tingkat Onderafdeeling. Keenam swapraja yang ada digabungkan berdasarkan Daerah Statuut 1948 dengan ketentuan bahwa swapraja harus menandatangani acte van verband dengan pemerintah NIT (namun yang terlaksana hanya dengan Th. Binilang). Sesuai Daerah Statuut 1948 maka di Sangir Talaud dibentuk : Dewan Raja-raja dan Dewan Sangir Talaud. Ketua Dewan Raja-raja otomatis diangkat pemerintah NIT selaku Kepala Daerah dan atas dasar itu maka W.A. Sarapil dianggap sebagai Kepala Daerah yang pertama. Ketika Sarapil diangkat menjadi anggota Senat NIT maka B.J. Medellu ditunjuk menggantikannya dan dianggap selaku Kepala Daerah yang kedua.

Dewan Sangir Talaud dipilih dengan sistem bertingkat dengan enam distrik pemilihan sesuai jumlah swapraja yang ada. Peraturannya dibuat oleh Dewan Raja-raja yang disahkan oleh Kementerian Dalam negeri NIT. Tugas/wewenang Dewan Sangir Talaud ini terbatas sekali yaitu hanya menyusun anggaran belanja daerah (medebegro tend) dan memberi nasehat (adviserend) (Pontoh, ; Monografi Daerah).

Di daerah Bolaang Mongondow, para pejabat Belanda selaku Controleur sesudah penyerahan Jepang berturut-turut :

1. Mr. Wolrabbe (1945 - 1946)
2. Mr. Verhagen (1946 - 1947)
3. Mr. Veldkamp (1947 - 1948)
4. Mr. Langendonk (1948 - 1949)
5. Mr. A.C. van der Vlugt (1949 - 1950)

Sejak 8 Maret 1948, status Onderafdeeling dihapuskan lalu dibentuk daerah "Gabungan Bolaang Mongondow" dalam lingkungan NIT. Gabungan Bolaang Mongondow itu dibentuk berdasarkan Zelfbestuurs regelen 1938 dan Staatsblad NIT No. 18 dan 27 Tahun 1946 yang dilaksanakan oleh Residen Manado pada tanggal 20 Agustus 1948 No. B 17/1/8 mulai 8 Maret 1948. Gabungan Bolaang Mongondow ini berstatus sebagai Kabupaten otonom. Gabungan Bolaang Mongondow ini kemudian digabungkan dengan Gorontalo dan Buol dan ketiga daerah itu membentuk "Daerah Sulawesi Utara" yang beribukotakan Gorontalo (untuk tidak mengacaukan dengan wilayah Sulawesi Utara yang sekarang ini, periksa kembali di halaman depan).

Sebagaimana diketahui, daerah Bolaang Mongondow terdiri atas empat kerajaan yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh seorang raja dan semua raja berada di bawah Controleur yang berkedudukan di Kotamobagu (Ibukota daerah Bolaang Mongondow). Pada tahun 1948, dibentuklah Dewan Raja-raja Bolaang Mongondow yang susunannya adalah sebagai berikut (Manus dkk, 1979).

1. Raja Bolaang Mongondow H.J.C. Manoppo selaku Ketua;
2. Raja Bolaang Uki A.H. Gobol selaku anggota;
3. Raja Bintauna M.T. Datunsolang selaku anggota; dan
4. Raja Kaidipang Besar R.S. Ponto selaku anggota.

Di samping Dewan Raja-raja di atas yang menjalankan pemerintahan maka ada Dewan Gabungan Bolaang Mongondow yang diketuai oleh A.C. Manoppo. Sama dengan di daerah Sangir Talaud, Dewan Gabungan ini tugasnya yakni dalam soal medebegrotend (penyusunan anggaran belanja) dan adviserend (memberi nasehat) kepada Ketua Dewan Raja-raja Gabungan Bolaang Mongondow saja.

Dalam periode sampai tahun 1950, terjadi kegiatan-kegiatan politik pro RI yang menentang pemerintahan NIT dan menuntut dibubarkannya pemerintahan Dewan Raja-raja serta Dewan Gabungan di atas. Sejumlah organisasi politik di Bolaang Mongondow itu menuntut segera dibentuknya pemerintahan daerah yang pro RI dan memperjuangkan terwujudnya Komite Nasional (KNI) Bolaang Mongondow. Tuntutan perjuangan mereka nanti dapat terwujud berkat bantuan Laskar Rakyat Republik Indonesia (LRRl) pimpinan H.L. Kaligis yang dikirimkan ke Bolaang Mongondow dari Amurang (Minahasa). (Mengenai hal ini akan disampaikan pada Bab V C).

Daerah Gorontalo dalam lingkungan NIT terbentuk sejak 1947 dengan Peraturan Presiden NIT (Staatsblad NIT No. 12 Tahun 1947) sebagai suatu gemeenschap (persekutuan hukum berdiri sendiri). Selanjutnya daerah Gorontalo ini digabungkan dalam bentuk federasi sehingga menjadi Daerah Sulawesi Utara sejak

19 Nopember 1948 yang disahkan oleh Residen Manado dalam penetapan tanggal 25 Januari 1949 No. R. 22/1/11 yang berlaku mulai 7 Februari 1949. Dengan demikian maka federasi Daerah Sulawesi Utara terdiri dari :

- a. Daerah Gorontalo
- b. Gabungan Bolaang Mongondow (terdiri dari Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar).
- c. Swapraja Buol.

Ketiga daerah itu membentuk Daerah Sulawesi Utara yang Ibukotanya ialah kota Gorontalo (yang pada waktu itu berstatus sebagai neo kotapraja = kotapraja gaya baru).

Daerah Sulawesi Utara ini adalah sesuai dengan penetapan dalam Staatsblad NIT No. 143/1946 yang mengatur tentang semua wilayah daerah dalam lingkungan NIT pada waktu itu dan berlaku sampai dibubarkannya NIT tahun 1950. Pelaksanaan pemerintahan Daerah Sulawesi Utara di atas dijalankan sesuai Zelfbestuursregelen (ZBR) 1938 di mana khusus untuk Daerah Gorontalo dibentuk :

- a. Satu Dewan Gorontalo, dan
- b. Satu Majelis Dewan Gorontalo

yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua. Di kemudian hari terjadi pergolakan politik di Gorontalo yang menuntut pembubaran dewan-dewan yang ada untuk disesuaikan dengan Komite Nasional Daerah (KNI) sesuai UU No. 22 tahun 1948 dari pemerintah RI. Kelak peranan dan tugas dewan-dewan di atas diambil alih oleh Komite Nasional Daerah Gorontalo (KNI Gorontalo).

Susunan pemerintahan dari tingkat Daerah Sulawesi Utara sampai ke tingkat kecamatan (marsaoleh) adalah untuk tingkat Daerah Sulawesi Utara dipimpin oleh Kepala Daerah Sulawesi Utara (pada waktu itu dijabat oleh Ajuba Wartabone). Kemudian tingkat ketiga daerah yang ada dipimpin oleh masing-masing Kepala Daerah (Gorontalo, Gabungan Bolaang Mongondow, Swapraja Buol). Selanjutnya di bawah tingkat Kepala Daerah ada Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan di bawah KPN ada Jogugu (Wedana) dan di bawah Wedana ada Marsaoleh (Asisten Wedana = setingkat camat sekarang ini).

Khusus daerah Gorontalo yang berstatus neo swapraja, terdiri dari lima distrik dan 15 onderdistrik sebagai berikut :

1. Distrik Gorontalo meliputi :
 - a. Onderdistrik Kota
 - b. Onderdistrik Kabila
 - c. Onderdistrik Bolango (Tapa)
 - d. Onderdistrik Telaga;
2. Distrik Suwawa meliputi :
 - a. Onderdistrik Suwawa
 - b. Onderdistrik Bonepante;
3. Distrik Limboto meliputi :
 - a. Onderdistrik Limboto
 - b. Onderdistrik Isimu
 - c. Onderdistrik Batudaa;

4. Distrik Kwandang meliputi :

- a. Onderdistrik Kwandang
- b. Onderdistrik Atinggola
- c. Onderdistrik Sumalata;

5. Distrik Bualemo meliputi :

- a. Onderdistrik Tilamuta
- b. Onderdistrik Paguyaman
- c. Onderdistrik Bumbulan (Paguat).

Distrik dikepalai oleh Wedana dan Onderdistrik oleh Asisten Wedana yang di daerah itu disebut Jogugu dan Marsaoleh. Kelima distrik tersebut di atas sekarang ini menjelma menjadi Kabupaten Gorontalo.

Selanjutnya dalam periode ini, di samping Kepala Daerah yang memimpin Daerah Sulawesi Utara, ada badan yang disebut Dewan Sulawesi Utara yang para anggotanya diutus dari daerah Gorontalo, Gabungan Bolaang Mongondow dan Swapraja Buol. Di tingkat daerah itu sendiri ada badan yang disebut Dewan Gorontalo (sudah disampaikan di depan), Dewan Gabungan Bolaang Mongondow (sudah disampaikan di depan) dan Dewan Swapraja Buol. Para pemimpin politik yang pro RI di daerah Gorontalo berjuang menuntut dibubarkannya pemerintahan daerah Gorontalo termasuk Dewan Gorontalo yang akhirnya mengakibatkan Dewan Gorontalo bubar dan diganti oleh KNI Gorontalo. KNI Gorontalo ini menyatakan bahwa Daerah Gorontalo terlepas dari NIT dan menggabungkan diri dengan pemerintahan RI yang berpusat di Yogyakarta dalam periode sebelum tahun 1950.

2. Sosial Ekonomi

Perhubungan laut dan udara yang lumpuh selama masa dikuasai Jepang, diaktifkan kembali sejak masa pemerintah NICA di daerah Sulawesi Utara ini. Prasarana perhubungan darat seperti jalan dan jembatan, direhabilitir kembali, untuk melancarkan urat nadi lalu lintas darat dan perekonomian dari satu tempat ke tempat lainnya. Maskapai pelayaran KPM mulai mengoperasikan kapal-kapalnya ke dan dari Minahasa yang menghubungkan daerah ini dengan daerah-daerah lain di Indonesia terutama dengan pulau Jawa. Pelabuhan yang utama dalam masa ini ialah pelabuhan Manado, di mana terjadi kegiatan ekspor dan impor. Komoditi ekspor yang utama, ialah kopra, cengkih dan pala yang didatangkan dari beberapa pelabuhan kecil dalam wilayah Keresidenan Manado (Sulawesi Utara sampai Sulawesi Tengah). Barang-barang impor, dimasukkan melalui Manado lalu didistribusikan ke daerah-daerah lain.

Dalam sektor pertanian, rakyat di Minahasa mulai lagi mengolah tanah-tanah pertaniannya seperti keadaan sebelum perang. Di Tomohon dalam masa pendudukan Jepang, rakyat di desa Paslaten dan Matani menjual tanah-tanah mereka kepada pemerintah pendudukan Jepang di mana di tanah-tanah itu didirikan Markas tentara Jepang yang menduduki wilayah Sulawesi Utara/Tengah. Setelah Belanda kembali berkuasa, tanah-tanah itu diolah kembali oleh para pemilik sebelumnya. Di kemudian hari timbul banyak perselisihan mengenai status tanah-tanah itu. Hal ini diakhiri oleh pemerintah RI yaitu dengan menentukan bahwa tanah-tanah yang dahulunya telah dijual kepada Jepang berstatus sebagai milik musuh dan karena itu

harus dikuasai oleh pemerintah, yang dalam pengawasannya diserahkan kepada TNI-AD (Palit, 1978).

Di daerah Sangir Talaud, sejak masuknya kembali pemerintahan Belanda/NICA sampai masa pemerintahan NIT, keadaan ekonomi mulai disusun kembali di mana perdagangan sudah mulai lancar. Rakyat mulai merasakan ketenteraman berhubung perang dengan Jepang telah berakhir yang memberi kesempatan untuk bergiat dalam bidang ekonomi. Hasil-hasil seperti kopra dan pala telah mulai diperdagangkan. Selain itu dihasilkan pula ikan laut oleh para nelayan. Sejak masuknya NICA, mereka mengaktifkan kembali Het Koprafonds yang mengadakan pembelian kopra rakyat. Harga kopra pada waktu itu relatif murah dan untuk merangsang agar petani mau menjual kepada Het Koprafonds milik Belanda, maka selain dibayar dalam bentuk uang, diberikan pula pembagian bahan-bahan lain seperti kain, sabun dan lain-lain. Kopra yang dibeli itu kemudian dibawa ke Manado atau diteruskan ke Jawa untuk diekspor ke luar negeri.

Tanaman pala yang terutama terdapat di pulau Siau kemudian meluas ke pulau Sangir Besar. Hasilnya terutama dibeli oleh para pedagang Cina, juga dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga sebelum perang. Perdagangan pala ini meningkat lancar apabila ada kapal laut yang siap mengangkutnya ke luar daerah. Mengenai hasil laut terutama ikan-ikan, hanyalah dipakai untuk mencukupkan kebutuhan sendiri, tidak dibawa keluar daerah.

Di daerah Gorontalo, uang Jepang yang berlaku selama Jepang menduduki daerah itu dinyatakan tidak berlaku lagi mulai 6 Maret 1946 untuk diganti dengan uang NICA. Dengan demikian maka uang NICA ini diberlakukan sampai saatnya dilakukan pengakuan kedaulatan terhadap RI oleh pihak Belanda. Sebelumnya, dalam masa pemerintahan NICA, mereka telah mengusahakan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok tetapi hanya khusus untuk para anggota pemerintahan NICA dalam hal ini para pegawai pamongpraja termasuk guru-guru. Langkah ini dimaksudkan agar para pegawai tersebut senantiasa mau memihak Belanda dan tidak terpengaruh dengan perjuangan kemerdekaan yang dilancarkan di sana.

Walaupun rakyat mulai lagi mengusahakan tanah-tanah pertanian seperti sebelum perang, namun hasil-hasil pertanian rakyat tidak dapat dibawa ke luar daerah itu. Dengan begitu maka pendapatan masyarakat tetap rendah. Para pengusaha swasta pribumi tidak dapat mengembangkan usahanya karena kekurangan modal dibandingkan dengan pengusaha Cina dan Arab yang ada di sana. Beberapa pemuka masyarakat menganjurkan dibentuknya usaha-usaha koperasi untuk membangun ekonomi rakyat untuk menyediakan kredit, karena melihat adanya kenyataan bahwa kaum pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan kaum pengusaha lainnya.

Rakyat daerah Bolaang Mongondow melanjutkan lagi usaha hanya di sektor pertanian sejak perginya orang-orang Jepang dari daerah itu. Dalam masa pemerintahan NICA dan NIT maka tanah-tanah pertanian dibuka kembali dan kehidupan ekonomi mulai dilancarkan kembali. Hasil-hasil pertanian memenuhi pasar-pasar di Kotamobagu, Inobonto dan tempat-tempat lainnya. Tanah-tanah perkebunan yang mengantarai desa-desa yang membentuk Ibukota Kotamobagu mulai dibuka orang

untuk dihuni, misalnya perkebunan kelapa di belakang kantor pemerintahan daerah yang sejak 1948 dijadikan kompleks pemukiman rakyat (Manus dkk, 1979).

3. Sosial Budaya

Jepang selama mereka menduduki Minahasa, sama sekali tidak memperhatikan soal kesehatan masyarakat. Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga yang sakit, maka hanya dicarikan obat-obat tradisional untuk sekedar meringankan akan penderitaan tapi seringkali dapat menolong menyelamatkan jiwa anggota keluarga yang sakit itu. Mereka yang dikerahkan untuk bekerja "giliran" (semacam romusya) kesehatannya kurang diperhatikan menyebabkan banyak yang sampai meninggal dunia di tempat bekerja.

Melihat hal itu maka timbul perhatian sementara anggota masyarakat terutama kepada para anak yatim piatu korban kekejaman Jepang di atas. Perhatian itu lebih diperkuat lagi berkat anjuran Ds. A.Z.R. Wenas, seorang pendeta pribumi yang memimpin GMIM pada waktu itu dan menjabat selaku Ketua Sinode GMIM dan Ketua Klasis Tomohon masa Jepang sampai sesudahnya. Ia menganjurkan agar anggota-anggota jemaat GMIM memperhatikan dan menolong mereka yang tubuhnya lemah atau sakit, memberikan tumpangan bagi yang telah kehilangan tempat tinggal dan menolong mereka yang telah kehilangan mata pencahariannya. Gedung gereja yang ada dapat saja dipakai sebagai rumah sakit darurat (Lintong, 1978).

Sesudah pendudukan Jepang maka anjuran Wenas di atas, dilembagakan oleh GMIM dengan membentuk Lembaga Kesehatan GMIM yang melakukan program-program kesehatan bagi masyarakat di Minahasa. Tahun 1948 Lembaga itu membuka Balai Kesehatan di Tomohon dan di tahun itu juga, Wenas mulai mengusahakan didirikannya sebuah rumah sakit GMIM. Menteri Kesehatan NIT DR. Med. S.J. Warouw memberikan izin kepada Lembaga Kesehatan GMIM tahun 1948 untuk mendirikan rumah sakit dimaksud. Setelah dua tahun, pada 5 Agustus 1950 maka berdirilah dengan resmi Rumah Sakit Bethesda Tomohon dengan Ds. A.Z.R. Wenas selaku kepalanya (untuk sementara) di samping jabatan selaku Ketua Sinode GMIM (Lintong, 1978).

Sejak sebelum perang dengan Jepang, di daerah Minahasa hidup berbagai ragam kebudayaan khususnya seni musik, seni tari dan sebagainya. Dalam masa Jepang, kegiatan kebudayaan ini terhenti, kecuali di tahun 1942 - 1943 (lihat dalam bab II.C.). Adapun jenis-jenis seni tari antaranya tari maengket, tari marambak dan sebagainya. Jenis-jenis seni musik antaranya musik bambu, musik bambu klarinet, kolintang dan sebagainya. Seni sastra seperti sumisil (berceritera), pantun dan sebagainya. Kesemuanya ini tetap ada walau tidak pernah digiatkan dalam periode ini, dan barulah mulai aktif pada tahun lima puluhan.

Di daerah Gorontalo, kegiatan sosial budaya yang ada sebelumnya tetap berlaku di kalangan masyarakat sampai pada periode ini. Yang terutama ialah kegiatan gotong royong seperti motutulungiya artinya kegiatan tolong menolong sesama manusia. Dembulo artinya kegiatan memberikan sumbangan atau bantuan kepada keluarga yang ditimpa duka baik dalam bentuk uang maupun bahan makanan yang diperlukan oleh yang bersangkutan.

Dalam bidang seni budaya dikenal adanya kesenian mobarajanji yaitu suatu syair memuji dan memuliakan Nabi Muhammad S.A.W. di mana masyarakat Gorontalo hampir seluruhnya beragama Islam. Kesenian mobarajanji ini dan juga yang sejenis dengan itu, tetap dipelihara oleh masyarakat dan dibawakan dalam setiap upacara keagamaan. Momalebohu yakni memberikan petuah atau nasehat kepada pengantin yang dilakukan dalam upacara perkawinan setempat.

Di daerah Sangir Talaud, khususnya dalam bidang seni budaya, tari ampa wayer yang timbul di masa Jepang, mulai dipopulerkan dalam periode ini karena semakin menarik banyak penggemar di mana-mana terutama di desa-desa. Begitu populernya sehingga mulai dianggap sebagai tarian asli daerah Sangir Talaud di samping adanya tari gunde, tari ransa sahabe, tari alabadiri dan sebagainya. Seni musik juga muncul antaranya musik bambu dan menyanyi (koor). Baik seni tari maupun seni musik sering dipertandingkan di daerah ini sampai sekarang.

Kegiatan masyarakat lainnya dalam bidang sosial budaya dapat dikemukakan misalnya dalam soal gotong royong menyelesaikan rumah, membersihkan kebun dan sebagainya. Namun kegiatan seperti ini tidak memiliki organisasi yang teratur atau permanen (tetap) sebab hanya dilakukan sewaktu-waktu saja bilamana keperluan untuk itu ada.

Di daerah Bolaang Mongondow, kegiatan sosial budaya di kalangan masyarakat yang telah ada sebelumnya, dalam periode ini tetap dipertahankan misalnya kegiatan bergotong royong misalnya pogogutat, posad dan mododuluan. Pogogutat ialah kegiatan tolong menolong khusus di lingkungan keluarga tertentu dalam hal perkawinan, kematian dan sebagainya. Posad adalah kegiatan tolong menolong antar warga sedesa untuk membuka kebun, mendirikan rumah dan sebagainya. Mododuluan adalah kegiatan tolong menolong yang sejenis dengan posad di atas.

Jenis-jenis kesenian di daerah Bolaang Mongondow adalah sama dengan yang sudah ada sebelumnya. Seni tari antaranya tari dangisah, tari joke, tari saurongko, tari husaro dan sebagainya. Seni musik antaranya tolilabag, lolilabag, logantod, totam-pit dan sebagainya. Seni sastra antara lain diungkapkan dalam bentuk mite, legen- da dan dongeng.

4. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

Dalam masa pendudukan Jepang, semua sekolah tingkat sekolah rendah baik milik pemerintah maupun yang diusahakan swasta, diambil alih menjadi sekolah pemerintah pendudukan dengan mata pelajaran wajib antaranya bahasa dan kebudayaan Jepang. Dengan menyerahnya Jepang, maka semua sekolah dikembalikan kestatusnya yang semula.

Dalam periode antara 1945 - 1950, pemerintah NICA di Minahasa mendirikan kembali sejumlah sekolah rendah yang dinamakan Algemene bagere School (Sekolah Rendah Umum) di Manado, Tondano, Airmadidi, Amurang dan Langowan. Hal ini diikuti oleh badan-badan pendidikan GMIM dan RK. Semua sekolah di atas dibuka dengan masa pelajaran tujuh tahun. Para lulusannya dapat melanjutkan studi ke MULO di Tondano (milik Belanda), Tomohon (milik GMIM) atau ke Manado (milik RK). Para lulusan MULO dapat melanjutkan ke AMS-B di Tomohon (dibuka

1946) atau HBS-A (dibuka 1947) atau ke sekolah guru (Staatskweekschool dibuka 1947). Semua sekolah di atas masih mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Selain itu, semua sekolah rendah berbahasa Melayu yang ada sebelum perang yang memakai sistem 4, 5 dan 6 tahun dijadikan Sekolah Rendah berbahasa Indonesia enam tahun. Untuk kelanjutan studi dari sekolah-sekolah seperti itu maka di beberapa tempat didirikan sekolah lanjutan yang setingkat dengan SMP sekarang ini dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Misalnya Sekolah Guru di Kuranga Tomohon (milik GMIM) atau di Paslaten Tomohon (milik RK) dan ke Sekolah Normal (Normaalschool) di Tondano (Sigarlaki dkk, 1977).

Para pejuang nasionalis di Minahasa mendirikan Yayasan Pendidikan Kebangsaan di Tondano diketuai oleh A.H.A.A Kawilarang. Yayasan ini mendirikan Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan (SMRK) yang diresmikan 6 Januari 1946 di Tondano, di mana SMRK ini adalah kira-kira setingkat dengan MULO Belanda. Melalui SMRK ini para pejuang nasionalis mengadakan penggemblengan semangat perjuangan kemerdekaan kepada para siswanya.

Di daerah Bolaang Mongondow, sebelum perang yang mengelola pendidikan rakyat di sana adalah pemerintah Onderafdeeling, pemerintah kerajaan dan distrik, Zending, PSII, serta beberapa usaha perorangan. Yang terbanyak dibuka ialah Sekolah Rendah berbahasa Indonesia. Zending mendirikan HIS di Kotamobagu (sejak 1911) dan PSII melalui BPPI mendirikan HIS di Molinow (1931). HIS Zending kemudian diambil alih oleh Kerajaan Bolaang Mongondow menjelang masuknya Jepang menjadi HIS Landschap. Ketika Jepang masuk maka semua sekolah di atas diambil alih menjadi sekolah pemerintah pendudukan. Kegiatan pendidikan tumbuh kembali mulai tahun 1948 di mana tercatat di tahun itu 58 Sekolah Rendah, 1 ALS, 2 Volk school dan 1 sekolah tingkat menengah.

Di daerah Sangir Talaud, sejak menyerahnya Jepang maka mulai lagi timbul usaha untuk mengaktifkan bidang pendidikan rakyat di sana. Semua sekolah rendah yang pernah ada sampai kedatangan Jepang, dibuka kembali. Selain itu dibuka pula Algemene Lagere School (ALS) yakni sekolah tingkat sekolah rendah dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, di samping bahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 1946 dibuka Normaalschool di Tahuna dan sebuah sekolah lanjutan lainnya di kota itu. Pemimpin sekolah menengah ini ialah J.E. Tatengkeng. Ketika Tatengkeng menjadi anggota Senat NIT dan kemudian Menteri Pengajaran NIT maka pimpinan sekolah menengah itu diserahkan kepada seorang asing bernama Nona Luckey. Semua sekolah yang ada mempergunakan bahasa Belanda di samping bahasa Indonesia.

Di daerah Gorontalo, semua sekolah diaktifkan kembali sejak Belanda kembali berkuasa. Tahun 1946 didirikan setingkat SMP sekarang, dipimpin oleh Idrak Jasin. Didirikan pula sebuah sekolah yakni Normaalschool 4 tahun dan sebuah sekolah guru (Volks Onderwijs). Badan swasta mendirikan Sekolah Menengah Islam (SMI) di tahun 1945 pimpinan Antu Harun, Maniko Ali dan M.T. Iamu. Tahun 1947 didirikan sebuah SMP Muhammadiyah pimpinan Ibrahim Muhammad.

5. Agama dan Kepercayaan.

Daerah Minahasa mayoritas penduduknya beragama Kristen yang dipeluk masyarakat sejak 1563. Mulai 1675 VOC menempatkan pendeta Kristen di Minahasa dan sejak 1799, NZG mengambil alih tugas-tugas kegerejaan VOC di Minahasa, di samping mengusahakan bidang pendidikan masyarakat. Tahun 1835 dibentuk Indische Kerk (Gereja Protestan Indonesia = GPI) dan mulai 1934 didirikanlah gereja-gereja daerah dimulai dengan berdirinya GMIM di Minahasa. Dalam masa pendudukan, Jepang berusaha mempersatukan aliran-aliran keagamaan khususnya Kristen dan Katolik dengan membentuk MAK dan kemudian PAKSU (lihat kembali Bab II.C. di depan). Dengan kembalinya Belanda, maka kehidupan keagamaan mulai ditata kembali seperti keadaan sebelum perang.

Selama pendudukan Jepang, Ds. A.Z.R. Wenas mengambil alih kepemimpinan Sinode GMIM dari tangan orang Belanda (Ds. Locher) dan pada bulan Oktober 1945 ia dikukuhkan menjadi Ketua Sinode GMIM. Di pihak lain, kepemimpinan Gereja Katolik dipegang oleh H.J.D. Tinangon selama pendudukan Jepang menggantikan Uskup Panis dan kembali ke tangan orang Belanda semenjak NICA berkuasa lagi.

Di daerah Bolaang Mongondow, kegiatan penginjilan dari NZG dimulai tahun 1904 yaitu tiga tahun setelah di daerah itu ditempatkan seorang Controleur Belanda. Sampai tahun 1945, jumlah anggota gereja Kristen di sana berjumlah sekitar 15.000 orang terdiri atas 7000 orang Minahasa 5000 orang Sangir Talaud dan 4000 orang asli Bolaang Mongondow. Usaha mendirikan Sinode Kristen sudah dimulai sejak tahun 1939 sampai 1940 di mana pada waktu itu didirikan Sinode GMIBM (Gereja Masehi Injili Bolaang Mongondow), di bawah badan pimpinan yang disebut Badan Pekerja Proto Sinode. Tahun 1949 dibentuk kembali Badan Pekerja Proto Sinode yang baru berhubung yang lama tidak aktif sejak masa pendudukan Jepang.

Badan itu resminya dinamakan Panitia Proto Sinode dipimpin oleh Pendeta P. Kolopita dan Pendeta J.M. Langeveld dengan 10 anggota. Para anggota itu masing-masing J.M. Tumbelaka, F. Sagay, S.I. Mamesah, M. Simbala, H. Siondo, H. Lolombulan, B. Sumeleh, E. Tampemawa, F.A. Najoan dan F. Rumondor. Panitia ini bertugas membentuk pimpinan Sinode yang definitif dan hal itu baru terwujud 8 Juni 1950. Mengenai susunan Badan Pengurus Sinode GMIBM pada waktu itu adalah sebagai berikut :

Ketua	: Pendeta P. Kolopita
Sekretaris	: O.O. Daun
Bendahara	: Pendeta J.M. Langeveld
Anggota-anggota	: 1. J.M. Tumbelaka
	2. H. Lolombulan
	3. F. Sagay
	4. G. Momongan
	5. F. Tulende
	6. H. Kumendong.

Di Daerah Sangir Talaud, di mana mayoritas penduduknya beragama Kristen seperti di Minahasa, kegiatan kegerejaan di sana antaranya dilakukan oleh Komite Sangir Talaud yang melakukannya jauh sebelum masa pendudukan Jepang. Komite ini berusaha mendirikan badan Pengurus untuk gereja Kristen di daerah itu yang dimulai sejak tahun 1934. Tapi baru tahun 1947 terbentuk Sinode GMIST (Gereja Masehi Injili Sangir Talaud) yang berkembang sampai sekarang ini.

Di daerah Gorontalo, sebagian besar penduduknya beragama Islam di mana agama ini dijadikan sebagai agama rakyat di sana sejak tahun 1566 dan berkembang dengan pesat sampai sekarang ini. Demikian pula dengan di daerah Bolaang Mongondow yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam yang masuk ke sana sekitar tahun 1650.

6. Pers.

Kehidupan pers terutama di Minahasa sudah dimulai sejak September 1868 dengan terbitnya nomor pengenalan dari surat kabar *Cahaya Siang* sebagai surat kabar yang pertama di Minahasa khususnya dan di Sulawesi Utara pada umumnya. *Cahaya Siang* tidak muncul lagi sekitar 1927 (Lapian, 1977). Dengan dipelopori oleh surat kabar itu maka bermunculanlah banyak surat kabar dan majalah sampai sebelum masa pendudukan Jepang.

Sesudah masa pendudukan Jepang maka diterbitkan beberapa surat kabar dan majalah. Antaranya dapat digolong-golongkan atas yang netral, yang pro Belanda, yang pro RI dan juga ada yang tidak diketahui orientasinya. Berikut ini akan disampaikan beberapa surat kabar dan majalah dimaksud sesuai orientasinya masing-masing.

Penerbitan yang netral adalah :

1. "Berita Gereja" (1935-1955) yang dikeluarkan oleh Sinode GMIM;
2. "Rangkaian Pemuda" (1946-1958) majalah untuk pembinaan pemuda Katolik pimpinan Ny. Qoman;
3. "Guru" (1948) majalah pendidikan pimpinan A. Matulandi;

Penerbitan yang pro Belanda yakni :

1. "Pelita" (1945-1949) surat kabar harian yang diterbitkan oleh Kantor Penerangan NIT di Manado pimpinan J.E. Sondakh;
2. "Singa Minahasa" (1946-1949) majalah TWAPRO pimpinan Jan Mawikere;
3. "Pemakat" (1946-1958) mingguan pimpinan Ch. Dimpodus;
4. "Suara Minahasa" (1948-1949) mingguan KKM pimpinan H.A. Saerang;

Penerbitan yang pro RI adalah :

1. "Persatuan" (1946-1951) mingguan pimpinan O.F. Pua dan H.M. Taulu;
2. "Menara" (1946-1954) harian di bawah redaktur G.E. Dauhan, J. Sarijowan, A. Madjid, J.I. Permata, dari BNI;
3. "Catapult" (1945-1946) diterbitkan di Manado sebagai harian berbahasa Belanda pimpinan John Rahasia dan Ch. D. Pontoh dari BPNI;
4. "Suara Irdonesia Muda" (1945-1946) harian di bawah pimpinan John Rahasia

dan Chris D. Pontoh di Manado, dari BPNI;

5. "Gerakan" (1946-1950 ?) harian GEPNIS kemudian GIM pimpinan E. Katoppo dkk.;
6. "Suara PISO" (1946-1947) harian PISO pimpinan Ch. D. Pontoh di Manado.;
7. "Gelora Masa" (1948-1950?) sebagai suara KRIS di Manado pimpinan redaktur Ch.D. Pontoh dkk., yang merupakan pengganti "Suara PISO";
8. "Sinar" (1947-1949?) pimpinan M. Tambahani.

Selain itu ada juga penerbitan yang tidak jelas identitasnya misalnya bulanan "Gerakan" (1947-1958) yang dipimpin oleh D.A. Kumenit, F.J. Gerungan dan A.B.H. Waworuntu (LPPU Cabang Manado, 1977 ; Manus dkk, 1978; Taulu, 1950 ; Wowor, 1977).

Di daerah Sangir Talaud, tidak diterbitkan surat kabar atau majalah sehingga yang ada di sana adalah yang dikirimkan dari Minahasa. Selain itu beberapa surat kabar atau majalah di atas dikirimkan juga ke Bolaang Mongondow dan ke Gorontalo, bahkan ke beberapa tempat dalam wilayah Keresidenan Manado waktu itu.

Selain yang terbit di Minahasa dan Manado, banyak pula yang diterbitkan di Gorontalo, antaranya (Kempen, 1953) :

1. "Suara Nasional" pimpinan Ismail Datau dkk, yang berhaluan pro RI dengan alamat Dewan Pemerintah Nasional Gorontalo;
2. "Cahaya Merdeka" pimpinan A.R. Onge dkk, mingguan dicetak 500 eksemplar dengan harga langganan Rp. 2,50 sebulan oleh Badan Penerbit Nasional Gorontalo;
3. "Sinar Merdeka" pimpinan Ismail Datau dkk yaitu mingguan di Gorontalo;
4. "Suara Rakyat" pimpinan Usman Monoarfa, tengah bulanan harga Rp. 3,- satu eksemplar diterbitkan oleh Tata Usaha Bakti, Tanggilaa Gorontalo;
5. "Kilat", mingguan pimpinan Abdullah Tumu Rp. 3,- sebulan d/a Toko Syardi Gorontalo;
6. "Kesatuan", mingguan pimpinan Sjarifuddin Panigoro, 1500 eksemplar sekali terbit harga Rp. 3,- sebulan dengan alamat PO Box 16 Gorontalo;
7. "Suara Pemuda", mingguan pimpinan M.S. Ointu, George Bokings dan H. Hippy, langganan Rp. 3,50 sebulan d/a Drukkerij Asri Gorontalo;
8. "Lukisan Masyarakat" pimpinan S. Musa dkk, merupakan bulanan yang terbit di Limboto Gorontalo;
9. "Kebenaran" mingguan pimpinan M. Amin Larekeng dkk, 1000 eksemplar sekali terbit Rp. 3,- sebulan, d/a Tata Usaha Bakti Tanggidaa Gorontalo;
10. "Kita" mingguan pimpinan R. Sjuab dkk diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Rakyat di Gorontalo;
11. "Adil" tengah bulanan pimpinan M. Imran dkk, d/a kampung Limba B di Gorontalo;
12. "Insya" tengah bulanan pimpinan M. Imran dkk, d/a Kampung Limba B di Gorontalo.

Menurut keterangan, tuntutan dan keinginan rakyat yang pro RI di Gorontalo yang disalurkan melalui surat-kabar di atas, dilakukan dengan gigihnya, sehingga Belanda dengan tidak henti-hentinya senantiasa mengadakan penekanan dan inti-

midasi di sana (Anwar Haras, wawancara 6-9-1979). Demikian pula dengan di Minahasa, sebagaimana sudah dikemukakan di depan.

Melanjutkan keterangan tentang kegiatan pers di daerah Sangir Talaud, maka sebagaimana diketahui, di sana tidak pernah diterbitkan surat kabar atau majalah. Yang masuk ke sana adalah surat kabar milik BNI yakni harian "Menara" pimpinan G.E. Dauhan dkk. Melalui harian ini maka tahun 1946 rakyat di sana mengetahui tentang berita Proklamasi Kemerdekaan dan teks "Pancasila" yang juga dimuat dalam harian itu. Pengirimannya ke Sangir Talaud dilakukan secara rahasia yakni melalui anggota-anggota BNI dengan memakai motor laut dari Manado (LPPU Cabang Manado, 1977, Tompo, wawancara 14-9-1979).

Selain itu Belanda memasukkan majalah mingguan "Pandji Negara" yang diterbitkan oleh kementerian Penerangan NIT di Ujungpandang. Pandji Negara waktu itu di bawah redaktur Parada Harahap sebagai pimpi nan umum. Sebagai redaktur harian ialah R. Imam Sajono dan Sjarief Saleh dengan bantuan beberapa orang seperti H. Dg. Mangemba serta beberapa pembantu tetap yakni H. Kama-luddin, Soh Lian Tjie, M.R. Dajoh, dan lain-lain. Di samping memuat berita-berita tentang NIT maka Pandji Negara juga memuat ajaran-ajaran Bung Karno tentang nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

7. Kepemudaan.

Dalam uraian-uraian terdahulu sudah dikemukakan bahwa para pejuang nasionalis di daerah Sulawesi Utara terutama berintikan para pemuda. Peranan pemuda dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan di daerah yang berada di bawah penilikan yang keras dari Belanda, adalah tidak dapat diragukan lagi. Hal ini nyata dari banyaknya organisasi pemuda yang berjuang bersama unsur-unsur kekuatan pro RI lainnya, dalam menghimpun kekuatan melawan Belanda.

Menghadapi kembalinya Belanda, maka para pemuda nasionalis pada akhir Agustus 1945 segera membentuk Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI) di Manado pimpinan John Rahasia dan Chris D. Pontoh. Pada bulan berikutnya yakni sekitar September - Oktober 1945, para pemuda yang pemuda dilatih militer oleh Jepang, mengaktifkan kembali Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) di Tondano pimpinan E.D. Johannes SH dan kawan-kawannya. Mereka mendirikan Markas Besar di Tondano dan segera mengatur sektor-sektor pertahanan di Minahasa sampai ke daerah-daerah lainnya. BPNI dan PPI ini kemudian merencanakan perebutan kekuasaan antara Desember 1945 sampai Januari 1946 tetapi dapat digagalkan Belanda. Kemudian setelah bekerja sama dengan unsur-unsur bersenjata dalam dinas KNIL yang pro RI, BPNI dan PPI bersama-sama Ch.Ch. Taulu dan S.D. Wuisan, berhasil merebut kekuasaan NICA dan mendirikan pemerintahan yang pro RI untuk Keresidenan Manado. Mengenai jalannya peristiwa itu dapat diikuti kembali di depan. Menyadari potensi perjuangan pemuda maka mulai 16 Februari 1946, pimpinan TRISU menyatukan seluruh kekuatan dari pemuda melalui organisasi PPI dan kepada PPI disertai tanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban umum di Minahasa, sebagai bagian tugas yang sebesarnya tugas TRISU dan kepolisian waktu itu.

Pembinaan dan perjuangan pemuda tidak saja dilakukan di Minahasa, tetapi juga di daerah-daerah lain. Di Gorontalo, para pejuang nasionalis membentuk kelompok-kelompok pemuda untuk membantu mempertahankan daerah itu terhadap kembalinya Belanda dengan membongkeng tentara Sekutu. Para pemuda di sana dipersenjatai dan di bawah komando dari A.J. Usman, bertahun-tahun lamanya melancarkan perjuangan gerilya di hutan-hutan melawan Belanda. Demikian jugalah halnya di daerah Bolaang Mongondow di mana perjuangan pemuda PPI Laskar Banteng di sana, merupakan inti kekuatan yang bersama-sama beberapa organisasi perjuangan lainnya, melancarkan perang gerilya melawan Belanda.

Pembinaan kepemudaan tidak saja dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis tetapi aktif juga dilakukan oleh para pemimpin keagamaan dan kemasyarakatan. Pimpinan kegerejaan baik dari Kristen maupun dari Katolik, terus menerus menyusun program pembinaan Pemuda dalam soal-soal kerohanian untuk menjaga agar jangan sampai Para pemuda dari masing-masing organisasi itu terseret atau hanyut oleh kemelut perobahan dan peristiwa politik dan sebagainya yang ada pada waktu itu.

Selain itu beberapa pemimpin masyarakat aktif membina pemuda melalui organisasi-organisasi kepanduan antaranya yang diselenggarakan oleh organisasi/aliran keagamaan, sehingga organisasi kepanduan yang pernah ada sebelum perang, dimunculkan kembali untuk membina para pemuda. Muncullah kembali kepanduan Hizbul Wathon, Kepanduan SIAP (milik PSII), kepanduan Kristen, Kepanduan Katolik dan sebagainya.

Belanda juga menyadari potensi pemuda sehingga mereka juga berusaha menghimpun kekuatan pemuda agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan NICA. Untuk itu antara lain dapat disebutkan usaha NICA membentuk "Comite van Initiatief" akhir Desember 1945. Maksud dari Komite ini adalah untuk menghimpun potensi Pemuda agar dapat bekerja sama dengan Belanda. Mengenai hal ini dapat diikuti kembali pada halaman di depan.

8. Kewanitaan.

Peranan wanita dalam perjuangan kemerdekaan khususnya dalam periode antara 1945 - 1950 cukup besar bahkan dirasakan bahwa tanpa keikutsertaan kaum wanita, perjuangan tidaklah lengkap. Mengenai peranan wanita sudah banyak dikemukakan di depan dalam berbagai organisasi antaranya dalam BPNI, PPI, PIR, LRRI, BNI dan sebagainya. Bahkan mereka juga karena menyadari peranan yang dapat disumbangkan bagi perjuangan aktif membentuk organisasi tersendiri misalnya PERWANIS di Siau, yang bersama-sama PARI dan BAPRI, bahu membahu menyusun tenaga melawan Belanda.

Para pemimpin wanita nasionalis di daerah ini antaranya dapat disebutkan beberapa nama yakni Ibu Maas Tangkilisan (isteri Mayor TRISU S.D. Wuisan), Nona Gusta Ngantung, Lusje Supit, Dina Korompis, Miss Mangowal, dan sebagainya. Di Sangir Talaud antaranya Ibu F. Pasandaran Lalisang, Ibu Nona Mohede, Ibu Elias-Pangulimang dan sebagainya. Di Bolaang Mongondow

antaranya Nurtina Gonibala (isteri Ketua Komisariat PPI J.F.K. Damopolii) yang aktif memimpin pasukan wanita PPI Laskar Banteng di sana. Banyak di antara para pemimpin wanita di seluruh daerah Sulawesi Utara yang namanya belum tercatat di sini namun peranan serta perjuangan mereka amatlah besar untuk tegaknya kemerdekaan.

V. KEADAAN DI DAERAH MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK).

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB.

Menjelang diadakannya Konferensi Meja Bundar, maka Belanda secara diam-diam berusaha membentuk kekuatan untuk mewujudkan pemisahan NIT dari NIS yang akan dibentuk. Hal ini nyata dari kegiatan Komisaris Belanda untuk NIT Mendelaar bersama DR. Soumokil untuk mendirikan suatu organisasi politik untuk memperjuangkan pemisahan NIT dari NIS dan berdiri sendiri sebagai suatu negara merdeka. Usaha bersama antara Komisaris Mendelaar dan Menteri Kehakiman NIT DR. Soumokil itu menghasilkan terbentuknya suatu organisasi politik yang bernama Gerakan Republik Indonesia Timur (GRIT), antara bulan Juni-Agustus 1949.

Salah satu basis dari GRIT ialah Minahasa yang bersama-sama Ambon dan Timor (Indonesia), merupakan tiga basis kekuatan dan pertahanan politik untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Pimpinan GRIT seluruhnya berada di tangan Soumokil sedangkan untuk Minahasa dipimpin oleh Jan Mawikere (yang juga menjabat selaku Ketua TWAPRO). Kekuatan militer untuk menunjang GRIT diatur oleh Mendelaar yang secara rahasia menginstruksikan kepada KNIL dan Polisi NIT, agar mendukung usaha Soumokil mendirikan Republik Indonesia Timur sesuai program GRIT. Sesuai rencana mereka, proklamasi RIT akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1949 yaitu sebagai kontra proklamasi RI 17 Agustus 1945. Pada hari itu akan diproklamasikan berdirinya RIT yang terlepas sepenuhnya dari NIS (Wowor, 1972).

Di Minahasa, GRIT ini mendapat sokongan sepenuhnya dari TWAPRO dan KKM yang masing-masing dipimpin oleh Jan Mawikere dan dr. V.L. Ratumbuysang. Direncanakan bahwa begitu Soumokil memproklamasikan berdirinya RIT maka segera TWAPRO, KKM dan GRIT di Minahasa, mengeluarkan suatu pernyataan untuk melepaskan diri dari NIT dan masuk dalam RIT yang diproklamasikan 17 Agustus 1949 itu. Untuk itu maka TWAPRO mempersiapkan rencananya agar pada tanggal tersebut, pernyataan sudah dapat diumumkan dengan dukungan massa dari ketiga organisasi yang ada di Minahasa. Tetapi perkembangan politik tingkat nasional

menggagalkan seluruh rencana Mendelaar-Soumokil itu, di mana pihak RI dan BFO berhasil mengadakan Konperensi Antar Indonesia. Apalagi rencana dari GRIT, TWAPRO dan KKM di Minahasa berhasil diketahui oleh unsur-unsur yang pro RI, sehingga mengacaukan dan pada akhirnya menggagalkan rencana gerakan separatis di atas. (Wowor, 1972 ; Posumah, 1978).

Pada tanggal 17 Agustus 1949 itu, pimpinan GRIT, TWAPRO dan KKM memanggil seluruh anggotanya untuk datang ke kompleks kantor pusat TWAPRO di Tomohon. Para anggota LRRI dan KRIS yang sudah mengetahui rencana itu, turut menghadiri undangan itu walaupun tidak dimaksudkan untuk mereka sehingga membangkitkan kecurigaan pimpinan ketiga organisasi separatis itu. Kepada para anggota TWAPRO, KKM dan GRIT ditanyakan oleh para anggota KRIS dan LRRI mengapa mereka datang berkumpul di tempat itu. Tetapi jawaban yang diterima yakni bahwa mereka hanya diminta datang berkumpul untuk sesuatu keperluan yang tidak jelas. Menyadari bahwa rencana mereka sudah diketahui kekuatan yang pro RI, maka pimpinan TWAPRO, GRIT dan KKM tidak memunculkan diri pada waktu itu. Dengan demikian maka massa yang sudah terkumpul satu demi satu kembali ke rumahnya masing-masing. Kekuatan KNIL dan Polisi NIT yang sedianya akan menunjang proklamasi TWAPRO, GRIT dan KKM waktu itu, juga tidak dapat berbuat apa-apa karena hal itu tidak terlaksana. Juga apabila dapat dilaksanakan, segera mereka yang pro RI akan menghalang-halangi para anggota KNIL dan polisi lainnya. Sebagaimana diketahui, dalam KNIL dan polisi NIT sudah banyak yang secara diam-diam menjadi pro RI berkat penggalangan dari para anggota LRRI untuk polisi dan LFP untuk KNIL. Mengenai hal itu sudah disampaikan di depan.

Dengan ditandatangani Persetujuan Roem-Royen 7 Mei 1949, maka perlakuan gerilya terhadap Belanda agak mereda tetapi hal itu tidak untuk di daerah Sulawesi Utara. Hal ini karena Belanda merasa bahwa gencatan senjata dengan unsur gerilya di daerah ini (bersama-sama dengan lingkungan NIT lainnya), tidak turut termasuk dalam persetujuan itu. Dengan demikian maka bagi Belanda, tindakan mereka terhadap gerilya kita adalah dengan dalih menjaga keamanan terhadap kaum pengacau. Sebaliknya para anggota gerilya kita menganggap bahwa Belanda tidak menjalankan sepenuhnya isi persetujuan Roem-Royen di atas karena masih tetap menjalankan tindakan militer terhadap kaum gerilya kita.

Hal ini nyata dari terjadinya beberapa peristiwa khususnya di Minahasa, yang terjadi pada 10 dan 25 Oktober 1949. Sebelumnya pada tanggal 8 Oktober 1949, para anggota KRIS Minahasa (Kebaktian Rakyat Indonesia Sosialis) mengadakan pertemuan di Tondano untuk memperingati hari lahirnya KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) di Jawa. Para pemimpin pro RI yang hadir waktu itu ialah Bert Supit, Sj. Taulu, Ompi, Moningka, L. Anes, N.Th. Rumajar, Ch. Talumikir (Letnan AURI yang menyusup), F. Runtunuwu, J. Watuseke, F. Tuju dan lain-lain. Pada waktu itu hadir pula J. Wajong yang baru saja datang dari Yogyakarta yang menjabat selaku Wakil Sekertaris/Sekertaris Jenderal Pemerintahan Propinsi Sulawesi dari pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta (berhubung Sulawesi masih dikuasai NIT).

Acara peringatan itu menandakan rasa solidaritas dari KRIS di Minahasa terhadap KRIS di Jawa yang sama-sama sebagai barisan perjuangan melawan kekuatan Belanda. Juga sebagai tempat konsolidasi keanggotaan dan perjuangan KRIS di Minahasa. Apalagi waktu itu dihadiri oleh tokoh KRIS J. Wajong yang dalam kata-kata sambutannya, membakar semangat perjuangan KRIS khususnya dan semua organisasi pro RI pada umumnya yang ada di Minahasa waktu itu.

Pertemuan KRIS 8 Oktober 1949 di Tondano itu dapat diketahui oleh mereka yang pro Belanda di Minahasa. Untuk itu maka polisi NIT merencanakan melakukan penangkapan terhadap para pejuang yang pro RI di Minahasa. Rencana penangkapan ini diketahui oleh KRIS yang sebaliknya memutuskan untuk medahului tindakan polisi NIT terhadap mereka. Karena itu maka KRIS di bawah pimpinan Letnan AURI Ch. Tulumikir mendahului dan berhasil melucuti para anggota polisi NIT yang ada di Tondano pada tanggal 10 Oktober 1949. Hal itu sudah disampaikan pada halaman di depan.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa di Minahasa pada masa revolusi fisik ini banyak terdapat anggota TNI yang dikirimkan dari Yogyakarta untuk membantu perjuangan kaum gerilya pro RI di daerah ini. Beberapa di antara mereka sudah disebutkan di depan. Peranan mereka amatlah besar dalam menunjang perjuangan gerilya melawan Belanda di daerah ini. Antaranya dapat disebutkan Kapten C. Mamahit yang lebih dikenal sebagai Tein Mamahit yang ditugaskan oleh pimpinan LRR I F.H.L.W. Mondong untuk menjabat selaku Komandan Wilayah V LRR I Kakas-Remboken. Pada tanggal 25 Oktober 1949, bersama sepasukan LRR I dari Remboken, ia pergi menyerang kedudukan polisi NIT di Kakas. Dalam serangan itu Mamahit tertembak dan akhirnya meninggal dunia tanpa perawatan seperlunya di Kakas. Hal itu juga sudah disampaikan pada halaman di depan.

Di daerah Sangir Talaud, sebagaimana sudah dikemukakan di depan, rakyat terbagi atas dua golongan besar yakni yang pro Belanda dan yang pro RI. Dalam menghadapi Konperensi Meja Bundar, sebagaimana juga menghadapi persetujuan-persetujuan sebelumnya, golongan yang pro Belanda bersikap menyetujui sepenuhnya akan isi persetujuan dimaksud sedang yang pro RI bersikap menentangnya. Namun kemudian setelah ditandatangani Persetujuan KMB, maka kedua golongan itu menganggap bahwa pelaksanaan isi persetujuan berarti kemerdekaan 100% yang telah lama dicita-citakan bersama. Hal ini berarti kegagalan politik divide et impera Van Mook sebagaimana direncanakan Belanda.

Dengan demikian maka jelaslah kedua golongan itu menganggap bahwa apabila KMB diadakan maka hal itu akan berarti lenyapnya pertentangan di kalangan masyarakat yang terjadi selama ini. Hal itupun dimaklumi oleh lembaga-lembaga institusional yang ada di daerah itu di mana semuanya mengharapkan terciptanya keadaan yang aman sebagai hasil dilaksanakannya konperensi itu.

Rakyat di daerah Gorontalo pada tahun 1948 mengirimkan utusan/wakilnya ke Ujungpandang untuk menghadiri Konperensi Gerakan Kemerdekaan yang disponsori oleh Arnold Mononutu di sana. Yang pergi ke konperensi itu yakni tiga orang yaitu A.J. Usman, Kobus Laya dan Aba Rapi. Ketiganya pergi bersama-sama utusan-utusan lainnya dari daerah Sulawesi Utara. Selain Arnold Mononutu, kon-

perensi di sponsori juga oleh Burhanuddin dan G.E. Dauhan (Usman, 1972).

Di Ujungpandang, terbentuklah Gabungan Persatuan-persatuan Kemerdekaan Bangsa-bangsa Indonesia (GAPKI). GAPKI ini beranggotakan beberapa organisasi antaranya BNI di Manado, Gerakan Kebangsaan Indonesia (GKI) dan Persatuan Kedaulatan Rakyat (PKR) di Ujungpandang. Pemrakarsa pembentukan GAPKI ialah Sukardjo Wirjopranoto yang menyusun Anggaran Besar dan Anggaran Rumah Tangga GAPKI itu. Ia kemudian diangkat menjadi Ketua GAPKI sedangkan para anggotanya yakni Anton C. Manoppo (dari BNI), A.J. Usman dari GERKINDO, dan Andi Burhanuddin dari PKR.

Dalam pada itu, untuk menunjang kegiatan-kegiatan politik di atas, kaum gerilya kita senantiasa melancarkan operasi-operasi perlawanan terhadap Belanda di daerah ini. Para pemuda nasionalis di Gorontalo terus menerus melancarkan perlawanan bersenjata antara lain mengadakan sabotase, penghadangan konvoi Belanda dan sebagainya sehingga pasukan KNIL dan polisi NIT di sana menjadi kewalahan. Untuk menindas gerakan gerilya itu maka pasukan KNIL di bawah pimpinan Kapten Schiphuys melakukan tindakan-tindakan yang membabi buta tanpa mengenal perikemanusiaan. Misalnya ketika perwira KNIL itu mengerahkan pasukannya untuk beraksi di pasar kota Gorontalo dengan mengadakan penembakan secara membabi buta terhadap rakyat yang ada di dalam pasar tersebut. Pada serangan tanpa mengenal perikemanusiaan itu, sekurang-kurangnya delapan orang sipil menjadi korban.

Organisasi perjuangan melawan Belanda dimantapkan dengan dibentuknya Batalyon X05 dari Komando Groep Seberang Brigade XVI yang dibentuk berdasarkan surat keputusan dari Panglima Besar Jenderal Soedirman No. A 1949 07/kgs/PH/49. Pimpinan Batalyon X05 ini ialah Kapten Ibrahim Mohamad selaku Komandan, Letnan Satu G.M. Bokings selaku Kepala Staf dan Letnan Satu Azis Hippy selaku Wakil Kepala Staf. Batalyon ini bertugas di Gorontalo. Para perwira bawahan antaranya A. Junus, R. Bidja, M.S. Ointu dan kira-kira 42 pemuda lainnya selaku bintara. Batalyon ini dibentuk pada kira-kira medio Desember 1949 (Mimbar Indonesia No. 22 3 - 6 - 1950).

B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONPERENSI ANTAR INDONESIA

Menjelang KMB, para wakil RI dan BFO sepakat mengadakan Konperensi Antar Indonesia dengan maksud untuk membentuk satu delegasi menghadapi delegasi Belanda. Perkembangan politik tingkat nasional ini turut berpengaruh di daerah-daerah lain termasuk di daerah Sulawesi Utara. Konperensi Antar Indonesia itu berturut-turut diadakan di Yogyakarta dan Jakarta. Delegasi RI diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dan delegasi BFO diketuai oleh Sultan Sjarif Hamid Alkadrie II atau Sultan Hamid II. Kelak Hatta dan Hamid mengetuai delegasi Indonesia dalam KMB menghadapi delegasi Belanda yang diketuai oleh Mr. van Maarseveen.

Kekuatan-kekuatan yang pro RI di daerah Sulawesi Utara menghadapi perkembangan politik tingkat nasional khususnya tentang dilangsungkannya Konperensi Antar Indonesia itu, menyambutnya dengan gembira berhubung cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin dekat menjadi kenyataan. Wakil-

wakil dari daerah Sulawesi Utara yang walaupun tergabung dalam delegasi NIT, menyambut hangat terlaksananya konperensi itu sebab dianggap telah mencerminkan hal-hal yang positif menuju terwujudnya kesatuan bangsa Indonesia menghadapi konperensi dengan pihak Belanda. Hal ini karena sesuai hasil konperensi itu, RI dan BFO bersama-sama membentuk delegasi untuk menghadapi delegasi Belanda. Juga konperensi itu memutuskan untuk mengakui Ir. Soekarno, sebagai Presiden dari NIS yang akan dibentuk sebentar di samping menentukan bahwa perlu membentuk suatu angkatan perang yang berintikan TNI sebagai pasukan APRIS sebentar.

Terhadap hal-hal di atas, masyarakat di daerah Sulawesi Utara bersikap menerima hasil-hasil positif yang diputuskan dalam konperensi itu. Dengan demikian maka baik menjelang sampai selesainya konperensi itu, baik kekuatan yang pro RI maupun yang tidak, semuanya menaruh harapan mereka agar konperensi itu dapat membuahkan hasil-hasil yang diharapkan dapat menciptakan ketenteraman di kalangan rakyat; dan antara rakyat dengan pemerintahan daerah yang masih dikuasai Belanda walaupun secara tidak langsung (yakni melalui pemerintahan yang dipimpin oleh putera-putera daerah sendiri yang mau memihak Belanda).

C. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Menjelang persetujuan KMB maka kekuatan-kekuatan politik di daerah Sulawesi Utara, berpolarisasi menjadi dua kekuatan besar. Kalau dahulunya terdiri atas tiga kekuatan yakni yang pro RI, yang pro Belanda dan yang menghendaki adanya bentuk federasi bagi NIS, maka sekarang hanya terdiri atas dua kekuatan saja yakni yang pro RI dan yang tetap pro Belanda. Mereka yang dulunya menghendaki bentuk federasi bagi NIS, setelah melihat bahwa harapan untuk itu semakin tipis, berbalik menjadi pro Belanda, bahkan menjurus menghendaki pemisahan dari NIS yang akan dibentuk dan mau berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka. Hal ini nyata sekali sekitar bulan Juni - Agustus 1949, pada waktu dibentuknya GRIT oleh Mendelaar dan Soumokil yang di Minahasa dipimpin oleh Jan Mawikere. Hal tersebut sudah dikemukakan di depan.

Sikap masyarakat yang menghendaki terwujudnya Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan sudah dinyatakan sejak tahun-tahun pertama RI yang di daerah ini dipelopori oleh BPNI, PPI, dan yang bersama-sama dengan para pejuang nasionalis yang bergerak dalam tubuh KNIL di Minahasa, berhasil merebut kekuasaan selama 24 hari (14/2 sampai 11/3 1946) dan menyatakan sebagai bagian dari wilayah RI yang berpusat di Yogyakarta, didukung oleh seluruh rakyat di daerah ini. Direbutnya kembali kekuasaan oleh Belanda tidak berarti bahwa cita-cita menjadi padam, tetapi terus digelorakan oleh rakyat di mana para pemudanya senantiasa menjalankan perang gerilya melawan Belanda dan merupakan ancaman yang amat berat bagi NIT bentukan Belanda itu.

Dalam kancah perjuangan politik, BNI memelopori aksi yang menghendaki terwujudnya Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan yang berdaulat. BNI dalam pernyataannya di tahun 1947, mengatakan bahwa hanya dengan terpaksa mau

mengakui NIT sebagai suatu kenyataan historis, tetapi BNI dengan penuh keyakinan tetap memperjuangkan cita-cita Negara Kesatuan bagi Indonesia. Mengenai hal itu dapat diperiksa kembali pada halaman di depan.

Dalam sidang-sidang DPR Daerah Minahasa yang terbentuk atas usaha Belanda bulan Maret 1948 sampai tahun 1950, kekuatan-kekuatan yang pro RI (yang menghendaki adanya Negara Kesatuan) seperti BNI, KRIS dan lain-lain, senantiasa mendesak agar dewan bentukan Belanda itu menyatakan diri lepas dari NIT dan bergabung dengan RI yang berpusat di Yogyakarta. Hal itu disuarakan melalui jurubicara mereka, antaranya M.B. Tumbel. Tuntutan ini semakin keras sehingga kelak dalam tahun 1950, menjadi acara tunggal sidang dewan itu yang akhirnya menyetujui adanya pernyataan keluar dari NIT untuk bergabung dengan RI.

Pada tahun 1947, organisasi-organisasi pemuda pejuang pro RI yakni BPNI, PPI, PISO, serentak dilebur ke dalam suatu organisasi baru yang merupakan kelanjutan dari semua organisasi di atas yaitu LRRI di bawah Komandan F.H.L.W. Mondong. Laskar Rakyat Republik Indonesia ini, melihat namanya saja, adalah jelas suatu organisasi gerilya yang berjuang demi terwujudnya Negara Kesatuan RI. Sikap masyarakat di Minahasa terhadap cita-cita Negara Kesatuan, menyatakan diri dalam aktipnya para pemuda memperjuangkan cita-cita mewujudkan Negara Kesatuan melalui perjuangan LRRI melawan politik memecah belah yang dijalankan Belanda. Mengenai bagaimana gigihnya LRRI berjuang melawan Belanda itu, dapat diikuti kembali pada halaman depan.

Walaupun Belanda berkali-kali mengadakan konperensi dengan RI tetapi sesungguhnya mereka hanya bermaksud memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat dan negara Indonesia. Di balik itu terdapat kesadaran yang tinggi pada rakyat Indonesia yang menghendaki terciptanya Indonesia sebagai satu Republik Kesatuan yang meliputi seluruh tanah air. Hal ini dibuktikan misalnya dengan berangkatnya Ajuba Wartabone dari Gorontalo ke Yogyakarta yang membawa pernyataan mendukung dan bergabung dengan RI. Para anggota pemerintahan setempat juga sudah menyatakan memutuskan hubungan dengan NIT.

Menurut pendapat para tokoh pejuang dan tokoh masyarakat di Gorontalo, tercapainya cita-cita Indonesia sebagai satu Negara Kesatuan maka itu berarti bahwa wilayah RI akan meliputi seluruh tanah air dan tumpah darah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang kuat dan utuh. Dengan begitu maka tidak akan ada satu kekuatan yang mampu mematahkan semangat perjuangan menuju cita-cita tersebut. Walaupun kemudian telah terbentuk RIS, tetapi wadah itu masih mengandung adanya perpecahan berhubung adanya negara bagian-negara bagian, yang sesungguhnya tidak dikehendaki rakyat Indonesia.

Rakyat di daerah Bolaang Mongondow membentuk sejumlah organisasi politik dan perjuangan untuk mengejar cita-cita Indonesia sebagai satu Negara Kesatuan. Hal itu diperjuangkan oleh PSII, PNI, GIM, KERWANI (Kerukunan Wanita Indonesia), PERGINDO (Persatuan Guru Indonesia), PERPIBOM (Persatuan Pegawai Indonesia Bolaang Mongondow), SERBIBOM (Serikat Buruh Indonesia Bolaang Mongondow) SIAP Kaum Tukang (SIKAT), PPI (Pasukan Pemuda Indonesia)

Laskar Rakyat Bolaang Mongondow, SPK (Serikat Pegawai Kesehatan), KPM (Kesatuan Pemuda Maeahi) dan sebagainya. Kegiatan mereka yang memperjuangkan Negara Kesatuan, nyata sekali terutama pada tahun 1950 untuk melikuidir NIT dan bergabung dengan RI.

Rakyat di daerah Sangir Talaud tahun 1947 membentuk satu organisasi politik yakni Persatuan Rakyat Sangir Talaud (PIRASAT). Organisasi ini dipimpin oleh J.E. Tatengkeng. Ketika di sana dibentuk cabang BNI dari Manado, maka para anggota PIRASAT semuanya meleburkan diri ke dalam BNI, yang pada waktu itu di Siau dipimpin oleh L.M. Kansil, dan di Sangir Besar (Tahuna) dipimpin oleh Hamzah Adariku. L.M. Kansil ini selain memimpin BNI di Siau, juga menjadi Ketua PARI (Partai Republik Indonesia) dan mendirikan PERWANIS serta BAPRI di Siau. Dalam jabatannya selaku Ketua PARI, pada tahun 1945 dan 1946, ia mengirimkan kawat dan disusul surat kepada pemerintah RI di Yogyakarta, yang isinya menyatakan mendukung sepenuhnya pemerintah RI Yogyakarta. Surat serta kawatnya itu dibalas oleh pemerintah RI dalam hal ini oleh Sekertaris Perdana Menteri.

Sekitar tahun 1949, muncul beberapa organisasi politik yang sebelumnya sudah pernah didirikan cabangnya di sini atau baru saja dibentuk cabangnya. Organisasi yang dimaksud antaranya PNI di bawah Wellem Aër, PARKINDO di bawah pimpinan Hebingabil, PSII pimpinan L. Wuaten, Ahmad Tompo, Hamzah Adariku dan lain-lain. Partai-partai itu turut berjuang untuk cita-cita Indonesia sebagai Negara Kesatuan (Tompo, wawancara 14 dan 18 - 9 - 1979).

D. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.

1. Sosial Ekonomi.

Daerah Minahasa sebagai tempat kedudukan pusat pemerintahan Keresidenan Manado dalam periode ini, merupakan pula pusat kegiatan sosial ekonomi untuk daerah itu. Semenjak NICA mulai berkuasa, kegiatan ekonomi ditujukan kepada usaha mencukupkan bahan-bahan keperluan masyarakat. Diaktifkanlah ekspor-impor untuk menggiatkan perekonomian daerah. Untuk menampung dan menjual hasil kopra, pemerintah NICA dan kemudian pemerintah NIT mengaktifkan kembali Het Copra Fonds, seperti keadaan sebelum perang dengan Jepang (1939). Pelayaran pantai digiatkan kembali sedangkan untuk pelayaran interinsuler dan pelayaran yang menghubungkan daerah ini dengan pulau Jawa, ditangani oleh kapal-kapal milik KPM. Khusus untuk menangani pelayaran antar pulau dalam wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, didirikanlah NV NOCEMO (Noord Celebes en Molukken Kustvaart Maatschappij) berkedudukan di Manado (kelak NV ini diambil alih tahun 1950-an dan menjadi PT PERINDO = Pelayaran Rakyat Indonesia). Jaringan pelayaran kapal-kapal NOCEMO yakni untuk perairan Sulawesi Utara sampai Maluku Utara dan ke Sulawesi Tengah.

Dalam bidang lainnya, pemerintah NIT melanjutkan usaha merampungkan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Tonsea lama (dekat Tondano - Minahasa) yakni penggalian pipa untuk saluran airnya. Listrik dari Tonsealama ini disalurkan ke seluruh Minahasa terutama ke Manado. Pengangkutan antar kota di Minahasa diselenggarakan oleh swasta dalam hal ini oleh rakyat dengan mempergunakan

bis-bis yang dibentuk dari sisa-sisa truck peninggalan perang. Hanya sebagian kecil jaringan perhubungan darat di Minahasa yang dapat dikatakan dalam keadaan cukup baik, sedang selebihnya masih rusak berat, sehingga sangat mengganggu kelancaran komunikasi antar kota dan desa di sana.

Perhubungan udara dengan daerah lain terutama dengan pulau Jawa diaktifkan kembali mulai tahun 1948. Kegiatan ini ditangani oleh KLM dengan rute udara antara Manado - Makassar (sekarang Ujungpandang) ke Jakarta. Penerbangan dari KLM ini mulanya sekali seminggu kemudian meningkat terus. Sebagai pangkalan atau lapangan udara ialah lapangan udara "Mapangot" (yang sekarang ini dinamakan LANU Sam Ratulangi). Sistem distribusi yang diterapkan semenjak NICA mulai berkuasa semakin dimantapkan yang disebarakan sampai ke desa-desa oleh badan-badan distribusi NICA. Pemasukan barang-barang distribusi untuk rakyat ditangani oleh beberapa perusahaan yang didirikan Belanda antaranya NV NIGEO di Manado (Sigarlaki dkk, 1977 ; Watuseke, 1968).

Kegiatan sosial ekonomi di daerah Sangir Talaud dalam periode ini semakin menunjukkan adanya kegairahan masyarakat, berhubung semakin terbukanya kesempatan berusaha bagi mereka dalam bidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Barang-barang yang keluar masuk pelabuhan-pelabuhan di sana semakin ramai dilakukan karena semakin lancar. Yang dimasukkan ke sana antaranya beras dan lain-lain kebutuhan pokok masyarakat, yang kalau dahulunya hanya dapat diperoleh melalui distribusi NICA, sekarang dapat dimasukkan oleh kaum pedagang dari Manado. Beras dan semua keperluan masyarakat itu diperjualbelikan di pasar bebas yang ada di sana (Yuda, wawancara 18-9-1979). Di kemudian hari, Het Copra Fonds yang menangani soal-soal perkopraan di sana dibubarkan dan diganti dengan Yayasan Kelapa Rakyat Sangir Talaud (YKRST tahun 1956) kemudian Pusat Koperasi Kopra Sangir Talaud (PKKST tahun 1958).

Di daerah Gorontalo, kegiatan berusaha tumbuh sejalan dengan semangat perjuangan menegakkan kemerdekaan. Namun satu hal yang kurang menguntungkan yakni kurangnya modal dan rendahnya tingkat ketrampilan rakyat untuk berusaha dalam bidang perekonomian diperhadapkan dengan orang-orang Cina dan Arab yang semenjak dahulu memiliki modal yang kuat dan pengalaman yang lama dalam soal ekonomi. Oleh karenanya maka timbul kesadaran untuk mempergunakan sarana koperasi bagi rakyat di sana dengan maksud membentuk modal dan mempersatukan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Sosial Budaya.

Mengenai kehidupan sosial budaya dari rakyat di Minahasa pada waktu itu, tidak mengalami perubahan apa-apa selain merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Kegiatan sosial budaya mengiringi usaha-usaha pertanian seperti mapalus. Mapalus adalah usaha kerjasama tolong menolong misalnya untuk mengerjakan kebun (sawah atau ladang), mendirikan rumah dan kemudian bukan saja dalam soal pengerahan tenaga, tetapi meningkat dalam soal keuangan (sejenis arisan).

Kerjasama tolong menolong juga berlaku dalam daur hidup (life cycle) misal-

nya dalam mempersiapkan perkawinan, di mana keluarga yang berhajat dibantu oleh para anggota keluarganya sendiri atau para tetangga sedesa. Dalam soal kematian, maka keluarga yang berduka dibantu oleh sanak keluarganya dalam menyediakan bahan-bahan keperluan. Juga dibantu oleh para warga sedesa. Bantuan pada dasarnya diberikan secara sukarela tetapi ada juga yang kemudian terikat secara moral untuk membalas apabila keluarga yang membantu mendapat kesulitan dalam soal kematian atau membalas bantuan yang diberikan ketika mengadakan pesta perkawinan. Dalam hubungan dengan kematian keluarga, muncul istilah *merur*, *maerur-erur*, *kumawus* dan sebagainya yang pada dasarnya ialah berkumpul untuk makan bersama menghibur keluarga yang berduka (Manus, dkk, 1978).

Kehidupan sosial budaya di daerah Gorontalo juga merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Masyarakat di sana hampir seluruhnya beragama Islam, kecuali para pendatang yang terdiri dari orang Minahasa, Sangir Talaud dan lain-lain yang kebanyakan beragama Kristen, tetapi jumlah mereka sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah penduduk asli. Kegiatan sosial budaya banyak sekali dipengaruhi atau bersumber dari ajaran Islam, dengan mempergunakan pranata-pranata sosial sebagai bagian dari adat istiadat setempat. Misalnya kerjasama tolong menolong dalam upacara perkawinan, kematian dan sebagainya. Dalam upacara perkawinan dikenal istilah *mohuyula* dalam lingkungan suatu keluarga luas (*extended family* = *ungalaa*) di mana keluarga yang berhajat memperoleh bantuan dari kaum keluarganya sendiri. Demikian pula dalam soal kematian, di mana bila ada seorang yang meninggal dunia (*ilopateya*) semua kerabatnya datang berkumpul ke rumah duka untuk membantu atau menghibur yang kena duka (Tumenggung Sis dkk, 1977).

Di daerah Sangir Talaud, kegiatan sosial budaya khususnya dalam soal-soal kekeluargaan yang berdasarkan adat dalam hal ini berdasarkan kelahiran atau keturunan, digantikan dengan perkumpulan-perkumpulan berdasarkan lingkungan *ethnic - groups* tertentu (lingkungan pulau/kepulauan, sub suku dan sebagainya). Lahirlah organisasi-organisasi sosial dalam bidang kematian dan sebagainya dari orang asal Tagulandang, Talaud, Tamako dan sebagainya. Di samping itu ada pula organisasi-organisasi sosial dalam soal-soal kepemudaan, kewanitaan, pendidikan, keagamaan dan lain-lain (Yuda, wawancara 18-9-1979).

Mengenal kehidupan sosial budaya di daerah Bolaang Mongondow, dianggap merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya sehingga tidak akan dikemukakan lagi di sini.

3. Pendidikan.

Di Minahasa sejak 1 Nopember 1946 sudah didirikan satu sekolah lanjutan menengah yakni AMS-B (setingkat SMA sekarang ini) dengan mempergunakan bahasa Belanda selaku bahasa pengantar di samping bahasa Indonesia. Tahun 1947 dibuka satu sekolah negeri untuk pendidikan guru yakni *Staatsweekschool* dan HBS-A (lima tahun) yang memberikan pelajaran sastra Barat dan Ekonomi. Kesemua sekolah ini didirikan sebagai persiapan untuk dilanjutkan ke perguruan tinggi (Watuseke, 1968). Semua sekolah yang ada mulai dari tingkat SR sampai

SLTP, berjalan seperti biasa semenjak diambil alih kembali dan dikembalikan statusnya seperti sebelum perang dengan Jepang.

Di daerah Sangir Talaud, terdapat perkembangan dalam jumlah SR maupun tingkat SLTP. Antaranya didirikan Sekolah Kepandaian Gadis (SKG) di Tamako dan SMP di Ulu Siau. Juga sudah ada sebelumnya SGB di Tahuna dan di Ulu Siau serta di Lirung Talaud, ada VO. Tenaga guru kebanyakan tenaga asing tetapi perlahan-lahan mereka keluar dari daerah ini, lalu digantikan oleh tenaga-tenaga guru asal daerah Sangir Talaud sendiri, baik sebagai guru tetap maupun sebagai guru tidak tetap (tenaga pembantu). Kurikulum mulai disesuaikan dengan dipergunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan bahasa Belanda dikeluarkan dari kurikulum yang ada. Sekolah menengah yang dahulunya empat tahun, sekarang masa pendidikannya menjadi tiga tahun. Para guru di daerah Sangir Talaud kemudian hari bersatu dalam organisasi profesi PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) tahun 1950 yang ketua pertamanya ialah Sem Kamudi.

Di Daerah Gorontalo, pemerintah NIT memperluas pendidikan rakyat dengan membuka sekolah-sekolah di kecamatan atau desa yang belum ada sekolah (SR). Selain itu diperkenankan juga swasta mengusahakan pendirian sekolah-sekolah misalnya kepada lembaga-lembaga perguruan Islam. Didirikanlah Sekolah Menengah Islam (SMI) pimpinan Antu Harun dan SMP Muhammadiyah pimpinan Ibrahim Mohammad di samping adanya SR Kristen di Gorontalo. Tingkat SLTA yakni SMA dan SGA baru didirikan di tahun 1951. Tokoh-tokoh pendidikan di sana antaranya Ibu Lamadilalo, Mari Suleman, Nain Mooduto, Nusi Kedju, Ari Monoarfa (Pelontalo, wawancara 11-9-1979). Pendidikan diarahkan pada pembinaan para murid agar memiliki tanggung jawab dengan dasar pendidikan yakni keadilan sosial di mana semua sekolah terbuka untuk setiap orang. Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar diganti oleh bahasa Indonesia.

4. Agama dan kepercayaan.

Mengenai kehidupan keagamaan dalam periode ini dapat dikatakan sama dengan periode sebelumnya dan tentang hal itu sudah disampaikan di depan untuk seluruh daerah Sulawesi Utara. Tentang kepercayaan masyarakat, dapat disampaikan bahwa walaupun agama-agama yang ada telah lama memegang peranan yang penting dalam masyarakat, namun rakyat belum sama sekali meninggalkan kepercayaan lama mereka dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya di Minahasa ada Tonaas, di Gorontalo ada talenga atau panggoba, di Bolaang Mongondow ada bolian dan di Sangir Talaud ada ampuang, yang kesemuanya merupakan dukun-dukun magis yang memiliki peranan besar dalam upacara pengobatan orang sakit atau upacara-upacara lainnya.

5. Pers.

Mengenai kehidupan pers sudah banyak disinggung pada halaman di depan. Hanya masih dapat ditambahkan yaitu tentang beberapa surat kabar yang terbit di Minahasa yang pro RI sebagai berikut (Kempen, 1953) :

1. "Pemuda" pimpinan Ch.D. Pontoh, berbentuk bulanan yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Pemuda di Manado;
2. "Kemudi" mingguan pimpinan M.B. Tumbel dkk dengan alamat Toko Rakyat Pasar Ikan Manado;
3. "Suara Rakyat", terbit tiga kali sebulan di bawah pimpinan F. Intama dkk, dengan alamat Tikala II Manado.

Selain itu di daerah Sangir Talaud telah diterbitkan sebuah majalah bulanan bernama "Trektor" pimpinan Adam, seorang yang banyak pengalamannya dalam bidang pers. Majalah ini diterbitkan di Tahuna (pusat pemerintahan daerah itu). Di samping itu pernah ada sebuah penerbitan lain yang dipimpin oleh Sapudi tapi nama penerbitan itu sudah tidak diketahui lagi. Namun karena minat masyarakat kurang sekali maka kedua penerbitan itu tidak sanggup bertahan lama dan cepat sekali menghilang dari peredaran.

6. Kepemudaan.

Di Daerah Sangir Talaud, kegiatan pembinaan pemuda sangat menonjol khususnya dalam hal kepanduan. Di sana waktu itu ada tiga organisasi kepanduan yaitu :

- a. Organisasi kepanduan Islam di bawah pimpinan Achmad Bachari;
- b. Organisasi kepanduan Kristen di bawah pimpinan Makikui;
- c. Organisasi kepanduan Nasional pimpinan Wellem Aer.

Kegiatan ketiga organisasi kepanduan ini terbatas pada aktivitas intern kepanduan seperti mempelajari tata tertib kepanduan, menjaga keamanan dan lain-lain. Juga diaktipkan pada waktu ada pesta-pesta, keramaian, pertandingan olah-raga dan sebagainya.

Di daerah Minahasa, pembinaan kepemudaan banyak sekali dilakukan oleh organisasi-organisasi kegerejaan seperti GMIM dan Gereja RK. Pada setiap organisasi itu diadakan usaha-usaha dalam bentuk program pembinaan pemuda khususnya dalam soal-soal kerohanian. Pendidikan kepemudaan diadakan juga di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun yang diusahakan oleh swasta, dalam arti kata mendidik para murid untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di samping menambang ilmu untuk bekal di masa depan.

Di daerah Gorontalo, pembinaan pemuda sejak lama dilakukan oleh antara lain Kepanduan Muslimin Indonesia (KMI) pimpinan Ibrahim Mohammad. Juga di sana diaktipkan kembali organisasi kepanduan Hizbul Wathon dan SIAP.

7. Kewanitaan.

Di daerah Sangir Talaud pada masa itu muncul organisasi wanita yang dinamakan PEWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yaitu di Tahuna dan di Ulu Siau. Organisasi wanita ini dipimpin oleh Ibu Lalisang. Kegiatan PEWARI diketahui hanya khusus dalam soal-soal kerajinan wanita serta usaha-usaha pendidikan keagamaan/kerohanian. Di samping itu ada organisasi Kaum Wanita Masehi Sangir Talaud (KWAMST) pimpinan Ibu Salawati Makagiarsar. KWAMST ini hanya khusus bergerak dalam soal kerohanian pula dengan struktur organisasinya

mengikuti struktur organisasi GMIST. Pimpinan pusatnya berkedudukan di Tahuna (pusat GMIST) dan para anggotanya tersebar di semua desa di Sangir Talaud.

E. PELAKSANAAN HASIL KMB DI DAERAH.

Daerah Sulawesi Utara pada periode ini, tetap termasuk dalam lingkungan NIT. Negara bagian ini adalah yang tertua di antara semua negara bagian yang dibentuk Belanda. Sejak terbentuknya NIT 24 Desember 1946, NIT telah menyatakan pendirian politiknya yang tegas mengenai bentuk Negara Indonesia yang akan datang, ialah menghendaki bentuk "federasi". Hal ini telah ditegaskan pula di dalam "politik-manifest" pemerintah NIT yang telah diterima oleh Parlemen NIT bulan April 1947. Pada masa itu parlemen NIT terdiri dari dua golongan yakni yang pro RI dan yang pro bentuk federalisme. Yang pro RI membentuk fraksi dengan nama GAPKI (Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia) dan bersikap oposisi terhadap semua kebijaksanaan pemerintah NIT yang merugikan kepentingan fraksi atau langsung merugikan perjuangan pro RI, (Kempen, 1953).

Sebagai akibatnya maka terjadi pergantian kabinet yang silih berganti. Dalam periode 1949 - 1950, yang memerintah adalah Kabinet Anak Agung Kedua dipimpin oleh Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung mulai 12 Januari 1949. Pada 26 Desember 1949, yakni tiga hari sebelum tercapainya Persetujuan KMB, yang memerintah adalah Perdana Menteri NIT J.E. Tatengkeng yang memimpin 10 menteri. Dalam masa pemerintahan Kabinet Anak Agung Kedua di atas, pemerintah NIT membagi wilayah NIT (kecuali Irian Barat) atas tiga Komisariat Negara (Staats-commissariat). Status wilayah Komisariat Negara ini kira-kira sederajat dengan sebuah propinsi. Sebagai pemimpin setiap Komisariat Negara ialah seorang Komisaris Negara yang kedudukannya kira-kira setaraf dengan Gubernur. Salah satu di antara Komisariat Negara itu ialah Komisariat Negara Sulawesi Utara dan Maluku Utara (Komisariat Negara SUMU) di bawah Komisaris Negara Mr. Boon (Watusieke, 1968 ; Kempen, 1953).

Wilayah Komisariat Negara SUMU ini meliputi empat daerah yang berlaku mulai Desember 1949 sebagai berikut :

- a. Daerah Minahasa di bawah Kepala Daerah D.A.Th. Gerungan yang berkedudukan di kota Manado;
- b. Daerah Sangir Talaud di bawah Kepala Daerah B.J. Medellu yang berkedudukan di kota Tahuna;
- c. Daerah Sulawesi Utara di bawah Kepala Daerah Ajuba Wartabone yang berkedudukan di kota Gorontalo yang membawahi tiga sub daerah yakni:
 - (1) Gabungan Bolaang Mongondow (sebagai federasi empat kerajaan yang ada yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna, Kerajaan Kaidipang Besar) di bawah Kepala Daerah Raja H.J.C. Manoppo (dari Kerajaan Bolaang Mongondow) yang juga selaku Ketua Dewan Raja-raja;
 - (2) Daerah Gorontalo di bawah Kepala Daerah Ajuba Wartabone yang berkedudukan di kota Gorontalo;

(3) Daerah Buol di bawah seorang Kepala Daerah yang berkedudukan di kota Buol;

d. Daerah Maluku Utara di bawah seorang Kepala Daerah yang berkedudukan di kota Ternate.

Dengan terbentuknya Komisariat Negara SUMU di atas maka diadakan pemisahan wilayah pemerintahan sepenuhnya dengan Daerah Sulawesi Tengah yang dahulunya masih termasuk dalam wilayah Keresidenan Manado. Sebelum itu, Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan surat Penetapan Residen Manado tanggal 25 Januari 1949 No. R/21/1/4. Daerah ini merupakan federasi 15 wilayah Dewan Raja-raja dengan Kepala Daerah yang berkedudukan di Poso (Arsjad Moh. Ali, 1973). Di tahun 1960 kedua wilayah ini disatukan kembali sebagai Propinsi Sulawesi Utara/Tengah dengan ibukotanya yakni Manado. Tahun 1964 dipisahkan lagi menjadi Propinsi Sulawesi Utara Ibukota Manado dan Propinsi Sulawesi Tengah Ibukota Palu, yang berlaku sampai sekarang ini.

Dengan dicapainya Persetujuan KMB 27 Desember 1949 maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri atas beberapa negara bagian di antaranya NIT. Bagi yang pro RI, terbentuknya RIS dianggap merupakan suatu kemenangan karena hal itu dapat dijadikan salah satu langkah maju menuju terwujudnya cita-cita Negara Kesatuan RI. Hal inipun dimiliki oleh para pejuang pro RI di daerah Sulawesi Utara yang walaupun RIS telah terbentuk, tetapi terus menerus mereka berjuang untuk menghapuskan NIT dan menggabungkan daerah ini ke dalam RI. Dengan demikian maka sejalan dengan langkah-langkah pelaksanaan hasil-hasil KMB di daerah-daerah di seluruh Indonesia, maka di daerah Sulawesi Utara terjadi pergolakan politik untuk membubarkan NIT. Dalam pada itu kekuatan-kekuatan yang pro bentuk federal masih bercokol dengan kuatnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan NIT didukung oleh pejabat-pejabat Belanda yang masih ada ditambah kekuatan militer KNIL dan Barisan Polisi NIT.

Perjuangan rakyat yang ingin bergabung dengan RI didasarkan pada pasal 43 Konstitusi RIS 1949 yang menentukan aturan bahwa "dalam penyelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat, maka berlakulah azas pedoman, bahwa kehendak rakyatlah di daerah-daerah bersangkutan yang dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi". Selanjutnya dalam pasal 44 ada peraturan bahwa "perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang federal". (DPR-GR, 1970).

Sejak terbentuknya RIS 1949, daerah demi daerah menyatakan penggabungannya dengan RI. Hal itu diterima oleh RIS dan RI dan diatur dalam Keputusan Presiden RIS No. 108 sampai 113 tgl. 9 Maret 1950 yu. UU Darurat RIS No. 11/1950 disusul Keputusan Presiden RIS No. 126 dan 127 tgl. 24 Maret 1950 serta Keputusan Presiden tgl. 4 April 1950. Dengan keluarnya semua peraturan di atas, maka pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya terdiri dari tiga negara bagian saja yaitu RI, NIT dan NST (Negara Sumatera Timur) (DPR-GR, 1970).

Masih tetap bertahannya Pemerintah NIT yang belum sepenuhnya mau menyalurkan hasrat rakyat untuk menggabungkan diri dengan RI sesuai Konstitusi RIS yang dihasilkan dalam Persetujuan KMB itu, semakin lama semakin membangkitkan keresahan di kalangan masyarakat. Pasukan-pasukan KL yang ada belum dipulangkan ke Negeri Belanda sedangkan pasukan-pasukan KNIL belum segera dimasukkan ke dalam APRIS, sehingga mereka sering dipergunakan oleh Belanda untuk menekan hasrat rakyat untuk bergabung dengan RI. Kedua hal di atas ditambah sikap yang angkuh dari mereka yang tetap pro Belanda serta pro bentuk federalis, membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk dengan kekerasan mendesak agar NIT membubarkan diri segera digabungkan dengan RI.

Di daerah Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa, perjuangan rakyat untuk membubarkan NIT dijalankan melalui dua cara yakni dalam forum resmi DPR Minahasa (dibentuk Maret 1948) serta melakukan terus perang gerilya melawan pasukan KNIL dan Polisi NIT yang ada di daerah ini. Dengan kata lain dilakukan dengan perjuangan politik dan perjuangan militer. Dalam perjuangan politik, kekuatan-kekuatan pro RI membentuk fraksi dalam DPR Minahasa. Fraksi itu gabungan dari BNI, KRIS dan Partai Katolik, dengan juru bicaranya yakni M.B. Tumbel. Fraksi ini berhadapan dengan yang pro federalis yakni organisasi TWAPRO, PEMAKAT, KKM dan Hoofdenbond yang dipimpin oleh Jan Mawikere (dari TWAPRO). Di luar DPR Minahasa, tokoh-tokoh politik pro RI berposisi dengan membentuk FKRI (Fraksi Kesatuan Republik Indonesia) yang merupakan gabungan dari dua organisasi yakni PNI dan PPI (Persatuan Pemuda Indonesia). Secara diam-diam, para anggota fraksi pro RI dalam DPR Minahasa seperti M. Sondakh, R.M.A. Dahlan, O.F. Pua dan M.B. Tumbel, juga menjadi anggota FKRI yang berposisi di luar dewan itu. Bahkan tuntutan agar DPR Minahasa menyatakan diri bergabung dengan RI Yogyakarta, sudah sejak Agustus 1949 dimajukan oleh para anggota fraksi pro RI jauh sebelum terbentuknya FKRI awal tahun 1950 (Posumah, 1978).

Dalam pada itu, jabatan Kepala Daerah Minahasa dan Ketua DPR Minahasa diserahkan dari pejabat lama kepada P.M. Tangkilisan pada bulan Januari 1950. Pemimpin yang baru ini ternyata adalah seorang pro RI yang di bawah pimpinannya maka semakin kuatlah posisi fraksi yang pro RI dalam dewan itu. Pada masa itu DPR Minahasa terdiri dari 22 anggota termasuk ketua. Dalam jabatannya itu maka Tangkilisan pergi menemui Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong yang waktu itu bermarkas di Amurang. Ia pergi bersama seorang anggota MBP (Majelis Badan Pekerja, dewan yang mendampingi Kepala Daerah Minahasa dalam menjalankan pemerintahan) yang bernama E. Kandou. Selesai pertemuan dengan Mondong, maka Tangkilisan menugaskan E. Kandou untuk memimpin Pemerintahan di Minahasa Utara.

Tindakan Tangkilisan di atas, semakin memperkuat keyakinan para pemimpin politik pro RI bahwa perjuangan mereka akan segera menjadi kenyataan. Fraksi pro RI dalam DPR Minahasa bersama FKRI yang berposisi di luar dewan, mendesak agar segera diadakan sidang Dewan dengan acara tunggal yakni membicarakan keluar dari NIT dan bergabung dengan RI. Walaupun tuntutan itu dihalang-halangi

oleh yang pro bentuk federal dengan kerasnya, namun akhirnya 30 April 1950, diadakanlah sidang DPR Minahasa.

Kepala Daerah Minahasa P.M. Tangkilisan yang juga merangkap Ketua dewan, setelah membuka secara resmi sidang hari itu, disusul dengan sambutan yang gegap gempita dari hadirin yang terdiri dari para anggota dewan serta para anggota FKRI yang hadir tanpa diundang. Sidang membicarakan acara pokok yakni daerah Minahasa harus menyatakan diri keluar dari NIT dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RI yang berpusat di Yogyakarta. Tuntutan, argumentasi dan pembelaan dilontarkan oleh M.B. Tumbel, dan ditentang dengan kerasnya oleh Jan Mawikere. Karena sama-sama bertahan tidak mau mengalah, maka diadakan pemungutan suara dan sebagai hasilnya ialah 19 suara setuju, satu menentang serta tiga blangko. Atas dasar itu maka Ketua P.M. Tangkilisan segera menjatuhkan palu memutuskan bahwa Daerah Minahasa menyatakan diri keluar dari NIT dan bergabung dengan RI. Dengan demikian maka Minahasa secara yuridis formal menjadi daerah RI, sebelum hal itu dilakukan oleh NIT (Posumah, 1978 ; Kahin, 1961 ; Taulu, 1950).

Jan Mawikere yang konsekwen dengan pendiriannya yang tidak setuju penggabungan dengan RI, dalam sidang itu mengatakan bahwa "Biar dewan ini beberapa kali mengambil keputusan pro Negara Kesatuan, tapi saya tetap pada pendirian saya . . . sampai ke liang kubur sekalipun saya bersama Belanda . . . bila saya mati nanti, saya lebih berbahagia apabila jenazah saya dibungkus dengan bendera merah - putih - biru". Benarlah, tidak lama kemudian Jan Mawikere meninggal dunia, dan para pemimpin pro RI datang menjenguknya. Tidak ada seorangpun anggota fraksinya yang hadir waktu itu. Para anggota pro RI dipimpin oleh Abdul Madjid, datang ke sana dengan membawa sehelai bendera Belanda. Ketika menyerahkan karangan bunga dan bendera Belanda yang mereka bawa, Abdul Madjid berkata bahwa "kain tiga warna itu dibuat dan diserahkan untuk menghormati orang yang tahu mempertahankan pendiriannya hingga akhir hayat" (Posumah, 1978).

Di pihak lain sebagaimana sudah dikemukakan di depan, terjadi pula perjuangan bersenjata untuk membubarkan NIT yang dilakukan oleh LRRI dan LFP. LRRI berada di bawah Komandan F.H.L.W. Mondong sedangkan LFP di bawah Komandan L. Anes. Sebenarnya kedua organisasi perjuangan gerilya itu adalah satu yakni LRRI di bawah pimpinan Komandan F.H.L.W. Mondong. Tetapi sesuai strategi perjuangan yang diputuskan oleh para pimpinannya maka LRRI dibagi dua yakni sebagian tetap dinamakan LRRI dan sebagian dinamakan LFP. LRRI berjuang untuk melucuti senjata polisi NIT sedangkan LFP berjuang agar para anggota KNIL mau bergabung dengan mereka. Tentang hal itu sudah dikemukakan lebih dahulu pada halaman di depan.

Pada tanggal 14 April 1950, LRRI dan LFP menyusun rencana bersama untuk menyerang markas KNIL di Teling dan di Wanea (keduanya berkedudukan di kota Manado). Kalau penyerangan itu berhasil maka mereka akan memperoleh persenjataan yang lebih banyak untuk memperkuat persenjataan yang ada yang dirasakan sangat kurang. Tanggal 16 April 1950, di sekitar kedua markas itu terjadi gerakan-gerakan pasukan LRRI dan LFP. Markas komando khusus serangan itu

ditempatkan di "gedung Kopak" (sekarang gedung Pingkan milik BNI 1946) di tengah kota. Pos depan ada di lapangan Sario yang waktu itu sementara dilangsungkan pertandingan pacuan kuda. Para anggota KNIL yang pro RI di kedua asrama itu sudah diberi tahu akan adanya serangan dan mereka akan membantu dari dalam. Tapi berhubung rencana bocor, maka walaupun kedua markas itu sudah dikepung namun serangan dibatalkan untuk menghindari jatuhnya korban yang banyak. Pasukan LRRI yang telah datang untuk membantu LFP, pulang kembali ke daerah Minahasa.

Kebocoran rencana serangan itu disebabkan Sersan Rawung berkhianat dengan memberitahukan hal tersebut kepada KNIL dan Reserve Corps (KNIL di Teling dan RC di Wanea). Nama-nama para pemimpin LRRI dan LFP telah berada di tangan Kapten van Leur sebagai Wakil Komandan KNIL, termasuk para anggota KNIL dan RC yang memihak LRRI-LFP. Dengan demikian maka agar tidak didahului, para pimpinan LRRI rencana penyerangan kedudukan polisi NIT di Tomohon, Tondano, Airmadidi, Kawangkoan, Tumpaan dan Amurang. Rapat diadakan di Markas Besar LRRI di desa Talete Tomohon dipimpin langsung oleh Komandan F.H.L.W. Mondong. Serangan ke kota-kota di atas akan dilakukan serentak pada tanggal yang bersamaan yakni 24 April 1950 dengan jam yang berbeda yakni jam 22.00 menyerang Amurang, Tumpaan dan Airmadidi; jam 23.00 menyerang Tondano dan Kawangkoan; sedangkan untuk Tomohon, dilakukan jam 01.00 tanggal 25 April 1950. Sudah dibentuk enam pasukan untuk menyerang keenam kota itu.

Sesuai rencana maka pasukan diberangkatkan ke Amurang, untuk melucuti polisi NIT di Amurang dan Tumpaan. Gerakan itu dipimpin oleh F. Wongkar, J. Kaindeh dan Boy Potu yang di Amurang diperkuat oleh Komandan LRRI Wilayah VII H.L. Kaligis yang juga sudah siap untuk itu. Dengan mudah pasukan LRRI itu melucuti semua senjata polisi NIT di Amurang dan Tumpaan tanpa pencegahan dari KNIL dan RC yang ada di sana yang mungkin sekali tidak mengetahui adanya serangan. Pasukan LRRI itu karena tidak diperintahkan maka juga tidak mau menyerang pasukan KNIL dan RC sebab hal itu menjadi bagian dari LFP. Setelah berhasil dalam tugasnya, pasukan LRRI itu tidak melanjutkan dengan menyerang/melucuti polisi NIT yang ada di Kawangkoan sesuai rencana berhubung harus cepat-cepat kembali ke Tomohon untuk membantu serangan di sana. Tiba di Tomohon, pimpinan pasukan diambil alih lagi oleh Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong, yang bersama kekuatan-kekuatan LRRI yang siap siaga di sana, menyerang markas polisi yang ada di kota itu. Beberapa anggota polisi NIT yang pro LRRI antaranya Sem Mait ikut membantu, sehingga Komandan Polisi NIT yang ada di Tomohon (bernama Rusman), menyerah bersama seluruh anak buahnya. (Posumah, 1978). Semua senjata mereka dirampas oleh LRRI.

Pasukan yang diperintahkan menyerang polisi NIT di Tondano dan Airmadidi, gagal sebab rencana serangan sudah diketahui musuh. Tanpa menunggu berita dari kedua tempat itu, pasukan LRRI pimpinan Mondong memindahkan Markas Besar dari Tomohon ke desa Pondos (kecamatan Motoling Minahasa Selatan). Pemindahan itu dilakukan tanggal 25 April 1950 untuk menghindari serangan balas

dari polisi, KNIL dan RC di Minahasa, yang tentu saja tidak akan tinggal diam. Saat itu, daerah Minahasa Selatan sudah dibebaskan seluruhnya dari kekuasaan NIT. Kepala Daerah Minahasa P.M. Tangkilisan sebelum memimpin sidang DPR Minahasa (30 April 1950), pergi menemui Komandan LRRI F.H.L.W. Mondong untuk menyatukan perjuangan politik dan militer dalam membebaskan Minahasa dari NIT dan bergabung dengan RI yang berkedudukan di Yogyakarta (Posumah, 1978).

Dalam periode perjuangan waktu itu, populer lagu perjuangan LRRI (berbentuk mars tapi ragamnya tidak diketahui lagi). Adapun syairnya sebagai berikut (Posumah, 1978 ; Taulu, 1950) :

*Laskar Rakyat, pengawal rakyat
Bertindak cepat, lagipun tepat
Kalau terlambat barang sesaat
Banyak terhambat lagi tertambat*

*Aksi Westerling menjadi bukti
Aksi Azis nyata munafik
Aksi 18 April bahaya mendekat
Laskar Rakyat terpaksa nekad
25 April tonggak sejarah
Laskar Rakyat membuang jejak
Menegak tonggak kesatuan
Agar lepas dari tipuan*

*Roda sejarah berpusing terus
Laskar Rakyat mengintai terus
Mengawal rakyat, tanah dan bangsa
Agar tanahnya makmur bahagia.*

Sementara itu terjadi persiapan di kalangan KNIL dan RC untuk menyerang LRRI yang bermarkas di Minahasa Selatan. Untuk mendahului serangan itu, maka LFP pimpinan Komandan L. Anes mengadakan dua kali rapat kilat di Tomohon yakni 28 April dan 2 Mei 1950 untuk menyusun rencana penyerangan terhadap KNIL dan RC sebelum pasukan-pasukan itu digunakan oleh Belanda menghancurkan LRRI. Hasil-hasil rapat disampaikan pula kepada para anggota KNIL dan RC yang pro RI agar mereka dapat bersiap membantu jalannya serangan LFP. Kekuatan LFP dikerahkan dari Tomohon, Langowan dan Airmadidi untuk memperkuat pasukan yang ada di Manado. LFP Tomohon dipimpin oleh N.Th. Rumajar, LFP Langowan oleh W. Saerang, LFP Airmadidi oleh V. Mandey dan LFP Manado oleh S.D. Wuisan. Pimpinan keempat kelompok pasukan LFP di atas langsung berada di tangan Komandan LFP L. Anes.

Rencana serangan LFP itu didahului oleh larinya Sersan Tuturoong dari markas KNIL Teling yang membawa 20 anggota, menyeberang ke pihak LFP tanpa sepengetahuan komandan mereka. Peristiwa itu hampir saja menggagalkan se-

rangan LFP berhubung semua anggota KNIL yang diketahui memihak LFP segera ditangkap antaranya Sersan A.H. Mengko, Sersan F. Bolang, Sersan Angkouw, Sersan Pontoh dan Sersan Mamengko. Mereka langsung diperiksa oleh Komandan KNIL Mayor Nues. Ketika ditanya mengapa mereka merencanakan pemberontakan, maka Mengko menjawab bahwa mereka sama sekali tidak berniat memberontak selain merasa sakit hati berhubung kepangkatan mereka dirugikan kalau hendak dijadikan pasukan APRIS, sambil menyodorkan satu daftar tentang rencana Belanda untuk mengalihkan pasukan KNIL di Manado kepada APRIS. Ini hanya sebagai alasan saja dari Mengko dan kawan-kawannya di mana dokumen dimaksud secara kebetulan dilihat di meja komandan sebelumnya yang lalu diambil oleh Mengko. Sesuai daftar tersebut, mereka yang dicurigai pro RI tidak dinaikkan sedangkan yang lain dinaikkan ada yang sampai dua - tiga tingkat ke atas. Umpamanya Sersan Rawung (yang berkhianat) dinaikkan jadi Letnan Dua sedangkan Mengko dan Mamengko tidak.

Karena alasan ini maka luputlah mereka dari hukuman yang sedianya akan dijatuhkan Mayor Nues karena mayor Belanda itu rupanya merasa lega bahwa apa yang disinyalir olehnya sebagai rencana pemberontakan, rupanya hanya soal kepangkatan biasa saja. Mengko dan kawan-kawannya juga merasa yakin bahwa hubungan rahasia mereka dengan LFP belum sampai diketahui atasannya itu.

Sementara pemeriksaan mendekati akhir, telepon di ruangan mayor itu berdering mengabarkan bahwa Sersan Tuturoong telah lari ke jurusan desa Kali (15 Km tenggara kota Manado) bersama 20 anak buahnya. Mayor Nues kemudian mengajak kelima sersan KNIL itu untuk membantu agar Sersan Tuturoong mau kembali dan kepada kelima sersan itu akan diperhatikan soal kepangkatan sebelum dimasukkan ke dalam APRIS sebentar. Mengko disertai tugas untuk itu dibantu oleh Bolang yang akan memimpin pasukan untuk menemui Sersan Tuturoong. Sesudah itu dengan diantar oleh Kapten van Leur (Wakil Komandan) kelimanya dipulangkan ke asrama Teling.

Tiba di asrama, Sersan Bolang mempersiapkan satu peleton KNIL lengkap dengan senjatanya. Kapten van Leur menelepon Mayor Nues bahwa pasukan sudah berangkat. Mengko dan ketiga sersan lainnya mempersiapkan diri berhubung pada sebentar malam, pasukan LFP akan menyerang markas Teling di mana mereka berada. Karena itu maka keempat mereka (Mengko, Angkouw, Pontoh dan Mamengko) memberitahukan anggota KNIL yang pro RI agar bersiap-siap bergabung dengan LFP malam itu. Kemudian Mengko pergi ke rumahnya L.F. Saerang di Titiwungen Manado (sekarang dijadikan markas Dewan Kekayaan Daerah "M" KODAM XIII/Merdeka). L.F. Saerang adalah salah seorang pemimpin LFP dan rumahnya dijadikan markas LFP khusus dalam pelaksanaan serangan terhadap KNIL tanggal 3 Mei 1950, sedangkan Markas Besar LFP berkedudukan di Tomohon waktu itu.

Malam tanggal 2 Mei 1950, LFP dari Langowan, Tomohon dan Airmadidi, telah ada di Manado dengan persenjataan seadanya. LFP menerima informasi bahwa beberapa perwira APRIS secara rahasia telah ada di Manado untuk mengamati pelaksanaan pengalihan pasukan KNIL sesuai hasil KMB. Para perwira

APRIS itu yakni Letnan Kolonel H.N.V. Sumual, Kapten A. Supit, Kapten Gagola, Kapten Idrus dan Letnan Satu Nanohy. Mereka berada di RSU Gunung Wenang Manado. Mengetahui hal itu maka Komandan LFP L. Anes disertai Piet Ngantung, pergi menemui para perwira APRIS di atas. Anes mengatakan bahwa LFP telah siap untuk merebut senjata KNIL. Sumual berkata bahwa ia datang dalam rangka pengalihan semua pasukan KNIL menjadi APRIS sehingga sebenarnya mereka tidak usah diserang lagi. Tapi ia tidak dapat menahan kemauan LFP karena memang katanya adalah lebih baik kalau sebelum dimasukkan menjadi pasukan APRIS, mereka sebelumnya telah mengakui kepemimpinan kita. Anes menutup pertemuan rahasia itu dengan mengatakan bahwa LFP sudah siap untuk melaksanakannya karena rencana sudah matang, dan akan dilaporkan pelaksanaannya berhasil atau tidak berhasil (Posumah, 1978).

Tepat jam 24.00 (tanggal 2 menjelang 3 Mei 1950), LFP pimpinan N.Th. Rumajar telah berada di belakang markas Teling menunggu bergabungnya pasukan KNIL pimpinan Sersan Mamengko dan Sersan Angkouw. Pasukan itu memiliki senjata masing-masing lebih dari satu pucuk untuk diserahkan kepada LFP. Jumlah pasukan yang bergabung waktu itu 72 anggota yang kemudian berangkat dari Teling ke rumah L.F. Saerang di Titiwungen. Dari Titiwungen mereka menjemput pasukan pimpinan Sersan F. Bolang dan Sersan Tuturoong di Kali, lalu dengan tujuh truck militer mereka hendak ke Tomohon melalui Airmadidi dan Tondano. Di Airmadidi, pasukan KNIL yang sudah jadi pasukan LFP bersama pasukan LFP lainnya melucuti pasukan RC yang ada di sana.

Rentetan kejadian di atas sangat menggemparkan anggota KNIL, RC, MP bahkan semua yang pro Belanda yang ada di daerah ini. Sersan Mengko yang tidak turut bergabung malam itu menjadi sasaran pertanyaan mengapa pasukan pimpinan Sersan Bolang tidak kembali dan mengapa 72 anggota lainnya pimpinan Mamengko dan Angkouw lari malam tadi. Kebetulan Mengko tidur di rumahnya Mayor Nues sehingga siasatnya itu tidak membangkitkan kecurigaan hubungannya dengan Mamengko dan kawan-kawan lainnya. Mayor Nues membangunkan Mengko dan menuduh Mengko sebagai yang bertanggung jawab atas rentetan peristiwa di atas. Mengko dan Pusung kemudian berhasil meyakinkan mayor Belanda itu bahwa mereka sanggup memanggil kembali anggota-anggota KNIL yang telah melarikan diri. Karena itu Mengko ditugaskan untuk mengusahakan agar pasukan tersebut pulang ke Manado dari tempat di mana mereka sekarang. Untuk itu Mengko didampingi oleh Sersan Emor, seorang petugas intel yang sangat dipercaya oleh Mayor Nues.

Keduanya berangkat ke Tomohon dengan memakai kendaraan militer (jeep) berbendera Belanda. Dekat Tomohon Mengko mengatakan kepada Emor bahwa kalau pakai bendera itu maka mereka tidak akan diterima oleh pasukan KNIL yang telah memihak LFP. Karena itu maka bendera Belanda dirobek birunya, lalu berkibirlah bendera Merah Putih di depan kendaraan itu. Mengko diterima dengan penghormatan militer oleh pos LFP yang dijaga bekas anggota KNIL sehingga membangkitkan kecurigaan Emor. Dengan ancaman akhirnya Emor berjanji tidak akan membuka rahasia yang diketahuinya kepada Mayor Nues. Dengan janji itu

maka keduanya kembali lagi ke Manado melaporkan kepada Nues bahwa misi mereka telah gagal.

Sebelum Mengko dan Emor ke Tomohon-4 Mei 1950, Mengko masih menghubungi Sersan Pusung. Akibatnya maka sementara Mengko ada di Tomohon, Sersan Pusung bersama anak buahnya melarikan diri dari Markas Teling ke Iloilo yang terletak antara desa Wori dan desa Bailang di Minahasa Utara. Di sana mereka mendirikan kubu pertahanan untuk menghadapi serangan sambil menunggu perkembangan atau komando dari Markas Besar LFP di Tomohon. Letnan Kolonel H.N.V. Sumual beserta stafnya yang telah datang secara rahasia itu, pergi ke Tomohon dan memberikan penerangan seperlunya kepada para bekas anggota KNIL (yang telah memihak LFP) soal status dan jaminan mereka dalam APRIS sebentar sehingga melegakan para bekas anggota KNIL itu. Atas perintah Sumual maka kedudukan Markas Besar LFP dipindahkan dari Wakan (sekitar kota Tomohon) ke desa Kaaten dalam kota Tomohon (kompleks itu sekarang didirikan SPG Negeri Tomohon) (Posumah 1978).

Setelah kehilangan ratusan anggota KNIL maka kekuatan militer Belanda di kota Manado sangat berkurang. Pasukan KNIL hanya tersisa dua peleton, RC di Wanea satu peleton, CPM satu peleton dan kira-kira 50 anggota polisi NIT. Sementara di Tomohon, para pimpinan LFP mengadakan rapat kilat yang berhasil membentuk satu batalyon pasukan yang dinamakan "Batalyon 3 Mei". Sebagai Komandan batalyon ialah A.H. Mengko, dan Wakil Komandan ialah L. Anes. Pasukan-pasukan KNIL dan RC dipersiapkan Belanda untuk menyerang Batalyon 3 Mei yang berkedudukan di Tomohon. Letnan Kolonel Sumual yang mengetahui hal itu, memerintahkan kepada Kapten A. Supit untuk berangkat dari Manado ke Tomohon memberitahukan hal tersebut dengan perintah dari Sumual agar batalyon segera mempersiapkan diri. Pasukan lawan langsung dipimpin oleh Mayor Nues dan Kapten van Leur.

Tapi ternyata Nues dan van Leur dengan kawalan pasukan baret merah KNIL, setibanya di Tomohon malah menawarkan untuk berunding dengan pasukan LFP yang telah menjadi Batalyon 3 Mei. Nues dan van Leur tidak menyangka bahwasanya seorang bekas anggota KNIL yakni A.H. Mengko kini bertindak selaku Komandan batalyon itu. Namun perundingan dilangsungkan juga. Sementara perundingan berlangsung, Sersan F. Bolang masuk dan melaporkan kepada A.H. Mengko dari L. Anes bahwa pasukannya telah berhasil melucuti RC yang ada di Wanea Manado. Berita itu semakin melemahkan posisi Nues dan van Leur sehingga perundingan tanggal 5 Mei 1950 itu semakin dikuasai oleh pimpinan Batalyon 3 Mei. Nues, van Leur keduanya langsung mendengar laporan itu sehingga mereka bersama pasukannya semakin sulit mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Mengko dan Anes.

Mengko dan Anes menuntut agar Nues dan van Leur segera menyerahkan pasukannya lengkap dengan administrasinya kepada Batalyon 3 Mei. Tapi Nues dan van Leur menolak dengan alasan bahwa sesuai berita, akan datang pasukan APRIS ke Manado untuk menerima pengalihan KNIL menjadi APRIS, sesuai persetujuan KMB. Akhirnya walaupun tidak ada kata sepakat, namun kedua pihak setuju melakukan perundingan besoknya yaitu tanggal 6 Mei 1950.

Menyadari kekuatan yang dimiliki maka Batalyon 3 Mei merubah rencana sesuai hasil perundingan yakni bahwa mereka akan mendahului menyerang kota Manado. Persiapan-persiapan untuk itu telah diatur dengan teliti Pimpinan serangan dipegang langsung oleh Komandan batalyon A.H. Mengko. Wakil Komandan L. Anes ditugaskan menangkap Mayor Nues dan semua perwira KNIL yang ada di Sario Manado. Inti pasukan pimpinan Komandan A.H. Mengko mempersiapkan diri di sekitar Markas KNIL di Teling Manado. Tugas Anes berhasil dengan baik, yakni dengan tertawannya Nues dan para perwira KNIL yang ada. Mereka dibawa ke Teling di mana Nues diminta untuk mengumumkan kepada pasukan KNIL yang masih setia kepadanya yang ada di sana bahwa ia telah menyerah dan memerintahkan agar seluruh pasukan KNIL yang ada termasuk CPM, RC dan polisi NIT agar mengikuti jejaknya.

Ketika melihat bahwa kendaraan-kendaraan LFP yang membawa Mayor Nues memasuki kompleks asrama Teling maka pasukan pimpinan Komandan A.H. Mengko semakin mendekat dan mengepung kompleks markas itu. Mayor Nues turun dari kendaraan diapit oleh Anes dan kawan-kawannya. Batalyon itu masih memakai tanda pengenal "LFP" di lengan masing-masing sedang topi mereka bertuliskan "RI". Mayor Nues berdiri di tengah lapangan dan memerintahkan agar pasukan KNIL yang ada segera berbaris didepannya. Setelah seluruh anggota KNIL yang ada berbaris teratur, maka Nues berkata : "Anak-anak, mulai sekarang saya tidak pegang komando lagi. Sekarang komando saya serahkan kepada Laskar Front Pemuda". Suasana sangat hening di lapangan upacara itu. Pasukan KNIL terdiam kaku sedangkan para anggota LFP (Batalyon 3 Mei) yang ada yang mendampingi Mayor Nues juga turut terdiam. Kemudian L. Anes berkata ditujukan kepada para anggota KNIL yang telah menyerah itu, katanya : "Karena sekarang Saudara- saudara sudah berada dalam pimpinan kami, perlu kami jelaskan bahwa : gaji, pensiun serta semua hak Saudara- saudara, jalan terus seperti biasa . . . dan . . . Merdeka!" Pekikan Anes itu secara tidak disangka-sangka diikuti oleh para anggota KNIL yang telah menyerah itu, yang mungkin dilakukan secara tidak sadar (Posumah, 1978).

Pasukan lainnya pimpinan Komandan A.H. Mengko bergerak memasuki markas itu. Yang masuk dari arah depan, langsung menuju ke tiang bendera, menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, lalu digerek kembali menjadi Bendera Merah Putih. Pasukan KNIL masih tetap siap di barisan. Sersan Mondong dan Sersan Tumonggor (kawan-kawan A.H. Mengko) keluar dari barisan dan bergabung dengan pasukan yang baru saja datang. Mereka mengambil alih seluruh kekuasaan di Markas KNIL Teling pada tanggal 6 Mei 1950. Markas KNIL tersebut segera dijadikan Markas Batalyon 3 Mei. Tanggal 8 Mei dipindahkan kedudukan markas dari Teling (Manado) ke Tomohon seperti semula.

Tanggal 9 Mei, Kolonel Pereira (KNIL) dari Ujungpandang tiba di pelabuhan udara Mapanget disambut oleh L. Anes bersama pasukannya. Ia tidak curiga melihat pasukan penjemput memakai seragam KNIL. Pereira turun dari pesawat lalu mengatakan bahwa ia datang untuk menyelesaikan soal KNIL di Manado. Anes menimpali bahwa di Manado tidak ada lagi KNIL, dan yang berbaris sekarang

adalah pasukan LFP. Kolonel Pereira terkejut lalu cepat-cepat naik pesawat dan langsung terbang kembali.

Tanggal 10 Mei 1950, tibalah pasukan APRIS yakni "Batalyon Worang" dipimpin oleh Mayor H.V. Worang. Pasukan ini disambut dengan gembira oleh Batalyon 3 Mei pimpinan A.H. Mengko dan L. Anes di Manado. Di Amurang, pasukan APRIS ini disambut dengan sorak kemenangan oleh pasukan LRRP pimpinan Komandan F.H.L.W. Mondong. Berhubung semua anggota KNIL sudah dialihkan menjadi pasukan pro RI sebelum batalyon APRIS ini tiba, maka pasukan itu hampir tidak menemui kesulitan.

Tanggal 20 Mei 1950, Letnan Kolonel J.F. Warouw, secara resmi melantik LFP menjadi "Batalyon 3 Mei" dalam kedudukannya selaku Komandan Pasukan APRIS Wilayah SUMU (Sulawesi Utara dan Maluku Utara). Pelantikan dilakukan di Lapangan Sparta Tikala Manado sekaligus pengesahan formasi batalyon sebagai berikut (Posumah, 1978) :

Komandan Batalyon	: A.H. Mengko dengan Pangkat Acting Mayor.
Wakil Komandan	: L. Anes dengan pangkat Kapten
Komandan Kompi I	: A. Angkouw dengan pangkat Letnan Satu
Komandan Kompi II	: Tumonggor dengan pangkat Letnan Satu
Komandan Kompi III	: Ch. Pontoh dengan pangkat Letnan Satu
Komandan Kompi IV	: Dirangkat L. Anes
Komandan Kompi V	: L.F. Saerang dengan pangkat Letnan Satu.

Pelantikan dan pengesahan ini kemudian dituangkan dalam surat keputusan Penetapan No. Xs. 00093039 tanggal 28 Mei 1950, yang dikeluarkan oleh Komandan Pasukan APRIS Wilayah SUMU.

Menyusul pelantikan dan pengesahan ini, para anggota Batalyon 3 Mei memperoleh latihan militer sekitar dua bulan lamanya. Usaha Mendellar dan Soumokil mendirikan RIT melalui GRIT telah gagal, lalu Soumokil mendirikan Republik Maluku Selatan (RMS) 25 April 1950. Misi perdamaian RIS dijalankan berturut-turut tetapi gagal. Akhirnya RIS menumpas RMS dengan mempergunakan pasukan APRIS. Di antara pasukan-pasukan yang dikerahkan adalah Batalyon 3 Mei di bawah Komandan Ac. Mayor A.H. Mengko dan Wakil Komandan Kapten L. Anes. Panglima Pasukan APRIS dalam penumpasan RMS ialah Kolonel A.E. Kawilarang dengan Kepala Staf Letnan Kolonel Slamet Rijadi. Batalyon 3 Mei ini diberangkatkan ke medan pertempuran penumpas RMS bulan Juli 1950.

Perjuangan politik di Minahasa tetap dilanjutkan meskipun DPR Minahasa telah menyatakan diri keluar dari NIT untuk bergabung dengan RI 30 April 1950. FKRI tetap menuntut agar DPR dibubarkan untuk diganti dengan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Minahasa. Tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan demikian Pasukan APRIS menjadi APRI termasuk yang di daerah ini. Komandan Pasukan APRI Wilayah SUMU membubarkan DPR Minahasa bentukan NIT pada 15 September 1950 sambil menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri RI. Tapi kemudian pemerintah RI mengambil

jalan tengah; dewan tidak langsung dibubarkan, hanya keanggotaannya diperluas dengan FKRI yang selama ini beroperasi di luar dewan di mana PNI serta PPI (Persatuan Pemuda Indonesia) masing-masing mendapat satu kursi. Dewan ini tetap berfungsi sampai bulan Maret 1951 (Posumah, 1978 ; Taulu, 1950). Perlu ditambahkan bahwa setelah LFP menjadi Batalyon 3 Mei, maka pasukan LRR! pimpinan Komandan F.H.L.W. Mondong kemudian menjadi pasukan APRI dengan nama "Pasukan Mondong".

Pergolakan politik di Minahasa sebagaimana sudah dikemukakan di atas diikuti pula oleh daerah-daerah lainnya di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Misalnya di Daerah Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Gorontalo dan Buol) yang pusat pemerintahannya di kota Gorontalo, rakyat menuntut agar Dewan Sulawesi Utara dibubarkan untuk diganti dengan KNI Daerah Sulawesi Utara. Kemudian Dewan Gorontalo membubarkan dirinya untuk diganti dengan KNI Daerah Gorontalo. Olehnya maka Dewan Pemerintahan sub daerah Gorontalo diserahkan kepada para tokoh politik yang pro RI. Baik KNI Daerah Gorontalo, maupun Pemerintah Sub Daerah Gorontalo lalu menyatakan diri keluar dari NIT dan menggabungkan diri dengan RI pada tanggal 2 Mei 1950.

Di daerah Bolaang Mongondow, walaupun RIS telah terbentuk sesuai hasil KMB, namun rakyat tidak menghendaki tetap tergabung dalam NIT sebagai anggota RIS. Karena para pemimpin politik pro RI di sana mengetahui bahwa perjuangan mereka untuk bergabung dengan RI adalah sah sesuai Konstitusi yang ada, maka mereka menyusun tenaga dan strategi perjuangan untuk menuntut agar daerah itu melepaskan diri dari NIT dan bergabung dengan RI. Juga mereka menuntut agar pemerintahan daerah yang masih bersifat feodalistis di bawah Dewan Raja-raja segera dibubarkan karena tidak sesuai dengan azas demokrasi.

Perjuangan politik di atas sebenarnya sudah sejak semula dijalankan yakni dengan terbentuknya GAPRIBOM (Gabungan Perjuangan Republik Indonesia Bolaang Mongondow). GAPRIBOM ini adalah kesatuan aksi dari sejumlah organisasi politik yang ada di sana yakni PNI, GIM, PSII dan Muhammadiyah. Pimpinannya terdiri dari Ketua A.C. Manoppo (dari GIM) dan Sekertaris M.D. Kartawinata (dari PSII) (Kempen, 1953).

Dalam tingkat perjuangan berikutnya, muncullah banyak organisasi politik yang semakin memperkuat GAPRIBOM, yakni PNI, KERWANI, PERGINDO, PERPIBOM, SERBIBOM, SIKAT, PPI Laskar Banteng, SPK dan KPM (lihat di depan). Perjuangan politik di atas dilakukan bersamaan dan tunjang menunjang dengan perjuangan gerilya yang terus menerus dilancarkan sejak 1945 oleh PPI Laskar Banteng Bolaang Mongondow sampai tahun 1950. Sejalan dengan tuntutan GAPRIBOM agar pemerintahan Dewan Raja-Raja dan NIT dibubarkan dan agar pemerintahan diserahkan kepada rakyat, maka semua organisasi yang tergabung di dalamnya mengadakan rapat di Kotamobagu. Rapat itu diadakan tanggal 4 Mei 1950 dengan tujuan untuk membentuk suatu panitia menuju terbentuknya KNI Daerah Bolaang Mongondow untuk mengambil alih pemerintahan daerah tersebut lalu digabungkan kepada RI. Alat-alat kekuasaan NIT yang ada di sana tidak mampu menghalang-halangi diadakannya rapat tersebut sehingga dapat berlang-

sung tanpa adanya kesulitan, bahkan rapat diadakan dengan mempergunakan ruang sidang DPR Gabungan Bolaang Mongondow yang ada di sana.

Hadir dalam rapat itu sejumlah tokoh politik yang berpengaruh di Bolaang Mongondow antaranya Zakaria Imban, Johan Pontoh, C.S. Gobel, A.R. Gelu, R. Mokoginta, Nurtina Gonibala, B. Dodoali, A. Lumowa, F.P. Mokodompit, Pon Mokodongan, F. Salindeho dan lain-lain. Rapat memutuskan membentuk Panitia KNI yang susunannya sebagai berikut :

Ketua	: Johan Pontoh (dari GIM)
Wakil Ketua	: Zakaria Imban (PSII)
Sekretaris	: Rubuu Mokoginta (Muhammadiyah)
Anggota-anggota	: C.S. Gobel (PNI)
	A.R. Gelu (Muhammadiyah)
	A. Lumowa (KPM)
	B.A.M. Pandelaki (KPM)
	F.P. Mokodompit
	U. Mokodongan
	B. Dodoali (SPK)
	Nurtina Gonibala (PSII/PPI)

Kemudian Panitia KNI Bolaang Mongondow mengundang seluruh pimpinan organisasi sosial politik yang ada di daerah itu untuk mengadakan rapat pembentukan KNI. Rapat itu diadakan tanggal 7 Mei 1950 di tempat yang sama di mana telah dipilih 51 orang sebagai anggota sementara bagi KNI Daerah Bolaang Mongondow. Ke 51 anggota KNI tersebut adalah sebagai berikut (H. Imban, wawancara 17-9- 1979 ; R. Mokoginta, wawancara 18-9-1979) :

R. Mokoginta	B.T. Manoppo	U. Mokodongan
Hadjir Imban	A. Mokoginta	Zakaria Imban
A.U. Mokoginta	S.G. Tungkagi	P. Mokodompit
S.U. Tungkagi	W. Kadamong	B. Gilalom
K. Imban	B. Dodoali	R.A. Hardjodiwirjo
B.A.M. Pandelaki	L. Mokodongan	B. Gumohung
M.R. Manoppo	Johan Pontoh	M. Buhang
M.T. Daun	M.A. Sugeha	P.M. Jacob
D. Massie	U.H. Mamonto	D. Korompot
A.A. Mokodompit	F.T. Manoppo	H.M. Djangko
J. Tampemawa	A.R. Gelu	E. Patadjium
F. Salindeho	A. Mustafa	E.S. Pontoh
H. Tanta	C.S. Gobel	A. Marada
E. Pandelaki	E. Jusuf	Karta Pua
J. Lumowa	L. Mokobombang	J. Pattilima
M.J. Manoppo	L. Kandou	A. Korompot
E. Salindeho	O. Mokoagow	K. Lakadjo.

Setelah para anggota KNI tersebut disahkan pengangkatannya, maka hari itu juga dilanjutkan dengan rapat pembentukan Badan Pekerja KNI Bolaang Mongondow. Badan ini dipilih oleh para anggota KNI di atas di antara mereka sendiri, yang susunannya adalah :

Ketua	: Zakaria Imban (PSII)
Wakil Ketua	: Johan Pontoh (PSI)
Anggota-anggota	: C.S. Gobel (PNI) A.A. Mokodompit (PSI) F.T. Manoppo (PSII) H. Tanta (PSI) B.A.M. Pandelaki (PSI) A.R. Gelu (Muhammadiyah) Hadjir Imban (PSII) M.T. Daun (PSII) B. Dodoali (SPK)

yang semuanya berjumlah 11 anggota.

Selesai pembentukan Badan Pekerja KNI, maka Badan itu langsung bersidang hari itu juga yang membicarakan tentang :

1. Sikap Pemerintah Daerah Gabungan, Dewan Raja-raja, dan DPR Gabung Bolaang Mongondow yang tidak sesuai dengan tuntutan perjuangan ke arah Negara Kesatuan RI sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945 ;
2. Struktur dan keadaan pemerintahan yang masih tetap mengikuti susunan ketatanegaraan NIT di mana Daerah Bolaang Mongondow termasuk dalam Daerah Sulawesi Utara (bersama Gorontalo dan Buol) sesuai Undang-undang Dasar Daerah Sulawesi Utara tanggal 19 Nopember 1948, yang disahkan oleh Residen Manado DR. Morison tanggal 25 Januari 1949 No. R 22/1/11 yang diberlakukan mulai 7 Pebruari 1949.

Sebagai hasil sidang Badan Pekerja di atas, maka dikeluarkanlah tiga resolusi yang pada dasarnya adalah :

1. Tuntutan membubarkan NIT dan segera menggabungkan diri dengan RI;
2. Tidak mengakui lagi adanya bentuk pemerintahan di bawah Dewan Raja-raja dan DPR Gabungan di mana DPR itu hanya memiliki hak memberi nasehat kepada pemerintah, dan merencanakan anggaran belanja daerah tersebut;
3. Tuntutan menghapuskan pemerintahan swapraja di seluruh Bolaang Mongondow. (Hadjir Imban, wawancara 17-9-1979).

Ketiga resolusi di atas disampaikan kepada Pemerintah Daerah Gabungan dan DPR Bolaang Mongondow.

Rentetan kesuksesan perjuangan politik di atas sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kekuatan militer yang didatangkan dari Minahasa. Dalam hal ini adalah LRRI pimpinan Komandan F.H.L.W. Mondong yang menugaskan kepada H.L. Kaligis membawa satu detasemen LRRI ke Bolaang Mongondow untuk membantu perjuangan pro RI di sana. H.L. Kaligis ini sebelumnya adalah Komandan LRRI Wilayah Daerah VII (Amurang dan sekitarnya) sebelum ia ditugaskan Mondong sebagai Komandan Detasemen LRRI Bolaang Mongondow. Ia bersama pasukannya berangkat ke Kotamobagu tanggal 3 Mei 1950 jam 20.00 dan tiba tanggal 4

Mei jam 06.00 pagi harinya. Beberapa hari sebelum mereka tiba, di Bolaang Mongondow terjadi kekacauan di mana pemuda pejuang merampas kekuasaan NIT tanggal 1 Mei 1950 tapi direbut kembali oleh Polisi NIT tanggal 4 Mei 1950. Para pemuda pejuang anggota SPERITBOM (Serikat Perjuangan Republik Indonesia Tanah Bolaang Mongondow) sebanyak 51 orang, ditangkap polisi dan dipenjarakan di Kotamobagu. SPERITBOM ini dipimpin oleh Julian Pinontoan, Max Eman, Joost Sarundajang dan kawan-kawannya. Dengan tibanya pasukan LRRI pimpinan H.L. Kaligis maka semua mereka dibebaskan kembali (Taulu dan Sepang, 1961).

Sebagai komandan pasukan maka H.L. Kaligis menyusun laporan kejadian secara kronologis sejak 4 - 7 Mei 1950 untuk dilaporkan kepada atasannya di Minahasa. Dengan bahasanya sendiri, laporan itu dikutip selengkapnya sebagai berikut (Taulu dan Sepang, 1961) :

LAPURAN KEJADIAN-KEJADIAN PADA 4 MEI 1950 DI KOTAMOBAGU.

Tanggal 3 Mei 1950 jam 20.00 dengan surat kuasa berangkat dari Amurang.

Tanggal 4 Mei jam 06.00 pagi tiba di Kotamobagu. Keadaan katjau.

Chabar Pemerintah ribut, banjak orang sudah lari tjari perlindungan, begitu tjerita-tjerita orang di rumahkopi2 dan toko2.

Djam 07.00 pagi, Komandan Pasukan H.L. Kaligis dan F.S. Liogu, menemui Wakil Radja dan Kepala Daerah, menanyakan keadaan keamanan.

Dari kemarin katjau (3 Mei) terdjadi tembak menembak, demikian kata Wakil Radja dan Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Radja menanyakan : apakah kedua mereka utusan APRIS, kedua anggota LRRI hanja mendjawab : Tuan-tuan mengertilah sendiri kenapa kami sampai datang bertanja-tanja, tentang keadaan keamanan.

Kepala Daerah lantas katakan : Mengerti, dan lapurkan terus bahwa oleh se-orang bernama J. Pinontoan, sudah direbutnja kekuasaan polisi dan bertindak sewenang-wenang sebagai suatu perampok.

Makanja Pemerintah sudah ambil tindakan membasminja, terjadi tembak-menembak antara polisi dan pemuda, menimbulkan kekatjauan, dan Pinontoan beserta pemuda-pemuda 51 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam pendjara. Status alat kekuasaan NIT masih ada djuga.

Pemuda-pemuda itu dilepaskan pada tanggal 5 Mei jam 12 tengah hari, menurut keadaan.

Sesudah mendengar laporan lisan dari Kepala Daerah dan Wakil Radja tentang terganggunja keamanan kemarin, dan persetudjuan-persetudjuan jang dibuat sedjak 1 Mei, maka Pimpinan LRRI mempersalahkan setjara siasat kepada Pemerintah dan Polisi jang tak sanggup mendjaga keamanan itu.

Oleh karena Pemerintah dan Polisi merasa bersalah dan mesti menanggung djawab, maka disiasatkan :

1. Memanggil Kepala Polisi tuan Davies dan Mantri Polisi tuan Hoellan menghadap, tuan-tuan nama segera menghadap.

2. Tuan tersebut lantas ditinjau, kenapa tidak dijaga keamanan seperti ini, tuan Davies menjahut : lantaran sakit, dan tuan Hoellan dikasih beberapa peringatan yang tentu menimbulkan perasaan bersalah dan bertanggung jawab.

Lantaran begitu, maka oleh rakjat yang ada didesak mereka tidak mau lagi keamanan ditanggung oleh bekas Polisi NIT.

Sebab itu, diichtiarkan untuk dapatkan satu kumpulan pemuda yang akan menerima senjata dari Polisi yang tak akan dipakai lagi sebagai Polisi RI pendjaga keamanan.

Suatu Panitia diminta bentuk, dan Panitia mana diusulkan terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan Kumpulan-kumpulan Sosial yang ada.

Beberapa wakil Partai mengusulkan pertemuan partai-partai sore jam 7. Sementara berbitjara untuk membentuk pemuda itu, maka disiasatkan memerintah itu tuan Davies buat menjuruh semua senjata didalam gudang, dikumpul, dengan sendirinya Polisi dilutjuti senjata dan alat kekuasaan NIT terlepas senjata, terkumpul. Tidak ada yang pegang senjata lagi.

Sementara dalam perundingan lagi seterusnya, tiba-tiba datang surat daftar pengakuan dari Polisi-polisi yang tak bersenjata lagi itu, untuk minta masuk Kasjkar Rakjat.

Penandatanganan surat daftar itu diusahakan oleh Saudara Pes Liogu dengan 3 orang bekas Polisi tempo hari yaitu : J. Kotambunan, N.E. Kaligis dan M. Walalangi.

Pada mulanya kejadian ini tidak diterima, tapi 2 detik kemudian diterima juga pengakuan mereka, dan dikeluarkanlah proklamasi pada jam 11.25 bunjinja :

1. Mulai jam 11.17 alat kekuasaan Negara Indonesia Timur Daerah Kotamobagu telah menjadi Lasjkar Rakjat.
2. Mulai jam yang tersebut pada pasal 1 maka keamanan itu ketenteraman didjaga dan dijamin oleh Lasjkar Rakjat.
3. Toko-toko dibuka dan mendjual biasa.
4. Diserukan kepada Rakjat supaya tetap tenang dan tenteram.
5. Barang siapa melanggar pengumuman ini, diambil tindakan keras.

Dikeluarkan di Kotamobagu pada jam 11.25 pada tanggal 4 mei 1950.

Komandan Putjuk Pimpinan LASJKAR RAKJAT RI
di Kotamobagu/Minahasa :

a.n.

(H.L. KALIGIS).

Sorenya dikeluarkan lagi suatu siaran kilat jang lain, berbunyi :

Berhubung dengan peristiwa alat kekuasaan NIT sudah berada ditangan Lasjkar Rakjat, maka diumumkan, bahwa :

- 1. Pemerintah tetap berdjalan seperti biasa.**
- 2. Rakjat lakukan kewadajiban sebagai biasa.**
- 3. Lain-lain ketentuan akan menjusul.**

Kotamobagu, 4 Mei 1950
Putjuk Pimpinan Lasjkar Rakjat
a.n.
(H.L. KALIGIS).

Pada sorenja tgl. 4 Mei djam 7 malam (19.00), 12 Partai-partai Politik dan Kumpulan-kumpulan Sosial berkumpul digedung pertemuan Kotamobagu dan berhasil membentuk satu panitia untuk memadjukan setjara berimbang pemuda-pemuda jang akan diterima djadi Polisi RI diberi nama Polisi Rakjat, banjaknja 41 orang, buat dilatih.

Setelah selesai pada djam 11 malam, Panitia jang terdiri dari wakil-wakil Rakjat memproklamirkan bahwa daerah Bolaang Mongondow itu, djadi bahagian dari RI Pusat Djokja.

Segera sesudah proklamasi djatuhnya alat kekuasaan NIT, pada djam 12 tengah hari Kepanduan PSII dan Muhammadiyah dan banjak sekali rakjat suatu Demonstrasi, ditaksir banjaknya jang turut 1500 orang dimuka kantor pemerintahan.

... Penerangan di Modajag dibuat sore tgl. 4 djam 4 sore ... besok harinya tgl. 5 Mei 1950, Polisi mulai dilatih oleh Lasjkar Rakjat.

Tanggal 5 djam 7 didengar pembijtaraan Telepon dengan Bung Damopolii bahwa Tentara dari Amurang jang terdiri dari Sdr. M. Eman dan J. Sarundajang, seperti pemimpin berdjalan menudju Kotamobagu dengan bersendjata, jang lebih dulu telah berbitjara dengan tuan Mokodompit, Kepala Daerah t/b Bolaang Mongondow.

Mendengar berita itu saja lantas djalankan penjelidikan dengan 1 djip dengan 1 tentara nama Mokodompit bersendjata 1 pistol mitraleur.

Ditengah djalan distop oleh 2 orang jang tak dikenal dan tak mengenal saja Kaligis, sambil bertanja dimana saja berada.

Keduanja diizinkan naik sama-sama dan menudju Inobonto ... dua orang pengintip tadi Lumowa dan Sondakh tertahan.

... Didjambatan Mogolaing (ditengah kota) bertemu dengan 2 djip dan 1 bus jang ditumpangi oleh tentara bersendjata 1 mitraleur 11 Karaben dan 4 pistol

Saja memerintah oto stop, lalu turun dan mengantjam orang jang memegang metraleur dengan pistol.

Sendjata dirampas lalu tiap-tiap orang jang memegang sendjata dalam keadaan siap diantjam dan dirampas sendjatanya. Semua tentara dan orang-orang lain diantaranya Abo Anton, Kepala Daerah Mokodompit dan Manteri Kehutanan, ditawan

Malamnja diadakan perondaan Kota sampai Modajag djam 10 ...

Tanggal 7 Mei 1950, Rapat Muhammadijah untuk pendjelasan tentang membentuk KNI yang terdiri dari wakil-wakil partai politik dan kumpulan-kumpulan sosial akan membentuk Schaduwbestuur, pada djam 3 sore.

Malam djam 8, wakil-wakil partai untuk pembentukan KNI dengan djalan tiap-tiap partai menguridjuk wakilnja setjara Radaran.

Wakil-wakil partai menjatakan kepertjajaan kepada Lasjkar Rakjat untuk menjamin keamanan. Setelah itu dibentuklah KNI Daerah Kotamobagu 51 anggotanya, yang dimadjukan oleh tiap-tiap partai politik dan kumpulan Sosial.

Kotamobagu, 7 Mei 1950

djam 11.30 malam

Jang melapurkan,

(H. L. KALIGIS)

Tuntutan yang datang dari semua partai politik dan organisasi massa termasuk pemuda di daerah Bolaang Mongondow, yang menuntut agar pemerintahan feodal dibubarkan dan agar dibentuk pemerintahan yang pro RI, keluar dari NIT dan penggabungan diri dengan RI yang berpusat di Yogyakarta, semakin lama semakin menghebat. Tuntutan dilakukan dalam bentuk demonstrasi demi demonstrasi dari hampir setiap organisasi perjuangan yang ada, di samping ada yang mengirimkan surat pernyataan, resolusi dan sebagainya.

Periode antara Mei sampai Juni 1950 di Bolaang Mongondow ditandai dengan perjuangan politik menuntut hal-hal yang disampaikan di atas. Alat-alat kekuasaan NIT yang lama tidak mampu berbuat apa-apa sebab disokong sepenuhnya oleh Detasemen LRRI pimpinan Komandan H.L. Kaligis yang berkedudukan di Kotamobagu. Sebagian besar bekas Polisi NIT sudah menyatakan diri menjadi Polisi Rakyat yang membantu perjuangan di atas sambil menjadi keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Salah satu di antara pernyataan tuntutan di atas dibuat oleh PSSI yang mengadakan Rapat Umum di Matali 11 Juni 1950. Mosi rapat umum itu dikirimkan tanggal 12 Juni kepada Komandan Detasemen LRRI Bolaang Mongondow H.L. Kaligis sebagai berikut (Taulu dan Sepang, 1961)

Molinow, 12 Djuni 1950

Kepala jang Terhormat,

Bapak Komandan Detasemen Lasjkar Rakjat RI

Bolaang Mongondow

di Kotamobagu.

SALAM MERDEKA !!!

Dengan banjak hormat, bersama ini dikirim kepada Bapak 3 (tiga) lembar mosi yang telah dibuat dan disusun sebagai yang tersebut dalam mosi yang kami kirim sesama ini.

Demikian pengirinan kami.

.....

M O S I

Rapat Umum Partai Sjarikat Islam Indonesia di Matali pada hari Ahad tanggal 11 Djuni 1950 dihadiri k.l. 1000 orang dengan seia-sekata telah menjusun seperti berikut :

- I. Mendengar uraian dan keterangan-keterangan Wakil KPI perihal tuntutan seluruh barisan Pemuda jang tergabung didalam KPI dalam demonstrasinya tanggal 7 Djuni 1950 agar supaya bentuk susunannya dan sifat-sifatnya pemerintahan ber-Radja (Landschap) didalam daerah ini segera harus di-hapuskan dan dirobah dengan bentuk susunannya dan sifat-sifat pemerintahan sesuai dengan tuntutan zaman merdeka dan hasrat rakjat jang njata.
- II. Menaruh kira bahwa tjara-tjara pemerintahan ber-Radja (Landschap) jang memakai adat beraneka warna diluar undang-undang jang tertulis, sudahlah dijadikan alat jang paling sakti oleh kaum pendjadjah untuk meneguhkan dan mengekalkan djadjahannya, dan oleh karena aturan adat jang beraneka warna dan bersifat karet itu dimana-mana dalam tanah air kita telah menimbulkan korban jang tidak sedikit dari pemimpin-pemimpin dan rakjat dalam menuntut kemerdekaan tanah air dan bangsa.
- III. Menimbang bahwa pemerintahn ber-Radja itu harus memerlukan perbelandjaan daerah sebesar-besarnya itu, jang hanja memberatkan beban pikulan rakjat, jang kini dalam tugasnya hendak mengisi kemerdekaan kita jang masih muda itu.
- IV. Menimbang bahwa Pemerintahan ber-Radja jang berazas turun-temurun itu, amat bertentangan dengan azas-azas demokrasi jang sedjati-sedjatinya.
- V. Menimbang lebih djauh bahwa radja-radja dalam lingkungan daerah ini dalam masa perobahan dan peralihan daerah ini meleburkan diri ke RI sebagai penjataan hasrat rakjat, tidak telah sesuaikan dirinya dan membuktikan sikap pendiriannya, sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakjat.
- VI. Menjatakan :
Menjetudjui dan menundjang sepenuh-penuhnya tuntutan KPI tersebut pada angkat I diatas.
- VII. Memutuskan :
Mendesak kepada Komite Nasional Indonesia (KNI) Bolaang Mongondow

selekas-lekasnja bertindak menghapuskan susunan Pemerintahan ber- Radja (feodaal) di daerah ini, dan menggantinya dengan susunan Pemerintahan baru, sesuai dengan azas-azas demokrasi alias hasrat keinginan rakjat.

VIII Mengirim mosi ini kepada :

1. Bapak Ketua Komite Nasional Indonesia Bolaang Mongondow
2. Bapak Kepala Daerah Bolaang Mongondow
3. Panitia Pusat Kesatuan Nasional Indonesia Makassar
4. Perdana Menteri RI Djokjakarta
5. Pers untuk disiarkan landjut
6. Bapak Komandan Detasement Lasjkar Rakjat Kotamobagu.

Matali, 11 Djuni. 1950

**Pimpinan Rapat Umum PSII
Pimpinan Ladjnah Afdeling PSII
Bolaang Mongondow.**

**Ketua muda,
(tttd)**

L. MOKOBOMBANG.

**Panitera II,
(tttd)**

M. BAMBELA.

Dengan membanjirnya tuntutan serta demonstrasi, maka KNI Bolaang Mongondow mengadakan sidang tanggal 19 Juni 1950 di Kotamobagu. Sidang pleno KNI itu dihadiri 42 anggota sedangkan 9 anggota tidak hadir. Acara sidang itu adalah :

1. Pembubaran Daerah Sulawesi Utara yang beribukota Gorontalo;
2. Membentuk Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yang terpisah dari Daerah Sulawesi Utara di atas;
3. Memilih Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sidang pleno KNI itu memutuskan penghapusan pemerintahan kerajaan (landschap) di seluruh daerah Bolaang Mongondow. Keputusan itu didasarkan pada pemungutan suara anggota di mana 41 suara setuju hapus dan satu suara tidak setuju. Selain itu, sidang memutuskan susunan pemerintahan daerah yang disebut Dewan Pemerintah Harian Daerah Bolaang Mongondow sebagai berikut :

Ketua : F.P. Mokodompit, yang juga sebagai Kepala Daerah

Anggota-anggota : 1. M.J. Manoppo
2. M.R. Manoppo.

Hasil-hasil keputusan sidang pleno KNI di atas segera disampaikan kepada Pemerintah Gabungan Bolaang Mongondow dan seluruh pemerintah swapraja (Landschap) yakni Kerajaan Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Bintauna dan Kaidipang Besar yang mulai saat itu dibubarkan.

Berdasarkan pada hasil keputusan sidang pleno KNI itu, maka Raja H.J.C. Manoppo selaku Kepala Pemerintahan Gabungan Bolaang Mongondow mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 1 Juli 1950. Dalam pengunduran diri itu ia memberikan pernyataan yakni guna menjaga keselamatan rakyat dan demi menjaga ketertiban dan keamanan rakyat daerah Bolaang Mongondow.

Menteri Dalam Negeri NIT Lanto Daeng Pasewang yang tiba di pelabuhan Inobonto dalam rangka kunjungan kerja ke daerah Bolaang Mongondow waktu itu, mengeluarkan pernyataan, bahwa pemerintahnya mengakui Pemerintahan di Bolaang Mongondow yang diangkat dan disahkan oleh KNI Bolaang Mongondow. Pernyataan itu dikeluarkan Pasewang tanggal 20 Juli 1950 di Inobonto.

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1950, KNI Bolaang Mongondow mengadakan sidang pleno di mana diputuskan untuk membubarkan diri, kecuali 11 anggota Badan Pekerja KNI yang ada yang dipimpin oleh Zakaria Imban sebagai Ketua. Badan Pekerja KNI yang beranggota 11 orang itu, kemudian ditetapkan sebagai DPR Sementara untuk Daerah Bolaang Mongondow. Dengan demikian, maka sejak saat itu yang menjalankan pemerintahan di sana adalah Dewan Pemerintah Harian (3 orang) yang diketuai oleh F.P. Mokodompit selaku Kepala Daerah, dan DPR Sementara (11 orang) yang dipimpin oleh Zakaria Imban selaku Ketua.

Sumber lainnya menambahkan bahwa DPR Sementara itu kemudian diperluas di tahun itu juga menjadi 13 orang dan terdiri atas empat fraksi yakni PSII (4 anggota), PNI (2 anggota), PARKINDO (2 anggota) dan MASYUMI (5 anggota) (Taulu dan Sepang, 1961).

VI. PENUTUP

Penjajahan berabad-abad lamanya yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat penguasaan kolonialis Belanda, hanya dalam waktu beberapa bulan saja diruntuhkan oleh Jepang di tahun 1942. Daerah Sulawesi Utara pada waktu itu dapat dikatakan sebagai yang pertama dilepaskan dari penjajahan Belanda, berhubung Jepang menguasai daerah ini mulai 11 Januari 1942, mendahului daerah-daerah lainnya di Indonesia. Resminya Penjajahan Belanda berakhir 8 Maret 1942 ketika Pemerintah Hindia Belanda menyerah dan berkapitulasi dengan Jepang. Sejak saat itu maka sampai tahun 1945, rakyat Indonesia telah mengalami masa yang paling berat di bawah telapak kaki kaum fasisme Jepang.

Dalam masa pendudukan Jepang, daerah ini di bawah kekuasaan Angkatan Laut (Kaigun) bersama-sama seluruh Indonesia Timur, termasuk Kalimantan, sementara Indonesia Barat diduduki oleh Rikugun (Angkatan Darat). Pemerintah pendudukan menjalankan program-program mereka dan bidang pemerintahan, pertahanan, perekonomian dan sebagainya, yang kesemuanya menuntut pengorbanan yang sebesar-besarnya dari rakyat. Di balik itu, rakyat memperoleh perlakuan yang tidak sewajarnya dari pihak pemerintah pendudukan, tanpa adanya penghargaan akan hak-hak azasi sebagai manusia. Namun hal itu perlahan-lahan berubah, sejalan dengan perkembangan di medan perang melawan Sekutu.

Rakyat mulai diberikan kesempatan ikut serta dalam pemerintahan daerah, dan akhirnya diberi janji bahwa akan diberikan kemerdekaan sesuai keputusan pemerintah pusat mereka di Tokyo. Hal ini rupanya hanya sebagai taktik belaka karena mereka berharap, dengan adanya janji itu, maka rakyat akan dibangkitkan semangatnya membantu Jepang melawan Sekutu. Janji dan kesempatan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan di atas, dipergunakan sebaik-baiknya oleh para tokoh nasionalis yang kelihatannya saja mau bekerjasama dengan Jepang, tetapi pada hakekatnya dipergunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat, untuk suatu ketika, merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

Dengan kesadaran ini, maka rakyat terutama para pemudanya, aktif mengikuti barisan-barisan sukarela yang dibentuk. Semakin mendekati kekalahannya, maka Jepang semakin berniat untuk memanfaatkan pemuda-pemuda itu bagi kepen-

tingan militer melawan Sekutu. Para pemuda mulai dipersenjatai serta diberikan latihan-latihan militer. Puncak segala maksud Jepang itu ialah dibentuknya pasukan yang di Minahasa disebut *Boo Ei Teisintai* di bawah seorang Komandan (*Daidanco*) orang Indonesia. Ketika terdengar berita bahwa pemerintah pusatnya sudah menyerah, maka tergesa-gesa orang-orang Jepang yang membenci Belanda itu masih mengadakan usaha untuk mengalihkan pemerintahan ketangan orang Indonesia serta membentuk pasukan seperlunya. Terbentuklah pemerintahan *Keresidenan Manado* di bawah Residen E.H.W. Pelengkahu dan Pasukan PETA di bawah *Hulubalang P.A. Tiendas*, sebagai wadah yang akan mengambil alih tugas-tugas dimaksud. Tapi kedua badan itu dapat dianggap sebagai wadah tanpa isi, berhubung ketika Jepang mengambil alih kembali kekuasaan kedua badan itu belum mampu berlutik untuk melawan.

Tetapi kaum nasionalis di daerah Sulawesi Utara tidak berputus asa. Mereka mengorganisir rakyat bukan lagi untuk melawan Jepang yang sudah dikalahkan Sekutu, tetapi untuk melawan Belanda yang akan datang bersama tentara Sekutu sebagai pemenang perang. Merasa bahwa haknya dirampas secara paksa oleh Jepang, maka Belanda kembali lagi untuk mendirikan pemerintahan seperti sebelum pecahnya perang. Tapi rakyat di daerah ini tidak sudi begitu saja mengakui pemerintahan penjajah Belanda itu, karena sejak 17 Agustus 1945 sudah memiliki pemerintahan sendiri yakni Pemerintahan Republik Indonesia.

Menghadapi kenyataan ini maka Belanda berusaha memecah belah rakyat dan tanah air Indonesia untuk mengaburkan arti proklamasi kemerdekaannya. Dibentuklah sejumlah negara boneka untuk merongrong kesatuan dan persatuan yang telah dimiliki seluruh rakyat Indonesia di mana daerah Sulawesi Utara dimasukkan dalam wilayah NIT. Pergolakan dan pergulatan politik menghebat sebagai reaksi rakyat, ditunjang sepenuhnya oleh kekuatan senjata seadanya yang dimiliki tetapi dijiwai oleh semangat juang yang tinggi untuk menghancurkan Belanda, menghancurkan NIT serta mempersatukan diri dengan Republik Indonesia sesuai jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Pada akhirnya, walaupun dengan meminta pengorbanan yang amat besar, hasrat rakyat untuk bersatu dan memerintah sesuai jiwa proklamasi di atas, dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Belanda terpaksa mengakui keunggulan kita dan mau mengakui kedaulatan negara kita. Tapi bagi rakyat di daerah Sulawesi Utara, perjuangan terus dilanjutkan untuk menghalau sisa-sisa kekuatan kolonial berupa KNIL, KL, KM serta kekuatan administrasi kolonial yang masih tetap mau bercokol di daerah ini. Perjuangan itupun akhirnya berhasil sehingga sejak 17 Agustus 1950, daerah ini bersama-sama dengan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, membentuk satu wadah kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai cita-cita Proklamasi di atas.

Generasi yang sekarang perlu mengetahui jalan dan jalinan peristiwa di atas, untuk diwariskan jiwa dan semangatnya kepada generasi yang akan datang. Tepatlah kata salah seorang tokoh kita yakni Prof. Ahmad Subardjo *Djojoadisurjo*, bahwa "sejarah revolusi Indonesia berdasarkan sumber-sumber Indonesia sendiri, masih harus ditulis".

GLOSARIUM.

alabadiri,	salah satu jenis tarian di daerah Sangir Talaud.
ampa wayer,	salah satu jenis tarian di daerah Sangir Talaud.
ampuang,	pemimpin upacara religis magis menurut kepercayaan lama orang Sangir Talaud
balacae,	sejenis tanaman jarak yang bijinya mengandung minyak dan dapat dibakar sebagai lampu
bengko,	salah satu jenis tarian rakyat yang terdapat di Sangir Talaud.
bete talaud,	sejenis tanaman ubi talas yang banyak terdapat di daerah Sangir Talaud, di masa Jepang terpaksa dimakan berhubung kekurangan bahan pangan.
Bogodang,	barisan pemuda di Minahasa yang diorganisir Jepang yang kemudiannya menjadi Keibodan.
bolian,	pemimpin upacara religis magis menurut kepercayaan lama orang Bolaang Mongondow
Dangisah,	salah satu jenis tarian di daerah Bolaang Mongondow
dembulo,	salah satu bentuk kerja sama menurut adat di daerah Gorontalo dalam bentuk bantuan atau sumbangan bagi keluarga yang berduka
giliran,	istilah untuk pengerahan romusya di daerah Minahasa dan Bolaang Mongondow di masa Jepang
gunde,	salah satu jenis tarian rakyat di daerah Sangir Talaud
Hukum Besar,	istilah untuk jabatan Wedana atau Kepala Distrik di Minahasa.
Hukum Kedua,	istilah untuk jabatan Asisten Wedana di Minahasa yang sekarang ini setingkat Camat
Hukum Tua,	istilah untuk jabatan Kepala Desa atau Lurah di Minahasa (sampai sekarang masih dipakai)
hulobalangi,	kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan gaib dan sakti menurut kepercayaan lama orang Gorontalo.
Hulubalang,	istilah jabatan yang dipergunakan oleh PPI (Pasukan Pemuda Indonesia) di Minahasa
Hulubalang Besar,	istilah jabatan untuk Pemimpin tertinggi PPI di Minahasa
husaro,	sejenis tarian di Bolaang Mongondow terutama di Kerajaan Bintauna
ilopateya,	istilah di Gorontalo untuk keluarga di mana ada seorang yang meninggal dunia
Jaga,	istilah pemerintahan desa di Minahasa yang merupakan wilayah administratif yang lebih kecil dari desa (sebuah desa terdiri atas beberapa Jaga)
jiyuu,	istilah Jepang untuk "otonomi" yang ditawarkan kepada KTR dan BPPKI
Jogugu,	di Bolaang Mongondow khususnya untuk Kerajaan Bolaang Mongondow, merupakan jabatan tertinggi sesudah Raja

	di Gorontalo dahulu merupakan jabatan untuk Kepala Distrik yang kemudian dihapuskan dan diganti dengan istilah Marsaoleh (kira-kira setingkat Asisten Wedana, atau Camat sekarang ini)
joke,	di Sangir Talaud merupakan istilah jabatan untuk Kepala Distrik sejenis tarian di daerah Bolaang - Mongondow
jumbo,	barisan pemuda pembantu polisi masa Jepang di daerah Sangir Talaud
Kapten Laut,	istilah untuk jabatan Kepala Desa atau Lurah di daerah Sangir Talaud
Kepala Jaga,	istilah untuk jabatan kepala salah satu wilayah administratif pemerintahan desa di Minahasa (lihat Jaga di atas)
kipas,	Salah satu jenis tarian rakyat yang merupakan tarian adat di Sangir Talaud khususnya di daerah Talaud.
Kishman,	Wakil pilihan rakyat per desa dalam sistem bertingkat di daerah Sangir Talaud dalam rangka memilih dua orang wakil daerah itu untuk mengikuti konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh NIT dan seterusnya untuk duduk sebagai anggota Parlemen NIT mewakili daerah tersebut.
langika,	sejenis pohon kayu yang kulitnya dipakai sebagai bahan pencuci (sabun) oleh rakyat di daerah Sangir Talaud di masa Jepang berhubung sangat kekurangan bahan tersebut.
lenso,	sejenis tarian adat di Sangir Talaud khususnya di daerah Talaud
logantod,	salah satu alat dan jenis seni musik di daerah Bolaang Mongondow
lolibag,	salah satu alat dan jenis seni musik di daerah Bolaang Mongondow
lologga,	pakaian adat di daerah Talaud yang ditenun dari serat manila (manila hennep), serat daun nenas, serta benang kapas, yang dibuat di masa Jepang yang merupakan salah satu hasil seni kriya rakyat daerah itu.
londe,	salah satu jenis perahu bercadik di daerah Sangir Talaud
maengket,	salah satu jenis tarian rakyat di Minahasa
maeru-erur,	salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Minahasa pada waktu kematian
mapalus,	salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong untuk mendirikan rumah, mengerjakan kebun, bahkan arisan uang dan sebagainya yang hidup di kalangan orang Minahasa.
marambak,	salah satu bagian dari tarian maengket yang hidup di kalangan orang Minahasa.
Marsaoleh,	di Bolaang Mongondow merupakan istilah untuk jabatan kira-kira setingkat Asisten Wedana khususnya di Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bolaang Uki, yang kemudian diganti dengan istilah jabatan KPN (Kepala Pemerintahan Negeri) dan sekarang menjadi Camat di Gorontalo merupakan

	istilah untuk jabatan setingkat Asisten Wedana atau Camat sekarang ini.
masiroki,	salah satu jenis tarian rakyat yang muncul dalam masa Jepang di daerah Sangir Talaud
Mayor Kadato,	istilah untuk jabatan setingkat Asisten Wedana di Bolaang Mongondow khususnya untuk Kerajaan Bolaang Mongondow
Meweteng,	istilah untuk jabatan pembantu Kepala Jaga di Minahasa dan termasuk pamong desa
mobarajanji,	salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
mododuluan,	salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Bolaang Mongondow
mohuyula,	salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Gorontalo.
mojongge,	salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
molinggolo,	salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
momalebohu,	salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
motolohuta,	kepercayaan lama kepada adanya makhluk halus yang dianut oleh orang Gorontalo
motutulungia,	salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Gorontalo
pakadanga,	salah satu bentuk seni budaya di Gorontalo
panggoba,	istilah untuk pemimpin upacara religis magis di Gorontalo
pelang,	salah satu jenis perahu bercadik di Sangir Talaud
Penghulu,	istilah untuk jabatan Kepala Distrik di daerah Bolaang Mongondow
pogogutat,	salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Bolaang Mongondow
posad,	salah satu bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di Bolaang Mongondow
ransasahabe,	salah satu jenis tarian rakyat di daerah Sangir Talaud
Renraquin,	istilah Jepang untuk jabatan Wakil Raja yang dipergunakan selama masa pendudukan Jepang di daerah Bolaang Mongondow
ronggeng,	salah satu jenis tarian rakyat di daerah Sangir Talaud
salo,	salah satu jenis tarian rakyat di Sangir Talaud
Sangadi,	istilah untuk jabatan Kepala Desa atau Lurah di daerah Bolaang Mongondow
sumisil,	salah satu istilah di Minahasa dalam hal kesenian berceritera (ceritera rakyat)
talenga,	istilah untuk pemimpin upacara magis religis di daerah Gorontalo
tanam padi,	salah satu jenis tarian adat di Sangir Talaud khususnya di daerah Talaud
Tawudaa,	istilah untuk jabatan Kepala Desa atau Lurah di Gorontalo, yang sekarang diganti dengan istilah Ayahanda
tolibag,	salah satu jenis dan alat seni musik di daerah Bolaang Mongondow

tonaas,	istilah untuk dukun pemimpin upacara relegis magis di Minahasa
tonggobi,	salah satu jenis seni budaya di Gorontalo
totampit,	salah satu jenis dan alat seni musik di daerah Bolaang Mongondow
Uduluwo lou limo lo Pohalaa	istilah di daerah Gorontalo untuk menjelaskan tentang ikatan persaudaraan rakyat kerajaan-kerajaan mulai ketika masih dua kerajaan hingga jadi lima kerajaan yang berserikat; dua kerajaan pertama yang dimaksud adalah Kerajaan Suwawa-Bone dan Kerajaan Limboto, lalu menjadi lima yakni Kerajaan Suwawa, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Tapa, Kerajaan Limboto dan Kerajaan Atinggola.
ungalaa,	istilah di Gorontalo untuk lingkungan keluarga luas (extended family)
upase,	salah satu jenis tarian rakyat di Sangir Talaud.

DAFTAR KATA

A

Abas, Saerah
 Abdul Madjid
 Achmad
 Adariku, Ali
 Hamzah
 Adventis
 Aer, Willem
 Akademi Militer Breda Tondano
 Alabadiri, tari
 Algemeene Politie
 Alhasni, Sagaf
 Ali, Mohamad
 Maniko
 ALS
 AMI (Angkatan Muda Indonesia)
 Amiman, Jafet
 AMS
 Amu, Abdullah
 Andu, dr. A.B.
 Anes, L
 An
 Anes N
 Aniesz A.J.
 API (Angkatan Pemuda Indonesia)
 APRI (Angkatan Pemuda Republik Indonesia)
 APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia)
 APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat)
 Arbie, Djafar
 Atom A
 Azakawa
 Az Zakirat, Taman Pendidikan

B

Baarsel, Letkol van
 Bachari, Ahmad
 Badan Pekerja Proto Sinode
 Badan Pengurus Sinode GMIBM

Badan Proto Sinode
 Badjeber, Hasan
 Bailang
 balacae
 Bala Keselamatan
 Bambela M
 Bambu (musik)
 Bambu klarinet (musik)
 BAPRI (Barisan Pemuda Republik Indonesia)
 Baramuli SH,
 Batalyon 3 Mei
 Batalyon Worang
 Basalama, Umar
 Basumbul, Said
 Bawengan, GW
 Bawoleh, Ibu F
 Beel, DR. L.J.M.
 Beel, Rencana
 Beikokubu
 Bengko (tari)
 Beo
 Berita Gereja, bulanan
 BFO
 Bidja
 Bija
 Bijai, Fin
 Bimoli, PT
 Binilang, Th
 Bisman, F
 Blom, Kapten
 BNI (Barisan Nasional Indonesia)
 Bogar P
 Bogodang
 Bokings, George
 Bokings H.M.
 Bolang F
 Bolian
 Bone, Sun
 Boo Ei Teisintai

Boon, Mr
 BPNI (Barisan Pemuda Nasional Indonesia)
 BPPI (Balai Pendidikan dan Pengajaran
 Islamiyah)
 BPPKI (Badan Persiapan Pemerintahan
 Kemerdekaan Indonesia)
 Menado Syu
 BRRI (Barisan Revolusioner Rakyat
 Indonesia)
 Buchary A
 Bujung R.E.S.
 Bukit, PT
 Buluati M H
 Bunga, Hasan
 Bungalowang
 Burger, Controleur

C

Cahaya Merdeka, harian
 Cahaya Siang, harian
 Canon M
 Catapult, harian
 Ceinola, Nico
 Cipinang
 CKS (Corps Kebangsaan Sukarela)
 Cogo Cugakko
 Colson, letkol
 Comite van Initiatief
 CONICA
 Couper, R
 CP (Corps Pelajar)
 Czesco, dr. G

D

Daerah Sulawesi Utara
 Dahlan, R.M.A.
 Damopolii, A.B.
 Damopolii J.F.K.
 Dancona, Controleur
 Dangisah, (tari)
 Darondo A
 Datau, A.I. Ismail
 Datunsolang, A.M.
 Dauhan G.E.

Daun,
 Saridin
 Delegasi Belanda
 Delegasi Indonesia
 Delegasi Sekutu
 Dembulu
 Dendeng F
 Dengah, E.D.
 Denpasar, Konperensi
 Detu, H
 Dewan Gorontalo
 Dewan Minahasa Sementara
 Dewan Musyawarah Rakyat
 Sulawesi Utara
 Dewan Pemerintah Harian Bolaang
 Mongondow
 Dewan Raja-raja
 Dewan Sangir Talaud, (Sulawesi
 Utara)
 Dhanupojo, R.M. Kusno
 Dhanuwatijo, R.M.
 Dilapanga
 Djaafara, Anwar
 Djafara, Salma
 Djakaria
 Dolot, M.A.
 Dotulong, Gunco

E

Elias, H.B.
 El Libertador, MV
 Eman, Max
 Emden, Letnan van
 Emor, Sersan
 Ensleigh, Robert
 Exile government

F

Felix, Controleur
 FKRI (Front Kesatuan Republik
 Indonesia)
 Fujinkai
 Fukugun (Kecamatan)
 Fukugunco (Camat)

G

Gabungan Bolaang Mongondow
Gagola, Kapten
GAPI (Gabungan Politik Indonesia)
GAPKI (Gabungan Persatuan-persatuan
Kemerdekaan Republik Indonesia)
GAPRI BOM (Gabungan Perjuangan
Republik Indonesia Bolmong)
Gelora Masa, harian
Gelu, A.R.
GEPNIS (Gerakan Pembangunan
Indonesia Serikat)
Gerakan, harian
Gerakan Tiga A
GERKINDO (Gerakan Kebangsaan
Indonesia)
Gereja Pantekosta Indonesia
Gerungan D.A.Th
Gerungan F
Giebel, Kolonel
Gilalong, B
Giliran
GIM (Gerakan Indonesia Merdeka)
Girian
GMIBM (Gereja Masehi Injili Bolaang
Mongondow)
GMIM (Gereja Masehi Injili Minahasa)
GMIST (Gereja Masehi Injili Sangir Talaud)
Gobel, A.R. van
Gobol A.H.
Gonibala, Nurtina
Gosal, Kajang
GPI (Gereja Protestan Indonesia)
GRIT (Gerakan Republik Indonesia Timur)
Gun (Distrik)
Gunco (Kepala Distrik)
Gunde, (tari)
Guru, majalah

H

Habibie, Kadir
Hadju B
Usman
Hamanaka, K

Hamazaki, Ds
Harahap, Parada
Hara Si Seikan
Harirustaman, Erman
Harun, Antu
HBS
Hebingadil
Het Copra Fonds
Hidajat SH
Hippy Azis
Hirano
Hirschman A
Hizbul Wathon
Hoofdenbond
Horinte, Letkol
Horiuchi, letkol
Hulobalangi
Hulubalang
Hulubalang Besar
Hulukati, Ali
Humuro
Husaro, (tari)

I

Iamu, M.T.
Ibrahim Mohammad
Idrus, Kapten
Ikrar Pemuda
Ilahude A
Abudi
Ibrahim
Hamzah
Iloilo
Ilopataya
Imban, Hadjir
Zakaria
Indische Kerk
Indonesia Muda
Inimexintra, PT
Insyaf, mingguan
Intama, F
Ipilo
Item

J

Jacobs, W.Ph
 Jaga
 Jalaluddin
 Jasin, Idrak
 Jiyuu (otonomi)
 Jocom,
 Jogugu
 Johannes SH, E.D.
 Joke, (tari)
 Jumbo
 Junus, A

K
 Kabila
 Kadulla, B.J.
 Kaeng, H.S.
 Kaigun
 Kaigun Heiho
 Kai In Yooseiso
 Kaindeh, J
 Kairupan, F
 Kalawiran
 Kalengkongan, J.A.P.
 Kaligis, H.L.
 Kaligis, Jootje
 Kamagi, Max
 Kambey, F.Th
 Kandou E
 Kansil E
 Jerit
 L.M.
 Meyers
 W.A.
 Kapten Laut
 Karamoy, Boas
 Karinda, J
 Kartawinata, M.D.
 Kaseger, E.V.
 J. Kapten
 Katili, H
 Kato
 Katoppo E
 Kawilarang, D
 Kebenaran, mingguan

Kedju, Nusi
 Keibodan
 Keimin Bunka Syidosyo
 Kembali
 Kemudi, mingguan
 Keng Hoa Poo, harian
 Kenkanrikan
 KERWANI (Kerukunan Wanita Indonesia)
 Kesatuan, harian
 Kesatuan Kerajaan, mingguan
 KGPM (Kerapatan Gereja Protestan
 Minahasa)
 Kilat, mingguan
 KIM (Kepanduan Indonesia Merdeka)
 KIM, NV
 Kindangan, I
 Rens
 Kinolotagan
 Kinosita
 Kinrohosi
 Kipas (tari)
 Kishman
 Kita, mingguan
 KL
 KMB
 KNI (Komite Nasional Indonesia)
 KNIL
 KNS (Komite Nasional Siau)
 Koagouw, P.G.
 Kodama
 Kodomo Shinbun
 Kolintang, musik
 Kolopita, Pendeta L
 Komando Wilayah Daerah
 Kombo, P.U.
 Komisariat Negara
 Komisariat Negara SUMU (Sulawesi
 Utara Maluku Utara)
 Komisaris Negara
 Komisi Sekutu
 Komite Dua Belas
 Nasional Daerah
 Sembilan
 Kongres Pemuda

Koo Gakko
 Korah, Frans
 Korompis, Dina
 Korompot, Donggala
 Kortverbanders
 Kotambunan, Jus
 Willy
 Kotamobagu
 KPM (Kesatuan Pemuda Masehi)
 KPN (Kepala Pemerintahan Negeri)
 Krijgsraad te Velde van Makassar te Manado
 KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sosialis)

Kullit, G.B.
 Kurnaunang, J
 Kumawus
 Kumendong H
 Kumico
 Kumontoy, Eddy
 F.W.
 Jonky
 Kuno
 Kusoy, Sersan
 KWAMIST (Kaum Wanita Masehi Sangir
 Talaud)
 Kwandang
 Kyooiin Kanri Yooseisyo

L

Labaeng, Salmon
 Labaika, H.H. Waworuntu
 Lahunduitan
 Lalamantik, A.J.
 Lalisang, Ibu F. Pasandaran
 Lamadilalo, Ibu
 Langendonk, Mr
 Langeveld, Pendeta J.M.
 Langeverbanders
 langika
 Langowan
 Lapien B.W.
 Lapien, Sersan
 Lasut, R.C.L, W.G.A.

Larekeng, Amin
 Azis
 Latuperissa, Kapten
 Leeuw, de
 Legoh, H.M.L.
 Lekangpondang
 Lelengboto, J.L.S.
 Lembaga Kesehatan GMIM
 Lengkong, J
 Lenso, (tari)
 Leur, Kapten van
 Lewu, A.E.
 LFP (Laskar Front Pemuda)
 Lie Beng Tiok
 Linu, A
 Liogu, Alex
 Liotohe, Anton
 Locher, ds
 Logantod
 Lolibag
 Lologga
 Lolombulan H
 Londe, perahu
 Longdong R
 LRRi (Laskar Rakyat Republik
 Indonesia)

Luckey
 Lukisan Masyarakat, bulanan
 Lumentah, Ton
 Lumingas, Letnan R
 Lumingkewas, J
 Lumowa A
 Luna, SS
 Lutheyn, A.I.

M

Macpal, K.J.L.
 Madrasah Muhammadiyah
 maengket (tari)
 Maengkon, G.A.
 Maeru-erur
 Mait, Sem
 Majelis Dewan Gorontalo
 MAK (Majelis Agama-agama Kristen)

Makagiansar, Ibu S
 Makalehi
 Makasar
 Maleke, W.H.
 Malino, konperensi
 Maluku Utara
 Mamahit, Butje
 Mamansage, M
 Mamusung Jus
 Manangka, Sam
 Mandey
 Mangindaan A
 Mangowal J.U.
 Manoppo, A.C.
 Mapalus
 Mapanget
 Marambak (tari)
 Marle, letkol J. van
 Marsaoleh
 Masengi, Andi
 Masiroki (tari)
 Massie, John
 Masyumi
 Matahari Terbit, harian
 Matsuda
 Matulandi, Ben
 Mawikere, Jan
 Mawuntu, O
 MBP (Majelis Badan Pekerja)
 Menara, harian
 Mende, S
 Merdeka, harian
 Methusala, Jan M
 Mewengkang L.J.
 Meweteng
 Mi Hari In
 Minahassische Protestant de Kerk
 Misi
 Mobarajanji
 Mododuluan
 Mogot, Gunco
 Mohede A.J.
 Mohuyula
 Mokobombang

Gilly
 Hasima
 Hatidah
 Mokodenseho C.P.
 Mokodompit F.P.
 Mokodongan, Pen
 Mokoginta, A.U.
 Molibagu
 Molinggolo
 Molinow
 Momalebohu
 Momongan
 Mondong, F.H.L.W.
 Mondong S
 Mongula J.P.
 Moninka
 Monoarfa, Ari
 Mononutu, Arnold
 Mooduto, Nain
 Mook, DR. H.J. van
 Morisan, DR
 Morotai
 Motoboi Kecil
 Motolohuta
 Motutulungiya
 Muhamad, Ibrahim
 Muhammadiyah
 Muir, Letkol
 MULO
 Muntu, Arie
 Mustafa, H.M.S.
 Mustir, A.H.
 Musu J
 Myahara dr

N

Najoran F.A.
 Nakamura
 Nanlohy, Lettu
 Nantaibo
 Nantaku
 Nantoibo
 NEFIS
 Nento, A

Nesin, Eki
 Ngantung, Gusta
 Ngasa, Donggeng Daeng
 NICA
 NIGEO, NV
 NIS
 NIT
 Nippon Go Gakko
 NOCEMO, NV
 Noogy Teisintai
 Noomin Dooyoo
 Nues, Mayor
 Nusakambangan
 NZG (Nederland Zending Genootschap)

O

Oberman, Residen J
 Oflagi, Junus
 Ointu A.R.
 Olii, Junus
 Omhoog, harian
 O'Malley
 Ondong
 Ontoraël, Gotfried

P

Paat, Louis
 Pade, Adam
 Pakadanga
 Pakaja O.N.
 Pakasi, Alex
 PAKSU (Persatuan Agama-Agama
 Kristen Sulawesi Utara)
 Palamani J
 Panamon, Karel
 Pandegiroth J
 Pandeiroth P
 Pandelaki B.A.M.
 Pandji Negara, mingguan
 Pangalila, Wim
 Pangemanan A
 Panggoba
 Pangulimang, Ibu A. Elias
 Panigoro S

Panis, Uskup
 Panitia Proto Sinode
 Paparang, L.N.
 Para
 Parengkuan E.A.
 PARI (Partai Republik Indonesia)
 PARINDRA (Partai Indonesia Raya)
 PARKINDO (Partai Kristen Indonesia)
 Partai Katolik
 Pasandaran, H
 Pasukan Bakti Tani
 Gerilya Morotai
 Mondong
 Pemuda Kakas
 PTA
 PDRI
 Pedoman Tani, bulanan
 Pelang, perahu
 Pelealu M.W.
 Pelengkahu E.H.W.
 Pelita, harian
 PELNI
 PEMAKAT (Persatuan Masyarakat
 Katolik)
 Pemakat, mingguan
 Pemuda, bulanan
 Pereira, Kolonel
 PERGINDO (Persatuan Guru
 Indonesia)
 PERINDO, PT
 PERPIBOM (Persatuan Pegawai
 Indonesia Bolaang Mongondow,
 PERSIT KCK
 PERTIWI
 PERWANIS (Persatuan Wanita
 Indonesia Siau)
 PEWARI (Persatuan Wanita Republik
 Indonesia)
 Piay, Jan
 Piet Hein, kapal perang
 PIM (Persatuan Indonesia Muda)
 Pimpi
 Pinkster Beweging
 Gemeente

Pinontoan, Julian
 PIR (Partai Indonesia Raya)
 PIRASAT (Persatuan Rakyat Sangir
 Talaud)
 PISO (Pemoeda Indonesia Soelawesi
 Oetara)
 Pitoy J.P.
 PKI
 PKR (Pasukan Keamanan Rakyat)
 PNI
 Pogogutat
 Polii, Jeppy
 Podos
 Ponto, C
 Pontoh, Ch
 PooE, Ibrahim
 PPI Laskar Banteng (Pasukan Pemuda
 Indonesia)

PPK (Pasukan Pemuda Kakas)
 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
 Indonesia) Menado Syu
 PPP (Pasukan Pemuda Pejuang = P-3)
 PPPG (Pucuk Pimpinan Pemerintahan
 Gorontalo)
 PPPPPP (P-7 = Pasukan Pemuda
 Pemudi Pejuang)

Pembanteras Pergerakan Penjajahan)
 Prijosudarmo, Sunandar
 PSI (Partai Sosialis Indonesia)
 PSII

PTT (Pos Telegrap Telepon)

Pua, Alex
 PUSM (Pengurus Umum Sekolah Masehi)
 Pusung J
 PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)

R

RAAF (Royal Australian Air Force)
 Rahasia, John
 Rampisela E
 Rangkaian Pemuda, majalah
 Ransasahabe, (tari)
 Rapi, Aba
 Ratulangi, DR. G.S.S.J.

Ratumbusang, dr. V.L.
 Raupu, A.H.
 Rawung, Sersan
 RC (Reserve Corps)
 Rekso Suryo, Badan Pendidikan
 Renrakuin
 Rensei Koosyuukai
 Rey, Jo
 Rikugun
 Rikugun Heiho
 RIS
 RIT (Republik Indonesia Timur)
 RK (Roma Katolik)
 RK Missie
 Rombot, A.S.
 Rombot J
 Rompis A
 Romusya
 Ronggeng (tari)
 Rooy, Kolonel de
 Rorimpandey R
 Rotinsulu M
 Rumajar N.Th.
 Rumambi, Ds. W.J.
 Runtu, H.J.
 Runtukahu J.M.
 Runtunuwu F
 Rusman
 Ruyter, Coomans de
 Ryoomintai

S

Sabu, dr. John
 Sadikin, Djamaluddin
 Saerang, I.F.
 Safar, H
 Sagay, F
 Sahelangi, Arie
 Salasa, Piet
 Salindeho, F
 Salo (tari)
 Salola, Ishak
 Sambouw, Raun
 Sambuaga, J

Sangadi
 Sanger F (Eddy)
 Sangkaen, Goan
 Sarapil, W.A.
 Sarundajang J
 Saurongko (tari)
 Sebentar, Adeleide
 Seinendah
 Seinentai
 Sekolah Kanri
 Sendenbu
 Senduk, Cons
 SERBIBOM (Serikat Buruh Indonesia
 Bolaang Mongondow)
 Seretan
 Shikiobu
 Sho Gakko
 Siasat, harian
 Sigarlaki, A.A.
 SIKAT (SIAP Kaum Tukang)
 Silangen W.H.
 SKG (Sekolah Kepandaian Gadis)
 SMI (Sekolah Menengah Islam)
 SMRK (Sekolah Menengah Rendah
 Kebangsaan)
 SMU (Sekolah Menengah Umum)
 SPERITBOM (Serikat Perjuangan
 Republik Indonesia Tanah Bolaang
 Mongondow)
 SPK (Serikat Pegawai Kesehatan)
 SU
 Suara Indonesia Muda, harian
 Suara Minahasa, mingguan
 Nasional
 Pemuda, harian
 Pikat, bulanan
 PISO, harian
 Rakyat, mingguan
 Sudiro
 Sugondo, M
 Sukamiskin
 Sukarni, Agust
 Suling, E.P.
 Sumampouw, B

Sumanti, W.F.
 Sumarauw, G.
 Sumeleh B
 Sumisil
 Suparmin
 Supit, A
 Supit, J.M.L.
 Karel
 Lusje
 Wuli
 Suwawa

T

Tagulandang
 Tahuna
 Taico
 Takamoto
 Takasaki, letkol
 Talaud
 Talenga
 Talumikir Ch
 Tamaka, Theodora
 Tamalawe A.L.
 Taman Ibu, majalah
 Tampemawa E
 Tanam padi, (tari)
 Tangahu A.H.
 Tangkilisan, Maas P.M.
 Tangkudung
 Tangsi Hitam
 Tan Ing Hwa
 Tanod, A.S.
 Tanoyan
 Tarib, A.H.
 Tasuka
 Tatengekeng, G
 Taulu, Ch.Ch.
 Tawaang
 Ternate, keresidenan
 Terok, J.B.
 Tewu, Gerzon
 The Sing Hoo SH
 Tiendas, P.A.
 TIM (Tentara Indonesia Merdeka)

Tinangon H.J.D.
 Tindas, P.A.
 Tinumbia M.A.
 Tirie, Pendeta N.S.
 TNI (Tentara Nasional Indonesia)
 Tokeitai
 Tokubetsutai
 Toleba, Daeng
 Tolibag
 Tolotio
 Tombeng, Bus
 Tomohon
 Tomohon Syihan Gakko
 Tonaas
 Torndano
 Cuu Gakko
 Yooseisyo
 Tonsealama
 Tooko Gakuen
 Tooy J.P.
 Totampit
 Toyobo
 TRI (Tentara Republik Indonesia)
 TRISU (Tentara Republik Indonesia
 Sulawesi Utara)
 TRM (Tentara Rela Mati)
 Tugu Persahabatan Nederland Minahasa
 Tuju F
 Tujuwale A
 Tular J.H.
 Tulende F
 Tumbel M.B.
 Tumbelaka F.J.
 Tumonggor
 Tumu, A
 Twaalfde Provincie
 TWAPRO

U

Udukuwo lou limo lo pohalaa
 Ulu Siau
 Umar Muhammad
 Ungalaa
 Unicotin Ltd., PT

Uno, A
 Upase (tari)
 UPI (United Press International)
 Usman, A.B.
 Utusan, harian
 Usu, A.G.

V.

VC (Vernieling Corps)
 Veldkamp, Mr
 Veld politie
 Verhagen, Mr
 Verwajen, Letnan
 Vlucht, Mr. A.C. van der
 Volkschool
 Volks Onderwijs
 Vries, Letkol de

W

Wagey, E
 Wajong, J
 Wala, Ch
 Walalangi A.J.
 Walewangko J
 Waney, Wim
 Wangkay S.B.
 Wangko Remba Talasa
 Wantalangi J
 Wardojo, dr. R
 Warikki, O
 Warouw, C
 Gustaaf
 Wartabone, Ajuba
 Wartabone, Nani
 Watuseke
 Waworuntu, Jolli
 Weekblad Manguni, Mingguan
 Wenas, Ds. A.Z.R.
 Wensen, O
 Westerbeek, Karel
 Wilayah Besar
 Wilson, Mayor
 Wirjopranoto, Subardjo
 Wondal, D
 Karel

Wongkar F
Wong Pai Sau
Worang, H.V
Worek J
Wori
Wovor, Ben
Gerrit
Wuaten L
Wuisan, S.D.
Wulauwan Tondano

Y

Yayasan Al Ikhsan
Eben Haezer
Pendidikan Kebangsaan
PIKAT
Tabita
YKRST (Yayasan Kelapa Rakyat Sangir Talaud)
Yok Chae School
Yunomura

Z

Zending
Zulhadji, W.A.

PETA SULAWESI UTARA
Skala 1 : 2.500.000

Kota-kota

1. Manado
2. Bitung
3. Tondano
4. Tomohon
5. Amurang
6. Kotamobagu
7. Inobonto
8. Molibagu
9. Boroko
10. Gorontalo
11. Suwawa
12. Limboto
13. Kwandang
14. Tahuna
15. Beo

- Batas Kabupaten
+++ Batas Propinsi
=== Batas Negara



DAFTAR SUMBER

- Adriaan, D.B., Renungan Kisah Kepulauan Sangihe Talaud, Tabukan, 1968.
- Bone, Sun, Sedjarah Gorontalo, Gorontalo, 1972.
- Brosur "Payu Limo Wuudyo Bubalata Ito Mopoopiyo Madala Ilangata, Gambaran Singkat Tentang Adat, Kebudayaan dan Perjuangan Rakyat Gorontalo serta Masalah Pembangunan Kotamadya Gorontalo", Gorontalo, 15 Juli 1979.
- Bujung BA, R.E.S., Peristiwa 14 Februari 1946 di Manado dalam rangka Revolusi kemerdekaan Bangsa Indonesia, Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulut, Manado, 1971.
- Bupati KDH Bolaang Mongondow, Esensi Laporan Bupati KDH Dati II Bolaang Mongondow kepada Bapak Gubernur KDH Dati I SULUT pada Perkunjungan Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow 1 Agustus 1978, Kotamobagu, 1978.
-, Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, Kotamobagu, 1978.
-, Selayang Pandang Tentang Perkembangan Tata Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow Propinsi Dati I Sulawesi Utara, Kotamobagu, 1977.
- Bupati KDH Gorontalo, Ikhtisar Pertumbuhan/Perkembangan Otonomi Dati II Gorontalo Dari Masa ke Masa, Limboto, tanpa tahun.
- DGW Sulutteng, "Ds. A.Z.R. Wenas (1897 - 1967) Pelajan Geredja di Minahasa" dalam Bulletin Dewan Geredja-Geredja Sulawesi Utara/Tengah, Tomohon, 1969.
- Dimiyati, Muhammad, Sedjarah Perdjuaan Indonesia, Widjaya, Djakarta, 1951.
- Elias, H.B., Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Pulau Siau, Markas Cabang LVRI Kotamadya Manado, Manado, 1973.
- Geredja Masehi Indjili Bolaang Mongondow, Pandangan Beberapa waktu Setjara Chronologies dari Sedjarah Geredja di Bolaang Mongondow, Kotamobagu, 1967.
- Kaeng SH, H.S., Selayang Pandang Sedjarah Regional Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia di Sulawesi Utara : Menjongsong Hari Ulang Tahun ke XXV Peristiwa Merah Putih Sulawesi Utara, Biro Penerangan Badan Perdjuaan 14 Februari 1946 Merah Putih, Djakarta, 1971.
- KANDEP P dan K, Monografi Daerah Kabupaten Sangir Talaud, Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sangir Talaud, Tahuna, 1979.
- Kementerian Penerangan NIT, Pandji Negara, madjalah mingguan, No. 15 Thn. III, Makassar, 22 Oktober 1949.
- Kementerian Penerangan RI, Propinsi Sulawesi, Makassar, 1953.
- KODAM XIII/Merdeka, Sejarah Perjuangan TNI-AD KODAM XIII Merdeka 1945-1977, Dinas Sejarah Militer KODAM XIII/Merdeka, Manado, 1978.
- Kruger, Th, Muller, Sedjarah Geredja di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Djakarta, 1959.

- Lalamentik, A.J., Sekelumit Sejarah "Peristiwa Merah Putih" 14 Pebruari 1946 di Minahasa, naskah ketikan, Manado, 1979.
- Legoh, H.M.L., 14 Pebruari 1946 Mengisi Lembaran Sejarah Indonesia, Manado, 1973.
- Lensa Utara, harian, Manado, 19 April 1978.
- Lintong Sm.Th., Pdt. D.M., Ds. A.Z.R. Wenas Ketua Sinode GMIM (1942-1967) Tesis Sarjana, Fakultas Theologia Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Tomohon, 1978.
- Liputo, M.H., Sedjarah Gorontalo Dua Lima Pohalaa, Djilid XIII, Pertjetakan Rakjat, Gorontalo, 1950.
- LPPU Cabang Manado, Sejarah Pers di Daerah Sulawesi Utara Percetakan Sejak tahun 1835, Surat Kabar dan Majalah Sejak Tahun 1869, Lembaga Pers dan Pendapat Umum, Manado, 1977.
- Manoppo, Cornelles, Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bolaang Mongondow, Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1979.
- Manus, Drs. L.Th., Drs. F.E.W. Parengkuan, Drs. A. Sigarlaki, J.A. Pangkey BA, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara, Dept. P dan K Pusat Penelitian Sejarah Budaya P3KD Sulawesi Utara 1978/1979, Manado, 1978.
-, Drs. F.E.W. Parengkuan, Drs. A. Sigarlaki, Drs. A.E. Rompas, Sejarah Perkembangan Kotamobagu Sebagai Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow, PPPT UNSRAT 1978/1979, Manado, 1979.
- Mawuntu, Grietje, Awal Masa Pendudukan Jepang di Bolaang Mongondow, Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1979.
- Marunduh, S.U., Pendaratan Jepang di Minahasa, Tesis Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Mimbar Indonesia, No. 22, 3 Djuni 1950.
- Moh. Ali, Arsjad, Perkembangan Desentralisasi dan otonomi di Daerah Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, Skripsi Sarjana Muda, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Manado, 1973.
- Moo, Drs. Ina, Sejarah 23 Januari 1942 di Gorontalo : Suatu Coup d'etat Yang Berhasil Menggulingkan Pemerintahan Belanda, Yayasan 23 Januari 1942, Jakarta, 1977.
- Palit, R.F.J. Tomohon Dalam Lintasan Sejarah Perang Pasifik, Tesis Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Panitia Seminar Adat Daerah Gorontalo, Himpunan Bahan-bahan Seminar Adat Istiadat Daerah Gorontalo, Limboto, 1971
- Parengkuan, Drs. F.E.W., Sejarah Daerah Bolaang Mongondow 1900 - 1942, naskah ketikan, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Polontalo, Drs. I., Sejarah Peristiwa 23 Januari 1942, Gorontalo, 1978.
- Ponto, B., Sejarah Pemerintahan Sangir Talaud, manuskrip, Tahuna, 1979.
- Posumah, J.P., Perang Kemerdekaan di Minahasa dan Manado Sekitar Tahun 1950, Tesis Sarjana, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- Rhijn, M.van, Memorie van Overgave het Bestuur van den Aftredenden Resident van Manado, Manado, 1941.
- Rumagit, Meike E.P., Masuknya Agama Kristen di Bolaang Mongondow, Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Univ. Sam Ratulangi, Manado, 1979.

- Sastrawiria, Tatang dan Haksan Wirasutisna, *Ensiklopedi Politik*, Perpustakaan Perguruan Kem. PP dan K, Djakarta, 1954.
- Sekretariat DPR-GR, *Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, tjet. pertama, Djakarta 1970.
- Sigarlaki, Drs. A., Drs. L.Th. Manus, Drs. A.E. Rompas, F.S. Watuseke, M.F. Mottok Sm.H., *Sejarah Daerah Sulawesi Utara*, P3KD Sulawesi Utara 1977/1978, Manado, 1977.
- Sihombing, Drs. O.D.P., *Pemuda Indonesia Menantang Fasisme Djepang*, Sinar Djaya, Djakarta, 1962.
- Soebekti, *Sketsa Revolusi Indonesia 1940 - 1945*, GRIP, Surabaya, 1966.
- Sompie, K.H.E., "Riwayat Singkat Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Selama Pendudukan A.L. Jepang di Sulawesi Utara 1942-1945" dalam penerbitan Khusus No. 2. KANWIL DEPPEN RI Propinsi Sulawesi Utara, Manado, April 1978.
-, *Sekelumit Riwayat Perjuangan Kemerdekaan Indonesia 1942-1945 di Karesidenan Manado*, naskah stensilan, Manado, 1979.
- Tatimu, Ef., *Kepulauan Sangihe Talaud*, KANDEP P dan K Kabupaten sangir Talaud, Tahuna, 1975.
- Taulu, Ch.Ch., "Peringatan Perajaan Peristiwa Perebutan Kekuasaan di Sulawesi Utara 1946" dalam Buku Peringatan Ulang Tahun ke-10 1956 di Djakarta, hal. 8 - 17, ketikan reproduksi oleh H.M. Taulu, Manado, 1956.
- Taulu, H.M., *Sedjarah Minahasa*, Penerbit Jajasan Membangun, Tomohon, 1950.
-, dan A.U. Sepang, *Sedjarah Bolaang Mongondow*, Penerbit dan Toko Buku Rame, Manado, 1961.
- Tumenggung Sis, Drs. M., Drs. A.J. Ulaen, Drs. R. Tandi, Dra. Ny. E. Inkiriwang-Kalangie, N. Rondonuwu, *Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara*, P3KD Sulawesi Utara 1977/1978, Manado, 1977.
- Usman, A.J., *Keradjaan Suwawa-Gorontalo-Limboto Dalam Pertjaturan Politik Pendjadjahan (le Histoire se Repete)*, Djakarta, 1972.
- Wartabone, Nani, *Sedjarah Singkat Perebutan Kekuasaan Terhadap Pemerintah Kolonial Belanda 23 Djanuari 1942*, Gorontalo, 1968.
-, *Sejarah Singkat Latar Belakangnya Perebutan Kekuasaan oleh Rakyat Gorontalo pada 23 Januari 1942*, Gorontalo, 1973.
- Wowor, Ben, *Peristiwa Patriotik (Merah Putih) 14 Pebruari 1946 di Manado Dalam Rangka Revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia*, Djawatan Penerangan RI Propinsi Sulawesi Utara, Manado, 1972.
-, *Sulawesi Utara Bergolak : Peristiwa Patriotik 14 Pebruari 1946*, ALDA, Jakarta, 1977.
- Watuseke, F.S., *Sedjarah Minahasa*, Pertjetakan Negara, Manado, 1968.
- Yayasan 23 Januari 1942 Jakarta, *Brosur Peringatan 35 Tahun Peristiwa Patriotisme 23 Januari 1942 di Gorontalo dan Dua Tahun Yayasan 23 Januari 1942*, Jakarta, 1977.
- Yuda, H.E., *Sejarah Keperintahan Sangir Talaud*, manuskrip, Tahuna, 1978.

DAFTAR INFORMAN

- Amiman, Jafet, Tahuna, 14-9-1979
- Binilang, Th., Lirung, 20-9-1979
- Bone, Sun, Siendeng, 10-9-1979
- Datunsolang, Abdul Murad, Mogolaing, 15-9-1979
- Datunsolang, R.M., Kotamobagu, 12-9-1979
- Djibrán, Muh., Gorontalo, 3-9-1979
- Gobel, Dupanggola, Telaga, 4-9-1979
- Gobol, Arie H., Kotobangon, 12-9-1979
- Gonibala, Nurtina, Kotamobagu, 17-9-1979
- Hamel, F., Manganitu, 13-9-1979
- Haras BA, Anwar, Siendeng, 7-9-1979
- Imban, Hadjir, Kotamobagu, 17 dan 18-9-1979
- Jusuf, Husin K., Tapa, 10-9-1979
- Kartawinata, M.D., Winangun, 20-9-1979
- Korompot, Lau Donggala, Mogolaing, 14-9-1979
- Labaika, H.H. Waworuntu, Kotamobagu, 17-9-1979
- Lewu, A.E., Kotamobagu, 19-9-1979
- Lumeling, A.J., Mangaran, 20-9-1979
- Madonsa, Dominicus, Tahuna, 15 dan 18-9-1979
- Makahanap, H.C.H., Tahuna, 18-9-1979
- Manatar, Daniel, Tahuna, 16-9-1979
- Manoppo, Piet, Kotamobagu, 15-9-1979
- Mokoginta, R., Kotamobagu, 18-9-1979
- Monoarfa, A., Gorontalo, 11-9-1979
- Nadjamuddin, Hintulangi, Tingkohubu, 5-9-1979
- Ointu, A.R., Gorontalo, 9-9-1979
- Raroen MSC, Ps. Silvester, Tahuna, 17-9-1979
- Rompas, Ambrosius, Tahuna, 15, 16 dan 17-9-1979
- Rotty, Alex E., Manado, 14-9-1979
- Sarapil, G.M.T., Tahuna, 15 dan 18-9-1979
- Sugeha, Suit A., Kotobangon, 13-9-1979
- Tangahu, A., Kampung Bugis Gorontalo, 9-9-1979
- Tingginehe, Tahuna, 18-9-1979
- Tompo, Ahmad, Tahuna, 14 dan 18-9-1979
- Tunggal, H., Kotamobagu, 17-9-1979
- Wantogia, Daiton H., Tingkohubu, 6-9-1979
- Wantogia, Jusuf H., Suwawa, 8-9-1979
- Wartabone, Nani, Suwawa, 2-9-1979
- Yuda, H.E., Tahuna, 15, 16 dan 17-9-1979

Perpustakaan
Jenderal